RPJMD

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2026



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021 – 2026

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2021

BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

29. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 248), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 16);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Garongkong Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus enerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Barru untuk periode 2021-2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dayat tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
d. Pengendalian dan Evaluasi; dan
e. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*)

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan :

a. *holistic-tematik*;
b. *integrative*; dan
c. *spasial*.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) Dokumen RPJMD terdiri atas :
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
   d. BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
   e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
   f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
   g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program PD;
   h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   i. BAB IX Penutup.

(2) Ketentuan mengenai Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

(1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

(4) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi oleh Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(5) Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda

(6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

BAB VII
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Un dangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebiijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 20 Agustus 2021

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 264 ayat (4), bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendekatan teknokratik" adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendekatan partisipatif" adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan politis" adalah dilaksanakannya dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendekatan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*)" adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendekatan *holistik-tematik*" adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendekatan *integratif*" adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan *spasial*" adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021 – 2026

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2021

© Hak Cipta Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2021
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen Perencanaan ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, pendidikan, penelitian, Penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh dokumen perencanaan ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GRAFIK

BAB I. PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-11
1.4 Maksud dan Tujuan I-14
1.5 Sistematika Penulisan I-15

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kab.Barru ... II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-11
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-23
2.1.4 Kondisi Demografi II-33
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-35
2.2.1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... II-35
2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial II-52
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-63
2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar II-63
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-103
2.3.3 Layanan Urusan Pilihan II-138
2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan II-143
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-155
2.4.1 Indeks Layanan Infrastruktur. II-155
2.4.2 Produktivitas Total Daerah II-156
2.5 Evaluasi Capaian Target Indikator SPM II-157
2.6 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II-159
2.7 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020 ..... II-163
2.8 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah II-177
2.9 Kerjasama Daerah II-178

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-3

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-4

3.1.2 Neraca Daerah III-25

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-31

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-32

3.2.2 Analisis Pembiayaan III-33

3.3 Kerangka Pendanaan III-35

3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial, Fiskal III-35

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... III-37

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-39

3.3.4 Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 ..... III-40

3.3.5 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah III-40

3.3.6 Proyeksi Kebutuhan Investasi di Kab.Barru III-43

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.2 Identidikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah IV-13

4.3 Isu Strategis IV-25

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1

5.1 Visi V-1

5.2 Misi V-2

5.3 Tujuan dan Sasaran V-5

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1

6.1 Strategi VI-1

6.2 Arah Kebijakan VI-3

6.3 Program Pembangunan Daerah VI-7

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai KebutuhanPendanaan Kabupaten Barru VII-3

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah VIII-1

8.2 Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) VIII-16

8.3 Indikator TPB/SDGs VIII-19

BAB IX. PENUTUP IX-1

9.1 Pedoman Transisi IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Visi Misi RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024, RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dengan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026	II-1
Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Barru Tahun 2020	II-2
Tabel 2.2	Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan Laut Kabupaten Barru Tahun 2021	II-3
Tabel 2.3	Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Kabupaten Barru Tahun 2021	II-4
Tabel 2.4	Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2021	II-6
Tabel 2.5	Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2021	II-7
Tabel 2.6	Sungai Mengalir Menurut Lokasi Kabupaten Barru Tahun 2021	II-8
Tabel 2.7	Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Kabupaten barru Tahun 2021	II-8
Tabel 2.8	Status Daya Dukung Air Di Kabupaten Barru	II-10
Tabel 2.9	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020	II-10
Tabel 2.10	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru Tahun 2020	II-10
Tabel 2.11	Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru tahun 2021	II-11
Tabel 2.12	Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2020	II-12
Tabel 2.13	Tingkat Bencana Dikabupaten Barru Tahun 2020	II-25
Tabel 2.14	Total Kecenderungan Kejadiaan Bencana Di Kabupaten barru	II-26
Tabel 2.15	Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kabupaten Barru	II-27
Tabel 2.16	Distribusi Luas kinerja Jasa lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana banjir Di Kabupaten Barru Tahun 2021	II-29
Tabel 2.17	Distribusi Luas kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahaan Dan Perlindungan Bencana Longsor Di Kabupaten Barru Tahun 2021	II-30

Tabel 2.18 Distribusi Luas Kinerja Lingkungan Pengaturan Pencegahan Dan PerbandianganBencana kebakaran Di Kabupaten Barru Tahun 2021 ..... II-31
Tabel 2.19 Jumlah penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan II-32
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2020 ..... II-33
Tabel 2.21 Rasio Jenis kelamin Penduduk Kabupaten Barru tahun 2016 s.d 2020 ..... II-34
Tabel 2.22 Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kabupaten barru Tahun 2016-2020 ..... II-34
Tabel 2.23 Jumlah penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru Tahun 2016 s.d 2020 ..... II-35
Tabel 2.24 Rasio Ketergantungan Kabupaten barru Tahun 2016-2020 II-35
Tabel 2.25 Produk domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Kostum (ADHK) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah) 2016-2020 ..... II-36
Tabel 2.26 Produk Kosmetik Milik Regional Menurut lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ABHS) Kabupaten barru (Miliar Rupiah) 2016-2020 ..... II-37
Tabel 2.27 Distri busi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Di Kabupaten Barru (Persen) 2016-2020 ..... II-38
Tabel 2.28 Laju Pertumbuhan PDRB Atas harga Kostan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-39
Tabel 2.29 Perbandingan DPRB Atas Harga Kostan (ADHK) Dan Harga Berlaku(ADHB) Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2018-202 (Miliar Rupiah) II-39
Tabel 2.30 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-42
Tabel 2.31 Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2020 ..... II-45
Tabel 2.32 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016-2020..... II-46
Tabel 2.33 Indeks Ketimpangan Waliamson Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-48
Tabel 2.34 Tingkat Kemiskinan di Kab Barru Tahun 2016 - 2020 ..... II-49
Tabel 2.35 Perbandingan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman (P1) Dan Indeks Keparahan (P2) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar Tahun 2018-2020..... II-50

Tabel 2.36 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Di Kabupaten Barru Tahun 2018-2020 ..... II-52
Tabel 2.37 Angka IPM Dan Indikator Penduduknya Di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-54
Tabel 2.38 Indeks Kesehatan Barru Tahun 2016-2020..... II-54
Tabel 2.39 Pebandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016-2020 ..... II-55
Tabel 2.40 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016-2020 ..... II-56
Tabel 2.41 Pebandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016-2020 ..... II-57
Tabel 2.42 Perbandingan Paritas Daya Bali Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016-2020..... II-57
Tabel 2.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DanTingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Barru Tahun 2016-2020 II-58
Tabel 2.44 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru Dengan Wilayah Setara Tahun 2015-2020 II-59
Tabel 2.45 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Dengan Wilayah Setara Tahun 2016 - 2020 ..... II-59
Tabel 2.46 Indeks Pembangugnan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Barru Tahun 2016 - 2020 ..... II-61
Tabel 2.47 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Barru Tahun 2020 ..... II-62
Tabel 2.48 Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Barru Tahun 2019-2020. II-63
Tabel 2.49 Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-63
Tabel 2.50 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Dan SMP/MTS/Paket B Dikabupaten Barru Tahun 2016-2020 . II-64
Tabel 2.51 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Dan SMP/MTS/Paket B Dikabupaten Barru Tahun 2016-2020 . II-64
Tabel 2.52 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Dan SMP/MTS/Paket B Dikabupaten Barru Tahun 2016-2020 .. II-65
Tabel 2.53 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTS Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-66
Tabel 2.54 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Dan SMP/MTS Di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-66
Tabel 2.55 Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Dan SMP/MTS Di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-67
Tabel 2.56 Sekolah Pendidikan SD/MI Dan SMP/MTS Kondisi Bngunan Baik Di Kabupaten barru Tahun 2016-2020 ..... II-67

Tabel 2.57 Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD Dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II- 68
Tabel 2.58 Rasio Guru Dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-68
Tabel 2.59 Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Hurup (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-69
Tabel 2.60 Guru Yang Memenuhi Kualitas S1/D IV Dikabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-69
Tabel 2.61 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-70
Tabel 2.62 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-70
Tabel 2.63 Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru 2016-2020..... II-71
Tabel 2.64 Angka kematiaan Neo Natal Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel 2.65 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel 2.66 Rasio Posyandu Persatuaan Balita Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel 2.67 Rasio Puskesmas, Poliklinik Puskesmas Pembantu Per 1000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel 2.68 Rasio Rumah Sakit /1000 Jumlah Penduduk Kab. Barru Tahun 2016/2020..... II-74
Tabel 2.69 Rasio Dokter Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.70 Rasio Tenaga Medis Per 1000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.71 Cakupan Komplikasi Kehidupan Yang Di Tangani Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-76
Tabel 2.72 Cakupan Pertolongan Persediaan Oleh tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru II-76
Tabel 2.73 Cakupan Desa/kelurahan UCI Kab.Barru Tahun 2016-2020..... II-77
Tabel. 2.74 Persentase Balita Gizi Buruk Kab. Barru Tahun 2016-2020 II-77
Tabel. 2.75 Prevelensi Stunting Kab. Barru Tahun 2016-2020..... II-78
Tabel. 2.76 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kab. Barru Tahun 2016-2020 ..... II-79
Tabel 2.77 Pesentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak kabupaten Barru Tahum 2016-2020 ..... II-79

Tabel 2.78 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk kabupaten Barru..... II-80
Tabel 2.79 Cakupan Balita Pneumania Yang Ditangani Kab. Barru Tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel 2.80 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.81 Tingkat Revalensi (Per 100.000 Penduduk) Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.82 Tingkat Kematian karena Tuber Kolubis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten barru Tahun 2016-2020 ..... II-82
Tabel 2.83 Proporsi jumlah Kasus Tuberkolosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-82
Tabel 2.84 Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Di Obati Dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2016-2020. II-83
Tabel 2.85 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita penyakit DBD Tahun 2026-2020 ..... II-84
Tabel 2.86 Penderita Diere Yang Ditangani Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2.87 Angka Kejadian Malaria Kab. Barru Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2. 88 Tingkat Kematian Akibat Malari Kab.Barru Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2.89 Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-86
Tabel 2.90 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Kab Barru Tahun 2016-2020 ..... II-86
Tabel 2.91 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten barru Tahun 2016-2020 ..... II-86
Tabel 2.92 Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Barru Tahun 2016-2020..... II-87
Tabel 2.93 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Kab. Barru Tahun 2016-2020..... II-88
Tabel 2.94 Cakupan pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-88
Tabel 2.95 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2016-2020 ..... II- 89
Tabel 2.96 Cakupan pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-90
Tabel 2.97 Cakupan Pemberian MP Asi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-90
Tabel 2.98 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Tahun 2016-2020 ..... II-91

Tabel.2.99 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kab. Barru II-91
Tabel 2.100 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Serta Kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun2016-2020 ..... II-92
Tabel 2.101 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-92
Tabel 2.102 Kondisi Panjang jaringan Jalan Di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-93
Tabel 2.103 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Di Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-93
Tabel 2.104 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Barru Tahun 2016-2020 ..... II-94
Tabel 2.105 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kab. Barru Tahun 2016-2020... II-95
Tabel 2.106 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun2016-2020 ..... II-95
Tabel 2.107 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 . II-96
Tabel 2.108 Persentase Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses air Minum Kabupaten Barru II-96
Tabel 2.109 Area Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2016-2020. II-97
Tabel 2.110 Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Ber HP/HGB Dan Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-98
Tabel 2.111 Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020 ..... II-98
Tabel 2.112 Rasio Bermukiman Layak Huni Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-99
Tabel 2.113 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Limnas) Kab. Barru Tahun 2016 - 2020 ..... II-99
Tabel 2.114 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kab.Barru Tahun 2016-2020..... II-99
Tabel 2.115 Angka Kriminalitas Kab.Barru Tahun 2016-2020..... II-100
Tabel 2.116 Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-100
Tabel 2.117 Tingkat Waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-101

Tabel 2.118 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-102
Tabel 2.119 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kab. Barru Tahun 2016-2020 ..... II-102
Tabel 2.120 Persentase PMKS Yang Tertangani kabupaten barru Tahun 2016-2020 ..... II-103
Tabel 2.121 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Pertahun Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-104
Tabel 2.122 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-104
Tabel 2.123 Keselamatan dan Perlindungan Kabupaten Barru Tahun2016-2020 ..... II-104
Tabel 2.124 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-105
Tabel 2.125 Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-105
Tabel 2.126 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020... II-106
Tabel 2.127 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kab Barru..... II-106
Tabel 2.128 Rasio Kelulusan S1/S2/S3 Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-106
Tabel 2.129 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru II-107
Tabel 2.130 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Kab. Barru Tahun 2016-2020 ..... II-107
Tabel 2.131 Partisipasi Perempuan Dilembaga Swasta Kab. Barru Tahun 2016-2020 ..... II-108
Tabel 2.132 Rasio KDRT Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-108
Tabel 2.133 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-108
Tabel 2.134 Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-109
Tabel 2.135 Tersusunnya PPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-109
Tabel 2.136 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-110

Tabel 2.137 Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan LH Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-112
Tabel 2.138 Peningkatan Kapasitas Dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-112
Tabel 2.139 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kab. Barru Tahun 2016-202 ..... II-113
Tabel 2.140 Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuaan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-113
Tabel 2.141 Rasio Bayi Dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel 2.142 Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2020..... II-114
Tabel 2.143 Ketersediaan Database Kependidikan Skala Provinsi Dan Penerapan KTP Nasional Berbasis Nik Kabupaten barru Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel 2.144 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-115
Tabel 2.145 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-115
Tabel 2.146 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten barru Tahun 2016-2020 ..... II-116
Tabel 2.147 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kab.Barru Tahun 2016-2020 ..... II-116
Tabel 2.148 Persentase LPM Berprestasi Kab.Barru Tahun 2016-2020 ... II-116
Tabel 2.149 Persentase PKK Aktif kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ... II-117
Tabel 2.150 Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-117
Tabel 2.151 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2016-2020P..... II-117
Tabel 2.152 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020 ..... II-118
Tabel 2.153 Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-118
Tabel 2.154 Rasio Akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-118
Tabel 2.155 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia15-49 Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-119

Tabel 2.156 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawa 20 Tahun Kabupaten Barru tahun 2016-2020 ..... II-119
Tabel 2.157 Cakupan PUS Yang Di Inginkan Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need)* Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-119
Tabel 2.158 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-120
Tabel 2.159 Persentase Tingkat Keberlansungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2016..... II-120
Tabel 2.160 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BPB) Ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-120
Tabel 2.161 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-121
Tabel 2.162 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-121
Tabel 2.163 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap KecamatanKabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-121
Tabel 2.164 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-122
Tabel 2.165 Cakupan PKB/PLKB Yang Didaya Gunakan Perangkap Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-122
Tabel 2.166 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaSejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun2016-2020 ..... II-122
Tabel 2.167 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-123
Tabel 2.168 Cakupan Ketersedian Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Kabupaten barru Tahun 2016-2020..... II-123
Tabel 2.169 Presentase Paskes Dan Jejaringannya (seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-124
Tabel 2.170 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-124
Tabel 2.171 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun2016-2020 ..... II-124
Tabel 2.172 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-125
Tabel 2.173 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-125
Tabel 2.174 Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-126

Tabel 2.175 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-126
Tabel 2.176 Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-126
Tabel 2.177 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2016-2020 ..... II-127
Tabel 2.178 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Pertahun II-127
Tabel 2.179 Persentase Koperasi Aktif Kab.Barru Tahun 2016-2020..... II-128
Tabel 2.180 Persentase UKM Non BPE/LKM Aktif Kabupaten Barru 2016-2020 ..... II-128
Tabel 2.181 Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Thun 2016-2020 ..... II-129
Tabel 2.182 Persentase Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-129
Tabel 2.183 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDE/PMA) Tahun 2016-2020 ..... II-130
Tabel 2.184 Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-130
Tabel 2.185 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-131
Tabel 2.186 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-131
Tabel 2.187 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-132
Tabel 2.188 Cakupan pembinaan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-132
Tabel 2.189 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.190 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.191 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.192 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.193 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Di Kabupaten barru Tahun 2016-2020 ..... II-134
Tabel 2.194 Penyelenggaraan Pestifal Seni Dalam Budaya Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-135

Tabel 2.195 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Di Lestarikan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-135
Tabel 2.196 Jumlah karia Budaya Yang Direpitalisaisi Dan Inpentarisasi Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-135
Tabel 2.197 Jumlah Cagar Budaya Yang Di Kelola Secara Terpadu Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-136
Tabel 2.198 Jumlah Pengungjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-136
Tabel 2.199 Koleksi Buku Dan Judul Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah KabupatenBarru Tahun 2016-2020 .. II-136
Tabel 2.200 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk KabupatenBarru Tahun 2016-2020 ..... II-137
Tabel 2.201 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-137
Tabel 2.202 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-137
Tabel 2.203 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-137
Tabel 2.204 Kunjungan Wisata KabupatenBarru Tahun 2016-2020 ..... II-138
Tabel 2.205 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 II-138
Tabel 2.206 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Pe hektar Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-139
Tabel 2.207 Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-139
Tabel 2.208 Ekspor Bersih Perdaganagan Kabupaten Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-140
Tabel 2.209 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2016-2020 ..... II-140
Tabel 2.210 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-140
Tabel 2.211 Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-141
Tabel 2.212 Komsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-142
Tabel 2.213 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-142
Tabel 2.214 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-142
Tabel 2.215 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalaam RKPD KabupatenBarru Tahun 2016-2020 ..... II-144
Tabel 2.216 Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-145

Tabel 2.217 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-146
Tabel 2.218 Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-146
Tabel 2.219 Persaentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-146
Tabel 2.220 Pesentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-147
Tabel 2.221 Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-147
Tabel 2.222 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-147
Tabel 2.223 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-148
Tabel 2.224 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-148
Tabel 2.225 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Istansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-148
Tabel 2.226 Persentase Inflementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-149
Tabel 2.227 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-149
Tabel 2.228 Persentase Perangkat Daerah Di Pasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020..... II-150
Tabel 2.229 Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-150
Tabel 2.230 Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018-2021 . II-150
Tabel 2.231 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru 2016-2020..... II-154
Tabel 2.232 Persentase Pelanggaran Pegawai Kab.Barru 2016-2020..... II-154
Tabel 2.233 Jumlah temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2016-2020... II-154
Tabel 2.234 Tersedianya Bencana Kerja, Terintegrasi Program-Program DPRD KedalamDokumenPerencanaan Dan Dokumen Anggaran Satuan Setwan DPRD KabupatenBarru Tahun 2016-2020..... II-155
Tabel 2.235 Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2016 – 2020 ..... II-156
Tabel 2.236 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik..... II-156
Tabel 2.237 Produktivitas Total Daerah Tahun 2016 – 2020..... II-156
Tabel 2.238 Capaian SPM Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-157
Tabel 2.239 Rekapitulasi Cappaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2016 s/d 2021 Berdasarkan Tujuan II-160

Tabel 2.239 Hasil analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... II-164
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Barru III-24
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-26
Tabel 3.3 Rasio Lancar Kabupaten Barru 2018-2020 ..... III-29
Tabel 3.4 Rasio Quick Kabupaten Barru Tahun 2018-2020 ..... III-30
Tabel 3.5 Rasio Cash Kabupaten Barru Tahun 2018-2020 ..... III-30
Tabel 3.6 Rasio Total Kewajiban Dengan Ekuitas Kabupaten Barru Tahun 2018-2020 ..... III-31
Tabel 3.7 Rasio Total Kewajiban Dengan Aset Kabupaten Barru Tahun 2018-2020 ..... III-31
Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barru Tahun 2018s/s 2020 ..... III-33
Tabel 3.9 Defisit Ril Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2018 s/d 2020 ..... III-34
Tabel 3.10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2018 s/d 2020 ..... III-34
Tabel 3.11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Barru Tahun 2018 s/d 2020 ..... III-34
Tabel 3.12 Asumsi Indikator Makro Ekonomi Dan Sosial Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 ..... III-36
Tabel 3.13 Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Kanbupaten Barru Tahun 2021-2026 ..... III-37
Tabel 3.14 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja daerah Tahun 2021-2026 ..... III-37
Tabel 3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Menandai Pembangunan Daerah Kabupaten Barru III-39
Tabel 3.16 Rencana Penggunaan kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru III-40
Tabel 3.17 Rencana Kebutuhan Investasi Pada Perseroda Kabupaten Barru..... III-44
Tabel 4.1 Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Desa Di Kabupaten Barru..... IV-29
Tabel 4.2 Target Pembangunan Kawasan Pembangunan Parepare Sekitarnya Tahun 2018-2023 ..... IV-36
Tabel 4.3 Data Perkawinan Anak Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 IV-41
Tabel 5.1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026..... V-2

Tabel 5.2	Keterkaitan pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026	V-3
Tabel 5.3	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026	V-3
Tabel 5.4	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dengan RPJMN Nasional Tahun 2020-2024	V-4
Tabel 5.5	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dengan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	V-5
Tabel 5.6	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Barru	V-8
Tabel 5.7	Metodologi Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2021 - 2026	V-10
Tabel 5.8	Hubungan Sasaran Pokok RPJPD Kab.Barru 2005 – 2025 terhadap RPJMD 2021 - 2026	V-13
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan STrategi Kabupaten Barru	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021- 2026 Kabupaten Barru	VI-4
Tabel 6.3	10 Program Unggulan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026	VI-7
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Tahun 2022-2026	VI-10
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022-2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2022-2026	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2022-2026	VIII-2
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2022-2026	VIII-3
Tabel 8.4	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2022-2026	VIII-17
Tabel 8.5	Penetapan Indikator TPB/SDGs Kabupaten Barru Tahun 2022-2026	VIII-19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RPJMD Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017	I-3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-12
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2021	II-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2021	II-3
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2021 .	II-4
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Barru 2021	II-5
Gambar 2.5	Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru Tahun 2021	II-6
Gambar 2.6	Peta Status Daya Dukung Penyedian Air Di Kabupaten Barru.....	II-9
Gambar 2.7	Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barru	II-17
Gambar 2.8	Dokumentasi Kejadian Bencana Alam Di Kabupaten Barru	II-28
Gambar 2.9	Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2021.....	II-29
Gambar 2.10	Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2021.....	II-30
Gambar 2.11	Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan pencegahan Dan perlindungan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2021	II-32
Gambar 3.1	Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke Depan	II-43
Gambar 4.1	Komposisi Capaian TPB Kabupaten Barru	IV-26
Gambar 4.2	Rincian Capaian TPB Kabupaten Barru menurut Tujuan.	IV-27
Gambar 4.2	Prsentase Distribusi Luas Kinerja Fungsi Jasa Ekonomi Penganturan Ilim Kabupaten Barru	IV-29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020.....	II-40
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 – 2020	II-42
Grafik 2.3	PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Barru Tahun 2016 s.d Tahun 2020	II-43
Grafik 2.4	Perbandingan PDRB Perkapira Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2016 s.d Tahun 2020 (dlm Juta Rupiah)	II-44
Grafik 2.5	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2016 – 2020	II-45
Grafik 2.6	Indeks Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020	II-46
Grafik 2.7	Hubungan Indeks Gini Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020	II-47
Grafik 2.8	Indeks Kedalaman Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Di Kabupaten Barru 2016-2020	II-49
Grafik 2.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barru Dengan capaian Privinsi SulSel Dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020	II-50
Grafik 2.10	Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020	II-51
Grafik 2.11	Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2020	II-52
Grafik 2.12	Perbandingan IPM Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016-2020	II-53
Grafik 2.13	Perbandingan Angka harapan Hidup Kabupaten Barru Dengan Capaian Provinsi SulSel Dan Nasional Tahun 2016-2020	II-55
Grafik 2.14	Perbandingan Angka Harapan Lama sekolah Kabupaten Barru Dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020	II-56
Grafik 2.15	Perbandingan Rata Rata Lama sekolah Kabupaten Barru Dengan Capaian Provinsi Sulsel Dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020	II-56
Grafik 2.16	Perbandingan Paritas Daya Beli Kabupaten Barru Dengan Capaian Provinsi Sulsel Dan Capaian Nasional Tahun 2016-2020 (dlm Juta Rupiah)	II-57

Grafik 2.17 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten barru Dengan Capaian Provinsi Sulsel Dan capaian Nasional tahun 2016-2020 ..... II-58
Grafik 2.18 Perbandingan tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Dangan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional II-59
Grafik 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020 ..... II-60
Grafik 3.1 Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-6
Grafik 3.2 Postur Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-6
Grafik 3.3 Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-7
Grafik 3.4 Postur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-8
Grafik 3.5 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-9
Grafik 3.6 Postur Pajak Daerah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-9
Grafik 3.7 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-11
Grafik 3.8 Postur Retribusi Jasa umum Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-11
Grafik 3.9 Postur Retribusi Jasa usaha Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-12
Grafik 3.10 Postur Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-13
Grafik 3.11 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-13
Grafik 3.12 Postur Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-14
Grafik 3.13 Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-16
Grafik 3.14 REalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-16
Grafik 3.15 Realisasi Penerimaan Dana ALokasi Umum Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-17
Grafik 3.16 Realisasi Penerimaan Dana ALokasi Khusus Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-17

Grafik 3.17 Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-18
Grafik 3.18 Realisasi Penerimaan Dana Desa Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-18
Grafik 3.19 Kinerja Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-19
Grafik 3.20 Distribusi Postur Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kab. Barru Tahun2016-2020 ..... III-20
Grafik 3.21 Kinerja Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-22
Grafik 3.22 Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-22
Grafik 3.23 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020 ..... III-23



BAB I
PENDAHULUAN

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan atau perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah tergambarkan dalam satu dokumen daerah yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 Ayat (3) disebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN.

Periode pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2021 - 2026 dimulai sejak dilantiknya Bupati Barru **Ir.H.SUARDI SALEH, M.Si** dan Wakil Bupati Barru **ASKA MAPPE** pada tanggal 26 Februari 2021. Sebagaimana amanat Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Barru berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 juga merupakan Periode IV (keempat) atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru tahun 2005 – 2025 sehingga menjadi sangat penting. Dimana RPJMD Tahun 2021 – 2026 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025. Adapun

visi RPJPD 2005-2025 adalah **"Barru Sebagai Daerah Maju Berlandaskan Kebersamaan dan Bernafaskan Keagamaan"**.

Dari segi proses, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Teknokratis, merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
b. Pendekatan Partisipatif, merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan.
c. Pendekatan politis, adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik dimana visi, misi dan program pembangunan daerah yang ditawarkan pada saat kampanye oleh masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih kemudian disusun ke dalam Rancangan RPJMD.
d. Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, merupakan proses perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Untuk memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dibuat berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan yang tercantum di bagian keempat tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD pada Permendagri 86 Tahun 2017, adapun tahapan kegiatan tersebut yakni :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD (Pasal 41 – 46 Permendagri 86 Tahun 2017)

   Tahap ini meliputi Penyusunan SK Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun, orientasi RPJMD, penyusunan agenda kerja, penyiapan data dan informasi berdasarkan SIPD dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD (Pasal 47 – 60 Permendagri 86 Tahun 2017)

   Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD menjadi rancangan awal RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021 – 2026 dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan;

3. Penyusunan Rancangan RPJMD (Pasal 61 – 63 Permendagri 86 Tahun 2017)

   Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RPJMD;

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD (Pasal 64 – 65 Permendagri 86 Tahun 2017)

   Tahap ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam pembangunan Kabupaten Barru mulai dari eksekutif, legislatif, organisasi profesi, perguruan tinggi, ormas, unsur pers dan lain-lain;

5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD (Pasal 66 – 69 Permendagri 86 Tahun 2017)

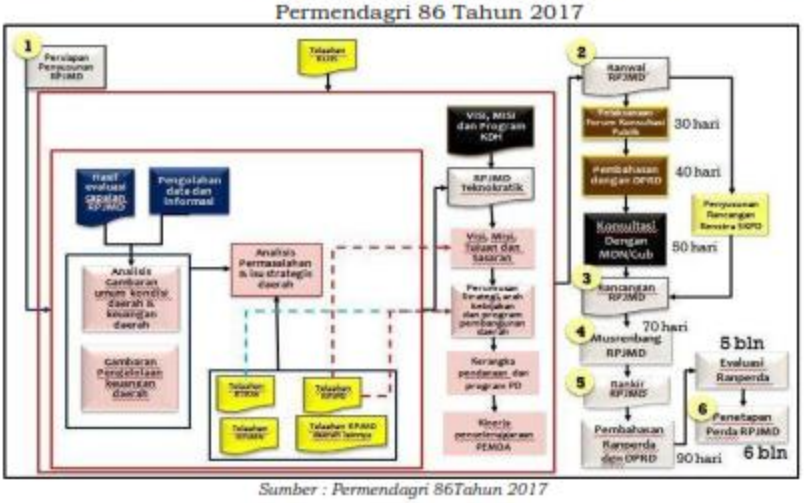
   Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

6. Penetapan RPJMD (Pasal 70 – 72 Permendagri 86 Tahun 2017)

   Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah.

Secara lebih jelas alur penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dijelaskan pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017



Sumber : Permendagri 86Tahun 2017

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021 – 2026 juga memperhatikan evaluasi kinerja periode sebelumnya. Capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya menunjukkan capaian kinerja yang baik. Untuk petumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2019 sebesar 7,41, namun mengalami pelambatan pada tahun 2020 sebesar 0,87, ini diakibatkan karena pandemi COVID 19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi seluruh Indonesia dan terkhusus Kabupaten Barru. Selanjutnya capaian kinerja tingkat kemiskinan Kabupaten Barru. Pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang positif, dimana capaiannya sebesar 8,26 persen. Selanjutnya capaian indikator ekonomi makro pada tahun 2020 sebesar 6,39%.

Untuk capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistanable Development Goals* (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian SDGs tahun 2020, sebanyak 220 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Barru, dengan uraian capaian sebagai berikut : (i) untuk kategori yang telah melaksanakan indikator TPB dan telah mencapai target sebanyak 66 indikator atau 30,00%; (i) untuk kategori yang telah melaksanakan indikator TPB tapi belum mencapai target sebesar 57 indikator atau sebesar 25,91%; (iii) untuk kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 5 indikator atau 2,27%; (iv) untuk indikator yang tidak ada data sebesar 92 atau 41,82%.

RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 yang merupakan tahap ke empat dari RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 juga telah berpedoman pada RPJM Nasional 2020 – 2024 dan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru 2021 - 2026 didasarkan pada sejumlah landasan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 248), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 16);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Garongkong Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

47. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 13);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

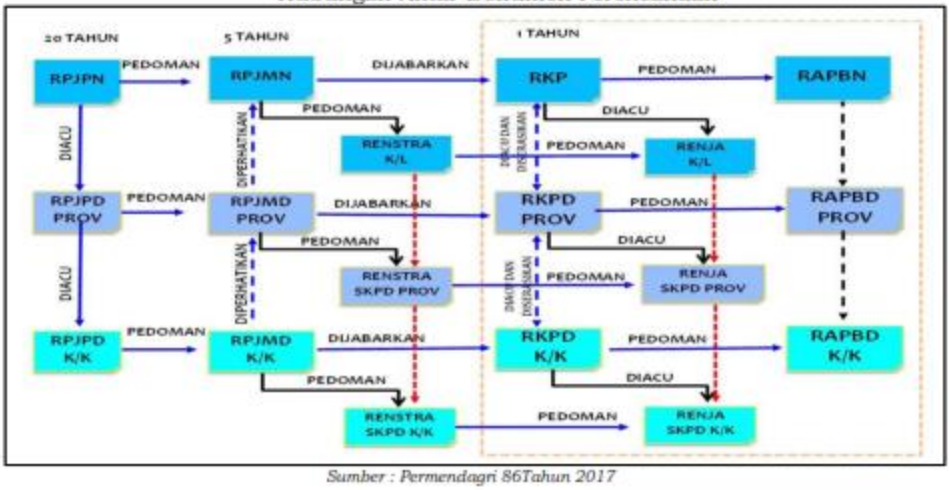
Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari segi waktu dokumen perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-PD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Permendagri 86Tahun 2017

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2010-2030. Selanjutnya agar RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Tabel I.1

Hubungan Visi Misi RPJM Nasional Tahun 2020-2024,RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

Visi Misi. RPJMN 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	**Visi RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter**	**Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan**
Misi	**Misi**	**Misi**
1. Peningkatan Kualitas Manusia	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif (PN.5;6;7)	1. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya (PN.1)(PP.4)

Misi	Misi	Misi
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	2. Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel (PN.3)	2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal (PN.7)
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan	3. Mewujudkan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif (PN.2)	3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (PN.3)(PP.2)
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter (PN.1)	4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (PN.2)(PP.3)
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan (PN.4)	5. Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan (PN.3)
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya		6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi (PN.6)(PP.1)
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga		7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama (PN.5;6;7)(PP.1)

Sumber : Dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2018 - 2023
Keterangan = PN (Prioritas Nasional), PP (Prioritas Provinsi

Dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 ini telah memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJM Nasional dan juga Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021 – 2026. KLHS merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026,

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta Rencana Rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pelaksanaan KLHS didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 untuk memberikan Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai upaya untuk lebih mengarahkan pemenuhan amanat universal yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka KLHS berfungsi sebagai dokumen yang mengkaji dan memastikan bahwa indikator SDGs/TPB tertuang dalam dokumen penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru.
5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
6. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Barru berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.
7. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagaimana tertuang dalam Lampiran C.2 Penyajian Dokumen RPJMD pada Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab ini berisikan tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, serta Aspek Daya saing Daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Bab ini berisikan tentang Kinerja Keuangan masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Serta Kerangka Pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab Permasalahan dan isu strategis daerah memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian Permasalahan dan isu-isu strategis daerah pada bab ini terdiri dari Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Barru hingga akhir periode RPJMD ini.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PD

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII.KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX.PENUTUP

Bab ini menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Barru

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Barru adalah salah satu dari 24 Kabupaten Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi yang terletak di pesisir pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 Km arah utara Kota Makassar dengan luas 1174,72 Km2.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber: Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah didalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan

tugas pembantuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Barru sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar

Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Barru Tahun 2020

Kode	Kecamatan	Desa	Kel	Luas (Km²)	%	Jumlah Penduduk
731101	Tanete Riaja	6	1	174,29	14,83	25.702
731102	Tanete Rilau	8	2	79,17	6,74	37.788
731103	B a r r u	5	5	199,32	16,97	44.746
731104	Soppeng Riaja	5	2	78,90	6,72	18.548
731105	Mallusetasi	5	3	216,58	18,44	27.746
731106	Pujananting	6	1	314,26	26,75	13.355
731107	Balusu	5	1	112,20	9,55	19.507
	Total	**40**	**15**	**1174,72**	**100**	**187.392**

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan Pujananting adalah kecamatan yang terluas di Kabupaten Barru yakni seluas 314,26 Km² atau sebesar 26,75% dari total wilayah Kabupaten Barru, sementara Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan yang tersempit di Kabupaten Barru yakni hanya seluas 78,90 Km² atau sebesar 6,72% dari total wilayah keseluruhan.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°0.5'35"–4°47'35"LS,119°35'00"–119°49'16"BT. Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barru terbentang daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0 – 20 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah Kabupaten Barru memiliki kelerengan yang sangat bervariasi mulai datar, bergelombang hingga bergunung dengan persentase kemiringan antara 0% - >40%.

2.1.1.3 Topografi

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Secara topografis, Kabupaten Barru mempunyai wilayah bervariasi yang terdiri atas wilayah laut, dataran rendah dan wilayah pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0–1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl). Keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang dibagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu 0-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1.000 m dan ≥ 1000 m dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan Laut Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Ketinggian Tempat (Ha)					Total
		0-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	≥1000 m	
1	Tanete Riaja	1.132	4.547	6.082	5.153	515	17.429
2	Tanete Rilau	3.830	2.113	1.974	-	-	7.917
3	Barru	3.454	5.113	9.363	1.806	196	19.932
4	Soppeng Riaja	3.137	1.171	2.771	811	-	7.890
5	Malusetasi	2.583	2.4	11.100	5.575	-	21.658
6	Pujananting	-	275	21.723	8.368	1.060	31.426
7	Balusu	3.411	1.428	5.003	1.307	71	11.220
Total		**17.547**	**17.047**	**58.016**	**23.020**	**1.842**	**117.472**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase luas wilayah yang paling besar adalah wilayah dengan ketinggian antara 100-500 m yaitu sebesar 58.016 Ha sedangkan yang paling sedikit adalah wilayah dengan ketinggian ≥ 1.000 m yaitu sebesar 1.842 Ha Secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2

Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber: Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

Selanjutnya keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan meliputi 4 (empat) kriteria yaitu kemiringan 0-2%, 2-15%, 15-40%, >40%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Kemiringan Tanah / Lereng				Total
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%	
1	Tanete Riaja	593	5,552	7,985	3,299	17,429
2	Tanete Rilau	1,159	3,369	2,857	532	7,917
3	Barru	1,458	7,538	7,872	3,064	19,932
4	Soppeng Riaja	788	3,419	2,687	996	7,890
5	Malusetasi	611	4,360	9,371	7,316	21,658
6	Pujananting	239	5,730	15,718	9,739	31,426
7	Balusu	1,084	4,000	4,764	1,372	11,220
TOTAL		**5,932**	**33,968**	**51,254**	**26,318**	**117,472**
PERSENTASE		**5.05%**	**28.92%**	**43.60%**	**22.40%**	**100**

Sumber :Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan tanah/lereng lebih didominasi oleh wilayah dengan kemiringan antara 15%-40% yaitu sebesar 43,60%, sedangkan yang paling sedikit yaitu dengan kemiringan antara 0-2% hanya sebesar 5.05%. Secara spasial kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3

Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

2.1.1.4 Geologi

Pegunungan yang ada di Kabupaten Barru sebagian besar merupakan batuan gunung api yang bagian selatannya lebih tinggi, tetapi ke utara menyempit dan merendah. Secara bersama batuan itu menyusun Formasi Camba yang tebalnya sekitar 5.000 m. Sebagian besar pegunungan terbentuk dari Formasi Camba yang menindih tak selaras Formasi Tonasa.

Terobosan batuan beku yang terjadi di Kabupaten Barru semuanya berkaitan erat dengan kegiatan gunung api. Bentuknya berupa stok, sill dan retas, bersusunan beraneka dari basal, andesit, trakit, diorit, dasit dan granodiorit yang diperkirakan berumur pada kiasan Miosen Akhir.

Endapan Holosen yang luasannya berupa endapan aluvium, danau dan pantai terdiri atas lempung, lanau, lumpur pasir dan kerikil di sepanjang sungai besar dan di sepanjang pantai. Endapan pantai setempat mengandung sisa kerang dan batu gamping koral. Secara umum endapan aluvium terdapat di sebelah barat atau pesisir pantai dari daerah Kabupaten Barru.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Barru



Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

Struktur regional Kabupaten Barru terdiri atas struktur lipatan dan struktur sesar dimana struktur lipatan adalah suatu bentuk deformasi pada batuan sedimen, batuan vulkanik dan batuan metamorf yang memperlihatkan suatu bentuk bergelombang dan struktur yang berkembang di Kabupaten Barru adalah struktur sinklin. Sedangkan struktur sesar merupakan suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami

pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dan arahnya sejajar dengan bidang patahan. Secara spasial peta geologi Kabupaten Barru dapat dilihat melalui gambar diatas.

Kondisi geologi daerah Barru yang kompleks akibat tektonik inilah yang menyebabkan potensi pertambangan di Kabupaten Barru sangat besar dari segi bahan galian batuan, mineral dan logam. Bahan galian yang bernilai ekonomis tersebar dari Utara hingga selatan daerah Barru. Kromit ditemukan dalam batuan ultrabasa di timur Barru, terutama pada bagian yang berlapis berupa lensa, tanah pelapukannya mengandung apungan kromit. Khusus di sebelah Selatan daerah Barru di Kecamatan Pujananting dan Tanete Riaja potensi bahan galian yang bernilai ekonomis banyak dijumpai antara lain: emas, galena, mangan dan batubara.

Gambar 2.5

Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber: Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

Tabel 2.4

Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan Kab.Barru Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Tambang
1	Tanete Riaja	Batubara, kromit, batugamping, pasir kuarsa, marmer,serpentinit, tanah liat, batupasir, pasir, dan batu sungai
2	Tanete Rilau	Pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentinit
3	Barru	Batugamping, serpentinit, tanah liat, pasir dan batu Sungai
4	Soppeng Riaja	Pasir dan batu sungai
5	Mallusetasi	Tras, pasir besi dan batu sungai
6	Pujananting	Batubara, kromit, batugamping, marmer, serpentinit, mangan, galena, emas, pasir kuarsa, tanah liat, pasir dan batu sungai
7	Balusu	Batugamping dan tanah liat

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

Sedangkan potensi batuan menyebar dari Utara sampai Selatan daerah Barru, seperti yang terlihat pada tabel 2.4.

Jenis Tanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

a. Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium, tekstur beranekaragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini di daerah daratan Aluvial Sungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.

b. Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofografi berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru.

c. Jenis tanah Regosol meliputi 35,12 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal dari bahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk– gumuk pasir.

d. Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuan kapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 27,68 persen terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

Dari ke empat jenis tanah tersebut, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5

Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Jenis Tanah	Luas Dan Persentase	
		Ha	Persentase (%)
1.	Aluvial	14.659	12,48
2.	Litosol	29.043	24,72
3.	Regosol	41.254	35,12
4.	editeran	32.516	27,68
	total	**117.472**	**100**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Dari tabel diatas, diantara ke 4 (empat) jenis tanah, yang memiliki persentase terbesar adalah Regosol sebanyak 35,12% dan terkecil adalah Aluvial sebesar 12,48%.

2.1.1.5 Hidrologi

Air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hajat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Kabupaten Barru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan untuk budidaya perikanan. Berikut data sungai yang mengalir menurut lokasi:

Tabel 2.6

Sungai Mengalir Menurut Lokasi Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Nama Sungai	Panjang	Lokasi	Ketinggian	Kerendahan
1	Lisu	38 Km	Tanete Riaja	4 M	3 M
2	Jampue	20 Km	Barru	4,5 M	3 M
3	Nepo	18 Km	Mallusetasi	3,5 M	2,5 M
4	Lampoko	18 Km	Balusu	4 M	2,5 M
5	Manuba	23 Km	Mallusetasi	3 M	2 M
6	Waesai	24 Km	Tanete Riaja	4 M	2,5 M

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Untuk menentukan status daya dukung air di Kabupaten Barru yaitu dengan menghitung selisih antara jumlah ketersediaan air dengan jumlah kebutuhan air di Kabupaten Barru. Ketersediaan dan kebutuhan air pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih kebutuhan (m3)
1	Tanete Riaja	195.661.363,46	81.654.160,28	114.007.203,18
2	Tanete Rilau	87.766.378,69	50.709.850,85	37.056.527,84
3	Barru	231.806.923,49	78.743.615,96	153.063.307,53
4	Soppeng Riaja	119.005.762,91	35.461.502,11	83.544.260,80
5	Mallusetasi	264.204.914,68	45.266.824,14	218.938.090,54
6	Pujananting	368.810.276,56	58.699.474,88	310.110.801,69
7	Balusu	159.746.620,21	41.699.448,62	118.047.171,59
Total		**1.427.002.240,01**	**392.234.876,83**	**1.034.767.363,18**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2021

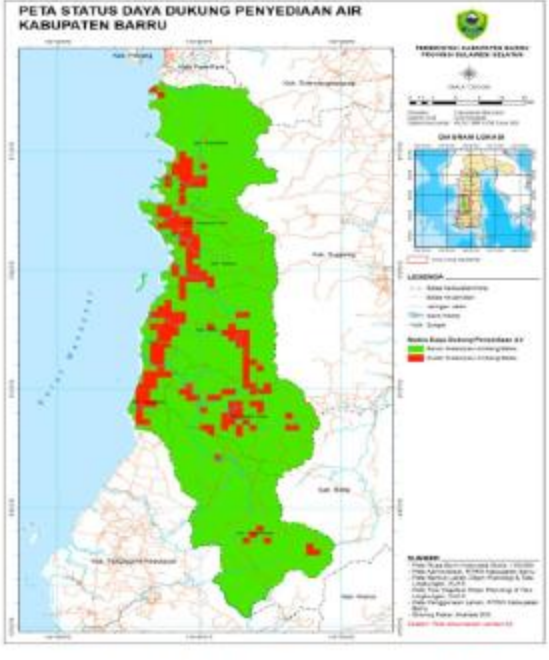
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air dari setiap Kecamatan tertinggi di Kecamatan Pujananting dan terendah di kecamatan Tanete Rilau. Kebutuhan air dalam perikehidupan manusia dibagi menjadi 2 yaitu kebutuhan air untuk lahan

dan kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Barru yaitu pada Kecamatan Tanete Riaja sebesar 81.654.160,28 m^3 disebabkan tingginya kebutuhan air untuk lahan pada Kecamatan tersebut yaitu 79.542.630,68 m^3 sedangkan kebutuhan air terendah yaitu pada Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 35.461.502,11 m^3 dengan kebutuhan air untuk lahan sebesar 33.971.534,11 m^3.

Pada tabel diatas juga diketahui bahwa masih terdapat selisih daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air di Kabupaten Barru dengan kebutuhan air bagi perikehidupan penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sehingga dapat disimpulkan bahwa status daya dukung penyediaan air bagi penduduk Kabupaten Barru belum terlampaui pada setiap kecamatan. Berdasarkan jumlah ketersediaan air di Kabupaten Barru (123.337.296,00 m^3), jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaan airnya secara alamiah oleh Kabupaten Barru adalah 12.151.381 jiwa populasi, masih surplus sekitar 11.969.008 jiwa populasi penduduk dari total penduduk eksisting tahun 2019 sebanyak 182.373 jiwa.

Gambar 2.6

Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Barru



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru (2021)

Pada gambar disamping menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampauan alam

menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi air yang dibutuhkan masyarakat diwilayah tersebut. Rincian luasan status daya dukung wilayah penyediaan air disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8

Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barru

Kecamatan	Ambang Batas	Status Ambang Batas	Luas wilayah masih mendukung		Luas Wilayah tidak mendukung	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Tanete Riaja	1.343.976	1.296.795	17.295,18	85,8	2.852,88	14,2
Tanete Rilau	464.133	395.121	4.521,40	64,3	2.510,53	37,
Barru	1.812.225	1.730.508	16.187,82	80,1	4.025,20	19,9
Soppeng Riaja	984.197	949.057	6.579,90	81,5	1.490,69	18,5
Mallusetasi	2.560.383	2.508.465	20.840,56	91,9	1.836,05	8,1
Pujananting	3.601.887	3.576.145	30.813,80	97,8	681,26	2,2
Balusu	1.384.580	1.347.657	8.751,68	79,5	2.255,07	20,5
Total	**12.151.381**	**11.803.748**	**104.990,34**	**87,0**	**15.651,68**	**13,0**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sebagian wilayah dalam kecamatan tersebut sudah tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air.

2.1.1.6 Klimatologi

Untuk jumlah hari hujan dan curah hujan Kabupaten Barru pada tahun 2016 s/d 2020 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Curah Hujan (mm)	3.316	3.392	3.529	1.804	3.136
2	Hari Hujan	163	165	168	105	152

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Sedangkan jumlah hari hujan dan curah hujan menurut bulan sepanjang tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan Tahun 2020

No.	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm^3)
1	Januari	-	-
2	Februari	16	511
3	Maret	16	248
4	April	21	342
5	Mei	13	258
6	Juni	10	89
7	Juli	12	110

No.	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm^3)
8	Agustus	2	28
9	September	7	38
10	Oktober	10	349
11	November	15	235
12	Desember	30	928

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana terhadap karakteristik dan kecenderungan pola pemanfaatan ruang wilayah. Rencana pola ruang meliputi alokasi pemanfaatan ruang, kawasan budidaya, kawasan lindung, serta kawasan perkotaan dan pedesaan. Luas arahan kawasan budidaya Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	%
1	Hutan Produksi	17.290,03	14,52
2	Hutan rakyat	5.923,35	4,97
3	Kawasan Budidaya Perikanan	2.682,69	2,25
	Tambak	2.682,69	2,25
4	Kawasan Budidaya Perkebunan	14.046,91	11,79
	Perkebunan	14.046,91	11,79
5	Kawasan Budidaya Pertanian	19.880,78	16,69
	Pertanian lahan basah	14.322,14	12,02
	Pertanian lahan kering	1.785,70	1,50
	Holtikultura	3.772,94	3,17
6	Kawasan Budidaya Peternakan	2.290,54	1,92
	Peternakan Besar	2.290,54	1,92
7	Kawasan Permukiman	3.771,64	3,17
	Permukiman	3.771,64	3,17
8	Kawasan Pertambangan	1.490,56	1,25
	Pertambangan	1.490,56	1,25
Total Kawasan Budidaya		**67.376,50**	**56,57**

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2021

Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang.Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan hutan lindung juga merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan sebagaimana dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari :

- Kawasan hutan lindung yang memiliki skor > 175, yang merupakan penjumlahan skor intensitas curah hujan, kepekaan tanah terhadap erosi dan kemiringan lereng. Selain itu kawasan ini meliputi pula wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dari permukaan laut.
- Kawasan resapan air yang meliputi hutan rawa.
- Kawasan sempadan sungai dan danau.

Secara keseluruhan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru seluas 51.969,00 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 17.879 hektar. Secara lebih rinci luasan kawasan hutan lindung berdasarkan kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12

Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kecamatan	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung	Jumlah
1	Tanete Riaja	4.811,00	3.539,00	8.350,00
2	Tanete Rilau	0	2.188,00	2.188,00
3	Barru	3.272,00	7.057,00	10.329,00
4	Soppeng Riaja	972	1.543,00	2.515,00
5	Mallusetasi	14	16.309,00	16.323,00
6	Pujananting	4.305,00	19.665,00	23.970,00
7	Balusu	4.505,00	1.668,00	6.173,00
Jumlah		**17.879,00**	**51.969,00**	**69.848,00**

Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Sedangkan kawasan perlindungan setempat terdiri dari beberapa kawasan sebagai berikut:

- Kawasan sempadan pantai ditetapkan berdasarkan pesisir pantai Kabupaten Barru sepanjang 78 Km yang terdistribusi pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Balusu.
- Kawasan sempadan sungai ditetapkan pada Sungai Barru, Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai

Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai Jalanru.

- Kawasan sekitar mata air ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan lindung spiritual ditetapkan di kawasan perkampungan Suku Tobalo di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.
- Kawasan ruang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 persen dan Ruang Terbuka Hijau privat paling sedikit 10 persen dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp dan PPK.

Kawasan lindung yang selanjutnya adalah Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang terdiri dari :

- Kawasan pantai berhutan bakau, dengan luasan kurang lebih 343,783 Ha, ditetapkan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 26,322 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 86,804 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Balusu (termasuk Pulau Panikiang) dengan luasan kurang lebih 200,078 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 30,579 Ha.
- Kawasan taman wisata alam, ditetapkan di Pulau Dutungan, Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kawasan Rumah Adat Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu, Kawasan Monumen Paccekke di Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru dan Kawasan Pendidikan Pesantren Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Barru di sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.

Untuk Kawasan Budidaya adapun Pengembangan wilayah Kabupaten Barru diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru. Hal ini guna mewujudkan ruang Kabupaten Barru yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan.

Secara hierarki sebagaimana disebutkan dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Wilayah Kota merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland dan lain-lain. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031, telah mengatur beberapa Potensi pengembangan wilayah yang berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah. Diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, petambangan dan lainnya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Adapun dari hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru maka diperoleh potensi pengembangan wilayah sebagai berikut.

1. Kawasan Pertanian

   Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Barru, Penetapan kawasan peruntukan pertanian, dibagi kedalam beberapa kawasan sebagai berikut.

a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri dari: kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan kurang lebih 14.527,07 Ha yang diarahkan pada sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Selanjutnya kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan sekitar 12.781,73 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan kurang lebih 6.305,99 (enam ribu tiga ratus lima koma Sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

b) Kawasan peruntukan perkebunan. Kawasan peruntukan perkebunan terbagi dalam beberapa peruntukan. *Pertama*, kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida dengan luasan kurang lebih 2.202 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kedua*, Kawasan peruntukan perkebunan kopi dengan luasan kurang lebih 758 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Ketiga*, kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih 5.278 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan

Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Keempat*, kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dan kakao dengan luasan kurang lebih 1.100 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kelima*, kawasan peruntukan perkebunan kemiri dan karet dengan luasan kurang lebih 4.617 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

c) Kawasan peruntukan peternakan, ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luas sekitar 2.290,54 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan untuk kawasan pertanian untuk wilayah Kabupaten Barru diarahkan untuk sektor unggulan komoditas Tanaman Pangan padi, sementara untuk komoditas peternakan diarahkan untuk komoditas sapi potong.

Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 17.879 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 4.505 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 3.272 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 14 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan kurang lebih 4.305 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 972 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 4.811 Ha.

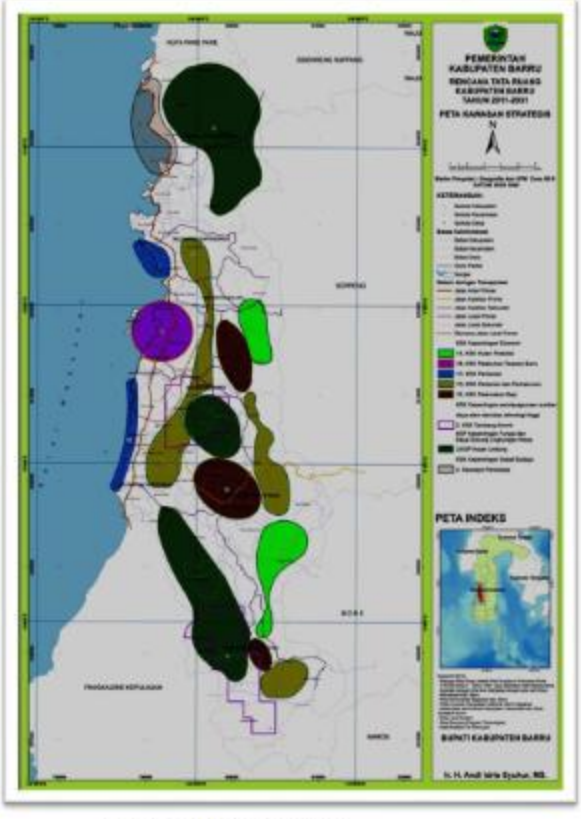
Dan untuk pengembangan Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Barru ditetapkan dengan luasan sekitar 5.923,35 Ha,

berada di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Untuk pengembangan komoditas pangan jenis hortikultura, perkebunan dan kehutanan masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan konversi produk. Hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan dari sektor beras, namun juga harus didukung dengan komoditas pangan yang lain.

Gambar 2.7

Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barru



Sumber : RTRW Bappeda 2021

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan. Pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Barru diarahkan dengan kebijakan

pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. Adapun Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di dalam Dokumen RTRW terdiri dari:

a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mallusetasi.
b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan diarahkan pada; *Pertama*, kawasan budidaya perikanan air payau dengan komoditas udang dan bandeng ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Kedua*, Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi.
c) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan akan dikembangkan di PPI Polejiwa di Kecamatan Tanete Rilau.

Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar. Untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan

pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri di kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota Makassar.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Barru untuk Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari :

a. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barru.
b. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan makanan dan pakan ternak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu.
c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan perkotaan PKLp dan PPK.

Sementara untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Wilayah pertambangan di Kabupaten Barru terdiri dari:

a) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi : Pertama, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa kromit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Kedua, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa mangan, galena dan emas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Ketiga*, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping ditetapkan di

sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Keempat*, wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa tras, kerikil berpasir alami, tanah liat dan marmer ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja.

b) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam terdiri dari wilayah usaha pertambangan panas bumi yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusf dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Barru pada beberapa kawasan berikut.

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari :
   - ✓ Kawasan Makam Pajung Tenri Leleang, kawasan Makam Petta Pallase-LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan Masjid Tua Lalabata, kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan Makam Datu Maddusila To Appaewa dan kawasan Makam Karaeng Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau;
   - ✓ Kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H. M. Pudhail dan kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru;

- ✓ Kawasan Makam Arung Nepo dan kawasan Makam La Bongo di Kecamatan Mallusetasi;
- ✓ Kawasan permukiman suku To Balo di Kecamatan Pujananting;
- ✓ Kawasan Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu.

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri dari:

- ✓ Kawasan Pantai Ujung Batu, kawasan Air Panas KalompiE, kawasan Air Terjun Tanjung Asap, Pantai LembaE dan kawasan Cek Dam Lajulo Indah di Kecamatan Barru.
- ✓ Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pantai Kupa, Taman Laut Mallusetasi, Pantai Lapakaka, kawasan permandian Bujung MatimbaoE, Bendungan LanraE dan Kawasan Wisata Mareppang di Kecamatan Mallusetasi.
- ✓ Pulau Pasir Putih, Pantai Awerange dan Permandian Alam Batu SitongkoE di Kecamatan Soppeng Riaja.
- ✓ Permandian Alam Datae Salopuru di Kecamatan Pujananting.
- ✓ Permandian Waempubbu, Air Terjun Sarang Burung dan Gua Togenra di Kecamatan Balusu.
- ✓ Kawasan Waenungnge, kawasan Batu Mallopie, kawasan Air Terjun Waesai dan kawasan Bukit Harapan di Kecamatan Tanete Riaja.
- ✓ Pulau Puteanging, Sungai Bottoe dan Tanjung Butung di Kecamatan Tanete Rilau.

5. Sistem Perkotaan

Dalam Dokumen RTRW, Untuk Sistem Perkotaan di Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut :

a) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari; Kantor Komando Distrik Militer Barru di Kota Parepare, Kantor Komado Rayon Militer di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting, Kantor Kepolisian Resort Barru di Kecamatan Barru, Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting.

b) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
   - ✓ Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di kawasan perdagangan Garongkong Kecamatan Barru, kawasan perdagangan Palanro Kecamatan Mallusetasi, kawasan perdagangan mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, kawasan perdagangan Takkalasi Kecamatan Balusu, kawasan perdagangan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan perdagangan Doi-doi Kecamatan Pujananting, dan kawasan perdagangan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau.
   - ✓ Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.

c) Kawasan peruntukan perkantoran terdiri dari:
   - ✓ Kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten diarahkan pada kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa diarahkan pada kawasan perkotaan PKLp, PPK dan PPL.
   - ✓ Kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu pada kawasan perkotaan Barru.

d) Kawasan peruntukan pelayanan umum terdiri dari:
   - ✓ Kawasan pendidikan dibagi atas kawasan pendidikan dasar diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting, kawasan pendidikan menengah diarahkan pada kawasan PKLp dan PPK di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting dan kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru, kawasan perkotaan Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasn perkotaan PekkaE di Kecamatan Tanete Rilau.
   - ✓ Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri dari puskesmas dan balai pengobatan diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan

Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting dan pelayanan kesehatan skala regional berupa rumah sakit diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru.

- ✓ Kawasan peruntukan olahraga terdiri dari kawasan olahraga skala kabupaten di arahkan di kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

e) Pengembangan Kawasan peruntukan permukiman tersebar pada semua wilayah dan secara spesifik dibagi menjadi dua kawasan permukiman seperti diuraikan berikut ini.

a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan ini ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Barru Kecamatan Barru, Kawasan Perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kawasan Perkotaan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan Perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu, Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau, dan Kawasan Perkotaan Doi-Doi Kecamatan Pujananting.

b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan ini ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Letak geografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat menyebabkan Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Barru

tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara keseluruhan yang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain :

1). Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir Selatan cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat Makassar memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa yang terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari kedalaman dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar naik (*Thrust Fault*).

2). Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitude lebih besar dari 0,6 skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang dari 33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami.

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah Kabupaten Barru terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan bencana alam banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan kawasan rawan ombak besar.

1). Banjir

Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi, penggundulan hutan di hulu sungai, penyumbatan aliran atau saluran, tidak berfungsinya tanggul, selokan air yang tidak dapat menampung derasnya/ besarnya debit air pada musim hujan.

2). Tanah Longsor

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru terdiri dari tanah regosol, mediteran, litosol, aluvial, sebagian tanah tersebut berpotensi mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat jenis pergerakan yaitu; aliran tanak dan batu batuan, longsoran atau tanah longsor, runtuhan atau tanah runtuh, amblesan atau pergeseran tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan tanah tersebut antara lain : Topografi wilayah (lereng/ kemiringan); Keadaan tanah, bebatuan, struktur perlapisan dan lainnya; Kandungan air termasuk curah hujan; Vegetasi, flora dan penggunaan lahan.

3). Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi

menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia.

4). Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan oleh masyarakat serta musim kemarau yang berkepanjangan.

5). Kekeringan

Kekeringan adalah kondisi dimana Ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Adapun wilayah di Kabupaten Barru yang merupakan wilayah rawan bencana dapat dilihat pada tabel 2.13.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru. Adapun tahapan proses dalam upaya mengurangi risiko bancana di Kabupaten Barru dimulai dari fase pra bencana. Tanggap darurat, pasca bencana dan juga dipengaruhi beberapa hal yaitu tingkat sinergitas antara organisasi perangkat daerah terkait, instansi lintas sektoral dan pihak dunia usaha dalam proses pengurangan risiko bencana. Juga dibutuhkan kelengkapan dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Data kejadian bencana di Kabupaten Barru menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecendrungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecendrungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13

Tingkat Bencana di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas wilayah Terdampak Bencana dengan KLasifikasi Tinggi (Ha)					Total
		Banjir	Longsor	Gelombang Pasang	Kebakaran	Kekeringan	
1	Tanete Riaja	1.713 Ha	3,2 Ha	-	0,5 Ha	150 Ha	1866,7 Ha
2	Tanete Rilau	2.607 Ha	-	1244 Ha	-	-	3851 Ha
3	B a r r u	2.458 Ha	1,5 Ha	333 Ha	0,13 Ha	65 Ha	2857,63 Ha
4	Soppeng Riaja	2.289 Ha	2 Ha	-	0,5 Ha	250 Ha	2541,5 Ha
5	Mallusetasi	1.197 Ha	0,5 Ha	456 Ha	0,6 Ha	60 Ha	1714,1 Ha
6	Pujananting	-	15,4 Ha	-	-	-	15,4 Ha
7	Balusu	3.220 Ha	-	267 Ha	-	-	3487 Ha

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

Tabel 2.14
Total Kecendrungan Kejadian Bencana di Kabupaten Barru

No	Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banjir	2	3	4	2	2
2.	Longsor	7	4	12	-	5
3.	Angin Puting Beliung	6	7	9	11	12
4.	Gempa	-	-	-	-	-
5.	Gelombang Pasang	1	-	-	-	-
6.	Kebakaran Hutan	3	-	-	6	-
7.	Kekeringan	-	-	1	1	1
Total		**19**	**14**	**26**	**20**	**19**

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terdapat kecendrungan peningkatan/penurunan kejadian bencana di Kabupaten Barru dalam rentang waktu tahun 2016 – 2020 yaitu :

1. Bencana banjir yang diklasifikasikan ke dalam bencana Hydrometeorologi ini cukup berdampak besar bagi wilayah Kabupaten Barru hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 dengan angka kejadian sebesar 2 Kejadian, pada tahun 2017 dengan angka kejadian 3 Kejadian, pada tahun 2018 dengan angka kejadian 4 kejadian, frekuensi tertinggi dicapai pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 2 kejadian. Bencana banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di beberapa bagian wilayah Kabupaten Barru sehingga mengakibatkan luapan volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu.
2. Bencana longsor adalah gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Di Kabupaten Barru pada tahun 2016 terdapat 7 kasus longsor dan menurun pada tahun 2020 sebesar 5 kasus.
3. Bencana angin Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Di Kabupaten Barru pada tahun 2016 terdapat

6 kasus longsor dan meningkat secara signifikan sebesar 12 kasus pada tahun 2020.

4. Bencana Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Kejadian gempa bumi tercatat tidak pernah terjadi di Kabupaten Barru selama kurun waktu 5 Tahun.
5. Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak. Bencana gelombang pasang terjadi hanya pada tahun 2016 sebanyak 1 kejadian.
6. Bencana kebakaran hutan adalah api yang tidak terkendali di daerah memiliki vegetasi yang mudah terbakar. Kejadian kebakaran hutan hanya terjadi pada tahun 2016 sebanyak 3 kejadian dan pada tahun 2020 sebanyak 6 kejadian.
7. Bencana Kekeringan disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Kekurangan sumber air menjadi penyebab bencana ini. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sebanyak 3 kejadian.

Adapun gambaran wilayah relokasi bencana untuk 7 kecamatan yang telah ditentukan oleh BPBD Kabupaten Barru dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.15

Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kabupaten Barru

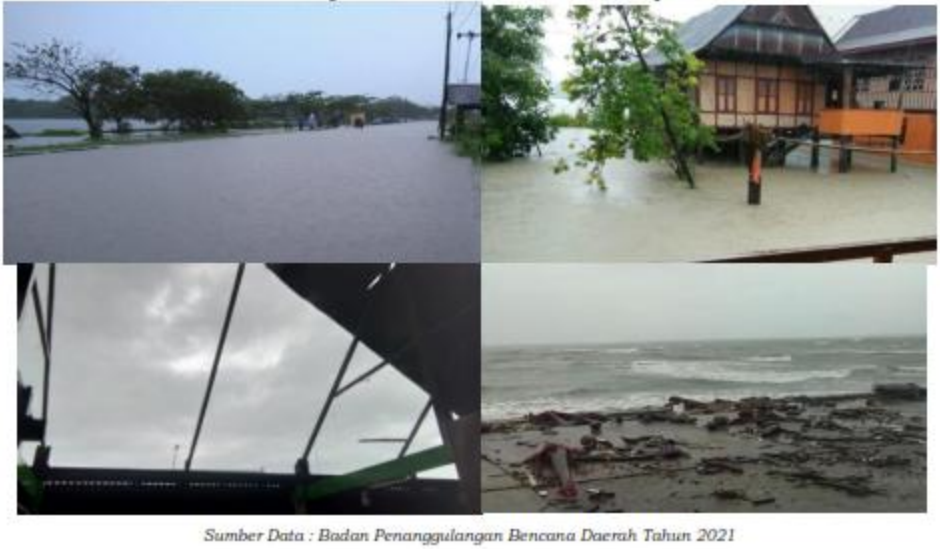
No	Jenis Bencana	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1.	Tanete Riaja	Longsor	Lapangan Sepak Bola Ralla
		Cuaca Extrim (Banjir, Angin Putting Beliung, Gelombang Pasang)	Pasar Ralla
		Kebakaran	Pkg Maruala
2.	Tanete Rilau	Longsor	Lapangan Sepak Bola Pekkae
		Cuaca Extrim (Banjir, Angin Putting Beliung, Gelombang Pasang)	SMA Aroppoe
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Pancana
3.	Barru	Longsor	Lapangan Sepak Bola Sumpang Binangae
		Cuaca Extrim (Banjir, Angin Putting Beliung, Gelombang Pasang)	SMA Lajullo
		Kebakaran	MAN Magempang
4.	Soppeng Riaja	Longsor	Lapangan Sepak Bola Mangkoso
		Cuaca Extrim (Banjir, Angin Putting Beliung, Gelombang Pasang)	SMP 3 Siddo
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Siddo

No	Jenis Bencana	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
5.	Balusu	Longsor	Lapangan Sepak Bola Takkalasi
		Cuaca Extrim (Banjir, Angin Putting Beliung, Gelombang Pasang)	SMK Bulu Lampoko
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Madello
6.	Pujananting	Longsor	Lapangan Sepak Bola Doi Doi
		Cuaca Extrim (Banjir, Angin Putting Beliung, Gelombang Pasang)	PGK Ralla
		Kebakaran	SMP Doi Doi
7.	Mallusetasi	Longsor	Lapangan Sepak Bola Palanro
		Cuaca Extrim (Banjir, Angin Putting Beliung, Gelombang Pasang)	SMK Bojo
		Kebakaran	MAN Lakalita

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

Gambar 2.8

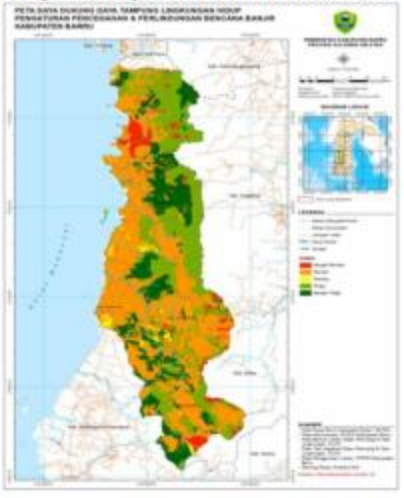
Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barru



Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

Pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah meliputi ekosistem yang di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah area peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir di hilir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial.

Gambar 2.9
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru (2020)

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi – sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah – rendah). Lahan yang berpotensi tinggi – sangat tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir memiliki luasan sebesar 55.221,88 Ha atau 45,76% dari keseluruhan lahan di Kabupaten Barru. Kategori sedang seluas 2.211,43 Ha (1,83%) dan kategori rendah seluas 63.208,71 Ha (52,41%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	KECAMATAN	SANGAT RENDAH - RENDAH		SEDANG		TINGGI - SANGAT TINGGI	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Tanete Riaja	14.275,43	11,83%	201,65	0,17%	5.670,98	4,70%
2	Tanete Rilau	5.775,93	4,79%	474,80	0,39%	781,20	0,65%
3	Barru	9.235,13	7,66%	626,31	0,52%	10.351,58	8,58%
4	Soppeng Riaja	4.362,31	3,62%	205,53	0,17%	3.502,75	2,90%
5	Mallusetasi	8.878,42	7,36%	94,38	0,08%	13.703,82	11,36%
6	Pujananting	16.472,52	13,66%	559,71	0,46%	14.462,83	11,98%
7	Balusu	4.208,96	3,49%	49,05	0,04%	6.748,74	5,60%
TOTAL		**63.208,70**	**52,41%**	**2.211,43**	**1,83%**	**55.221,90**	**45,76%**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas memberikan informasi bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi)

yaitu Kec. Pujananting dengan luas 14.462,83 Ha (11,98%), sedangkan kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah (sangat rendah–rendah) juga Kec. Pujananting dengan luas 16.472,52 Ha (13,66%).

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi – sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah – rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha (19,24%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17

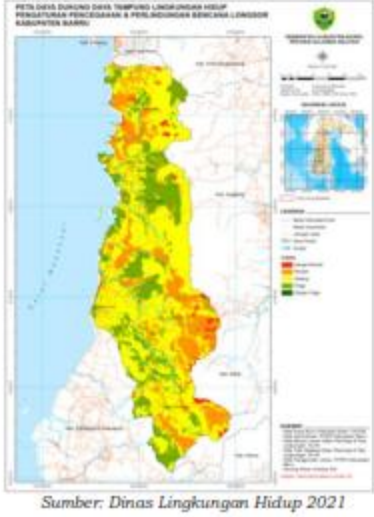
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kecamatan	Sangat rendah – rendah		Sedang		Tinggi – sangat tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Tanete Riaja	12.205,75	10,12	5.623,57	4,66	2.318,74	1,92
2	Tanete Rilau	3.933,75	3,26	1.775,40	1,47	1.322,78	1,10
3	Barru	7.423,08	6,15	9.995,90	8,29%	2.794,05	2,32
4	Soppeng Riaja	2.639,26	2,19	2.793,47	2,32%	2.637,86	0,40
5	Mallusetasi	8.400,95	6,96	10.151,39	8,41%	4.124,27	3,42
6	Pujananting	16.354,80	13,56	7.373,36	6,11%	7.766,90	6,44
7	Balusu	2.286,06	1,89	3.806,72	3,16%	4.913,96	4,07
Total		53.243,66	44,13	41.519,81	34,42	25.878,55	19,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2021

Gambar 2.10

Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori tinggi (tinggi – sangat tinggi) yaitu kecamatan Pujananting dengan luas 7.766,90 Ha (6,44%) sedangkan Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori rendah (sangat rendah – rendah) yaitu kecamatan Tanete Riaja dengan luas 7.408,46 Ha (6,14%).

Untuk Fungsi Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran dimana kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya kebakaran.

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi – sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah – rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha (19,67%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%).

Adapun rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran disajikan pada tabel berikut.

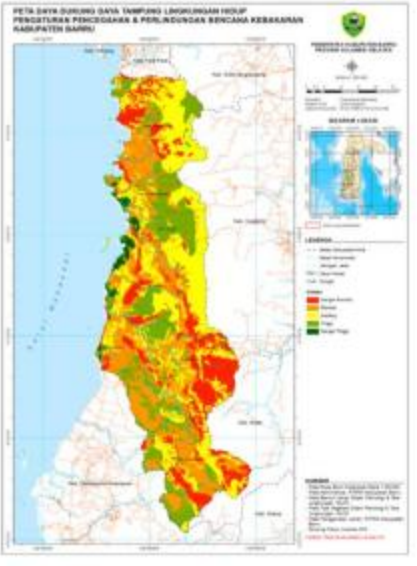
Tabel 2.18

Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran di Kabupaten Barru Tahun 2020

No	Kecamatan	Sangat rendah – rendah		Sedang		Tinggi – sangat tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Tanete Riaja	917.43	0.76%	13,358.00	11.07%	201.65	0.17%
2	Tanete Rilau		0.00%	5,775.93	4.79%	474.80	0.39%
3	Barru	7.73	0.01%	9,227.40	7.65%	626.31	0.52%
4	Soppeng Riaja	433.52	0.36%	3,928.79	3.26%	205.53	0.17%
5	Mallusetasi	2,121.09	1.76%	6,757.33	5.60%	94.38	0.08%
6	Pujananting	1,289.52	1.07%	15,183.00	12.59%	559.71	0.46%
7	Balusu		0.00%	4,208.96	3.49%	49.05	0.04%
Total		**4,769.29**	**3.95%**	**58,439.42**	**48.44%**	**2,211.43**	**1.83%**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2021

Gambar 2.11
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2020

2.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Barru menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2016-2020 sebesar 1,74 persen, dimana Jumlah penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2016 sebesar 173.163 jiwa meningkat menjadi sebesar 187.392 jiwa pada Tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Barru dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, seperti diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk										Laju Pert. Penduduk (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Tanete Riaja	11.920	12.409	11.976	12.467	12.162	12.715	12.229	12.761	12.695	13.087	13.88
2	Tanete Rilau	17.044	17.755	17.279	17.959	17.869	18.570	18.031	18.642	18.639	19.149	20.14
3	Barru	19.572	20.442	19.933	20.704	20.910	21.657	21.216	22.061	22.018	22.728	23.42
4	Soppeng Riaja	8.182	8.877	8.317	8.926	8.675	9.337	8.769	9.409	8.944	9.604	9.92
5	Mallusetasi	12.870	13.456	12.920	13.448	13.223	13.745	13.349	13.751	13.700	14.046	15.02
6	Pujananting	6.164	6.310	6.231	6.419	6.332	6.569	6.402	6.615	6.606	6.749	7.18
7	Balusu	8.771	9.391	8.812	9.480	9.042	9.703	9.252	9.886	9.441	10.066	10.46
	Total	84.523	88.640	85.468	89.403	88.213	92.296	89.248	93.125	91.963	95.429	1,74

Sumber : Dinas Dukcapil 2021

Data kepadatan penduduk Kabupaten Barru berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebesar 187.392 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Barru sebesar 168 Jiwa/ Km^2.

Distribusi penduduk di Kabupaten Barru pada Tahun 2020 ini terlihat sangat tinggi di Kecamatan Barru yakni sebesar 44.746 jiwa atau 23,88% penduduk, lalu disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 37.788 jiwa atau 20,17%, Kecamatan Mallusetasi sebesar 27.746 jiwa atau 14,81%, Kecamatan Tanete Riaja sebesar 25.702 jiwa atau 13,72%, Kecamatan Balusu sebesar 19.507 jiwa atau 10,41%, Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 18.548 jiwa atau 9,90% dan Kecamatan Pujananting sebesar 13.355 jiwa atau 7,13%.

Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Usia belum produktif (kelompok umur <14 tahun)
b. Usia produktif (kelompok umur antara 15 - 64 tahun),
c. Usia tidak produktif (kelompok umur > 64 tahun)

Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab.Barru (Jiwa) Tahun 2020

No	Usia Non Produktif Dan Produktif	Jenis Kelamin		Penduduk	Persen
		laki2	perempuan		
		n(jiwa)	n(jiwa)	n(jiwa)	(%)
1.	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	23.480	21.998	45.478	24,27%
2.	15-64 Tahun (Usia Produktif)	61.363	64.276	125.639	67,05%
3.	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	7.120	9.155	16.275	8,69%
Total		91.963	95.429	187.392	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru masih didominasi oleh penduduk yang berusia produktif yaitu sebesar 125.639 Orang atau sebesar 67,05% dari total penduduk Kabupaten Barru.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk yang dibagi menjadi kelompok jenis kelamin yaitu laki – laki dan perempuan. Struktur penduduk menurut jenis kelamin disuatu wilayah dapat dianalisis dengan menghitung rasio jenis kelamin (sex ratio) di wilayah tersebut. Rasio jenis kelamin merupakan angka yang didapat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Rasio jenis kelamin terakit penyediaan lapangan

kerja, sarana dan prasarana serta tingka kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.21

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2016 s.d 2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio
		L	P	Total	
1	2016	84.523	88.640	173.163	95
2	2017	85.468	89.403	174,871	96
3	2018	88.213	92.296	180.509	96
4	2019	89.248	93.125	182.373	96
5	2020	91.936	95.429	187.392	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan berdasarkan rasio pada tahun 2020 yang sebesar 96 berarti dari 100 orang perempuan terdapat 96 orang laki-laki.

Rumah tangga dapat diartikan satu orang anggota atau sekelompok orang yang tinggal bersama tetapi dengan atau tidak memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan perkawinan. Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan jumlah rumah tangga pada tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22

Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Tahun 2016 - 2020

Kode	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
731101	Tanete Riaja	6.893	7.060	7.420	7.692	8.191
731102	Tanete Rilau	10.115	10.288	10.958	11.308	11.874
731103	Barru	11.719	12.044	12.803	13.321	14.033
731104	Soppeng Riaja	5.132	5.195	5.571	5.754	5.993
731105	Mallusetasi	7.642	7.775	8.205	8.438	8.893
731106	Pujananting	3.547	3.621	3.867	4.014	4.242
731107	Balusu	5.455	5.527	5.883	6.130	6.435
TOTAL		**50.503**	**51.510**	**54.707**	**56.657**	**59.661**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga di tiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2016 sebesar 50.503 RT meningkat sampai dengan tahun 2020 sebesar 59.661 RT.

Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu wilayah akan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan di Kabupaten Barru pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru
Tahun 2016 s.d 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belum/Tidak Punya ijazah	55.531	55.401	59.606	60.425	62.996
2	Tamat SD	54.094	54.012	54.136	54.058	54.021
3	Tamat SMP	23.126	23.841	23.939	24.110	25.353
4	Tamat SMA	29.036	29.700	30.082	30.573	31.448
5	Diploma	2.631	2.676	2.734	2.740	2.780
6	Sarjana S1	8.265	8.715	9.432	9.849	10.143
7	Sarjana S2	466	509	558	590	630
8	Sarjana S3	14	17	22	24	21
Total		**173.163**	**174.871**	**180.509**	**182.373**	**187.392**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Barru masih banyak yang belum memiliki ijazah yakni sebesar 62.996 jiwa di Tahun 2020. Sementara untuk pendidikan tertinggi yakni strata 3 pada tahun 2020 hanya sebesar 21 Jiwa.

Berdasarkan pengelompokan umur tersebut dapat diketahui rasio beban tanggungan (dependency ratio) yang dapat digunakan untuk melihat angka ketergantungan suatu wilayah. Rasio beban tanggungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif dengan penduduk usia produktif. Persentase rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang rendah menunjukkan rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Tabel 2.24
Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	47.98	47.712	44.974	44.776	45.478
2	Jumlah Penduduk usia>64 tahun	13.273	13.562	15.285	16.340	16.275
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	61.253	61.274	60.259	61.116	61.753
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	110.653	111.493	120.250	121.257	125.639
5	Rasio ketergantungan (%)	55,36	54,96	50,11	50,40	49,15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi

dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi), angka yangditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam17 sektor rincian kategori lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, sektor Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya. Untuk mengetahui nilai dan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 25

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.436,85	1.501,20	1.581,31	1.652,72	1.662,67
2	Pertambangan dan Penggalian	119.72	125,04	130,68	138,15	139,11
3	Industri Pengolahan	212.67	222,58	232,09	253,70	247,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.34	5,70	6.10	6,39	6,80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.05	4,28	4.62	5,10	5,79
6	Konstruksi	580,17	648,67	714,30	785	792,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	389,85	422,90	460,26	505,36	497,56
8	Transportasi dan Pergudangan	91,69	98,83	111,50	126,16	112,19

No	Lapangan Usaha	Tahun 2016	2017	2018	2019	2020
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,61	39,17	43,32	48,28	48,24
10	Informasi dan Komunikasi	211,94	232,78	255,89	281,43	313,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	115,17	117,76	120,72	124,64	127,94
12	Real Estate	135,71	145,36	153,34	155,82	160
13	Jasa Perusahaan	0,96	1,04	1,14	1,25	1,18
14	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan	293,58	309,79	338,93	375,96	371,71
15	Jasa Pendidikan	158,64	165,05	173,78	186,48	195,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,15	102,55	108,28	117,30	125,65
17	Jasa Lainnya	25,17	27,29	30,29	33,68	31,60
	Jumlah PDRB	**3.916,34**	**4.169,98**	**4.420,93**	**4.797,43**	**4.839,12**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Tabel 2. 26

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun (Miliar) 2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.028,42	2.162,34	2.333,00	2.458,99	2.582,15
2	Pertambangan dan Penggalian	179,96	192,71	206,58	219,09	225,39
3	Industri Pengolahan	275,20	298,48	319,94	355,33	348,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,83	5,66	6,20	6,44	6,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,14	5,66	6.16	6,96	7,93
6	Konstruksi	927,52	1.042,34	1.221,39	1.411,25	1.428,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	468,54	532,23	605,96	686,75	688,31
8	Transportasi dan Pergudangan	138,67	152.01	173,04	197,96	181,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51,37	56.88	63.73	73,22	75,78
10	Informasi dan Komunikasi	227,09	257.98	289,39	322,33	359,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,88	184.43	197,73	211,34	217,16
12	Real Estate	191,05	207,96	226,44	233,45	241,06
13	Jasa Perusahaan	1,28	1,36	1,51	1,74	1,67
14	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	430,70	467,86	533,93	612	616,47
15	Jasa Pendidikan	203,12	219,08	235,93	257,93	273,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,00	133,32	145,43	162,04	180,57
17	Jasa Lainnya	36,97	41,64	47,76	54,37	51,94
	Jumlah PDRB	**5.458,75**	**5.961,95**	**6.614,10**	**7.271,22**	**7.432,30**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Tabel 2. 27

Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) (Persen), 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,10	36,48	36,10	35,78	35.58	35.40	33,82	34,45	34,02	34,36
2	Pertambangan dan Penggalian	3,30	3,06	3,24	3,00	3.39	3.02	3,01	2,88	3,03	2,87
3	Industri Pengolahan	5,05	5,44	5,01	5,35	5.06	5.29	4,89	5,29	4,69	5,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,14	0,10	0,14	0.10	0.14	0,09	0,13	0,09	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0.09	0.10	0,10	0,11	0,11	0,12
6	Konstruksi	16,98	14,81	17,44	15,54	16.59	15.58	19,41	16,36	19,21	16,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,73	10,09	9,15	10,30	9.64	10.67	9,44	10,53	9,26	10,28
8	Transportasi dan Pergudangan	2,54	2,35	2,55	2,38	2.74	2.42	2,72	2,63	2,44	2,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,94	0,94	1,00	0,94	0.99	0.95	1,01	1,01	1,02	1,00
10	Informasi dan Komunikasi	4,20	5,42	4,33	5,59	4.38	5.70	4,43	5,87	4,84	6,47
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	3,10	2,96	3,10	2,83	3,23	2.89	2,91	2,60	2,92	2,64
12	Real Estate	3,56	3,47	3,55	3,49	3,61	3.52	3,21	3,25	3,24	3,31
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0.02	0.02	0,02	0.03	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,90	7,51	7,85	7,44	7,92	7.24	8,42	7,84	8,29	7,68
15	Jasa Pendidikan	3,73	4,06	3,70	3,97	3.69	3.96	3,55	3,89	3,68	4,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,51	2,24	2,46	2.24	2.42	2,23	2,45	2,43	2,60
17	Jasa Lainnya	0,70	0,64	0,70	0,66	0.74	0.67	0,75	0,70	0,70	0,65
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai produk domestik regional bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sedangkan distribusi masing-masing kategori lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) berfluktuatif dari tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB menurut sektor/kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,02	4,48	5,34	4,52	0,6
2	Pertambangan dan Penggalian	3,68	4,44	4,51	5,72	0,69
3	Industri Pengolahan	6,11	4,66	4,27	9,31	-2,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,37	5,71	7,01	4,66	6,49
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,65	5,68	7,79	10,47	13,63
6	Konstruksi	7,87	11,81	10,12	9,90	1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,03	8,48	8,84	9,80	1,54
8	Transportasi dan Pergudangan	7,61	7,79	12,83	13,14	-11,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,63	6,99	10,59	11,45	-0,08
10	Informasi dan Komunikasi	9,78	9,83	9,93	9,98	11,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,56	2,25	2,51	3,25	2,65
12	Real Estate	8,04	7,10	5,49	1,62	2,68
13	Jasa Perusahaan	3,21	7,63	9,67	10,27	-5,8
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,18	5,52	9,41	10,93	1,54
15	Jasa Pendidikan	4,15	4,04	5,29	7,31	4,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	4,48	5,58	8,33	7,12
17	Jasa Lainnya	3,24	8,42	11,01	11,19	-6,18
Produk Domestik Regional Bruto		**6,01**	**6,48**	**7,11**	**7,41**	**0,87**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berfluktuatif namun cenderung meningkat. Dan karena pandemic covid maka di tahun 2020 beberapa sektor mengalami kontraksi diantaranya sektor industry pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan komodasi dan makan minum, sektor jasa lainnya. Sementara itu perbandingan PDRB atas Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel 2.29

Perbandingan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) dan Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018 – 2020 (milliar RP)

No	Kabupaten/ Kota	ADHB			ADHK		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	6.614,19	7.271,22	7.432,30	4.466,54	4.797,43	4.839,12
2	Kota Pare-pare	6.602,36	7.230,40	7.323,65	4.639,40	4.947,79	4.944,03
3	Kab. Soppeng	10.005,94	10.937,39	11.382,12	6.494,39	6.993,51	7.146,65
4	Kab.Sidrap	12.937,37	13.893,72	14.073,43	8.075,03	8.450,69	8.401,06
5	Kab. Pangkep	23.944,89	25.990,11	25.662,55	16.168,91	17.205,16	16.915,23
6	Kab. Bone	33.120,53	36.034,84	36.560,64	20.660,07	22.108,04	22.053,74

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Triwulan I Tahun 2021

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku seperti yang diuraikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota wilayah sekitar, Kabupaten Barru memiliki PDRB baik ADHK maupun ADHB yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Grafik diatas menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru bertumbuh lebih cepat dari Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020, kondisi perekonomian Kabupaten Barru, sebelum terjadinya Pandemi Covid 19, menunjukkan trend peningkatan dari angka 6,01 pada Tahun 2016 meningkat menjadi 7,41 pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional capaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 2019 telah melampaui capaian Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif dalam kurun waktu lima tahun ini dan telah mencapai target yang ditentukan memiliki faktor keberhasilan yakni Pertumbuhan konsumsi masyarakat, Investasi yang mulai tumbuh, dan intensifnya perbaikan serta pembangunan infrastruktur. Selain itu kondusifnya kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan atmosfer segar bagi perolehan PDRB Kabupaten Barru di tahun 2019 yang lebih baik.

Pada Tahun 2020 karena adanya pandemic covid 19 mempengaruhi semua sektor, yang kemudian berimbas dengan terjadinya kontraksi perekonomian. Capaian 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi bertumbuh negatif diangka -2,07 untuk nasional, sementara Provinsi berada pada angka -0,70. Untuk Kabupaten Barru sendiri PE tahun 2020 berada diangka 0,87. Angka PE Kabupaten Barru masih positif meskipun tumbuh melambat dipengaruhi oleh sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang menyumbang share terbesar tetap berproduksi dengan pencapaian yang maksimal.

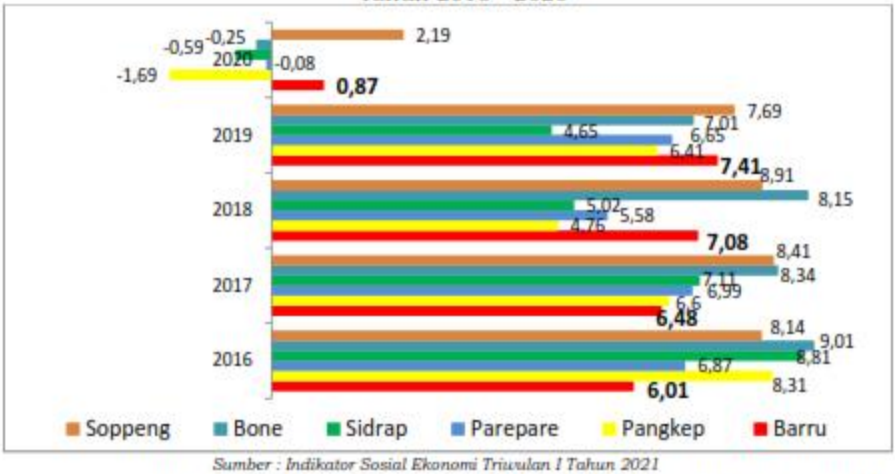
Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang berbatasan langsung yakni Kab. Pangkep, Kab. Soppeng, Kab. Sidrap, Kab.Bone dan Kota Parepare, Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2016 lebih rendah, pada tahun 2019 berada pada posisi dua setelah Kabupaten Soppeng. Dan jika dicermati, diantara enam Kabupaten Kota ini, Laju PE Kabupaten Barru dari tahun 2016 – 2020 secara signifikan mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif.

Sementara untuk Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Berdasarkan data pada gambar 2.12 tercermin gambaran terkait kondisi perekonomian Kabupaten Barru, dalam lima tahun terakhir terjadi fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional capaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 2019 telah melampaui capaian Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar (Kab. Pangkep, Soppeng, Bone, Sidrap dan Kota Parepare), Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2016 lebih rendah, pada tahun 2019 berada pada posisi dua setelah Kabupaten Pangkep. Laju PE Kabupaten Barru dari tahun 2016 - 2020 secara signifikan mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif. Dan pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru tetap bertumbuh positif meskipun terjadi Pandemi Covid, jika dbandingkan dengan daerah tetangga yakni Kabuaten Pangkep, Sidrap, Bone dan kota Parepare yang bertumbuh negative, hanya Kabupaten Barru dan Soppeng yang bertumbuh positif, seperti yang terlihat di grafik di bawah ini.

Grafik 2.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2016 - 2020



Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Triwulan I Tahun 2021

Produk domesktik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Struktur perekonomian Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru Tahun 2016 - Tahun 2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,16	36,27	35,27	33,82	34,24
2	Pertambangan dan Penggalian	3,30	3,23	3,12	3,01	3,05
3	Industri Pengolahan	5,04	5,01	4,84	4,89	4,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11
6	Konstruksi	16,99	17,48	18,47	19,41	19,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,58	8,93	9,16	9,44	9,32
8	Transportasi dan Pergudangan	2,54	2,55	2,62	2,72	2,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,94	0,95	0,96	1,01	1,03
10	Informasi dan Komunikasi	4,16	4,33	4,38	4,43	4,87
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	3,09	3,09	2,99	2,91	2,94
12	Real Estate	3,49	3,55	3,42	3,21	3,26
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,89	7,85	8,07	8,42	8,34
15	Jasa Pendidikan	3,72	3,67	3,57	3,55	3,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,24	2,20	2,23	2,45
17	Jasa Lainnya	0,68	0,70	0,72	0,75	0,07
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

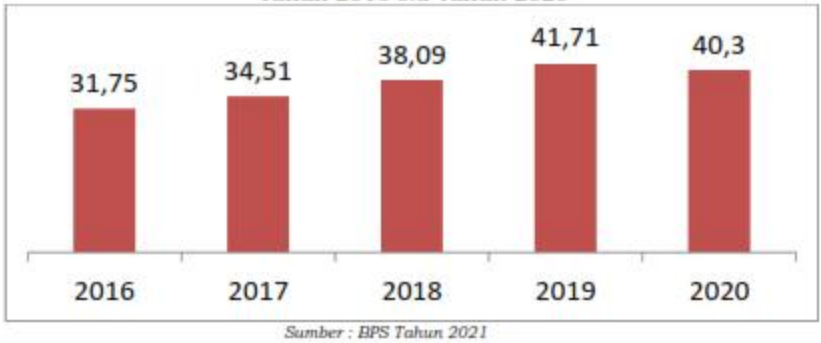
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

2.2.1.2 PDRB Per kapita

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (HB) terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) mengalami peningkatan dari Rp. 31.807.380 pada tahun 2016 menjadi Rp. 42.470.000 pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru semakin meningkat.

Grafik 2.3
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru
Tahun 2016 s.d Tahun 2020



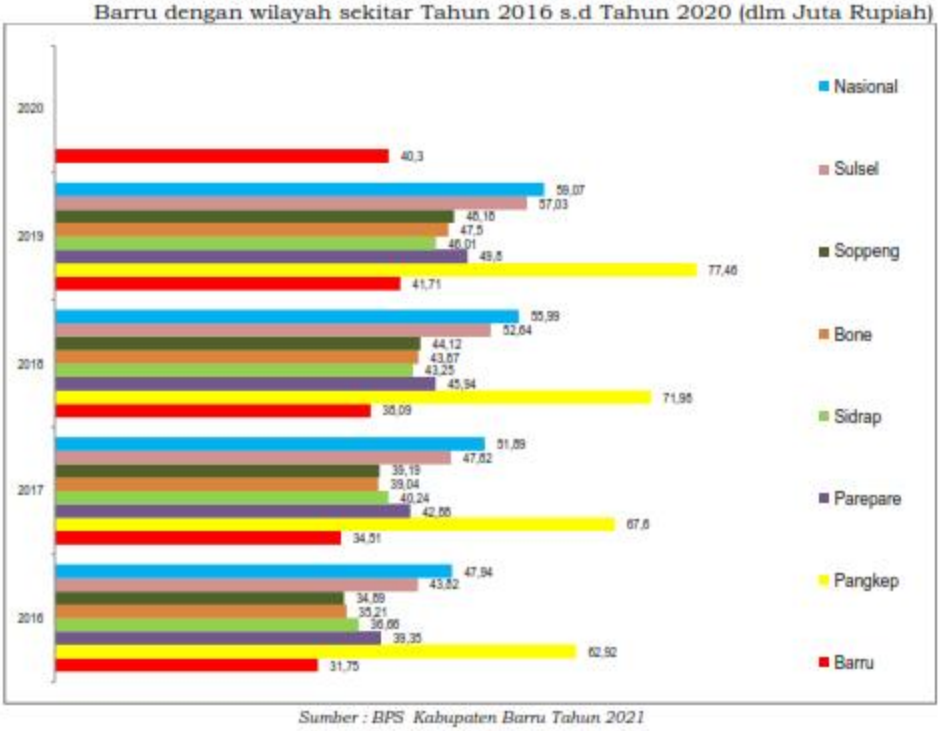
Sumber : BPS Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar (Kab. Pangkep, Soppeng, Pinrang, Sidrap dan Kota Parepare), Kabupaten Barru merupakan yang paling rendah PDRB Perkapitanya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 2.4 berikut ini.

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah sekitar, meskipun tiap tahunnya PDRB Perkapita terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, dimana peningkatan tersebut menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru semakin meningkat, namun Kabupaten Barru tetap berada di posisi paling bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada wilayah sekitarnya.

Grafik 2.4

Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2016 s.d Tahun 2020 (dlm Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2021

2.2.1.3 Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli masyarakat.

Data laju inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 31
Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016 - 2020

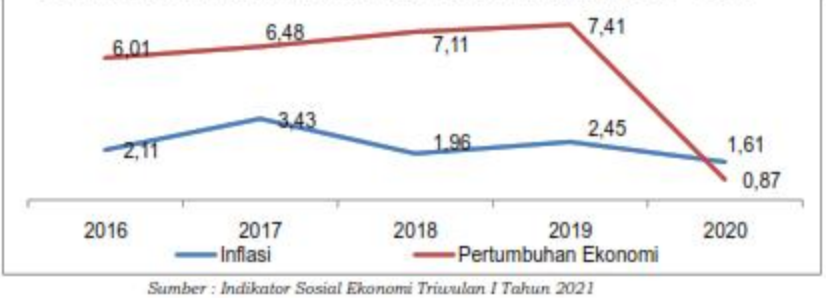
No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bulukumba	1,48	4,66	3,85	2,25	2,30
2	Kab. Bone	1,5	5,54	4,69	1,64	1,89
3	Kota Makassar	3,18	2,11	3,48	2,43	2,13
4	Kota Pare-pare	2,11	3,43	1,96	2,45	1,61
5	Kota Palopo	2,74	3,95	4,19	1,91	1,21

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 dihampir seluruh kota di Sulawesi Selatan. Tertinggi terjadi di Kabupaten Bone dan Bulukumba. Namun pada tahun 2020 rata – rata inflasi berada pada kisaran 2,30 – 1,20.

Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Barru dengan inflasi 1.58 – 2.45 masih dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi antara 6.01 – 7.14 pada rentang tahun 2016 - 2019. Dengan inflasi senilai tersebut masih dapat mendorong sektor rill untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan dengan baik. Namun pada tahun 2020 karena dampak COvid 19 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 0,87 persen dan inflasi juga turun di tahun 2020 menjadi 1,61 persen. Secara rinci hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 2.5
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2016 - 2020



Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Triwulan I Tahun 2021

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator MakroEkonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

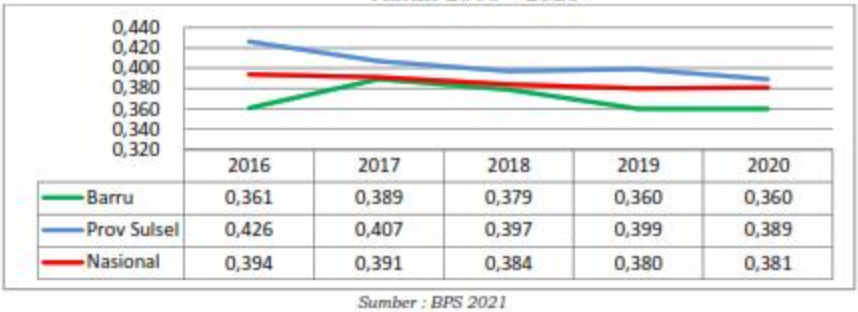
1. GR<0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
2. 0.4<GR<0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

3. GR >0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6

Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru
Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	0,361	0,389	0,379	0,360	0,360
Prov Sulsel	0,426	0,407	0,397	0,399	0,389
Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,381

Sumber : BPS 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2017 meningkat sebesar 0.389, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 0.360. Penurunan Indeks Gini menunjukkan semakin meratanya pendapatan masyarakat yang berarti semakin inklusif nya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.

Tabel 2.32

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar
Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	0,389	0,389	0,379	0,360	0,360
2	Kota Pare-pare	0,384	0,384	0,382	0,350	0,350
3	Kab. Soppeng	0,359	0,359	0,359	0,392	0,392
4	Kab.Sidrap	0,352	0,325	0,340	0,284	0,284
5	Kab. Pangkep	0,368	0,368	0,321	0,328	0,328
6	Kab. Bone	0,392	0,391	0,386	0,386	0,386

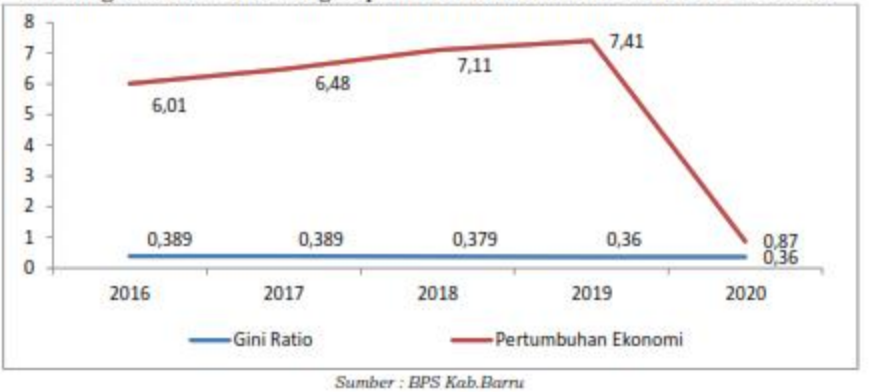
Sumber : BPS (Indikator Makro Sosek Prov. Sulsel Tahun 2021)

Berdasarkan Data yang disajikan diatas, Kabupaten Barru memiliki pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhannya cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten wilayah sekitar dengan Indeks Gini yang setiap tahunnya menunjukkan trend yang semakin menurun. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2016 – 2020 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsen pemerintah Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar.

Pada grafik berikut menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks gini, dimana pada grafik 2.7 memperlihatkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 – 2017 tidak terlalu mempengaruhi penurunan Indeks Gini, meskipun pada tahun 2018 – 2019 dengan meningkatnya Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi menurunnya indeks gini Kabupaten Barru, ini berarti bahwa semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru.

Grafik 2.7

Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kab.Barru

2.2.1.5 Indeks Williamson

Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan (Rustiadi *et al.* 2011). Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antara wilayah secara horizontal. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika Yi = Y maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten.

Menurut Rustiadi *et al.* (2011), wilayah yang memiliki PDRB per kapita tinggi, dan jumlah penduduknya relatif kecil, tingkat kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Namun, besaran PDRB per kapita suatu wilayah relatif moderat apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang kecil dengan jumlah penduduknya relatif besar, sehingga akan menyebabkan kesenjangan secara keseluruhan. Adapun indeks Williamson Kabupaten Barru seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33
Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Ketimpangan Williamson	0.25	0.24	0.27	0.29	0.29

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat tingkat disparitas yang terjadi di Kabupaten Barru berdasarkan PDRB Perkapita per Kecamatan. Dapat dilihat bahwa tingkat disparitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Barru pada tahun 2016 sebesar 0,25 meningkat pada tahun 2020 yang nilainya 0,29. Meskipun nilai indeks menunjukkan tingkat disparitas wilayah yang rendah yang berarti bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi wilayah dapat menekan terjadinya disparitas wilayah, namun kecendrungan terjadinya peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa jika tidak diantisipasi di masa mendatang akan rentan terjadi disparitas wilayah.

2.2.1.6 Tingkat kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Tingkat Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk

miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.34

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)
1	2016	16.245	178.168	9,45	90,55
2	2017	16.760	174.871	9,71	90,29
3	2018	15.680	173.451	9,04	90,96
4	2019	14.920	182.373	8,57	91,43
5	2020	15.479	187.392	8,26	91,74

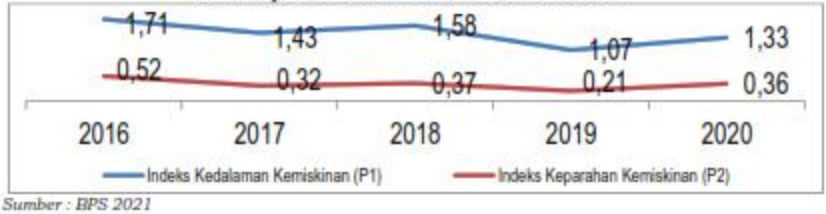
Sumber : BPS 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten Barru menurun, keberhasilan pembangunan di kabupaten Barru berkontribusi menyebabkan trend pertumbuhan penduduk miskin semakin menurun. Selain itu fokus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung maupun program-program prioritas pembangunan lainnya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru.

Disisi lain kondisi kemiskinan dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kinerja yang menurun. Adapun indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.8

indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan
di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020



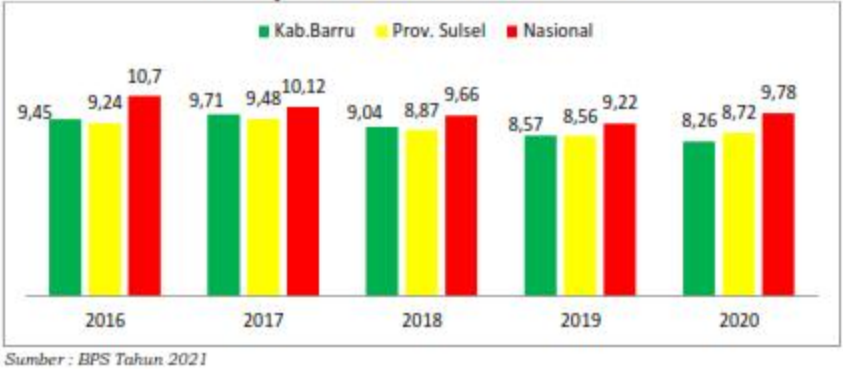
Sumber : BPS 2021

Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas terlihat bahwa angka P1 dan P2 Kabupaten Barru berfluktuatif, namun pada Tahun 2020 mengalami peningkatan kembali. Peningkatan indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan ini dipengaruhi oleh Pandemic Covid 19.

Adapun perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Prov.Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

Grafik 2.9

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Barru selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional, sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2020 berhasil berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35

Perbandingan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2018 - 2020

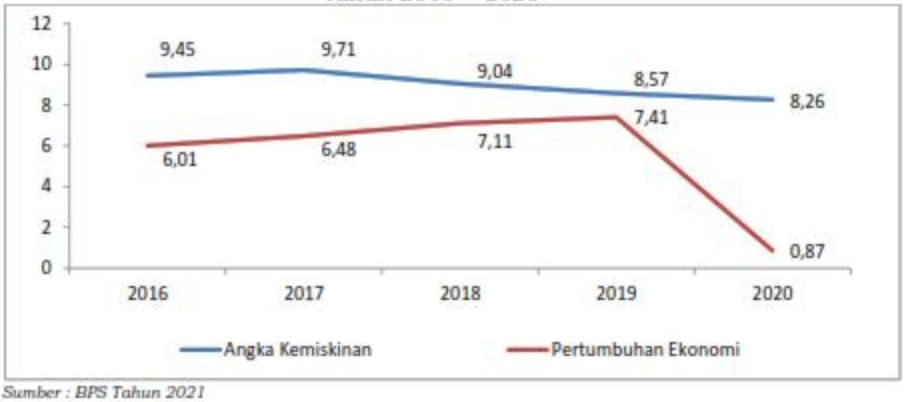
No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Tingkat Kemiskinan	P1	P2	Tingkat Kemiskinan	P1	P2	Tingkat Kemiskinan	P1	P2
1	Kab. Barru	9,04	1,58	0,37	8,57	1,07	0,21	8,26	1,33	0,36
2	Kota Pare-pare	5,59	0,75	0,17	5,26	0,71	0,15	5,44	0,71	0,15
3	Kab. Soppeng	7,50	1,39	0,37	7,25	0,69	0,12	7,59	0,69	0,12
4	Kab.Sidrap	5,16	0,94	0,23	4,79	0,60	0,13	5,05	0,60	0,13
5	Kab. Pangkep	15,10	3,12	0,92	14,06	1,81	0,31	13,96	1,81	0,31
6	Kab. Bone	10,55		0,38	10,06		0,34	10,68		0,34

Sumber : BPS 2021

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan presentase penduduk miskin Kabupaten Barru.

Grafik 2.10

Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi
Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat korelasi sangat erat antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 - 2019. Pada periode tersebut, terlihat bahwa dengan meningkatnya Pertumbunan ekonomi hal ini sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Meskipun pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga di titik 0,87, namun tingkat kemiskinan justru menurun di angka 8,26. Peningkatan kesejahteraan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

2.2.1.7 Persentase PAD terhadap pendapatan

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi PAD pada pendapatan daerah. Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru
Tahun 2018-2020

No	Tahun	PAD	Total Pendapatan	Persentase
1	2018	104,627,706,924.57	963,311,132,483.57	10,86
2	2019	103,870,138,497.26	919,299,816,845.33	11,30
3	2020	113.328.226.000,00	983.189.885.495,00	11,53

Sumber : BPKAD Kab Barru Tahun 2021

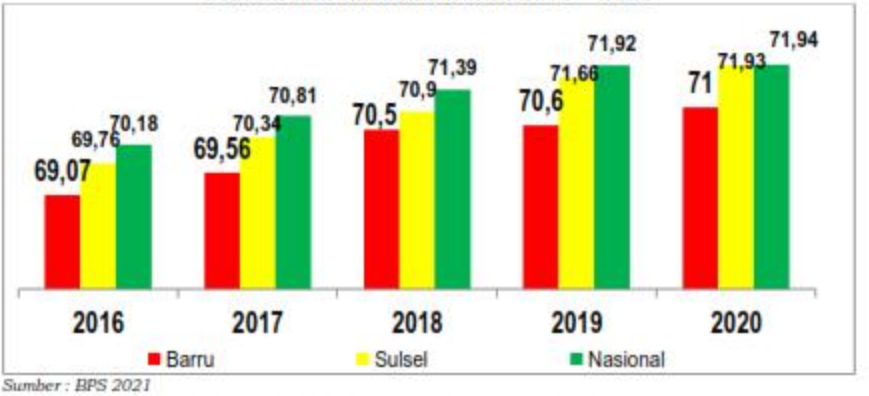
Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari : (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun rata- rata kontribusi untuk masing-masing komponen adalah untuk pajak daerah sebesar 16,56%, retribusi daerah sebesar 7,8%, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8,65% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 66,8%.

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Adapun IPM Kab. Barru Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020



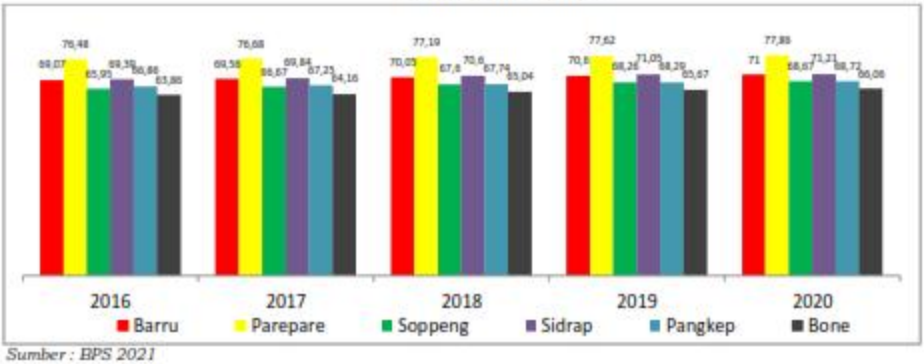
Sumber : BPS 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa IPM Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 menunjukkan trend positif, meningkat tiap tahunnya. Namun ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih berada di

bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti yang tersaji pada gambar di bawah ini :

Sementara itu, untuk perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar yang terdiri dari Kabupaten Pangkep, Bone, Soppeng, Sidrap dan Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.12
Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar
Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Kabupaten Barru untuk IPM berada pada posisi ketiga setelah Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, dan diatas Kabupaten Bone, Soppeng dan Kabupaten Pangkep. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri Kabupaten Barru berada pada posisi 8 diantara 24 Kabupaten Kota.

Untuk indikator pembangun IPM sendiri pada Tahun 2015 metode perhitungan IPM telah dilakukan revisi/ perbaikan dengan menyesuaikan metode yang dilakukan *United Nation Development Programme* (UNDP). Adapun indikatornya adalah :

a. Indeks Kesehatan

   Diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

b. Indeks Pendidikan

   Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah dimana angka harapan lama sekolah mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun)

yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata lama bersekolah merupakan angka yang menggambarkan tingkat capaian penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interprestasinya bahwa semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.

c. Paritas Daya Beli

Dikenal dengan *Purchasing Power Parity* (PPP); adalah PDRB riil per kapita yang telah disesuaikan dengan menggunakan PDRB riil per kapita, berarti mengasumsikan bahwa hasil pendapatan bruto daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk.

Perkembangan IPM berdasarkan indikator pendukungnya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37

Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kab.Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup	68.16	68.30	68.60	68,91	69,02
2	Harapan Lama Sekolah	13.54	13.55	13.56	13,57	13,58
3	Rata-rata Lama Sekolah	7.60	7.85	7.86	7,96	8,23
4	Paritas Daya Beli (Rp.000.000)	10.15	10.28	10.62	10,91	10,92
	IPM	68.64	69.07	69.56	69.56	71

Sumber : BPS 2021

Beberapa statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru.

2.2.2.2 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan digambarkan melalui angka harapan hidup yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Adapun capaian indeks kesehatan Kabupaten Barru tahun 2016 – 2020 terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38

Indeks Kesehatan Kab.Barru Tahun 2016 - 2020

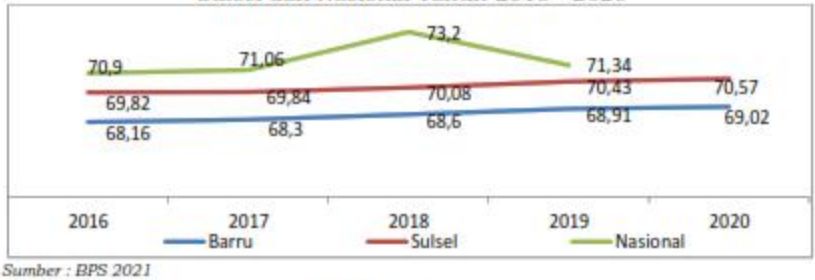
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kesehatan	74,09%	74,31%	74,77%	75,25%	75,42%

Sumber : BPS 2021

Sementara Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru jika dibandingkan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar tersaji secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.13

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS 2021

Tabel 2.39

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	68.16	68.3	68.6	68.91	69,02
2	Kota Pare-pare	70,64	70,69	70,88	71,18	71,27
3	Kab. Soppeng	68,62	68,72	69,02	69,43	69,65
4	Kab.Sidrap	68,69	68,82	69,15	69,59	69,83
5	Kab. Pangkep	65,77	65,86	66,12	66,49	66,66
6	Kab. Bone	66,12	66,22	66,50	66,88	67,07

Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan statistik di atas teriihat bahwa meskipun dengan pergerakan lambat, AHH Kabupaten Barru selalu meningkat sejak tahun 2016. Namun jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian provinsi sulsel dan wilayah sekitar, AHH Kabupaten Barru berada di posisi terbawah, dengan menyisakan Kabupaten Pangkep yang lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Barru. Pemerintah Kabupaten Barru perlu memperhatikan pembangunan di bidang kesehatan sebagai investasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Masyarakat yang terbiasa berlaku hidup bersih dan sehat, berpeluang lebih produktif dan menghemat pengeluaran biaya berobat sehingga menyumbangkan peluang hidup sejahtera lebih besar.

2.2.2.3 Indeks Pendidikan

Indikator pembangun IPM Berikutnya adalah Indeks Pendidikan yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Untuk angka Harapan Lama sekolah Tahun 2016 – 2020 jika disandingkan antara capaian HLS Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitar disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.14

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Tabel 2.40

Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	13.54	13,55	13,56	13.57	13,58
2	Kota Pare-pare	14,45	14,46	14,47	14,49	14,50
3	Kab. Soppeng	12,20	12,33	12,57	12,73	12,90
4	Kab.Sidrap	12,89	12,90	12,91	12,93	12,95
5	Kab. Pangkep	12,39	12,40	12,41	12,51	12,76
6	Kab. Bone	12,42	12,43	12,67	12,80	12,88

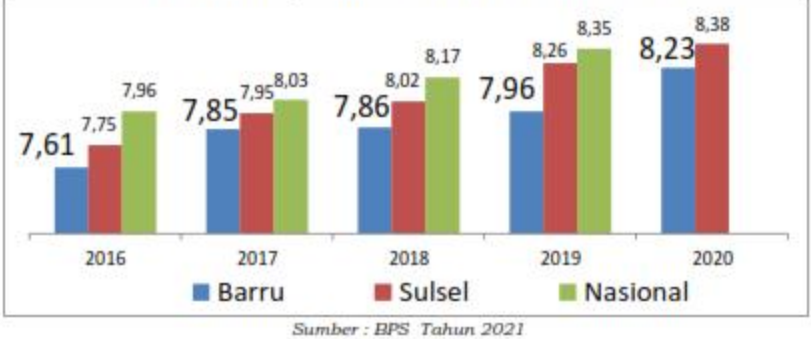
Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan data statistik di atas terlihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan begitupun dengan Wilayah Sekitar. Capaian Kabupaten Barru hanya menempatkan Kota Parepare berada diatas dibanding kabupaten/kota pada wilayah sekitar lainnya.

Selanjutnya masih dari Dimensi Pendidikan, Indikator pembangun IPM Lainnya adalah angka Rata-rata lama sekolah (RLS). Perbandingan antara capaian nasional, provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.15

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Tahun 2021

Tabel 2.41

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	7,61	7,85	7,86	7,96	8,23
2	Kota Pare-pare	10,02	10,09	10,29	10,30	10,45
3	Kab. Soppeng	7,06	7,42	7,63	7,74	7,81
4	Kab.Sidrap	7,33	7,52	7,79	7,83	7,84
5	Kab. Pangkep	7,33	7,48	7,49	7,60	7,66
6	Kab. Bone	6,76	6,77	6,97	6,98	7,15

Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Barru berbeda dengan capaian Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk sektor pendidikan lainnya yang merupakan pendukung IPM, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional, sementara berfluktuatif jika dibandingkan capaian Prov. Sulawesi Selatan, dan berada pada posisi kedua setelah Kota Parepare jika dibandingkan dengan wilayah sekitar.

2.2.2.4 Paritas Daya Beli

Indikator standart hidup layak pada komponen IPM diproksi berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi dan pemerataannya. Capaian Paritas Daya Beli Kabupaten Barru Tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian nasional, provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.16

Perbandingan Paritas Daya Beli Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 – 2020 (dlm Juta Rupiah)



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	10,15	10,28	10,62	10,91	10,92
Sulsel	10,28	10,49	10,81	11,12	11,08
Nasional	10,42	10,66	11,06	11,31	

Sumber : BPS Tahun 2021

Tabel 2.42

Perbandingan Paritas Daya Beli Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	10,15	10,28	10,62	10,91	10,92
2	Kota Pare-pare	12,9	13,08	13,30	13,64	13,66
3	Kab. Soppeng	8,95	9,06	9,30	9,44	9,48
4	Kab.Sidrap	11,09	11,52	11,83	12,04	12,07
5	Kab. Pangkep	10,52	10,83	11,20	11,39	11,41
6	Kab. Bone	7,86	8,01	8,32	8,95	8,96

Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa Paritas Daya Beli Kabupaten Barru telah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya namun tetap perlu mendapat perhatian, dikarenakan jika dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi masih rendah, juga dengan wilayah sekitar.

2.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tingkat pengengguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tiak terserap di dunia kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

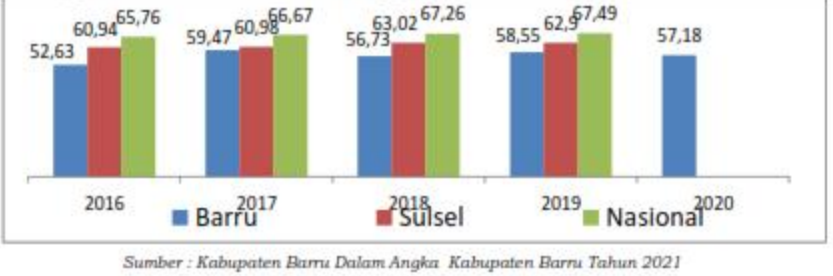
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	52,63	59,47	56,73	58,55	57,18
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,68	5,60	5,38	5,79	6,39

Sumber : BPS Povinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Sepanjang tahun 2016 – 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami fluktuatif, namun diakhir periode tetap meningkat dari 52,62% pada tahun 2016 meningkat hanya 58,55% pada tahun 2019. Sementara kondisi ketenagakerjaan akan lebih tergambarkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT di Kabupaten Barru terlihat berfluktuasi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,68% dan mencapai pengangguran terendah pada tahun 2018 yaitu hanya 5,38%, untuk kemudian meningkat lagi di tahun 2020 sebesar 6,39.

Grafik 2.17

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Tabel 2.44

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2015 - 2020

No	Kabupaten/ Kota	2015	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	52,63	59,47	56,73	58,55	57,18
2	Kota Pare-pare	60,25	66,65	64,09	63,27	65,53
3	Kab. Soppeng	56,29	60,84	63,64	57,47	57,5
4	Kab.Sidrap	53,27	49,17	56,22	55,30	56,92
5	Kab. Pangkep	59,25	59,36	63,50	61,22	63,85
6	Kab. Bone	63,30	63,94	57,30	59,84	60,57

Sumber : BPS Tahun 2021

TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Dari gambar diatas sejak tahun 2015 - 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barru selalu di atas 50%, dengan TPAK tertinggi yaitu mencapai 59,47% pada Tahun 2019.

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Grafik 2.18

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Barru	7,68	5,6	5,38	5,79	6,39
Sulsel	5,95	5,61	5,34	4,97	6,31
Nasional	6,18	5,5	5,34	5,28	

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Tabel 2.45

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten/ Kota	2015	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Barru	7,68	5,60	5,38	5,79	6,39
2	Kota Pare-pare	8,48	6,47	6,81	6,42	7,14
3	Kab. Soppeng	2,96	2,71	2,66	3,53	4,42
4	Kab.Sidrap	6,97	3,17	4,70	4,75	5,91
5	Kab. Pangkep	7,01	7,05	6,91	5,41	5,18
6	Kab. Bone	4,36	5,50	2,82	3,25	3,20

Sumber : BPS Tahun 2021

Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa baik TAPK maupun TPT, capaian yang diperoleh Kabupaten Barru menunjukkan kinerja yang rendah.

Arthur Okun menemukan bahwa tingkat pengangguran menurun pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tinggi, sedangkan tingkat pengangguran meningkat pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negative. Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Untuk Kabupaten Barru hubungan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.19

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 - 2020



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Kabupaten Barru Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas hubungan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 - 2020 menunjukkan hubungan negative. Hal tersebut ditunjukkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 0,16 persen mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2,08 persen. Begitupun pada tahun 2018 kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,73 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,22. Walaupun pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan namun semakin kecil bila dibandingkan dengan tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang awalnya meningkatkan produksinya melalui penambahan tenaga kerja beralih pada peningkatan penggunaan teknologi.

Fokus perusahaan yang beralih dari padat karya menjadi padat modal semakin bertambah pada tahun 2019 hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,30 persen tidak mampu menciptakan lapangan kerja sehingga terjadi peningkatan pengguran terbuka.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah undang-undang nomor 35 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2019, mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2016 – 2020 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	95,51	95,44	95,42	95,52
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	63,54	69,24	63,31	63,96

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPA Kab. Barru Tahun 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwasanya angka untuk IPG dalam periode tahun 2016 – 2020 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun mengalami penurunan.

Selain itu pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki

kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting focusing terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

2.2.2.7 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020 – 2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Barru telah berjalan sesuai dengan amanat Pepres 81 Tahun 2020. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public secara prima. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2020 adalah 46,34 dengan kategori C. Uraian komponen penilaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.47

Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kab.Barru Tahun 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	5,87
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,43
	III. Reform	30,00	8,25
	Total Komponen Pengungkit	**60,00**	**19,55**
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,78
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,70
3	Pemerintahyang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,15
4	Kinerja Organisasi	10,00	2,16
	Total Komponen Pengungkit	**60,00**	**19,55**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**46,34**

2.2.2.8 Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barru. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru memperoleh nilai 55,52 atau predikat CC. hasil evaluasi tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jka dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Barru belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian hasil evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut.

Tabel 2.48

Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019 - 2020

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
A	Komponen Pengungkit	30	20,79	21,04
B	Komponen Hasil	25	10,59	11,04
C	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	15	9,22	9,28
D	Kualitas Pelayanan Publik	10	3,46	4,18
E	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	20	9,97	9,98
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**54,03**	**55,52**
Tingkat Akuntabilitas Kerja			**CC**	**CC**

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49

Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	73,91%	78,28%	79,21%	80,25%	85,05 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat angka partisipasi PAUD di Kabupaten Barru, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah anak usia 3 – 6 tahun yang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dari tahun 2019 ke tahun 2020, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan minat orang tua untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Angka partisipasi kasar (APK) yang meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs di Kabupaten Barru tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	105,92%	112,87%	99,32%	100,49%	100,67%
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	106,03%	113,81%	103,23%	107,82%	112,09%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Barru pada jenjang SD Sederajat, dan jenjang SMP Sederajat tahun 2016 - 2019, yang berfluktuatif. APK tertinggi pada jenjang SD Sederajat yaitu 112,87% pada tahun 2017, kemudian jenjang SMP Sederajat sebesar 113,81% pada tahun 2017. Penyebab APK SD Sederajat maupun SMP Sederajat mencapai lebih dari 100%, hal ini disebabkan karena terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun dan anak berusia lebih dari 15 tahun yang sekolah di jenjang SD/SMP Sederajat.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka partisipasi murni yang meliputi angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs d di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,46%	93,67%	92,14%	94,71%	93.99%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,59%	86,58%	85,61%	90,42%	90.50%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas selama kurun waktu 5 (lima) tahun APM SD Sederajat dan APM SMP Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun berfluktiatif. Baik APM SD Sederajat maupun APM SMP Sederajat belum mencapai angka ideal karena terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak usia sekolah yang sekolah tidak pada jenjang kelompok usianya.

D. Angka partisipasi sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dan dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	89,46%	93,67%	92,13%	100,40%	97,69%
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	88,59%	86,58%	85,61%	107,38%	93,41%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 100 anak usia 07 - 12 tahun yang sekolah pada SD/MI/Paket A menunjukkan angka yang berfluktuatif, di tahun 2019 mencapai angka 100,40% namun menurun drastis pada tahun 2020 sebesar 94%. Sementara pada tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2019 mencapai 107,38% dan menurun pada tahun 2020 sebesar 90%. Kinerja yang diperlihatkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk bersekolah telah lebih baik tiap tahunnya, namun menurun pada tahun 2020 disebabkan oleh Pandemi Covid 19.

E. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi

atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kab.Barru Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,12%	0,38%	0,18%	0,38%	0,44%
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,41%	0,59%	0,35%	1,08%	1,19%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel di atas, angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs fluktuatif namun cenderung meningkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya APtS SD/MI dan SMP/MTs antara lain yaitu siswa yang motivasi belajarnya rendah, tingkat ekonomi keluarga, dan karena alasan sosial budaya lainnya.

F. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Semakin baik proses belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	98,81%	100%
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	97,11%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AL SD/MI dan AL SMP/MTs tahun 2016 – 2018 menunjukkan pencapaian hingga 100%, namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan hanya diangka 97 – 98%. Hal ini disebabkan karena kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Oleh karena itu nampaknya aspek mutu lulusan kurang mendapatkan perhatian.

G. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Namun di Kabupaten Barru pada

tahun 2017 dan 2018, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs melebihi 100% disebabkan karena jumlah siswa/siswi yang masuk sekolah SMP/MTs lebih besar dari jumlah siswa/siswi yang lulus SD/MI yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs di Kab.Barru 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,52%	101,73 %	105,81%	114,23 %	122,23%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel di atas, selama tahun 2016 - 2020 AM SD/MI ke SMP/MTs selalu menunjukkan peningkatan.

H. Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen. Sekolah mempunyai jumlah ruang kelas yang berbeda-beda dan kondisi ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Sekolah yang mempunyai ruang kelas dengan kondisi baik baik dan rusak ringan dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56

Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	**SD/MI**					
1	Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	206	215	199	202	202
2	Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI	225	225	225	226	226
3	**Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)**	**91.56**	**95.56**	**88.44**	**89**	**89**
B	**SMP / MTs**					
1	Jumlah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	50	51	26	29	29
2	Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs	52	52	52	53	53
3	**Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)**	**96,15**	**98,07**	**50**	**55**	**55**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Selama kurun waktu 2016 – 2020 Persentase Sekolah pendidikan dengan kondisi baik mengalami penurunan, baik bangunan SD/MI maupun SMP/MTs. Terutama pada tahun 2018 yang mengalami penurunan sangat signifikan terutama kondisi sekolah bangunan SMP//Mts, ini disebabkan karena pada tahun 2018 dilakukan perbaikan

database kondisi sekolah dalam bangunan baik yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di aplikasi dapodik, pada tahun 2018 ditemui hasilnya bahwasanya sebagian besar sekolah mengalami kerusakan pada bangunan sekolah.

I. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 57

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD)	115,58	122,39	114.07	102,63	102,63
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SMP)	53,10	55,90	53.07	40,59	40,59

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

J. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.58

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SD	920,51	1.011,57	1.074,24	1.228,34	1.100,34
2	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SMP	559,56	707,60	819.67	1.109,48	1.216,47

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan kondisi pada tahun 2020 untuk rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SD adalah 1 berbanding 9, artinya setiap 9 murid sekolah terdapat 1 guru SD. Sementara untuk rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SMP adalah 1 berbanding 8, artinya setiap 8 murid sekolah terdapat 1 guru SMP.

K. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa

harus mengerti yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf
(tidak buta aksara) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,5	98,85	98.97	99,71	99,03

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

L. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai tenaga pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga harus memiliki keahlian atau kulafikasi atau kompetensi dalam menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan bahwa guru wajib memiliki latar belakang akademis strata satu (S1) atau diploma empat (D-IV). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,89%	95,15%	90.27%	88,24%	94,89%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Perkembangan jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di atas. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik berfluktuatif.

2.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator kesehatan antara lain:

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup). Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	6	6	7	31	10
2	Jumlah kelahiran hidup	2.998	3.044	3.035	3.140	3.069
3	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,00	1,97	2.31	9,87	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

AKB pada tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

Pada tahun 2020, AKB menurun secara signifikan yaitu dari 31 orang menjadi 10 orang. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penyediaan sarana peralatan disemua fasilitas pelayanan kesehatan ibu hamil, terkhusus pada layanan/lini terdepan yaitu bidan Desa, yang juga menurunkan penyakit penyerta/infeksi yang diderita oleh ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Ditambah lagi semakin meluasnya cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir.

B. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana AKHB=1-Angka Kematian Bayi. Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB di Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 62
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kab.Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,80	99,80	99.77	99,13	99,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

AKHB pada tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

Pada tahun 2020, AKHB Kabupaten Barru mengalami kenaikan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk

menurunkan angka kematian bayi dimana semakin rendah angka kematian bayi maka angka kelangsungan hidup bayi akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Beberapa upaya telah dilakukan seperti:

- Advokasi terkait distribusi tenaga khususnya wilayah yang sulit dijangkau oleh tenaga bidan;
- Advokasi terkait kelengkapan sarana prasarana yang ada difasilitas kesehatan dasar;
- Koordinasi dengan layanan farmasi terkait Penyediaan obat dalam system layanan kesehatan pada ibu dan melatih tenaga kesehatan;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan sanitasi ditingkat individu, keluarga dan masyarakat;
- Mendorong dan mengembangkan Ivovasi masing masing disarana pelayanan dasar.

C. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka kematian balita (AKBa) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63

Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 kelahiran hidup Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Balita	2	1	3	5	2
2	Jumlah kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2.998	3.044	3.035	3.140	3.069
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,67	0,33	0.99	1,59	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat AKBa mengalami perubahan yang fluktiatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Barru berhasil menurunkan AKBa dari 5 orang ke 2 orang. Hal ini disebabkan oleh jangkauan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan anak balita di Puskesmas, Poskesdes, Posyandu bahkan sampai kunjungan rumah yang dilaksanakan oleh semua bidan Desa. Selain itu juga semakin berkurangnya faktor predisposisi kematian balita yaitu komplikasi neonatal, penyakit menular, diare dan kurang gizi serta gizi buruk.

D. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh

dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan. Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64

Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	22	18	10	20	6
2	Jumlah kelahiran hidup	2.998	3.044	3.035	3.140	3.069
3	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	7,34	5,91	3.29	6,37	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2020, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru menurun secara signifikan dari 20 kematian menjadi 6 kematian. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kompetensi petugas (bidan) dalam memberikan pelayanan kesehatan pada ibu mulai dari pelayanan Ante Natal Care (ANC), ibu bersalin dan ibu nifas. Serta terlihat pada kasus Asfiksia pada bayi baru lahir, Infeksi (sepsis,Pneumonia, tetanus, diare) pada bayi baru lahir serta Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang semakin menurun/berkurang.

E. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Indikator ini menunjukkan Angka kematian ibu pada saat hamil,bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup DI Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65

Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	7	2	4	7	3
2	Jumlah kelahiran hidup	2.998	3.044	3.035	3.140	3.069
3	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	233,49	65,70	131.80	222,93	98

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Angka Kematian ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini disebabkan karena meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang kompeten pada ibu hamil baik yang ada dipelosok wilayah yang sulit maupun yang berdekatan dengan sarana pelayanan kesehatan. Dan adanya pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) pada 2 wilayah Puskesmas yaitu Puskesmas Pujananting dan Puskesmas Doi Doi untuk ibu bersalin. Selain itu, untuk ibu nifas, adanya kunjungan mulai KN1, KN2, KN3 dan KN4 (lengkap), untuk mendeteksi kelainan dan atau komplikasi yang dialami ibu selama 42 hari setelah melahirkan.

F. Rasio posyandu per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66

Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	249	262	264	265	267
2	Jumlah balita	13.718	13.597	13.344	13.084	13.343
3	Rasio posyandu per satuan balita	18,15	19,27	19.78	20,25	20.01

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Barru pada tahun 2020 adalah 267 dengan rasio 20. Rasio Posyandu terhadap jumlah balita idealnya adalah 1 : 50, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Posyandu di Kabupaten Barru termasuk memadai dalam melayani balita yang ada. Faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain adanya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan Posyandu dan ADS yang merupakan sumbangan Desa/masyarakat, termasuk wakaf.

G. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu dihitung berdasarkan jumlah puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67

Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Thn	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	2016	173.163	12	0.069	0	0	33	0.19
2	2017	174.871	12	0.069	0	0	33	0.19
3	2018	180.509	12	0.066	0	0	33	0.18
4	2019	182.373	12	0.066	0	0	33	0.18
5	2020	187.392	12	0.064	0	0	33	0.18

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Begitupun dengan

rasio jumlah pustu terhadap jumlah penduduk juga terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penambahan sementara jumlah puskesmas dan jumlah pustu tetap. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,069 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,064.

H. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk yang menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68

Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah sakit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
3	Rasio rumah sakit per 1000 penduduk	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0053

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah rumah sakit lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penambahan sementara tidak ada penambahan jumlah rumah sakit. Rasio Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,0058 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,0053.

I. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69

Rasio Dokter Persatuan penduduk Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokter	26	30	24	37	25
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0,15	0,17	0.13	0,20	0,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Rasio Dokter Persatuan penduduk belum mencapai target jika berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2016 tentang Kriterian daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, dimana pada lampirannya disebutkan rasio yang layak untuk dokter/satuan penduduk adalah 1 : 2500, sementara di Kabupaten Barru masih jauh dari layak terkait ketersediaan tenaga dokternya. Hal tersebut juga terlihat pada beberapa puskesmas yang jumlah tenaga dokternya belum mencapai standar nasional. Adapun beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melakukan perekrutan tenaga kontrak dokter daerah dan pendayagunaan dokter internship di 3 tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

J. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang diukur berdasarkan jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.70

Rasio tenaga medis per 1.000 jumlah penduduk Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga medis	48	40	57	74	57
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,28	0,23	0.32	0,41	0.30

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat rasio tenaga medis persatuan penduduk belum mencapai target karena tenaga medis yang ada di RSUD dan puskesmas jumlah tenaganya masih kurang sementara disisi lain penduduk terus bertambah. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah perekrutan tenaga kontrak daerah , kontrak BOK dan tenaga sukarela serta pendayagunaan dokter internship di 3 tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

K. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada proses persalinan sehingga untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu maternal salah satunya melalui persalinan yang sehat dan aman, yaitu persalinan yang ditolong oleh

tenaga kesehatan yang terlatih. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	451	526	480	515	775
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	688	679	688	684	775
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	65,57	77,44	69.77	75,29	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami peningkatan yang signifikan dari 515 kasus ditahun 2019 menjadi 775 kasus pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan pada semua ibu hamil terutama penanganan difokuskan pada ibu hamil yang mempunyai faktor resiko dan memiliki resiko tinggi dengan melakukan pemantauan secara berkala dan mengoptimalkan sistem rujukan terpadu.

L. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (linakes). Adapun perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Barru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3.008	3.036	3.033	3.133	3.181
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	3.228	3.173	3.279	3.264	3.246
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	98,18	95,68	92,50	95,99	98

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena meningkatnya pengetahuan, pemahaman keluarga dan masyarakat akan manfaat bila ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus (bidan), selain juga berkat adanya kemitraan bidan dan dukun dalam menggalang dan memotivasi ibu

hamil sekaligus mengantar ibu ke sarana pelayanan kesehatan jika taksiran persalinan sudah dekat.

M. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73

Cakupan Desa Keluran UCI Kab. Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	54	55	44	52	19
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	55	55	55	55	55
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98,18	100	80	94,55	35

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tahun 2020, persentase desa kelurahan UCI mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu dari 52 desa/kelurahan yang dapat dilayani ditahun 2019 turun menjadi hanya 19 desa/kelurahan, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan vaksin IPV dan MR, dan adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada pelayanan imunisasi dimana banyak posyandu yang tertutup.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah puskesmas sudah melakukan pemberian imunisasi ganda guna percepatan target, dilakukan sweeping imunisasi dan memenuhi ketersediaan vaksin.

N. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74

Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk	7	12	3	4	3
2	Jumlah seluruh balita	13.718	13.597	13.344	13.084	13.343
3	Persentase balita gizi buruk (%)	0,05	0,09	0.02	0,03	0,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk Kabupaten Barru cenderung fluktuatif, namun masih dibawah angka 1%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan

adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Tabel 2.75

Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	10,81	9,13	25,20	17,43	11,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Prevalensi *stunting* balita di Kabupaten Barru pada tahun 2018 (25,20%) berada pada angka tertinggi artinya lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya, prevalensi stunting di Kabupaten Barru mengalami penurunan dari 17,43% pada tahun 2019 menjadi 11,04% pada tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari komitmen seluruh elemen untuk berupaya menanggulangi dan mencegah terjadinya stunting di Kabupaten Barru Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

O. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus

persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu	7	12	3	4	3
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	7	12	3	4	3
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan(%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua kasus balita gizi buruk yang ditemukan dalam kurun waktu 2016 – 2020, semuanya telah mendapatkan perawatan. Dalam penanganan balita gizi buruk ada beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain :

- Layananan rawat jalan balita (6-59 bulan) dengan gizi buruk tanpa komplikasi
- Layanan rawat inap untuk semua bayi berusia kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk (dengan/tanpa komplikasi) dan balita 6-59 bulan dengan komplikasi
- Melakukan pendampingan pada balita gizi buruk fase rehabilatasi agar kejadian gizi buruk tidak terulang
- Meningkatkan kapasitas petugas dengan mengadakan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk.

P. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak usia 1 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar sebagai perlindungan terhadap penyakit campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	3.071	2.984	2.830	3.036	2.706
2	Jumlah anak usia 1 tahun	3.071	3.044	3.030	3.036	2.967
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	100	98,03	93.40	100	91

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami penurunan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mencapai target 100%, sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar 91%. Hal ini disebabkan karena adanya kekosongan vaksin IPV dan MR serta pandemi covid 19 yang berdampak pada pelayanan imunisasi karena tertutupnya posyandu. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah puskesmas sudah melakukan pemberian imunisasi ganda guna percepatan target, sweeping imunisasi dan menjaga ketersediaan vaksin.

Q. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Acute Flacid Paralys (AFP) adalah gejala kelumpuhan pada anak yang berumur di bawah 15 tahun yang terjadi secara mendadak (akut). Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan	3	2	2	1	0
2	Jumlah penduduk < 15 tahun	48.331	42.406	42.406	45.583	45.583
3	Non Polio rate per 100.000 penduduk	6,21	4,72	4.72	2,19	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Jumlah kasus AFP dari tahun ketahun mengalami penurunan, puncaknya pada tahun 2020 dimana tidak terdapat lagi kasus AFP. Hal ini disebabkan karena adanya keberhasilan dalam pencegahan AFP diantaranya dengan memberikan imunisasi polio secara rutin sesuai jadwal, menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan.

R. Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli) yang disebabkan terutama oleh bakteri dan merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang sering menyebabkan meningkatnya angka kematian balita. Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan indikator untuk mengetahui proporsi pneumonia balita di suatu wilayah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79

Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	14	19	60	77	24
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	1.297	1.360	1,360	496	74
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	1,08	1,40	4.41	12,33	3.31

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Penderita pneumonia yang ditangani mengalami penurunan karena jumlah penderita pneumonia yang datang dan dilayani di sarana kesehatan mengalami penurunan akibat Pandemi Covid 19. Kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan mengalami penurunan dikarenakan mereka enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan.

S. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC/BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA di Kabaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	156	156	222	282	202
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	356	356	222	357	388
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	43,82	43,82	100	78,99	52.06

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA belum mencapai target karena jumlah penderita TBC BTA yang ditemukan dan diobati hanya 202 penderita dari 388 perkiraan penderita. Hal ini dikarenakan terlambatnya kasus ditemukan dan secara otomatis kasus terlambat tertangani. Adanya pandemi Covid 19 juga menyebabkan pasien dengan gejala batuk enggan berobat ke fasilitas kesehatan karena takut.

T. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan merupakan salah satu penyebab kematian dengan jumlah yang tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosi (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk) Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	214	231	222	282	202
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Tingkat prevalensi Tubercolosis (per100.000 pdk)	123,58	132,09	122.990	155,45	108

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan

kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjaringan suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans), peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pemeriksaan kontak serumah penderita TB.

U. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Angka kematian dan kesakitan akibat tuber kulosis ini masih cukup tinggi dan menjadi perhatian dunia. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase atas jumlah pasien TB yang meninggal terhadap jumlah penduduk per 100.000 jiwa. Tingkat Kematian karena Tubercolosis di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien TB yang meninggal	5	0	0	6	13
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Tingkat kematian karena Tubercolosis (per100.000 peddk)	2,88	0	0	3,31	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Data tahun 2020 menunjukkan tingkat kematian Tubercolosis meningkat menjadi 7 per 100.000 penduduk (ada 13 kasus antara lain: 7 kasus meninggal komplikasi DM, 2 kasus meninggal TB_HIV dan 4 kasus meninggal sementara dalam pengobatan). Hal ini dikarenakan terlambatnya kasus ditemukan dan secara otomatis kasus terlambat tertangani serta adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan pasien dengan gejala batuk enggan berobat ke fasilitas kesehatan karena takut.

V. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dalam Program *Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien baru TB/BTA yang diperkirakan ada terhadap jumlah pasien yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	222	146	118	233	202
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	355	362	371	357	388
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam Program DOTS (%)	62,53	40,33	31.81	65,27	52.06

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjaringan suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans), peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pengiriman dan pengambilan sedimen TBC di PRM.

W. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Proporsi kasus kasus tubercolosis yang di obati dan sembuh dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien TB/BTA yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS terhadap jumlah pasien yang sembuh. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	178	146	152	83	77
2	Jumlah pasien TB paru BTA yang diobati	222	146	152	233	202
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS (%)	80,18	100	100	35,62	38.12

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2019

Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana dari 202 pasien, yang sembuh hanya sebanyak 77 pasien (38.12%). Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga terdapat penderita yang putus berobat, ada yang meninggal dan ada yang tidak dievaluasi karena masih dalam pengobatan untuk tahun berikutnya.

X. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan ini merupakan persentase atas jumlah penderita DBD yang ditemukan dengan jumlah penderita DBD yang ditangani.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua penderita DBD telah ditangani dengan baik sesuai SOP. Jumlah kasus dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Namun penyakit DBD ini merupakan salah satu penyakit yang harus diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian. Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD pada Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.85
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun	340	340	44	36	32
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	340	340	44	36	32
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Y. Penderita diare yang ditangani

Indikator ini merupakan persentase penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disuatu wilayah dalam waktu satu tahun terhadap jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama dimana 10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk. Penderita diare yang ditangani Di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	2.896	2.249	2.011	2.953	2.024
2	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	3.679	3.717	4.874	4.898	6.721
3	Penderita diare yang ditangani (%)	78,72	60,51	41.26	60,29	30.26

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan karena jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19, masyarakat enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan.

Z. Angka kejadian Malaria

Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun. Angka kejadian malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang menderita malaria	19	24	9	23	1
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Angka kejadian malaria (per 100.000 penduduk)	10,97	13.72	4.99	12,68	0.53

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Angka kejadian malaria cenderung menurun dari tahun ketahun, walaupun pada tahun 2019 meningkat secara signifikan yaitu sebanyak 23 kasus. Kasus penyakit malaria ini terjadi di Kabupaten Barru karena adanya migrasi dari luar daerah Kabupaten Barru, karena adanya mobilitas penduduk. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan upaya promotif preventif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit malaria yakni sosialisasi penyakit malaria dan Surveilance migrasi untuk kasus malaria. Selain itu perlu dilakukan penyelidikan epidemiologi penderita positif malaria serta penyediaan obat anti malaria di puskesmas.

AA. Tingkat kematian akibat malaria

Tingkat kematian akibat malaria adalah jumlah kematian tersangka malaria terhadap jumlah penduduk per 1000 jiwa. Tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88

Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian tersangka malaria	0	0	0	0	0
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Tingkat kematian akibat malaria (per 1.000 penduduk)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Tingkat kematian akibat malaria dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah 0 per 1000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa penanganan penderita malaria di Kabupaten Barru termasuk berhasil karena semua penderita malaria tidak ada yang meninggal.

BB. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida adalah persentase banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida terhadap jumlah balita keseluruhan. Namun di Kabupaten Barru belum ditemukan indikasi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida	Tdk ada data	Tdk ada data	Tdk ada data	Tdk ada data	Tdk ada data
2	Jumlah balita	12.969	13.718	13.344	13.084	13.343
3	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida tidak tersedia data, karena selama ini tidak pernah dilakukan survey terhadap balita yang menggunakan kelambu berinsektisida.

CC. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

HIV dan AIDS merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan dengan kesehatan reproduksi terutama perempuan. Persentase Prevalensi HIV/AIDS merupakan jumlah pasien HIV dan AIDS terhadap total populasi penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS	0	0	6	3	5
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	-	-	0.003	0,002	0.003

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2018 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2018 terdapat 6 kasus lalu turun sebesar 50% pada tahun 2019 dan akhirnya naik kembali di tahun 2020 sebanyak 5 kasus. Semua penderita HIV/AIDS tersebut adalah perantau dari luar Kabupaten Barru yang ditemukan saat sudah diperiksa di RSUD Barru, setelah itu ditindaklanjuti dengan cara dirujuk Ke RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

DD. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi,diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap dengan sarana kesehatan strata 1 dan jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (jumlah Penerima Bantuan Iuran/PBI lokal).

Tabel 2.91

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	10.799	20.372	18.911	83.025	7.808
2	Jumlah masyarakat penerima KIS di kabupaten	67.626	125.460	124.550	128.122	135.423
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	15,97	16,24	15,18	64,58	5.8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru dari tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya program dari

pemerintah Kabupaten Barru, yakni kartu kepesertaan penerima bantuan iuran APBD, sehingga masyarakat miskin yang sakit akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis . Disamping itu Pemerintah Kabupaten Barru terus mengupayakan mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC).

Namun pada tahun 2020, jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 mengalami penurunan yang signifikan, dimana dari 83.025 jumlah kunjungan pasien miskin, menurun menjadi 7.808 jumlah kunjungan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 sehingga masyarakat lebih memilih berada dirumah (social distancing) dan tidak berkunjung ke pelayanan kesehatan.

EE. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92

Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3.123	3.104	3.045	3.050	2.955
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	3.071	3.046	3.136	3.140	3.094
3	Cakupan Kunjungan Bayi	101,69	101,90	97.10	97,13	95.51

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Adanya wabah Covid 19, menyebabkan jumlah kunjungan menurun pada tahun 2020. Masyarakat takut dan tidak mau membawa bayi dan anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poskesdes dan posyandu. Bahkan pada saat tenaga kesehatan mengadakan kunjungan ke rumah, sebagian masyarakat tidak mau menerima untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan alasan takut tertular Covid 19.

FF. Cakupan puskesmas

Cakupan puskesmas adalah rasio antara jumlah puskesmas dibandingkan jumlah kecamatan. Untuk cakupan puskesmas dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 171,43. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jumlah puskesmas dan jumlah kecamatan. Jumlah puskesmas sebanyak 12 puskesmas sementara jumlah kecamatan sebanyak 7 kecamatan.

GG. Cakupan pembantu puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas adalah rasio antara jumlah puskesmas pembantu dibandingkan jumlah seluruh desa/kelurahan. Cakupan puskesmas pembantu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak

mengalami perubahan yaitu sebesar 60,00. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jumlah puskesmas pembantu dan jumlah desa/kelurahan. Jumlah puskesmas pembantu sebanyak 33 puskesmas pembantu sementara jumlah desa/kelurahan sebanyak 55 desa/kelurahan.

HH. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan kunjungan ke-4 ibu hamil dan mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yaitu paling minim empat kali terhadap jumlah sasaran ibu hamil. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	3.183	3.104	3.114	3.145	3.173
2	Jumlah sasaran ibu hamil	3.439	3.396	3.440	3.420	3.404
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	92,56	91,40	90.52	91,96	93.21

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Cakupan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan ibu hamil K4 sesuai standar pada tahun 2020, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun belum mencapai target 100 %, yang disebabkan karena masih ada 69 ibu hamil ditemukan dan datang memeriksakan kehamilan setelah umur kehamilan lebih dari 12 minggu, dan terdapat 162 ibu hamil yang melakukan pemeriksaan pada bulan Desember yang tidak memunkinkan K4 sampai akhir tahun 2020.

II. Cakupan pelayanan nifas

Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari.

Tabel 2.94

Cakupan pelayanan nifas Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	2.947	2.938	2.975	3.054	3.112
2	Jumlah seluruh ibu nifas	3.228	3.047	3.279	3.264	3.246
3	Cakupan pelayanan nifas (%)	91,29	96,42	90.73	93,57	95.87

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Cakupan pelayanan ibu nifas sesuai standar (kunjungan nifas 3 kali) mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibanding dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target. Dari 3.246 ibu yang melahirkan yakni hanya 3.112 ibu nifas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 3 kali dalam waktu 42 hari setelah melahirkan atau dalam presentase sebesar 95,87 %, jadi terdapat 134 ibu melahirkan (nifas) yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Hal ini disebabkan karena terdapat 98 orang ibu melahirkan pada pertengahan bulan Desember , 7 orang ibu bersalin setelah kunjungan nifas 1 kali pindah wilayah, 12 orang ibu bersalin setelah kunjungan 2 kali pulang kedaerah tempat kerja, 6 orang ibu bersalin memiliki akses yang sangat sulit, 4 orang ibu bersalin yang beresiko tinggi sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit dan 7 orang ibu bersalin berasal dari luar wilayah.

JJ. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	257	234	244	268	313
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	450	457	455	466	313
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	57,15	51,20	53.63	54,47	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani oleh tenaga terlatih (dokter, bidan, perawat) baik dirumah maupun disarana pelayanan kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan mencapai angka 100%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kemampuan dan keterampilan bidan dalam mendeteksi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang memiliki faktor resiko dan resiko tinggi yang memungkinkan terjadi komplikasi. Disamping itu juga tenaga pemberi pelayanan sudah memiliki kompetensi teknis di puskesmas dan rumah sakit seiring dengan semakin lengkapnya sarana peralatan yang dimiliki puskesmas sebagai tempat pelayanan dasar serta ditambah dengan komitmen dan penguatan pada sistem rujukan terpadu.

KK. Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase anak balita (usia 12 sampai dengan 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standard. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96

Cakupan pelayanan anak balita Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	11.114	9.233	11.229	9.774	7.750
2	Jumlah seluruh anak balita	10.673	9.927	14.085	12.242	12.788
3	Cakupan pelayanan anak balita (%)	104,13	93,01	79.72	79,84	60.60

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Pandemi Covid 19 membuat masyarakat takut dan tidak mau membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan di posyandu, poskesdes dan puskesmas. Bahkan pada saat tenaga kesehatan mengadakan kunjungan rumah, sebagian masyarakat tidak mau menerima pelayanan kesehatan dengan alasan takut tertular Covid 19. Hal inilah yang membuat jumlah anak balita yang memperoleh pemantauan menurun pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh mobilisasi orang tua yang berdomisili dan bekerja diluar daerah.

LL. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan dari keluarga miskin karena mereka memiliki keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97

Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	254	384	0	232	0
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	655	5.975	0	4.605	0
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	38,78	6,42	0	5,04	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Jumlah anak usia 6-24 bulan yang mendapat MP ASI pada tahun 2020 tidak ada. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 sehingga pengadaan MP ASI tidak dilaksanakan karena *refocusing* anggaran.

MM. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi pengukuran tinggi badan,berat badan dan seterusnya. Cakupan

penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.98

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	4.225	5.337	3.948	3.315	10.764
2	Jumlah murid SD dan setingkat	17.415	17.220	17.574	3.571	16.737
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	24.26	30,99	22.47	92,83	64

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih guru UKS dan dokter kecil melalui penjaringan kesehatan mengalami penurunan sebesar 28.83% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor terutama dengan kepala sekolah pada masa pandemi Covid 19, selain itu pelaksanaan proses belajar mengajar dilaksanakan secara *online* sehingga untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada siswa sangat sulit untuk dilakukan.

NN. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik tanpa rawat inap terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (Penerima Bantuan Iuran/PBI Lokal). Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab.Barru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	10.799	20.372	18.911	83.025	7.808
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	67.626	125.460	124.550	128.122	135.423
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	15,97	16,24	15,18	64,58	5.8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Adanya program dari pemerintah Kabupaten Barru, yakni kartu kepesertaan penerima bantuan iuran APBD, dimana masyarakat miskin yang sakit akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, merupakan salah satu faktor meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Disamping itu pemerintah Kabupaten Barru terus mengupayakan pencapaian cakupan kesehatan semesta atau *Universal health Coverage* (UHC) .

Namun dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020, menyebabkan persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin turun secara signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih berada dirumah (*social distancing*) dan tidak berkunjung ke pelayanan kesehatan.

OO. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Indikator ini memberikan acuan pelayanan keperawatan dan penanganan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah gawat darurat level 1	1	1	1	1	1
2	Jumlah RS	1	1	1	1	1
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 telah mencapai 100%.

PP. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam	2	4	8	2	233
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi	2	4	8	2	233
3	Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2021

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dari tahun 2016 sampai tahun 2020 telah mencapai 100%. Semua kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) telah dilakukan penyelidikan epidemiologi. Meskipun jumlah kasus KLB dari tahun ke tahun kasusnya meningkat namun penanganan dan penanggulangan kasus 100% tertangani.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Proporsi panjang jaringan jalan merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan. Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kreteria teknis. Panjang jaringan jalan terbagi dalam empat kondisi yaitu kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondidi rusak berat. Kondisi pajang jaringan jalan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102

Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kab.Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik	379,15	414,406	415,461	438,13	445,05
2	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan	65,176	53,186	59,331	58,13	57,559
3	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Sedang	49,4	73,338	77,483	52,76	54,47
4	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Berat	189,63	142,429	131,080	134,3	126,28
5	Jalan secara keseluruhan (kabupaten)	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,55	0,606	0,608	0,641	0,651

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dari panjang jalan keseluruhan.

B. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (km)	428,55	467,52	415.461	490,89	502,61
2	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	62,71	68,41	60.80	71,72	73,550

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) yang diasumsikan sebagai jalan dalam kondisi mantap berdasarkan Permen PU No. 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan, dari tahun 2016 ke 2020 cenderung meningkat meskipun di tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kerusakan jalan akibat umur ekonomis sesuai jenis jalan. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan.

C. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab.Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	41.342	41.342	46.293	34.286	34.286
2.	Jumlah rumah tinggal	43.723	43.723	48.328	46.252	46.252
3.	Persentase	94,55	94,55	95.79	95,79	95,79

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas terlihat jumlah rumah yang berakses sanitasi meningkat setiap tahunnya dengan penjelasan data bahwa jumlah rumah dipersamakan dengan jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga.

D. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakankomponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.105

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	0	15,24	0	2,5	2,5
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	643.954	643.954	643.954	643.954	643.954
3	Persen	-	2,39	-	3,88	3,88

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan Persentase panjang drainase yang tersumbat pembuangan aliran airnya dengan total seluruh panjang drainase Kab. Barru cenderung stagnan, hanya pada tahun 2020 teridentifikasi drainase yang mengalami penyumbatan sehingga terjadi penurunan persentase, hal ini terjadi dikarenakan masih adanya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke saluran drainase serta adanya tumpukan sedimen yang seharusnya diselesaikan secara gotong royong, namun harus menunggu lagi dari pemerintah, sehingga drainase yang baik dapat berkurang kualitasnya dan mengalami kerusakan dan penyumbatan.

E. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	4556	4556	4890	3325	3488
2	Luas Irigasi kabupaten	9792	9792	9792	6919	6919
3	Persentase	46,53	46,53	49,94	48,06	50,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2021

Irigasi Kabupaten Barru tersebar di 7 kecamatan dengan klasifikasi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni Fungsi Primer, Sekunder dan Tersier dengan persentase dalam kondisi baik pada tahun 2019 mengalami penurunan akibat berkurangnya luas irigasi kabupaten. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan irigasi terutama perubahan fungsi lahan persawahan menjadi kawasan perumahan dan pemukiman serta industri dan lain-lain,setelah dilakukan penelusuran (database irigasi).

F. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan bangunan dan saluran yang dipergunakan untuk mengatur jalannya air irigasi, dimulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pemanfaatannya. Secara umum saluran atau jaringan irigasi di bagi menjadi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Irigasi Jaringan primer	22356	22356	22356	22356	22356
2	Irigasi Jaringan Sekunder	76167	80120	83490	90264	90264
3	Irigasi Jaringan Tersier	79217	79217	79217	79217	79217
4	Panjang saluran irigasi	177.74	181.693	185.063	191.837	191837
5	Luas Lahan Budidaya pertanian (Ha)	9792	9792	9792	6919	6919
6	Rasio	18,15	18,56	18,90	27,73	27,73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan rasio panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Kabupaten Barru. Selanjutnya hal ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan partisipasi bukan hanya dari GP3A, tetapi dari unsur masyarakat lainnya.

G. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air minum / air bersih adalah air yang berasal dari air ledeng/PAM dengan menggunakan meteran atau tanpa meteran, pompa air/sumur bor, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal dimana syarat-syarat air minum menurut kementerian kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108

Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	92.033	104.875	158.884	173.471	179.183
2.	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
3.	Persentase penduduk berakses air minum	53,53	59,97	88,02	95.30	95,61

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan presentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Akses air minum yang

dimaksud terdiri dari akses perpipaan dan non perpipaan dimana non perpipaan meliputi mata air terlindungi, air kemasan, air di jual eceran dan penampungan air hujan. Selanjutnya masih terdapat 4,3% penduduk yang mengakses air minum tidak layak dari mata air tak terlindungi dan sumur tak terlindungi.

H. Persentase areal kawasan kumuh

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan, pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109

Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Kawasan kumuh (Ha)	310,62	310,62	310,62	31.04	31.04
2	Luas Wilayah Kabupaten (Ha)	117.472	117.472	117.472	117.472	117.472
3	Persentase areal kawasan Kumuh	0,26	0,26	0,26	0,02	0,02

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan areal kawasan kumuh berdasarkan SK penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Barru Nomor 354/Bappeda/VIII/2014 hingga tahun 2019 tidak mengalami perubahan namun Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan beberapa intervensi penganggaran pada lokasi kumuh tersebut, hanya saja belum pernah dilakukan deliniasi kembali luas areal kawasan kumuh yang ditetapkan tersebut.

I. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam peraturan pemerintah no. 8 tahun 1953 dan peraturan menteri agraria no. 9 tahun 1965 menyatakan bahwa Hak pengelolaan (HPL) tidak ada batas waktu, hanya diberikan atas tanah Negara yang dikausai oleh BUMN dan BUMD sedangkan Hak guna bangunan (HGB) dapat diberikan atas tanah Negara, tanah hak pengelolaan oleh pemerintah atau tanah milik oleh pemegang hak milik dengan jangka waktu selama-lamanya 30 tahun dan diperpanjang paling lama 20 tahun, HPL/HGB dapat dialihkan ke pihak lain dan dijadikan jaminan hutang dan jaminan kredit di

perbankan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Luasan RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas ruang terbuka hijau	204.894	204.894	204.894	204.894	204.894
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	5,478	5,478	5,478	5,478	5,478
3	Luas wilayah kota/ kawasan perkotaan (Ha)	117.472	117.472	117.472	117.472	117.472
4	Rasio Ruang terbuka hijau (1:2)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
5	Persentase luasan RTH publik (1:3)	174,42	174,42	174,42	174,42	174,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2021

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111

Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	25805	44745	44745	45.089	45.089
2.	Jumlah Penduduk	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
3.	Rasio	0,15	0,26	0,25	0,25	0,24

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk berfluktuasi hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak beriringan dengan jumlah rumah layak huni.

B. Rasio permukiman layak huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio

permukiman yang layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	3740,6	3740,6	3740,6	3740,6	3740,6
2	Luas Wilayah Pemukiman (Ha)	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64
3	Rasio	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas rasio permukiman layak huni stagnan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, untuk luas permukiman layak huni didapatkan dari hasil pengurangan luas wilayah permukiman secara keseluruhan dengan luas permukiman kumuh yang pengertiannya dipersamakan dengan permukiman tidak layak huni.

2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yakni 100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.113
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	100 orang petugas Linmas di Kab/ Kota daerah pemekaran baru	846	846	1082	1082	898
2	1 Wilayah kerja kabupaten	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,49	0,48	0,60	0,60	0,47

Sumber : Dinas Satpol dan PP Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk namun mengalami penurunan jumlah personel petugas linmas.

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelanggaran K3 Yang terselesaikan	19	3	19	14	254
2	Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan Masyarakat Dan Teridentifikasi	19	3	19	14	254
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Satpol dan PP Kab. Barru Tahun 2021

Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kasus pelanggaran K3 meningkat tajam ini dikarenakan konstalasi politik pemilihan kepala daerah. Namun semua kasus pelanggaran K3 dapat diselasaikan dalam kurun tahun yang sama.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka kriminalitas yang tertangani dari tahun ke tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115

Angka Kriminalitas Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	JENIS KRIMINALITAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus Uang Palsu	0	0	0	0	1
2	Kasus Pembunuhan	1	1	0	1	2
3	Kasus Perkosaan/ Kejahatan Seksual	6	6	1	2	3
4	Kasus Perjudian	1	1	2	3	0
5	Kasus Penganiayaan Berat	0	0	0	16	3
6	Kasus Curanmor	33	33	22	15	18
7	Kasus Narkoba/Miras	31	31	22	1	0
8	Kasus Pengrusakan Kantor pemerintah/Polri	0	0	0	0	0
9	Kasus PengrusakanTempat Ibadah	0	0	0	0	0
10	Kasus Penimbunan	0	0	0	0	0
11	Kasus Unjuk Rasa	14	14	4	2	10
12	Kasus Penjarahan	0	0	0	0	0
13	Kasus Pencurian	31	31	58	76	79
14	Kasus Penipuan	28	28	30	23	20
	Jumlah Kriminalitas	210	153	139	139	136
	Jumlah penduduk	171.217	171.906	180.509	182,373	187.392
	Angka kriminalitas ((8)/(9)x10.000)	12,27	8,90	7,7	7,6	7,25

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kab. Barru Tahun 2021

4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.116

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	119.32	622.32	860.46	1174.7	1174,7
2	Luas Wilayah	1174.7	1174.7	1174.7	1174.7	1174,7
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	10.16	52.98	73.25	100	100

Sumber : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 target cakupan wilayah manajemen kebakaran telah tercapai karena telah dilakukan pembangunan parkir pemadam dan penempatan armada mobil pemadam kebakaran di WMK Kecamatan Pujananting, sehingga sampai Tahun 2020 ini sudah ada 6 WMK yang ada di Kabupaten Barru (Tanete Riaja, Balusu, Mallusetasi, Soppeng Riaja, Tanete Rilau, dan Pujananting) serta Posko Induk yang ada di Kecamatan Barru, yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian masyarakat atau pun korban jiwa akibat kebakaran.

5. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan kebakaran merupakan hal yang diataranya memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap WMK dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.117

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit	19	36	47	112	70
2	Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK	19	36	47	112	70
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan kebakaran di Kabupaten Barru dikarenakan musim kemarau yang sangat panjang dan angin kencang yang terjadi di tahun 2019 serta masih rendahnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan dan bahaya kebakaran.Tingkat waktu tanggap daerah WMK sudah mencapai 100% disebabkan adanya pemadam kebakaran di tiap Kecamatan.

6. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.

Setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Barru menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam Penegakannya. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118

Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	3	2	2	2	18
2	Jumlah Pelanggaran Perda	3	2	2	2	18
3	Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penyelesaian penegakan perda pada tahun 2019 masih sama pada tahun 2018 disebabkan karena terbatasnya personil satpol pp yang mengikuti diklat PPNS,rendahnya pemahaman terkait tugas operasional dan belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan perda.

2.3.1.6 Sosial

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	3008	3434	7109	15.522	17.967
2	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan	9.326	779	3.675	769	21821
3	Jumlah PMKS yang ada	12,395	11,301	7,626	16.291	39.788
4	Prosentase PMKS memperoleh Bantuan Sosial	24.76%	31.07%	93.2	95,68	45,15

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

2. Persentase PMKS yang tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120

Persentase PMKS yang tertangani Kab.Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang tertangani	3008	3434	7109	15.522	21821
2	Jumlah PMKS yang ada	12,395	11,301	7,626	16.291	39.788
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	24.76	31.07	93.2	95,68	45,15

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang PMKS yang tertangani meningkat tiap tahunnya kecuali pada tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus memenuhi pencapaian SPM. Namun menurun pada tahun 2020 disebabkan terjadinya pertambahan PMKS karna terdampak pandemic COvid 19, juga karena terjadinya perubahan data dimana telah dilakukan updating data PMKS.

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih,seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi : angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka sengketa pengusaha/ pekerja pertahun adalah perbandingan jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja dibandingkan dengan jumlah perusahaan di kali 100 persen. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun DI Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	Kasus	0	0	1	1	0
2	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	145	145	323	49	51
3	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun		0	0	3,09	0,02	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Perselisihan Kerja antara perusahaan dan tenaga kerja sampai dengan pada tahun 2020 yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah pare-pare dan Barru.

2. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar di kali 100 persen. Data Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 122

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	18	27	83	619	132
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar	247	483	514	672	250
3	Pencari Kerja yang ditempatkan	7,29%	5,59%	16,15%	92,11%	52,80%

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2021

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan monitoring tenaga kerja pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 132 tenaga kerja dari total pencari kerja 250 tenaga kerja atau sebesar 52,80%.

3. Keselamatan dan perlindungan

Keselamatan dan perlindungan adalah perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Barru. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123

Keselamatan dan perlindungan Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perusahan yang menerapkan K3	20	20	25	37	37
2	Jumlah perusahan di wilayah kabupaten	145	323	323	49	51
3	Keselamatan dan Perlindungan (%)	13,79	6,19	7,74	75,51	72,55

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2021

Kategori perusahaan yang termasuk dalam kewajiban penerapan K3 adalah yang berbadan usaha dan memiliki pekerja minimal 100 pekerja atau berpotensi terjadi Kecelakaan Kerja yang tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012. Dari 51 perusahaan yang terdata penerapan SMK3 telah dilakukan oleh 37 perusahaan, hal ini disebabkan beberapa tahun terakhir Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan sosialisasi SMK3 bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah perbandingan antara pekerja/buruh jamsostek dengan pekerja/buruh secara keseluruhan di kali 100 persen. Data Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek di Kabupaten Barru dapat dilhat pada tabel berikut.

Tabel 2. 124

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK	678	291	515	37.131	38.111
2	Pekerja/ Buruh	1212	59790	70328	48.075	48.075
3	Persentase	55,94	4,87	0,73	77,23	79,27

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2021

Peningkatan yang signifikan terhadap kepesertaan Jaminan ketenagakerjaan di Kab Barru meningkat drastis dari 0,73 % pada tahun 2018 menjadi 77,23% pada tahun 2019 dan meningkat lag di tahun 2020 sebesar 79,27%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Kerjasama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan BPJS ketenagakerjaan dalam penerbitan izin berbasis Jaminan Ketenagakerjaan;
- Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan;
- Coverage Pekerja Rentan yang dikerjasamakan oleh Pemda Kab. Barru, Baznas dan Pihak perbankan di wilayah Kab. Barru;
- Coverage Non ASN Pemda Barru dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam APBD 2020.

5. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda dengan jumlah kejadian perselisahan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda di kali 100 persen. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak ada perselisihan. data perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2	Jumlah Kejadian perselisahan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Persentase penyelesaian perselisihan Buruh & Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0	100%	0	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2021

6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah perbandingan tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga kerja yang dilatih	30	15	80	330	20
2	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	30	15	80	330	20
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2021

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 20 Tenaga Kerja.

7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah perbandingan antara tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100 persen. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.127

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Kab.Barru Tahun 2020 - 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga kerja yang dilatih	20	113	80	80	0
2	Pendaftar pelatihan	20	113	80	80	0
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	100	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2021

Pelatihan tenaga kerja berbasis Kewirausahaan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dikarenakan adanya refocusing anggaran karena pandemu covid 19.

8. Rasio lulusan S1/S2/S3

Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.128

Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Barru Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	10.435	10.177	11.592	10.463	12.763
2	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	602,61	581,97	642,18	573,71	681,08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsiperempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi eselon I-IV. untuk presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kab.Barru

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	3	2	2	2
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	27	24	28	29	32
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	176	207	215	220
4	Pekerja perempuan di pemerintah	2.625	3,307	4,705	4.710	4088
5	Jumlah pekerja perempuan	18,265	23,609	25,413	25.415	21687
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	14,37%	14.01%	18.51%	18,55%	18,55%

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPA Kab. Barru Tahun 2021

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.130

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	6 orang	6 orang	6 orang	5 orang	5 orang
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	24%	24%	24%	20%	20%

Sumber : Sekretaris Dewan Kab. Barru Tahun 2021

3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta dengan jumlah pekerja perempuan yang dinyatakan dalam persen. Untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.131
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang bekerja dilembaga swasta	576	576	690	705	725
2	Jumlah pekerja perempuan	18,265	23,609	25,413	25.715	24.460
3	Presentase pekerja perempuan dilembaga swasta	3,2	2,4	2.72	2,81	2,96

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2021

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132
Rasio KDRT Kabupaten Barru Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	10	7	7	9	8
2	Jumlah Rumah Tangga	42.375	42	41,070	41.575	41950
3	Rasio KDRT (%)	0,024	0,17	0.02	0,02	0,02

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2021

5. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perbandingan jumlah perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan yang bekerja	17,490	18,591	18,330	18,591	18.665
2	Jumlah penduduk perempuan	87,726	88,640	89,403	89,685	89.770
3	Persentase pekerja perempuan	19.94	20.97	20.50	20.73	20,85

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPPPA Kab. Barru Tahun 2021

2.3.2.3. Pangan

1. Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang

diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Indikator ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan meningkatkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134

Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama	4243	4178	4366	4379	4379
2	Ketersediaan energi	105,10	106,75	115,00	118,61	118,61
3	Protein perkapita	14,45	15,60	18,5	21,72	21,72
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0,201	0,249	0,275	0,423	0,423

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2021

2.3.2.4. Lingkungan Hidup

1. Tersusunnya RPPLH dan Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola ligkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Tersusunnya RPPLH dan Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135

Tersusunnya RPPLH dan Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH kab/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kab/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P

Regulasi yang mengatur tiap daerah untuk wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tertuang pada

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2). Pada ayat ini menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta Rencana Rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pada prinsipnya KLHS adalah suatu kajian/penilaian mandiri (self assessment) untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun terlaksananya KLHS sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan rencana Program Kabupaten Barru tahun 2016 – 2020 selalu terlaksana tiap tahunnya untuk tiap dokumen yang disusun pada tahun berkenaan.

3. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan indikator pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Indeks kualitas air adalah nilai yang menunjukkan status mutu air dengan metode indeks pencemaran, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya yang dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Perhitungan Indeks Tutupan Lahan dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Barru.

Tabel 2.136

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukuran indeks Kualitas Air	Tidak ada data	52,4	62,22	62,22	50
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Tidak ada data	94,02	94,2	93,40	90,59
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Tidak ada data	51,104	51,1	63,77	69,77
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tidak ada data	65,84	69,17	72,19	69,85

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2021

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Barru pada Tahun 2020 dilakukan pada 3 sungai, yaitu sungai Sumpang BinangaE di Kecamatan Barru, Sungai BottoE yang melintasi wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau dan sungai Takkalasi yang melintasi wilayah Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu. Setiap sungai memiliki 3 titik pantau dengan pengambilan sampel minimal 2 kali dalam setahun. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli. Pada Tahun 2020 Nilai Indeks kualitas Air (IKA) Kabupaten barru sebesar 50 berada pada kondisi baik. Nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada berbagai sumber air.
- ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global
- penggunaan air, tingkat erosi dan sedimentasi

Kualitas udara ambient di Kab.Barru dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Pemantauan dilakukan di 4 titik lokasi yang mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas dengan menggunakan metode passive sampler. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO2 dan SO2. Nilai konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020 di Kabupaten Barru sebesar 90,59 yang berarti indeks kualitas udara di Kabupaten Barru > 50 jadi termasuk dalam kondisi baik. Tetapi nilai IKU tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019, dimana pada Tahun 2019 nilai IKU Kabupaten Barru yaitu 93,40. Oleh karena itu Pemerintah harus meningkatkan upaya dalam peningkatan kualitas udara di Kab.Barru terutama pada lokasi perkantoran dan pemukiman. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLH Kabupaten Barru pada Tahun 2020 berada dalam status cukup, hal ini menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup dibanding pada tahun 2017 dan 2018, dimana pada tahun tersebut kualitas lingkungan hidup Kab.Barru berada dalam status kurang. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini disebabkan karena berubahnya status mutu air sungai pada beberapa titik pantau dari tercemar berat menjadi tercemar ringan dan yang tercemar sedang menjadi memenuhi baku mutu.

4. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani dengan Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang dinyatakan dalam persen. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	0	4.8%	9%	8%	0,05%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2021

5. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) terdiri atas Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina dan Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	0	0	1	0	1
1.1	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;	0	0	1	0	
1.2	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	0	0	0	0	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2021

6. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Penghargaan merupakan reward yang diberikan karena telah memenuhi dan/atau melebihi standar nilai yang ditentukan. Pada tahun 2016 – 2020 telah terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup yakni penghargaan adipura dan adiwiyata.

7. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang di tangani di bagi dengan Volume produksi sampah yang dinyatakan dalan persen. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139

Persentase jumlah sampah yang tertangani Tahun 2016 - 2020

NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	97,82	97,92	98.01	80,41	99,00

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Barru Tahun 2021

Presentase jumlah sampah yang di tangani di tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami peningkatan akibat jumlah produksi sampah yang meningkat secara signifikan.

2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.140

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	116.013	119.320	128.967	131.640	135033
2	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	125.444	128.209	129.177	131.981	135045
3	Rasio	0,92	0,93	0.998	0,997	0,999

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Barru terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2020 menunjukkan angka 0,999 yang berarti 99,99%.

2. Rasio bayi dan Penduduk berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio penduduk berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran

dengan jumlah penduduk. Rasio bayi dan penduduk berakte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141

Rasio bayi dan Penduduk berakte kelahiran Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	1386	2144	3503	3506	3506
2	Jumlah bayi	2998	2335	3995	3806	3806
3	Rasio	0.46	0,92	0,87	0,92	0,92

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

Sedangkan rasio penduduk berakte kelahiran tahun 2019 perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142

Rasio penduduk berakte kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2020

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah Penduduk	Rasio
731101	Tanete Riaja	6.080	7.459	0.82
731102	Tanete Rilau	9.133	11.567	0.79
731103	Barru	10.538	13.312	0.79
731104	Soppeng Riaja	3.826	5.209	0.73
731105	Mallusetasi	6.063	7.998	0.76
731106	Pujananting	3.104	3.859	0.80
731107	Balusu	4.047	5.446	0.74
7311	**Kab. Barru**	**42.791**	**54.850**	**0.78**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat kepemilikan akte kelahiran tidak mencapai angka maksimal. Pemerintah Kabupaten Barru perlu mengatasi keterlambatan pengurusan akte kelahiran yang menjadi permasalahan mengapa tidak pernah mencapai 100%.

3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2021

4. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (Orang)	116.013	119.320	128.967	131.640	135.033
2	Jumlah penduduk wajib KTP (Orang)	125.444	128.209	129.177	135.045	135.045
3	Persen ((1/2)x100%)	92,48	92,48	99,84	99,74	99,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Tahun 2021

2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor Kualitas Konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah Pengelolan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/ Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana tersebut. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kantor pemerintahan Desa yang Baik	39	39	40	40	40
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	40	40	40	40	40
3	Persen	98	98	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

2. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah perbandingan jumlah kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah LPM yang dinyatakan dalam persen. Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.146

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	55	55	55	55	55
2	Jumlah LPM	55	55	55	55	55
3	Rata-rata	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

3. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kab.Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan PKK	1550	1636	1711	1712	2485
2	Jumlah PKK	63	63	63	63	63
3	Rata-rata	24,60	25,979	27,16	27,18	39,44

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

4. Persentase LPM Berprestasi

Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah lembaga pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 148

Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM Berprestasi	55	55	55	55	55
2	Jumlah LPM	55	55	55	55	55
3	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

5. Persentase PKK aktif

PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan sekretariat dan memiliki program kerja. Persentase PKK aktif adalah perbandingan antara jumlah PKK yang aktif dengan keseluruhan jumlah PKK yang dinyatakan dalam persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149
Persentase PKK aktif Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK Aktif	63	63	63	63	63
2	Jumlah PKK	63	63	63	63	63
3	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

6. Persentase Posyandu aktif

Persentase posyandu aktif adalah perbandingan jumlah posyandu aktif dengan jumlah semua posyandu yang dinyatakan dalam persen. Persentase posyandu aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Persentase posyandu aktif Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu Aktif	249	262	262	262	262
2	Total Posyandu	249	262	262	262	262
3	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

7. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan bisa pula berupa bantuan finansial. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	180	180	180	180	180
2	Total program pemberdayaan Masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk Tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembang dan dipelihara masyarakat	3	3	3	3	3
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

2.3.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.153

Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak	6,038	60,380	60,250	60.350	61280
2	Jumlah keluarga	52,869	52,869	52,969	53.125	54320
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.14	1,142	1,137	1,136	1,128

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

2. Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154

Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB	21,801	21,344	21,065	20.141	19.562
2	Jumlah pasangan usia subur	30,528	30,803	30,117	29.671	29361
3	Rasio akseptor KB (%)	71.41	69.29	70	67,88	66,63

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

3. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. CPR adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang ditanyakan dalam persen.

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.155

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	21,736	21,344	21,065	20.141	19562
2	Jumlah pasangan usia subur	30,511	30,803	30,117	29.671	29361
3	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15– 49	71.24	69.29	69.94	67,88	66,63

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 - 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20 - 35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun. Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.156

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 thn	559	532	512	508	443
2	Jumlah pasangan usia subur	30,511	30,803	30,117	29.761	29.361
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1.83	1.73	1.70	1,71	1,51

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

5. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah perbandingan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani dengan jumlah pasangan uasia subur yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.157

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	4.300	5.043	8.971	5.744	4906
2	Jumlah pasangan usia subur	30.511	30.803	30.117	29.671	29.361
3	Persentase ((1/2)x100%)	14,09	16,37	29,78	19,35	16,71

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

6. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dengan jumlah akseptor yang dinyatakan dalam persen. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.158

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.206	3.137	2.889	2.745	2760
2	Jumlah akseptor KB	21.736	21.344	21.065	20.141	19.859
3	Persentase ((1/2)x100%)	14,75	14,70	13,71	13,62	13,90

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

7. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah perbandingan jumlah pasangan usia sabar yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah akseptor KB yang dinyatakan dalam persen. Peresentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	8,775	8,590	9,540	9.930	9.799
2	Jumlah akseptor KB	21,736	21,344	21,065	20.141	19562
3	Persentase ((1/2)x100%)	40.37	40.25	45.29	46,38	50.09

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

8. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 160

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	3,245	3,756	3,794	3.805	3.642
2	Jumlah anggota kelompok BKB	5,802	6,716	6,716	6.716	7.672
3	Persentase ((1/2)x100%)	55.93	55.93	56.49	56,65	45,13

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

9. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.161
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	3,078	3,972	3,984	3.997	3.008
2	Jumlah anggota kelompok BKR	7,659	9,262	9,262	9.266	9992
3	Persentase ((1/2)x100%)	40.19	42.88	43.01	43,13	30,10

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

10. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB adalah jumlah anggota kelompok BKL yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber- KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	1,085	2,668	2,705	2.752	2.325
2	Jumlah anggota kelompok BKL	3,913	7,346	7,367	7.374	7012
3	Persentase ((1/2)x100%)	27.73	36.32	36.72	37,32	33,16

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

11. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan adalah perbandingan antara jumlah PPKS dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	7	7	7	7	7
2	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

12. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah perbandingan jumlah pusat informasi dan

konseling remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	60	68	70	73	63
2	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
3	Persentase ((1/2)x100%)	857.14	971.43	1000	1042	900

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

13. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penegendalian penduduk adalah perbandingan jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan dengan jumlah PKB/PKLB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.165
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	44	47	47	50	50
2	Jumlah PKB/PLKB	44	47	47	50	50
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

14. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.166
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	172	352	381	412	469
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	876	917	917	917	917
3	Persentase ((1/2)x100%)	19.63	38.39	42	44,92	51,15

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

15. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa kelurahan adalah perbandingan jumlah petugas pembantu Pembina KB desa dengan jumlah desa kelurahan yang dinyatakan dalam persen. Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.167

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	55	55	55	55	55
2	Jumlah desa/kelurahan	55	55	55	55	55
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

16. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah alkon per mix kontarsepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan perkiraan permintaan masyarakat yang dinyatakan persen. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.168

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	56,900	55,315	48,362	20.588	34.279
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	56,900	55,315	48,362	20.588	34.279
3	Cakupan (1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

17. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayana KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring yang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169

Persentase Faskes dan jejaringnya (disceluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	12	14	14	14	14
2	Jumlah Faskes dan jejaring	12	14	14	14	14
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

18. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa adalah perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga yang dinyatakan dalam persen. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 170

Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

19. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga merupakan perbandingan antara jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dengan jumlah kelompok kegiatan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan Kelompok Kegiatan melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.171

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	232	249	249	255	255
2	Jumlah kelompok kegiatan	232	249	249	255	255
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2021

2.3.2.8. Perhubungan

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan angkutan umum yang keluar masuk pada suatu daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.172

Jumlah arus penumpang angkutan umum Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penumpang Bis	4.769.581	1.773.098	1,693,893	1,682,943	826.600
2	Jumlah penumpang Kapal laut	30.284	36.993	23,103	45,287	28.164
3	Total Jumlah Penumpang	4.799.865	1.810.091	1,693,893	1,682,943	853.764

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penumpang bis maupun jumlah penumpang kapal laut berfluktuasi. Untuk jumlah penumpang kapal laut mengalami penurunan di tahun 2020, hal ini dipengaruhi karena merebaknya wabah pandemic covid 19 sehingga menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas bepergian terlebih menggunakan angkutan umum.

2. Rasio ijin trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Rasio ijin trayek adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 173

Rasio ijin trayek Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	-	-
2	Izin Trayek perdesaan	248	41	41	41	41
3	Jumlah Izin Trayek	248	41	41	41	41
4	Jumlah penduduk	173.163	174.871	180.509	182.373	187.392
5	Rasio Izin Trayek	0,00144	2,34	2,27	2,24	2,18

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ijin trayek dari tahun 2016 sampai 2020 menurun, hal ini di pengaruhi jumlah permintaan ijin yang berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah.

3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut/udara diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat/kapal laut dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.174

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelabuhan laut	5	5	5	5	5
2	Jumlah terminal bis	5	5	5	4	3
	Jumlah	10	10	10	9	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis cenderung stagnan, hanya saja khusus untuk terminal bis pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.

4. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat adalah perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang yang terangkut yang dinyatakan dalam persen. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175

Persentase layanan angkutan darat Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan darat	2259	1535	1,475	1,288	525
2	Jumlah penumpang angkutan darat	4.769.581	1.773.098	1,693,893	1,682,943	825.600
3	Persentase	0,047	0,087	0.087	0.076	0.063

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase layanan angkutan darat mulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan darat karena kurangnya peremajaan kendaraan.

5. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Tabel 2.176

Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu	88	100	75	156	156
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	3951	3951	3951	3951	3951
3	Persen	2.23	2.53	1.90	3.95	3.95

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas presentase pemasangan rambu-rambu berfluktuatif, hal ini disebabkan adanya prioritisasi pemasangan rambu-rambu untuk kategori jalan tertentu yang menjadi kewenangan Kabupaten tergantung

dari tingkat kerawanan terhadap kecelakaan serta mendukung akses sarana pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ekonomi.

6. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 177

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	4.769.581	939,875	936,225	907,025	825.600
2	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum	17.977	11,278	11,235	10,884	8.784

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas jumlah orang /barang yang terangkut angkutan umum cenderung menurun mulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah orang/barang yang menggunakan sarana angkutan umum karena beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan umum karena kurangnya peremajaan kendaraan.

7. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Jumlah orang/ barang yang melalui dermaga/ bandara / terminal adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum yang melalui dermaga/ bandara dan terminal. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

No	Tahun	Satuan	Dermaga	Terminal	Jumlah
1	2016	Orang	30,284	4,769,581	4,799,865
		Barang	17,977		17.977
2	2017	Orang	39,074	4,769,581	4,808,655
		Barang	11,382.72	12,382	23,765
3	2018	Orang	23,103	4,769,581	4,792,684
		Barang	12,335.87	12,382	24,717.87
4	2019	Orang	45,287	1,682,943	1,728,230
		Barang	9,683,355	10,884	9,694,239
6	2020	Orang	45,287	1,682,943	1,728,230
		Barang	9,683,355	10,884	9,694,239

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2021

Pada tabel diatas jumlah orang melalui dermaga cenderung menurun disebabkan pemilihan moda transportasi masyarakat dari kapal laut ke pesawat udara. Untuk jumlah orang yang melalui terminal menurun sangat signifikan hal ini disebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan jumlah

barang yang melalui dermaga dan terminal meningkat, hal ini terjadi karena fungsi dermaga sangat optimal dari sisi pengangkutan barang, disamping itu pemilihan pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Barru menjadi alternatif para pengguna jasa.

2.3.2.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase koperasi aktif

Presentase koperasi aktif merupakan perbandingan jumlah koperasi aktif dengan jumlah semua koperasi yang ada dan dinyatakan dalam persen. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.179
Persentase koperasi aktif Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	97	58	58	63	65
2	Jumlah koperasi	119	103	103	102	104
3	Persentase koperasi aktif	81,51%	56,31%	56.31%	61,76	62,50

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2021

Meningkatnya jumlah koperasi aktif" diukur dari indikator kinerja perbandingan antara jumlah koperasi dengan jumlah koperasi seluruhnya. Merupakan indikator utama dalan penilaian suatu koperasi dikatakan aktif apabila melakukan RAT dua tahun terakhir. Jumlah koperasi di Kabupaten Barru tahun 2019 adalah 102 unit, sebanyak 63 koperasi yang melakukan RAT dan 39 yang tidak melakukan RAT artinya sebanyak 61,76% koperasi aktif. Adapun penyebab keberhasilan dari pencapaian indikator adalah :

- Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Pembinaan koperasi dan dilakukan pelatihan terhadap kemampuan untuk menyusun/membuat laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi
- Dilakukannya pengusulan penghapusan terhadap koperasi yang sudah tidak melakukan operasional usaha.

2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang dinyatakan dalam persen. Persentase UKM non BPR/LKM di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.180
Persentase UKM non BPR/LKM aktif Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	1898	1571	1494	430	762
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	1898	1571	1494	458	790
3	Persentase	100	100	100	93,88	96,46

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2021

Jumlah usaha kecil dan menengah tahun 2019 non BPR/LKM adalah sebanyak 430 unit dari 458 unit. Jumlah ini mengalami penurunan karena sekitar 1.112 unit setelah dilakukan verifikasi ulang mengenai permodalan dan aset usaha tersebut sudah bukan merupakan usaha kecil melainkan masuk kategori usaha mikro. Hal ini merupakan penyebab menurunnya Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif.

3. Persentase BPR/LKM aktif

Persentase BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan persen. Persentase jumlah BPR/LKM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 181

Persentase BPR/LKM aktif Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR/LKM aktif	20	20	20	20	20
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	28	28	28	28	28
3	Persentase	71.43%	71.43%	71.43%	71,43%	71,43%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2021

Data BPR/LKM di Kabupaten Barru adalah sebanyak 28 LKM yakni 20 unit merupakan Bumdes binaan Dinas PMDPPKBP3A sedangkan 8 merupakan binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang sudah tidak aktif karena baik dari usaha maupun pengurus sudah tidak ada.

4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.182

Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha mikro	15.611	17.979	17.820	18.999	9.122
2	Jumlah Usaha Kecil	1.514	1.933	1.434	322	718
3	Usaha Menengah	79	50	88	136	72
4	Jumlah UKM	17.204	19.962	19.342	19457	9.912
5	Persentase	99,78%	99,75%	99.55%	99,74%	99,27

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2021

Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro da kecil merupakan akumulasi dari jumlah pelaku industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Berdasarkan tabel di atas, target

kinerja yang ditetapkan adalah 99,74% artinya dari 20.656 unit usaha yag ada di Barru ada 20.603 unit merupakan usaha mikro dan kecil.

2.3.2.10. Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.183

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PMDN	538	323	325	260	118
2	PMA	-	-	-	-	-
3	Total	538	323	325	260	118

Sumber : Dinas PMPSPNaker Kab. Barru Tahun 2021

Jumlah Persetujuan Investasi (usaha) tahun 2019 sebanyak 260 yang dikategorikan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi lebih dari 200 juta dan penambahan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Daerah tahun 2019.

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui dinas terkait. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 184

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai InvestasiBerskala Nasional (PMDN/PMA)
1	2016	559	537.393.500.000
2	2017	323	541.582.143.139
3	2018	325	729.568.409.663
4	2019	260	730.659.151.736
5	2020	118	855.316.873.042

Sumber : Dinas PMPSPNaker Kab. Barru Tahun 2021

Terdapat Peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 124.657.721.306 dari nilai investasi tahun sebelumnya atau sebesar 17,06% pada tahun 2020. Peningkatan ini bergerak lambat dari periode sebelumnya. Masih diperlukan adanya kepastian lahan dan sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Percepatan RDTR untuk seluruh wilayah di

Kab. Barru , Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kemudahan / kebijakan investasi lainnya yang dapat ditawarkan oleh Pemda Kab. Barru

3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dihitung dengan membandingkan realisasi PMDN tahun evaluasi dikurang realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 185

Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)

No	Tahun	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi	Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)
1	2016	537.070.000.026	841.535.650.684	-36,18
2	2017	541.582.143.139	537.393.500.000	0,78
3	2018	729.568.409	591.931.425.987	35
4	2019	730.659.151.736	729.568.409.663	0,15
5	2020	855.316.873.042	730.659.151.736	17,06

Sumber : Dinas PMPSPNaker Kab. Barru Tahun 2021

Terdapat Peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 124.657.721.306 dari nilai investasi tahun sebelumnya atau sebesar 17,06% pada tahun 2020. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap daya dukung investasi di Kabupaten Barru yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- Peningkatan Promosi investasi ditahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali pameran investasi baik di dalam maupun diluar Provinsi;
- Peningkatan koordinasi investasi antar lembaga pemerintah, swasta dan pihak lainnya;
- Semakin membaiknya pelaporan realisasi penanaman modal daerah baik yang dilakukan secara manual maupun online;
- Perbaikan percepatan berusaha melalui pembentukan satuan tugas percepatan berusaha dan perbaikan regulasi perizinan dan penanaman modal daerah.

2.3.2.11. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah perbandingan antara jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah seluruh organisasi pemuda yang dinyatakan dalam persen. Persentase organisasi pemuda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186

Persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Barru	15	15	42	42	42
2	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Rilau	15	15	26	26	26

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Riaja	15	15	21	21	21
4	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Pujananting	15	15	16	16	16
5	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Balusu	15	15	21	21	21
6	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Soppeng Riaja	15	15	21	21	21
7	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Mallusetasi	15	15	20	20	20
8	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	105	105	167	167	167
9	Jumlah seluruh organisasi pemuda	105	105	167	167	167
10	Presentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2021

2. Persentase wirausaha muda

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah seluruh wirausahayang dinyatakan dalam persen. Persentase wirausaha muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187

Persentase wirausaha muda Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wirausaha muda	10	18	5	20	20
2	Jumlah seluruh wirausaha	18	23	90	150	150
3	Persen ((1/2)x100%)	55,56	78,26	5.56	13.33	13.33

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2021

3. Cakupan pembinaan olahraga

Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188

Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang	8	6	13	27	27
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabang	19	26	26	29	29
3	Persen ((1/2)x100%)	Persen	42,10	23,08	50	93,1	93,1

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2021

4. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pelatih yang bersertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 189
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelatih bersertifikat	11	11	43	57	57
2	Jumlah seluruh pelatih	15	15	58	75	75
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	73,33	73,33	74,13	76	76

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2021

5. Cakupan pembinaan atlet muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan altlet muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190
Cakupan pembinaan atlet muda Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	71	25	401	430	430
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	130	135	401	606	606
3	Persen ((1/2)x100%)	54,61	18,52	100	70,9	70,9

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2021

6. Jumlah atlet berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191
Jumlah atlet berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	4	7	0	0	0

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2021

Pada tahun 2018 – 2020 tidak terdapat atlet yang berprestasi dikarenakan pada tahun tersebut Kabupaten Barru tidak menyertakan atletnya pada beberapa event olahraga tingkat nasional dan internasional dikarenakan tidak lolos seleksi, selain itu efek pandemic covid juga menyebabkan beberapa event olahraga tingkat nasional dan internasional tidak terselenggara.

7. Jumlah prestasi olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga adalah Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 192
Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	3	4	0	0	0

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2021

2.3.2.12. Statistik

1. Buku "kabupaten Barru dalam angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru"

Buku Kabupaten dalam Angka sebagai sarana untuk menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Sedangkan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Adapun ketersediaan Buku Kabupaten Barru dalam angka dan PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2016 – 2020 selalu tersedia.

2.3.2.13. Persandian

1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.193

Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat daerah	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat daerah	39	37	37	37	37
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi PD	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2021

2.3.2.14. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Secara umum, seni budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan biasanya ditampilkan pada kegiatan festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 194

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival budaya	1 Kali	1 Kali	3 Kali	5 kali	5 kali

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

Dari data diatas terlihat bahwa penyelenggaraan festival budaya tiap tahunnya mengalami peningkatan.

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Menurut undang-undang no. 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentasenya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.195

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11	11	11	15	15
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	27	27	29	28	28
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dilestarikan	40,7	30,6	40,9	53,57	53,57

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya merupakan kewajiban dalam hal pelestarian budaya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga, memelihara, membangkitkan serta memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di suatu wilayah. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Barru yang dituangkan dalam bentuk dokumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.196

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Dokumen)	1	1	2	3	3

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

4. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu

Pengelolaan cagar budaya Kabupaten Barru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, hal ini sebagai bentuk pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya yang ada. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 197

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	11 Jenis	11 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	15 Jenis

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru Tahun 2021

2.3.2.15. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yangber tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.198

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kab. Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	146.803	187.25	193,601	202.142	121.286
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	146.803	187.25	193,601	202.142	121.286

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2021

2. Koleksi buku dan Judul Buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah buku dan judul buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersediadi perpustakaan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 199

Koleksi buku dan Judul Buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	53.096	55.344	56,435	58.685	58.685
2	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah	10.575	10.851	11.119	11.676	11.676

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2021

3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat

yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah dimana rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.200

Rasio perpustakaan persatuan penduduk Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	56	56	56	56	56
2	Jumlah Penduduk	173.163	174.871	180,509	182.373	187.392
3	Rasio (1/2*1000)	0,33	0,32	0.31	0,31	0,30

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2021

4. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 201

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	1	1	3	3	3
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	3	3	3	3	3
3	Persentase	33,33%	33,33%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2021

2.3.2.16. Kearsipan

1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 202

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	17	26	27	30	29
2	Jumlah Perangkat Daerah	39	37	37	36	36
3	Persen	43,59	70.27	72.97	81,08	80,5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2021

2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 203

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	4	5	3	3	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Barru Tahun 2021

2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten yang dinyatakan dalam persen. Kujungan wisata DI Kabupaten Barru dapat dlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.204

Kunjungan wisata Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten	26.5	49.35	54,835	117,967	61.519
2	Jumlah seluruh kunjungan wisata se-kabupaten	30	49.35	54,835	117,967	61.519
3	Jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten	26	28	29,500	31,000	33.000
4	Persen	101,92	176,25	185.88	378,30	186

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah persentase kunjungan wisata ke Kabupaten Barru pada tahun 2019, hal ini dipengaruhi terdapat beberapa objek/ daya Tarik wisata sebagai tempat pelaksanaan event besar seperti Lappalaona yang menarik kunjungan sampai 18.907 wisatawan, terdapat juga beberapa objek/daya Tarik wisata baru yang berkembang seperti diana waterpark dengan jumlah kunjungan 47.086 wisatawan dan embung paccekke dengan jumlah kunjungan 2.552 wisatawan.

2. PAD sektor pariwisata

Pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata merupakan perbandingan antara PAD sektor pariwisata dengan total PAD yang dinyatakan dalam persen. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 205

PAD sektor pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	PAD sektor pariwisata	Total PAD	Persen
1	2016	23,841,000	51,671,673,714.73	0,05
2	2017	25.570.000	130.717.794.632,7	0,05
3	2018	29,550,000	104.627.706.924,57	0,03
4	2019	34,350,000	110.310.167.038	0,03
5	2020	898.339.360	110.400.938.084	0,89

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah Pemasukan Asli Daerah dari sektor pariwisata sebesar 4.800.000 dari tahun sebelumnya yang hanya 29.550.000 menjadi 34.350.000 walaupun secara rasio keseluruhan

jika dibandingkan dengan PAD Kabupaten tetap sebesar 0.03 %, hal ini disebabkan terjadinya kenaikan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Barru yang dikarenakan adanya event besar yang pernah dilakukan dan juga meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke tempat wisata baru yang sementara terus berkembang.

2.3.2.2. Pertanian

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan local dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 206
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	110,514.01	116,874.30	121,470.07	124,399.04	155.172,43
2	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal (Ha)	22,323	22,975	23,488	23,986	25.916
3	Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ku/Ha)	51.15	54.13	56.71	58.140	59,8

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Barru 2020

Total Pertanaman Padi Tahun 2020 seluas 25.916 Ha dengan merupakan hasil produksi dari Padi Sawah 155.172,43 Ton.

2. Cakupan bina kelompok petani

Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dengan jumlah kelompok tani yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 207
Cakupan bina kelompok petani Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda	126	117	140	44	86
2	Jumlah kelompok tani	604	705	709	713	720
3	Persen	20,86	16,60	19,75	6.17	11,94

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Barru 2020

Jumlah Kelompok Tani sebanyak 86 kelompok merupakan kelompok yang mendapatkan Bantuan Pemda dari beberapa Bidang : Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan.

2.3.2.3. Perdagangan

1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Nilai ekspor	Nilai Impor	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan
1	2016	112.278.000	0	112.278.000
2	2017	127.438.834	0	127.438.834
3	2018	128,712,891	0	128.712.891
4	2019	97.264.928	0	97.264.928
5	2020	97.264.928	0	97.264.928

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2021

2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.209
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	3	6	9	12	12
2	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal	39	39	39	39	39
3	Cakupan (%)	7.69%	15.38%	23.08%	30,77%	30,77

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2021

2.3.2.4. Perindustrian

1. Cakupan bina kelompok pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemdadengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.210
Cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	20	20	20	20.67	14%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2021

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2019 sebsar 20,67 menunjukkan bahwa dari 30 kelompok pengrajin yang ada di kabupaten Barru terdapat 7 kelompok yang mendapatkan bantuan/binaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan

Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Produksi perikanan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211
Produksi perikanan Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan (ton)	23.279,07	24.148,03	24.373,41	25.648,66	25733,90
2	Target Daerah (ton)	24.112,72	24.968,64	25.874,52	26.587,30	27324,19
3	Persen	96,54	96,71	94,20	96,46	94,17

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2021

Jumlah produksi ikan terdiri dari jumlah produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Jumlah produksi ikan mengalami peningkatan dari 24.373,41 ton pada tahun 2018 menjadi 25.648,66 ton pada tahun 2019 dengan jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 19.450, 2 Ton dan jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 6.198,46 Ton. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh dukungan dari peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan perikanan, pembinaan terhadap nelayan yang semakin intensif serta peningkatan teknologi usaha perikanan.

Walaupun jumlah produksi ikan mengalami peningkatan namun belum mempu mencapai target daerah yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar 96,46 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertama, masih adanya lokasi perikanan budidaya yang rawan terhadap penyakit disebabkan seringnya tambak tergenang banjir dan saluran pemasok air untuk tambak sama dengan saluran pembuangan air sawah sehingga terjadi kontaminasi air tambak dengan zat kima limbah pertanian. Kedua, adanya Batasan kewenangan dalam pengawasan sumberdaya perikanan sehingga penangkap ikan secara illegal masih sering terjadi dan yang terakhir jumlah nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional masih lebih besar dibandingkan yang menggunakan alat tangkap modern.

2. Konsumsi ikan

Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.212

Konsumsi ikan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Konsumsi ikan Kg	Target Daerah Kg	Persentase
1	2016	7.787.740	7.804,53	99.78
2	2017	7.787.740	7.804,53	99.78
3	2018	7.913.736	7.917.209	99,96
4	2019	7.929.362	7.929.561	99,53
5	2020	4.580.000	4.553.000	99,44

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2021

3. Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan antara Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 213

Cakupan bina kelompok nelayan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan	31	39	27	63	70
2	Target Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan	14	16	16	18	18
3	Persen	221	175	168,75	350	388

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2021

Besarnya capaian cakupan bina kelompok nelayan disebabkan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap melalui pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa alat tangkap, mesin kapal, GPS dan Kapal motor tidak hanya DAU namun juga DAK melalui 2 Kegiatan yaitu kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan pengadaan saranan dan prasarana perikanan tangkap.

4. Produksi perikanan kelompok nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan di daerah yang dinyatakan dalam persen. Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.214

Produksi perikanan kelompok nelayan Kab.Barru Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Jumlah Produksi ikan di daerah	Prosentase
1	2016	5.161,07	23.279,07	22,17
2	2017	5.358,57	24.148,03	22,19
3	2018	8174,37	24.372,41	35,53
4	2019	8.583,09	25.874,52	33,17
5	2020	12.555,58	25.733,90	48,79

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2021

2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan rentan waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rentan waktu 5 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rentan waktu 30 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan ditetapkan dengan PERKADA. Ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Barru pada tahun 2016 – 2020 selalu tersedia sesuai peraturan perundang-undangan.

Rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan sebagaimana termuat dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada tingkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional , memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun tahun 2019 adalah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1);
- Peraturan Bupati Barru Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 nomor 20)
- Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 22).

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.215

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab.Barru Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	169	191	166	157	157
2	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan	171	191	166	157	157
3	Persen	98,83%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Konsistensi Penjabaran program RKPD kedalam APBD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di APBD dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dan angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD dengan RKPD. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.216
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan	169	161	166	157	157
2	Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan	169	191	166	157	157
3	Persen	100%	84,29%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Sementara itu, Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD adalah perbandingan jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100% dicapai pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 sedangkan dibawah 100% dicapai pada tahun 2016. Penjabaran program RKPD kedalam APBD sebesar 100% dicapai pada tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 sedangkan dibawah 100% dicapai pada tahun 2017. Angka 100% menunjukkan dokumen APBD telah konsisten dengan RKPD dan RKPD telah konsisten dengan RPJMD. Program yang ada pada PJMD telah dijabarkan sepenuhnya pada RKPD, dan program yang ada pada APBD sepenuhnya telah berpedoman kepada RKPD.

Adapun angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Jumlah program yang direncanakan pada RPJM tidak seutuhnya termuat pada RKPD dan jumlah program yang direncanakan di RKPD tidak seutuhnya mendapat penganggaran pada APBD. Hal ini disebabkan karena belum diterapkannya aplikasi E-Planning dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta kurangnya pengawasan aparatur perencana terhadap konsistensi program pada RPJMD ke dalam RKPD dan program yang ada pada RKPD ke dalam APBD. Selanjutnya perlu peningkatan kualitas aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan sampai pada penganggaran baik di tingkat kabupaten maupun SKPD.

2.3.4.2. Keuangan

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian ketaatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK terhadap

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217
Opini BPK terhadap laporan keuangan Kab.Barru Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Opini BPK
1	2016	WTP
2	2017	WTP
3	2018	WTP
4	2019	WTP
5	2020	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2021

2. Persentase SILPA

Silpa adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase SILPA merupakan perbandingan antara total SILPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase SILPA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.218
Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase
1	2016	171,849,905,419.98	1,094,126,775,699.72	15.71%
2	2017	171.858.014.411,98	1.357.790.897.071,09	12,66%
3	2018	141.476.534.480,84	992.656.086.174,65	14.25%
4	2019	83.717.109.878,35	1.119.164.212.811,57	13,37%
5	2020	83.734.357.547,35	992.414.128.554,56	8,43%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2021

3. Persentase belanja pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja pendidikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.219
Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase
1	2016	298,572,946,117.50	1,094,126,775,699.72	27.29%
2	2017	276.889.978.580,7	1.357.790.897.071,09	20,39%
3	2018	273.979.301.209,00	992.656.086.174,65	27,60%
4	2019	285.957.897.587,00	992.414.128.555	25,55%
5	2020	232.729.629.587,00	1.015.385.318.265	22,92%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2021

4. Persentase belanja kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan kesehatan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja kesehatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.220

Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase
1	2016	162,958,451,694.68	1,094,126,775,699.72	14.89%
2	2017	148.650.285.899,00	1.357.790.897.071,09	10,94%
3	2018	148.763.525.015,15	992.656.086.174,65	14,99%
4	2019	190.954.022.675	992.414.128.555	19,24%
5	2020	189.542.241.675	1.015.385.318.265	18,66%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2021

5. Penetapan APBD

APBD ditetapkan dengan perkada yang sebelumnya telah dibahas dengan badan legislatif (DPRD). Penetapan APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.221

Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Penetapan APBD
1	2016	29 Desember 2015
2	2017	29 Desember 2016
3	2018	20 Desember 2017
4	2019	17 Desember 2018
5	2020	29 Desember 2019

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barru Tahun 2021

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Salah satu kebijakan pemerintah dalam UU ASN nomor 5 Tahun 2014, Setiap ASN berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam per tahun. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dihitung beradsarkan perbandingan antara jumlah jam pelajaran yang telah diikuti PNS dengan jumlah PNS. Rata-rata lama pegawai mendaptkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 222

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah JPL yang telah diikuti PNS Kab. Barru	74810	50125	39430	22104	64916
2	Jumlah PNS	4421	4217	4122	4098	3919
3	Rata - Rata lama Diklat (JP)	16,92	11,89	9,57	5,39	16,56

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2021

2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah seluruh ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.223

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Diklat Teknis	4	109	217	1542	284
2	Jumlah PNS	4421	4217	4170	4098	3919
3	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0.09%	2.58%	5.26%	37.63%	7,25%

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2021

3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.224

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural	380	414	456	462	383
2	Jumlah Total Jabatan	695	664	664	664	668
3	Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	54.68%	62.35%	68.67%	69.58%	57,34%

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2021

4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang aparatur sipil negara, jabaatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sedangkan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.225

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu Kab.Barru Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	27	33	26	33	30
2	Jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah	566	493	530	579	544
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah	2.715 Orang	2.695 Orang	2.695 Orang	2.654 Orang	2.546 orang

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2021

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu penunjang urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah dimana hasil penelitian dan pengembanganyang akurat dalam bentuk konsep, model, scenario maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul disuatu wilayah.

1. Persentase implementasi rencana kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD yang dinyatakan dalam persen. Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.226

Persentase implementasi rencana kelitbangan Kab. Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	9	10	10	5	8
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	9	10	10	10	8
3	Persen	100%	100%	100%	50%	100%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam hal ini hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan renja perangkat daerah yang berkenaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.227

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Kab.Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti	100	85	15	3	7
2.	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	110	91	17	4	8
3	Persen	90,91%	93,41%	88,24%	75%	87,5%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah jumlah perangkat derah yang difasilitasi dengan jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase

perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 228
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	5	15	17	19	40
2	Jumlah total perangkat daerah	37	36	36	36	44
3	Persen	5,41%	41,66%	47.22%	52,77%	90,90%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 229
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan inovasi daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	5	15	17	19	50
2	Jumlah inovasi yang Diusulkan	15	36	36	36	77
3	Persen	33.33%	41,67%	47.22%	52,77%	64,93%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

Tabel 2. 230
Daftar inovasi daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2021

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 – 2019	INOVASI TAHUN 2020 - 2021	KET
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem pelayanan kepegawaian lancar efektif berkualitas, berintegrasi dan inovatif (SIPAKALEBBI)	-	
		Tambahan Penghasilan pegawai Berbasis E- Kinerja	-	
2	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah	Kopi Pintar	-	
		-	Peningkatan Minat Baca Pada Keluarga anak Pos PAUD dan Kelmpok Bermain di Pendidikan anak Usia Dini	
3	Dinas Sosial	-	Percepatan Penerbitan Rekomendasi KIS, Melalui Ruang Pelayanan Publik	
		Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui Pendampingan TKSK di setiap Kecamatan	-	
4	Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil	Percepatan penerbitan akta kelahiran melaui short massage service (SMS)	-	
		-	JEBOL LADAKU (Jemput Bola Layanan administrasi kepedudukan)	
		-	Percepatan penerbitan AKTA Kematian Melalui Whats'up	
		-	LAFOR pada DUKCAPIL (Pelayanan Informasi, Pengaduan Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 – 2019	INOVASI TAHUN 2020 - 2021	KET
5	Dinas Penanaman Modal, PTSP & TK	Agen Perizinan		
		-	Inventarisasi asset dengan Barcode	
		-	Peizinan di Ujung Jari	
6	Puskesmas Bojo Baru	Catin Sehat	-	
7	Desa Pao-Pao	Siap Desa Digital	-	
8	RSUD	-	Pelayanan Geriatri	2020
		-	Pelayanan Pendaftaran Online	2020
9	Dinas Kesehatan	-	PSC 119	
		-	Posyandu Terintegrasi	
10	Inspektorat Daerah	-	Klinik konsultasi	
		-	E- Audit	
		-	Asistensi APBDes	
		-	Asistensi RKAS	
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Peningkatan Mitigasi Bencana	
		-	Peningkatan Penanganan Darurat Bencana	
		-	Analisis Kajian Bencana (JITU PASNA)	
12	BPKAD	-	BUKA MATA (Membangun Komitmen Menata Aset/Klinik Aset)	
		-	Sigadis Peka (Sistem Informasi dan Integrasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	
13	Bakesbangpol & Linmas	-	Program Inovasi Pengolahan Data Kesbangpol Berbasis Internet	
14	BAPPEDA	-	Klinik Lakip	
		-	M-Water	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	e-Paper	
		-	Register tamu secara digital	
		-	Agenda Rapat Digital	
16	Dinas PMD,PPKB&P3A	-	Klinik Desa	
		-	Membangun Sinergitas dalam Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	Pemanfaatan sampah menjadi Biogas dan Pembangkit Tenaga Listrik	
		-	Peningkatan Laboratorium menjadi Laboratorium Terakreditasi	
		-	Pengurangan Sampah Kelola Bank Sampah	
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung olahraga	
		-	Kolaborasi dan Sinergitas percepatan pengembangan wirausaha muda	
19	Dinas Pertanian	-	Pengembangan Kawasan Agribisnis Berkelanjutan	
		-	Pelayanan Kesehatan Hewan Berbasis Masyarakat	
		-	Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian oleh BPP	

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 – 2019	INOVASI TAHUN 2020 - 2021	KET
20	Dinas Perikanan	-	Permentasi pakan alami untuk mengatur efisien dan efektifitas pakan	
		-	Aplikasi smart untuk menjaga kualitas benih unggul	
21	Dinas Pariwisata	Event festival Budaya To Berru	Dokter Pariwisata (Pendorong kemajuan Terpadu Pariwisata)	
		Pengembangan Destinasi Baru	Aplikasi Jelajah Wisata Barru	
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	Terus Terang, Terang Terus	
		-	Pendataan RTLH Berbasis System Informasi (E-RTLH)	
23	Dinas Pendidikan	-	Literasi Sekolah	
		-	Memperkenalkan Sastra Tutur(Massure)Kepada Siswa	
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Total Jaring Kondom (Tindakan Operasional Tambal Lubang jalan Irigasi Kondisi Objek Aman)	
		-	Gerbang Putri Ayu (Gerakan Membangun Penetaan dan Pemanfaatan Ruang Aman dan Nyaman)	
25	Dinas Perhubungan	-	Sinergitas stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Barru	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Pencegahan Pelanggaran PERDA melalui Bintaro (Pembinaan, Penguatan Kelembagaan&Integritas Patroli)	
		-	Penanganan Kebakaran Berbasis Masyarakat Melalui Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)	
27	Sekretariat Dewan	-	E – Reses	
		-	E – Aspirasi	
28	Kecamatan Pujananting	-	P.5 Pujananting	
		-	Gebyar PBB	
29	Kecamatan Soppeng Riaja	-	Laboratorium Desa Membangun	
		-	Strategi advokasi Penanganan Sampah (Unit Layanan)	
30	Kecamatan Mallusetasi	-	SIMPLE (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) Dengan Percepatan pelayanan pencatatan sipil dan Kependudukan dan Pendistribusian Surat Online	
31	Kecamatan Balusu	-	Pelayanan Adinistrasi Terpadu	
		-	Pelayanan Perizinan (Aplikasi penerbitan IUMK dan Persuratan melalui WA)	
32	Kecamatan Tanete Rilau	-	APESPEDE (Aplikasi SPPD)	
		-	Anda Puas Kami Senang (Sistem Pelayanan)	

NO	NAMA OPD	INOVASI TAHUN 2018 – 2019	INOVASI TAHUN 2020 - 2021	KET
33	Kecamatan Tanete Riaja	-	BERJUMPA BERLIAN (Bersama Masyarakat, jum'at pagi bersihkan lingkungan)	
34	Kecamatan Barru	-	Inovasi Pelayanan Terpadu	
35	Bagian Hukum	-	Media Online Produk Hukum Daerah	
		-	Mempercepat Penyelesaian TL dengan Aplikasi SIPTL	
36	Bagian Humas	-	Teamsus Media Desa/Kel Sosial Care	
37	Bagian Pemerintahan dan Otoda	-	Excelent Service dengan Stop Reduplikasi Adminstrasi Pemerintahan	
		-	Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui e- mail pada semua Kecamatan di Kabupaten Barru	
38	Bagian Umum	-	Aplikasi 3 Sipa	
		-	Memberi Kenyamanan pada Pengguna Kamar Kecil Kantor Bupati Barru	
39	Bagian Administrasi perekonomian	-	Klinik UMKM	
		-	Dewan CSR	
40	Bagian Organisasi	-	E- TUSI (Tugas Pokok dan Fungsi secara Elektronik)	
41	Bagian Administrasi Pembangunan	-	Penerapan AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal)	
		-	Pabbicara Administrasi Penyedia Barjas	
42	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	Reward Pemerintah Daerah kepada Imam Masjid, Pengawai Syara' dan Guru Mengaji menuju Baitullah atas Prestasinya	
43	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	Pengadaan Sewa/Rental Mobil Operasional Pemerintah (E- Katalog)	

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2021

Ada 3 fase dalam proses inovasi yaitu : Inisiatif, Ujicoba dan Penerapan. Di Kabupaten Barru terdapat 10 (sepuluh) inovasi merupakan fase penerapan, yang dilakukan pada tahun 2018-2019, 2 (dua) inovasi dalam fase ujicoba, dilakukan pada tahun 2021 dan 75 (tujuh puluh lima) judul inovasi masuk dalam fase inisiatif yang akan dilakukan di tahun 2021.

Untuk jenis kebaharuannya, Inovasi dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih fungsional, lebih mudah dan semacamnya. Hampir semua inovasi merupakan kebaharuan. Inovasi yang telah dilakukan di Kabupaten Barru merupakan kebaharuan untuk menunjang kinerja dari perangkat daerah yang bermanfaat bagi Aparatur sipil Negara,

masyarakat maupun bagi pemerintah daerah, sehingga dapat menghemat energi dan biaya.

2.3.4.5. Pengawasan

1. Persentase tindak lanjut temuan

Persentase tindak lanjut temuan merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 231
Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	234	87	51	171	156
2	Jumlah total temuan	293	98	68	243	204
3	Persen ((1/2)x100%)	79,86	88,77	91,67	70,37	76,74

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2021

2. Persentase pelanggaran pegawai

Persentase pelanggaran pegawai merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 232
Persentase pelanggaran pegawai Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	29	7	7	0	0
2	Jumlah total ASN	4.421	4217	4.122	4.122	4.122
3	Persen ((1/2)x100%)	6,56	0,16	0,17	0	0

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2021

3. Jumlah temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Tabel 2.233
Jumlah temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan BPK	30	12	9	10	10

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2021

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota serta terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke

dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2. 234
Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Sekretaris DPRD Kab. Barru Tahun 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Indeks Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertubhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini seagai motor pembangunan suatu daerah. Jaringan transportasi merupakan salah satu tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan, terminal, irigasi, layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan. Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.235
Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kemantapan Jalan	0,606	0,608	0,641	0,651
2	Kemantapan Irigasi	46,53	49,94	48,06	50,41
3	Akses Air Minum layak	59,97	88,02	95.30	95,61
4	Akses Sanitasi Layak	90,04	94,89	100	100
5	Ketersediaan Pelabuhan	5	5	5	5
	Indeks Layanan Infrastruktur	**77,61%**	**85,17%**	**88,24%**	**89,26%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2021

2. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan perbandngan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga yang dinyatakan dalam persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Barru tahun 2017 -2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.236
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kab.Barru

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	44.007	47.546	57.154
2	Seluruh Rumah Tangga	54.707	56.657	59.635
3	Persentase	80%	83,91%	95,84%

Sumber : PLN Kabupaten Barru Tahun 2021

2.4.2 Produktivitas Total Daerah

Perkembangan produktifitas total daerah Kabuaten Barru dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan. Angka partisipasi angkatan kerja yang merupakan perbandingan angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Barru berfluktuasi rentang tahun 2016 sampai dengan 2020. Adapun capaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.237
Produktifitas Total Daerah Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	91136	103996	102403	106779	107151
2	Produktifitas Total Daerah (Miliar Rupiah)	3.916,34	4.169,98	4.420,93	4.797,43	4.839,12

Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2021

2.5 Evaluasi Capaian Target Indikator Stadar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penetapan SPM untuk urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018. Penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak; dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Adapun capaian SPM Kabupaten Barru berdasarkan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.238
Capaian SPM Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian SPM				
			2016	2017	2018	2019	2020
SPM PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak usia dini	100%	100%	78,28%	79,21%	80,25%	85,05%
2	Pendidikan Dasar (SD)	100%	100%	93,67%	92,14%	94,71%	93,99%
	Pendidikan Dasar (SMP)	100%	100%	86,58%	85,61%	90,42%	90,50%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	37,16%	37,16%	36,10%	36,10%
SPM KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	100%	100%	100%	90.52%	91,96%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	100%	100%	100%	92.5%	98,98%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	94.36%	97,64%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	100%	100%	100%	79.72%	95,94%	61%
5	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar	100%	100%	100%	95.38%	97,17%	64%
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	100%	100%	100%	42.44%	91,16%	57%
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	100%	100%	100%	61.44%	91,17%	79%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	71.04%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV	100%	100%	100%	19%	98%	72%

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian SPM				
			2016	2017	2018	2019	2020
SPM PEKERJAAN UMUM							
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	53,53%	59,97%	88,02%	95.30%	95,61 %
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	90,04%	90,04%	94,89%	95,79%	100%
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	0	0	0	14%	0
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	0	0	0	0	0
SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	80%	80%	80%
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	40%	40%	40%
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100%	100%	100%	32%	100%	100%
SPM SOSIAL							
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	63,24%	100%
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	71%	41%	0	63,24%	100%
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100%	3,90%	8,00%	74,37%	75%	100%
4	rehabilitasi sosial das ar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	3,83%	7,49%	100%	100%	100%
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	0	0	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda 2021

Berdasarkan tabel diatas capaian SPM kabupaten Barru masih perlu perhatian karena pencapaian yang belum maksimal. Koordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya sangat diperlukan. Adapun permasalahan terkait pencapaian SPM adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pendekatan integratif untuk pencapaian SPM sehingga program–program terkait SPM yang diupayakan belum dapat mendorong akselerasi dan efektitas pencapaian target SPM menuju 100%.

2. Pada jenjang Pendidikan dan Kesehatan diperlukan upaya pemenuhan sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan. Tantangan yang berat dikarenakan tidak hanya terkait penyediaan fasilitas dan tenaga pendidikan dan juga kesehatan oleh pemerintah namun juga kesadaran masyarakat itu sendiri.
3. Belum optimalnya dukungan terhadap penanggulangan bencana termasuk belum adanya Dokumen Penanggulangan Bencana, selain itu luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayan penanggulangan bencana dalam hal ini bencana kebakaran serta belum terpenuhinya fasilitas bencana.
4. Belum adanya inisiasi kebijakan rehabilitasi sosial luar panti dalam bentuk *home/day care services* bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak potensial. Untuk itu perlu adanya inisiasi tersebut diatas sebagai upaya pemberian pelayanan dasar kepada warga miskin tidak potensial.
5. Perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak.

2.6 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistanable Development Goals* (TPB/SDGs)

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga ikut berkomitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Barru diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 indikator dengan 16 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun dari 220 indikator tersebut yang kemudian dilaksanakan hanya sebanyak 55 indikator. Adapun capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.239

Rekapitulasi Capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2016 s/d 2021 Berdasarkan Tujuan

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target akhir periode (2021)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	9,45	9,71	9,04	8,57	8,26	8,11	Belum Tercapai
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Orang	3044	3646	6332	6332	6430	6565	Belum Tercapai
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	60,70	66,49	88,02	95.30	95,61	100	Belum Tercapai
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	64,90	90,04	95,1	95,79	100	100	Belum Tercapai
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	%	89,46	93,67	92,14	94,71	93.99	95	Belum Tercapai
6	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jiwa / 100.000 org	1,2	2,9	NA	0,30	0,002	0	Belum Tercapai
7	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Desa	0	2	2	2	3	2	Melampaui
8	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Rp	2.150.805.000	5.556.600.000	NA	259.048.000	147.230.000	0	Belum Tercapai
9	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	%	0,48	1,37	3.51	5,01	5,72	1.55	Melampaui
10	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	%	73,29	75,18	73.51	73.51	7	76.8	Belum Tercapai
11	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	38,57	46,58	42.6	42,01	41,87	48.94	Melampaui
12	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Kurus)	Poin	0,03	0,03	0.03	0,02	0,01	0	Belum Tercapai
13	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	85	87	89.1	NA	91,2	95	Belum Tercapai

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target akhir periode (2021)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
14	Angka Kematian Ibu (AKI)	Poin	233,49	131	4	222,93	98	0	Belum Tercapai
15	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	/1000 jiwa	1,33	1,64	3,29	6,37	2	0,74	Belum Tercapai
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	/1000 jiwa	2	1.97	2,31	9,87	3	4	Melampaui
17	Kejadian Malaria per 1000 orang.		0,1	0,13	4,99	2	0,53	0.9	Melampaui
18	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	%	0,01	2,4	2.6	2,6	2,1	15.4	Melampaui
19	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	10,51	10,18	10.27	13,62	13,90	10.3	Melampaui
20	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	68,55	68,41	98	99	99	82,55	Melampaui
21	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	55,16	67,55	75.55	81,24	81,24	100	Belum Tercapai
22	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	37,25	67,92	62.26	74,36	74,36	100	Belum Tercapai
23	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	%	105,92	112,87	99,32	100,49	100.67	103	Belum Tercapai
24	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	%	70,2	73,91	85.04	NA	86.13	88,75	Belum Tercapai
25	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat		89,46	93,67	92.14	94,71	93.99	94	Melampaui
26	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	keg	4	4	3	5	6	6	Sesuai
27	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	%	71,24	70,86	69.29	69.29	72,87	87,29	Belum Tercapai
28	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	53,53	59,97	88,02	95.30	95,61	100	Belum Tercapai
29	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	53,53	59,97	88,02	95.30	95,61	100	Belum Tercapai
30	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	64,90	90,04	95,1	95,79	100	100	Sesuai
31	Jumlah desa/kelu yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan.	Desa/ Kel	6	13	16	38	55	41	Melampaui
32	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal.	Kec	1	3	6	7	7	7	Sesuai

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target akhir periode (2021)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
33	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	kk	300	350	450	1810	1810	550	Melampaui
34	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	40	52,4	66.22	61,67	50	100	Belum Tercapai
35	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Persentase	5,59	5,95	6,51	6,13	6,02	7,39	Belum Tercapai
36	PDRB per kapita.	Juta Rupiah	31,78	34,56	37,15	41,71	42,43	47,15	Belum Tercapai
37	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	6,67	5,6	5,32	5,79	6,39	5.34	Belum Tercapai
38	Jumlah wisatawan mancanegara.	org	2650	5100	245	NA	NA	3500	Belum Tercapai
39	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Org	23850	44250	54590	NA	NA	31500	Melampaui
40	Panjang jalur kereta api. (km)	km	0	6	50.25	50.25	50,25	30	Melampaui
41	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap per kapita.	(000) Rupiah	1 456 493,6	1 727 644,7	181 436.94	181 436.94	181 436.94	2 812 249	Belum Tercapai
42	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	%	6,11	4,66	5,12	5,12	5,12	6,46	Belum Tercapai
43	Koefisien Gini.		0,36	0,37	0,39	0,38	0,36	0.34	Belum Tercapai
44	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	%	9,54	9,71	9.04	8,57	8,26	8,11	Belum Tercapai
45	Jumlah desa tertinggal.	Desa	21	21	0	0	0	12	Melampau
46	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	1,2	2,9	NA	0,30	0,002	0	Belum Tercapai
47	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	rp	2 150 805 000	5 556 600 000	NA	259.048.000	147.230.000	0	Belum Tercapai
48	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	%	7,03	12,28	18	18	21	33,28	Belum Tercapai
49	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	JIWA	1,2	2,9	NA	0,30	0,002	0	Belum Tercapai
50	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	%	51,1	51,1	51.26	51.26	69,77	55,1	Melampaui
51	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dok	1	1	0	0	0	4	Belum Tercapai
52	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jiwa	1	3	0	0	0	0	Sesuai

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target akhir periode (2021)	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
53	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	0,00063	0,00078	NA	0,10	0,002	0	Belum Tercapai
54	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	11,11	11,11	11.11	11.11	11,11	15,50	Belum Tercapai
55	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	96%	96%	89.09	92,05	92	98	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 untuk dipenuhi target pencapaiannya itu sebanyak 55 Indikator. 46 indikator sampai dengan Tahun 2019 belum tercapai, 3 indikator yang sesuai dan 6 indikator TPB yang telah mencapai target. Adapun beberapa kendala dalam pencapaian TPB/SDGs dikarenakan penerapan SGDs dari keseluruhan stakeholders terdapat kurang pemahaman akan pentingnya implementasi SDGs, yaitu dari segi masyarakat. Masyarakat tidak sepenuhnya paham akan pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan ini. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan SDGs. Sehingga harapannya para stakeholders dapat saling memaksimalkan dan mendukung akan implementasi dari Sustainable Development Goals.

2.7 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020 diukur melalui indikator kinerja yang menunjukkan bahwa dari 199 yang diukur, terdapat 59 indikator yang telah melampaui target yang di tetapkan pada tahun 2020, 57 indikator yang sesuai target 2020 dan 83 indikator yang belum mencapai target 2020. Kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020 dengan berbagai indikator dan capaiannya disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.240

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
1					**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	**1**				**KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**								
1	1	1			Tingkat kemiskinan	%	9,45	9,71	9,04	8,57	8,26	8,11	Belum Tercapai
1	1	2			Pertumbuhan Ekonomi	%	6,09	6,48	6,81	7,41	0,87	6,98	Belum Tercapai
1	1	3			PDRB per kapita	Juta Rp	31,70	34,48	37,15	42	40,3	47	Belum Tercapai
1	1	4			Indeks Gini	Poin	0,361	0,389	0,38	0,36	0,36	0,34	Belum Tercapai
1	1	5			Laju inflasi	%	2,11	3,43	1,96	2,45	1,61	2,9	Melampaui
1	1	6			Indeks Williamson	Poin	0,25	0,24	0,27	0,29	0,29	-	-
1	**2**				**KESEJAHTERAAN SOSIAL**								
1	2	1			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,07	69,56	69,63	70,6	71	70,1	Melampaui
1	2	2			Tingkat pengangguran terbuka	%	6,67	5,6	5,38	5,79	6,39	5,4	Belum Tercapai
1	2	3			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.54	13.55	13.56	13,57	13,58	13,65	Belum Tercapai
1	2	4			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.60	7.85	7.86	7,96	8,23	8,12	Melampaui
1	2	5			Angka usia harapan hidup	Tahun	68.16	68.30	68.60	68,91	69,02	69	Melampaui
1	2	6			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	-	95,51	95,44	95,42	95,52	-	-
1	2	7			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	-	63,54	69,24	63,31	63,96	-	-
1	2	8			Indeks Kepuasan Masyarakat		NA	NA	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Belum Tercapai
2					**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
2	**2**				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**								
2	**2**	**1**			**Pendidikan**								
2	2	1	1		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	73,91	78,28	79,21	80,25	85,05	86,78	Belum Tercapai
2	**2**	**1**	**2**		**Angka Partisipasi Kasar**								
2	2	1	2	1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	105,92	112,87	99,32	100,49	100,67	106	Melampaui
2	2	1	2	2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	106,03	113,81	103,23	107,82	112,09	106,5	Melampaui
2	**2**	**1**	**3**		**Angka Partisipasi Murni**								
2	2	1	3	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	89,46	93,67	92,14	94,71	93.99	94	Belum tercapai
2	2	1	3	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,59	86,58	85,61	90,42	90.50	90	Sesuaii

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	**2**	**1**	**4**		**Angka partisipasi sekolah**								
2	2	1	4	1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	89,46	93,67	92,13	100,4	97,69	94	Melampaui
2	2	1	4	2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	88,59	86,58	85,61	107,38	93,41	94	Belum tercapai
2	**2**	**1**	**5**		**Angka Putus Sekolah:**								
2	2	1	5	1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,12 %	0,38%	0,18%	0,38%	0,44	0,3	Belum tercapai
2	2	1	5	2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,41 %	0,59%	0,35%	1,08%	1,19	0,5	Belum tercapai
2	**2**	**1**	**6**		**AngkaKelulusan:**								
2	2	1	6	1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	98,81	100	100	Sesuai
2	2	1	6	2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	97,11	100	100	Sesuai
2	**2**	**1**	**7**		**Angka Melanjutkan**								
2	2	1	7	1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,52	101,73	105,81	114,23	122,23	99	Melampaui
2	2	1	7	2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	-	-	-	NA	NA	94	Belum Tercapai
2	**2**	**1**	**8**		**Fasilitas Pendidikan:**								
2	2	1	8	1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	91,56	95,56	88,44	89	89	94,73	Belum Tercapai
2	2	1	8	2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	96,15	98,07	50	55	55	98,3	Belum Tercapai
2	**2**	**1**	**9**		**Rasio ketersediaan sekolah**								
2	2	1	9	1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	%	115,58	122,39	114,07	102,63	102,63	122,39	Belum Tercapai
2	2	1	9	2	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	%	53,1	55,9	53,07	40,59	40,59	55,9	Belum Tercapai
2	**2**	**1**	**10**		**Rasio guru/murid**								
2	2	1	10	1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)		920,51	1011,57	1074,24	1228,34	1.100,34	1080	Belum Tercapai
2	2	1	10	2	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)		559,56	707,6	819,67	1109,48	1,216,47	740	Melampaui
2	2	1	11		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98,5	98,85	98,97	99,71	99,03	99,15	Melampaui
2	2	1	12		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,89 %	95,15 %	90.27 %	88,24%	94,89	95,3	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	2	2			Kesehatan								
2	2	2	1		Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	2	1,97	2,31	9,87	3	1,93	Belum Tercapai
2	2	2	2		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	angka per 100.000	99,8	99,8	99,77	99,13	99,7	99,88	Belum Tercapai
2	2	2	3		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	0,67	0,33	0,99	1,59	1	0,21	Belum Tercapai
2	2	2	4		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	7,34	5,91	3,29	6,37	2	4,7	Belum Tercapai
2	2	2	5		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka per 100.000	233,49	65,7	131,8	222,93	98	65,3	Belum Tercapai
2	2	2	6		Rasio dokter per satuan penduduk	angka per 1000	0,15	0,17	0,13	0,2	0.13	0,27	Belum Tercapai
2	2	2	7		Rasio tenaga medis persatuan penduduk	angka per 1000	0,28	0,23	0,32	0,41	0.30	0,43	Belum Tercapai
2	2	2	8		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	65,57	77,44	69,77	75,29	100	87	Belum Tercapai
2	2	2	9		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98,18	95,68	92,5	95,99	98	98	Belum Tercapai
2	2	2	10		Persentase Balita Gizi buruk	%	0,05	0,09	0,02	0,03	0,04	0,05	Melampaui
2	2	2	11		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	2	2	12		Cakupan kunjungan bayi	%	101,69	101,9	97,1	97,13	95.51	100	Belum Tercapai
2	2	2	13		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	92,56	91,4	90,52	91,96	93.21	93,8	Belum Tercapai
2	2	2	14		Cakupan pelayanan nifas	%	91,29	96,42	90,73	93,57	98.87	98,8	Belum Tercapai
2	2	2	15		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	57,15	51,2	53,63	54,47	100	52,8	Melampaui
2	2	2	16		Cakupan pelayanan anak balita	%	104,13	93,01	79,72	79,84	60.60	92	Belum Tercapai
2	2	2	17		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	38,78	6,42	0	5,04	0	8,7	Belum Tercapai
2	2	2	18		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	24,26	30,99	22,47	92,83	64	100	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	**2**	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
2	2	3	1		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Angka	0,55	61	0,608	0,641	0,651	0,72	Belum Tercapai
2	2	3	2		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	62,71	68,41	60,8	71,72	73,55	83,04	Belum Tercapai
2	2	3	4		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90,04	90,04	95,79	95,79	100	93,29	Melampaui
2	2	3	5		Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	-	2,39	-	3,88	3,88	100	Belum tercapai
2	2	3	6		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	46,53	46,61	49,94	48,06	50,41	47,26	Melampaui
2	2	3	7		Rasio Jaringan Irigasi		18,15	18,56	18,9	27,73	27,73	22,23	Melampaui
2	2	3	8		Presentase penduduk berakses air minum	%	53,53	60,7	88,02	95,3	95,61	100	Belum Tercapai
2	2	3	9		Persentase areal kawasan kumuh	%	0,26	0,26	0,26	0,02	0,02	0,06	Melampaui
2	**2**	**4**			**Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman**								
2	2	4	1		Rasio rumah layak huni	Angka	0,15	0,26	0,25	0,25	0,24	0,3	Melampaui
2	2	4	2		Rasio permukiman layak huni	Angka	0,08	0,08	0,99	0,99	0,99	0,1	Melampaui
2	**2**	**5**			**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
2	2	5	1		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Per 10.000 pddk	0,49	0,48	0,6	0,6	0,47	0,49	Melampaui
2	2	5	2		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	2	5	3		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	10,16	52,98	73,25	100	100	69,99	Melampaui
2	2	5	4		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	2	5	5		Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	**2**	**6**			**Sosial**								
2	2	6	1		Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	24,76 %	31,07 %	93,2	95,68	45,15	100%	Sesuai
2	2	6	2		Presentase PMKS yang tertangani	%	24,76 %	31,07 %	93,2	95,68	45,15	100%	Sesuai
2	**3**				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**								
2	**3**	**1**			**Tenaga Kerja**								
2	3	1			Angka sengketa pengusaha- pekerja pertahun		0	0	3,09	0,02	0	2	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	3	1			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		0	0	0	0		0	Sesuai
2	3	1			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	7,29	5,59	16,15	92,11	52,8	30%	Melampaui
2	3	1			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	55,94	4,87	0,73	77,23	79,27	70	Melampaui
2	3	1			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	Sesuai
2	3	1			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	100	100	100	96	Melampaui
2	3	1			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	0	100	100	0	50	Melampaui
2	**3**	**2**			**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2	3	2	1		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	14,37	14	18,51	18,55	18,55	30,58	Belum Tercapai
2	3	2	2		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	24	24	24	20	20	30	Belum Tercapai
2	3	2	3		Rasio KDRT		0,024	0,017	0,02	0,02	0,02	0,005	Belum Tercapai
2	3	2	4		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	3	2	5		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	3	2	6		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	3	2	7		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	3	2	8		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	3	2	9		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	3	2	10		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	**3**	**3**			**Pangan**								
2	3	3	1		Ketersediaan pangan utama	%	42,43	41,78	43,66	43,79	4379	46,43	Belum Tercapai
2	3	3	2		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		0,201	0,249	0,275	0,423	0,423	65	Belum Tercapai
2	**3**	**5**			**Lingkungan Hidup**								
2	3	5	1		Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada/ Tidak ada	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	3	5	2		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Ada/ Tidak ada	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	3	5	3		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/ Tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	0	ADA	Sesuai
2	3	5	4		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air		NA	52,4	100	100	50	100%	Belum Tercapai
2	3	5	5		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara		NA	94,02	94,2	93,4	90,59	95	Belum Tercapai
2	3	5	6		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas tutupan Lahan		NA	51,1	51,2	51,3	69,77	51,5	Sesuai
2	3	5	7		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	0	4,80%	9,00%	8,00%	0,05	5,40%	Melampaui
2	3	5	8		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah		0	52,4	1	0	1	1	Sesuai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	3	5	9		Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ Tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Sesuai
2	3	5	10		Presentase jumlah sampah yang tertangani	%	97,82	97,92	98,01	80,41	99	99%	Belum Tercapai
2	**3**	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
2	3	6	1		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0,92	0,94	0,998	0,997	0,999	0,98	Melampaui
2	3	6	2		Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,46	0,92	0,87	0,92	0,92	0,97	Sesuai
2	3	6	3		Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100		100	Sesuai
2	3	6	4		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ADA	Sesuai
2	3	6	5		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sesuai
2	3	6	6		Cakupan Penerbitan KTP	%	92,48	92,48	99,84	99,74	99,99	98	Melampaui
2	**3**	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
2	3	7	1		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	99	98	100	100	100	100%	Sesuai
2	3	7	2		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1 Kelompok Binaan LPM (kel/desa)	1 Kelompok Binaan LPM (kel/desa)	1 Kelompok Binaan LPM (kel/desa)	1 Kelompok Binaaan LPM (kel/desa)	1	1 Kelompok Binaaan LPM	Sesuai
2	3	7	3		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		45	31,59	27,16	27,18	39,44	32,36	Belum Tercapai
2	3	7	4		Presentase LPM Berprestasi	%	0	0	100	100	100	25,45%	Sesuai
2	3	7	5		Presentase PKK aktif	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Sesuai
2	3	7	6		Presentase Posyandu aktif	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Sesuai
2	3	7	7		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30%	30%	30%	30%	30	100%	Belum Tercapai
2	3	7	8		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50%	50%	50%	50%	50	100%	Belum Tercapai
2	**3**	**8**			**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
2	3	8	1		Rasio akseptor KB		71,41	69	70	67,88	66,63	74,9	Belum Tercapai
2	3	8	2		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	71,24	69,29	69,94	67,88	66.63	75,01%	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	3	8	3		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,83	1,72	1,7	1,71	1,51	1,5	Melampaui
2	3	8	4		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,09	16,37	29,78	19,35	16,71	15,89%	Belum Tercapai
2	3	8	5		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14,75	14,69 %	13,71	13,62	13,9	18,02%	Belum Tercapai
2	3	8	6		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	40,37	40,24	45,29	46,38	50.09	42,3	Melampaui
2	3	8	7		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	55,93	56,09	56,49	56,65	45,13	61,05	Belum Tercapai
2	3	8	8		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	40,19	42,88	43,01	43,13	30,1	51,25	Belum Tercapai
2	3	8	9		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	27,73	36,31	36,72	37,32	33,16	45,5	Belum Tercapai
2	3	8	10		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Sesuai
2	3	8	11		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	857,14	971,42	1000	1042	900	1228,57	Belum Tercapai
2	3	8	12		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Sesuai
2	3	8	13		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	19,63	38,38	42	44,92	51,15	39,02%	Melampaui
2	3	8	14		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Sesuai
2	3	8	15		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Sesuai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	3	8	16		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Sesuai
2	3	8	17		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Sesuai
2	3	8	18		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	Sesuai
2	**3**	**9**			**Perhubungan**								
2	3	9	1		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	4.799.865	1.810.091	1.693.893	1.682.943	1,682,943	1.738.710	Belum Tercapai
2	3	9	2		Rasio Ijin Trayek		0,0014	2,34	2,27	2,24	2,24	2,24	Sesuai
2	3	9	3		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		10	10	10	9	9	5/0/6	Belum Tercapai
2	3	9	4		Presentase layanan Angkutan darat	%	0,047	0,056	0,087	0,076	0.076	0,12	Belum Tercapai
2	3	9	5		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Ton	4.769.581 Orang, 17.977 Ton	939,875 Orang, 11,278 Ton	936.225 Orang, 11,235 Ton	907.025 Orang, 10.884 Ton	917909	1.703.233	Belum Tercapai
2	3	9	6		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/Ton	4.799.865 Orang, 17.977 Ton	4.808.655 Orang, 23.765 Ton	4.792.684 Orang, 24.717,87 Ton	1.728.230 Orang, 9.694.239 Ton	9,694,239	4.808.655/23.765	Belum Tercapai
2	**3**	**11**			**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
2	3	11	1		Persentase koperasi aktif	%	81,51	56,31	56,31	61,76	62,5	58,25	Melampaui
2	3	11	2		Persentase UKM non BPR/LKM UKM	%	9,56	9,79	100	93,88	96,46	9,9	Melampaui
2	3	11	3		Presentase BPR/LKM Aktif	%	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	Sesuai
2	3	11	4		Presentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,78	99,75	99,55	99,74	99,27	99,73	Melampaui
2	**3**	**12**			**Penanaman Modal**								
2	3	12	1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		534	350	325	260	118	420	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	3	12	2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	rp	537.393.500.000	600.000.000.000	729.568.400.663	730.659.152	855.316.873.042	780.000.000.000	Melampaui
2	3	12	3		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-36,18	0,78	35	0,15	17,06	0,97	Melampaui
2	**3**	**13**			**Kepemudaan dan Olahraga**								
2	3	13	1		Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	60	Melampaui
2	3	13	2		Presentase wirausaha muda	%	55,56 %	78,26	5,56	13,33	13.33	41	Belum Tercapai
2	3	13	3		Cakupan pembinaan olahraga	%	42,1	23,08	50	93,1	93,1	100	Belum Tercapai
2	3	13	4		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	73,33	5,75%	74,13	76	76	20,29%	Melampaui
2	3	13	5		Jumlah atlet berprestasi	%	4	4	0	0	0	1	Belum Tercapai
2	3	13	6		Cakupan pembinaan atlet muda	%	54,61	18,52 %	100	70,9	70,9	60	Melampaui
2	3	13	7		Jumlah Prestasi olahraga	Org	3	4	0	0	0	1	Belum Tercapai
2	**3**	**14**			**Statistik**								
2	3	14	1		Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	3	14	2		Buku "PDRB kabupaten"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	**3**	**15**			**Persandian**								
2	3	15	1		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	10%	Belum Mencapai
2	**3**	**16**			**Kebudayaan**								
2	3	16	1		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Poin	1	1	3	5	5	9	Sesuai
2	3	16	2		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	40,7	30,6	40,9	53,57	100	90	Belum Tercapai
2	3	16	3		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Poin	1	1	2	3	3	6	Sesuai
2	3	16	4		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Poin	11	11	28	28	15	30	Belum Tercapai
2	**3**	**17**			**Perpustakaan**								
2	3	17	1		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa/ tahun	147	187	194	202,142	121.286	202.960	Belum Tercapai
2	3	17	2		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	53.096	55.344	56,435	58.685	58.685	148.457	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	3	17	3		Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,33	0,32	0,31	0,31	0,3	0,95%	Belum Tercapai
2	3	18	4		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Org	1	1	3	3	3	1 org	Melampaui
2	**3**	**18**			**Kearsipan**								
2	3	18	1		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	43,59	70.27	72.97	81,08	80,5	100%	Belum Tercapai
2	3	18	2		Peningkatan SDM pengelola kearsipan		4	5	3	3	0	2	Melampaui
2	**4**				**Pelayanan Urusan Pilihan**								
2	**4**	**1**			**Pariwisata**								
2	4	1	1		Kunjungan wisata	%	102	176	186	378	186	100	Melampaui
2	4	1	2		PAD Sektor Pariwisata		0,03	0,02	0,03	0,03	0,89	0,08	Melampaui
2	**4**	**2**			**Pertanian**								
2	4	2	1		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	51.15	54.13	56.71	58.140	59,8	58,19	Melampaui
2	4	2	2		Cakupan bina kelompok petani	%	20,86	16,6	19,75	6.17	11,94	41,87	Belum Tercapai
2	**4**	**3**			**Perdagangan**								
2	4	3	1		Ekspor Bersih Perdagangan		112.278.000	127.438.834	9577188350	95776576939	95776576939	95.767.000	Melampaui
2	4	3	2		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	12,35	16,22	19,77	23,04	30,77	14,28	Melampaui
2	**4**	**4**			**Perindustrian**								
2	4	4	1		Cakupan bina kelompok pengrajin	%	20	20	20	20,67%	14	14,28%	Melampaui
2	**4**	**5**			**Kelautan dan Perikanan**								
2	4	5	1		Produksi perikanan	Ton	23.279,07	24.148,03	24.373,41	25648,66	25733,9	28086,01	Belum Tercapai
2	4	5	2		Konsumsi ikan	%	99	99	99	99	99	46	Melampaui
2	4	5	3		Cakupan bina kelompok nelayan	%	221	175	168	350	388	108	Melampaui
2	4	5	4		Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	5.161,07	5.358,57	8.174,37	8.583,00	12555	11.300,60	Melampaui
2	**5**				**Penunjang Urusan**								
2	**5**	**1**			**Perencanaan Pembangunan**								
2	5	1	1		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/ tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Sesuai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	5	1	2		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/ tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Sesuai
2	5	1	3		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/ tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Sesuai
2	5	1	4		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	Sesuai
2	5	1	5		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	98,83	100	100	100	100	100	Sesuai
2	5	1	6		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	84,29	100	100	100	100	Sesuai
2	**5**	**2**			**Keuangan**								
2	5	2	1		Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
2	5	2	2		Persentase SILPA	%	15,71 %	12,66	14,25	13,37	8,43	10%	Melampaui
2	5	2	3		Persentase belanja pendidikan (20%)	%	27,29 %	20,39 %	27,60 %	25,55%	22,92	20%	Melampaui
2	5	2	4		Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,89 %	10,94 %	14,99 %	19,24%	18,66	10%	Melampaui
2	5	2	5		Penetapan APBD		29 Desember 2015	29 Desember 2016	20 Desember 2017	17 Desember 2018	29 Desember 2019	27 Desember 2021	belum tercapai
2	**5**	**3**			**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
2	5	3	1		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JPL	16,92 JPL	11,89 JPL	9,57 JPL	5,39 JPL	16,56	17 JP	Belum Tercapai
2	5	3	2		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,09 %	2,58%	5,26%	37,63%	7,25	10%	Melampaui
2	5	3	3		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	54,68 %	62,35 %	68,67 %	69,58%	57,34	95%	Belum Tercapai
2	5	3	4		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	27 Orang	33 Orang	26 Orang	33 Orang	30	34 orang	Belum Tercapai
2	5	3	5		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	566 Orang	493 Orang	530 Orang	579 Orang	544	610 orang	Belum Tercapai
2	5	3	6		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.715 Orang	2.695 Orang	2.695 Orang	2.654 Orang	3.345	2.800 orang	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Standart (Target RPJMD Tahun 2020)	Interpretasi
							2016	2017	2018	2019	2020		
2	**5**	**4**			**Penelitian dan Pengembangan**								
2	5	4	1		Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	Sesuai
2	5	4	2		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	90,91 %	93,41 %	88,24 %	75%	87,5	100%	Belum Tercapai
2	5	4	3		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	%	5	41,66	47,22	52,77	90.,90	63,88	Melampaui
2	5	4	4		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	5	41,66	47,22	52,77	64,93	63,88	Melampaui
2	**5**	**5**			**Pengawasan**								
2	5	5	1		Persentase tindak lanjut temuan	%	79,86	88,77	91,67	70,37	76,74	100	Belum Tercapai
2	5	5	2		Persentase pelanggaran pegawai	%	6,56	0,16	0,17	0	0	0,16	Melampaui
2	5	5	3		Jumlah temuan BPK		30	12	17	10	10	12	Melampaui
2	**5**	**6**			**Sekretariat Dewan**								
2	5	6			Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	5	6			Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	5	6			Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai

Sumber :Bappeda Tahun 2021

Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan hingga periode RPJMD Kabupaten Barru tahun 2020 dapat dilihat bahwa terdapat indikator-indikator yang tercapai sesuai target dan melampaui target namun masih didominasi oleh yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk indikator indeks Williamson, Indeks Pemberdayaan gender, indeks Pembangunan Gender belum dapat diinterpretasikan dikarenakan pada periode RPJMD 2016 – 2021 belum ditetapkan target terhadap tiga indikator tersebut. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut antara lain:

1. Ketidaktepatan dalam menentukan target (terlalu tinggi), yang diantaranya disebabkan oleh ketidaktepatan dalam menentukan formula perhitungan atau definisi operasional, sehingga secara riil sulit untuk dicapai;
2. Pencapaian beberapa target kinerja juga terhambat oleh kapasitas pemerintah yang kurang memadai, dilihat dari aspek pendanaan, kebijakan maupun keterbatasan kemampuan kontrol terhadap faktor eksternal yang sangat mempengaruhi.
3. Masih terdapat belanja kegiatan yang tidak tepat dan tidak mendukung pencapaian target secara langsung.
4. Merebaknya wabah pandemic Covid 19 pada taun 2020 juga mempengaruhi capaian-capaian indikator pembangunan daerah Kabupaten Barru, terutama sector perekonomian yang secara langsung terpapar dampak dari pandemi ini.

2.8 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Barru sampai dengan Tahun 2021 terdiri dari 2 jenis pelayanan, yaitu pelayanan air bersih (PDAM TIRTA WAESA) dan Pelayanan kepelabuhanan yang sementara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

PDAM Tirta Waesa Kabupaten Barru resmi berdiri sejak tanggal 16 Desember 1991 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 1991 Perda tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 1991.

Yang kedua, Perusahaan perseroan daerah (PERSERODA) Samudra Nusantara Barru yang secara resmi berdiri pada tahun 2021, namun belum diatur dalam peraturan daerah. Peraturan Daerah terkait entitas Perseroda Samudra Nusantara Barru masih sementara berproses.

2.9 Kerjasama Daerah

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efekktifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah yang dilaksanakan terdiri dari kerjasama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Kebijakan kerja sama antar daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Penyelenggaraan kerja sama antar daerah bersifat wajib dan sukarela. Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swata, NGO, dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi.

Jumlah kerja sama antar daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 165 (Seratus Enam Puluh Lima) naskah kerjasama, yaitu seperti yang diuraikan di bawah ini.

A. *Tahun 2016 sebanyak 11 Kerjasama, antara lain :*

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah kabupaten Barru dengan Pemakai Perumahan Dinas di Kabupaten barru
2. Perjanjian Kerjasama tentang Kontrak Kerjasama Media, diantaranya : RAKYAT SULSEL. HARIAN PARE POS UJUNG PANDANG EKSPRES. BERITA KOTA MAKASSAR FAJAR
3. Nota Kesepahaman Antara Sekretaris Jendral Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Bupati Barru tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dari Pegawai Tidak Tetap Pusat.
4. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Parepare dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
5. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian PU dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi

Bebasis Masyarakat dan Tempat Pengelolaan Sampah dengan Pola Reuse, Reduse, Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Barru.

6. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Pare-Pare tentang Kepesertaan dan Penegakan Hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa melalui Penguatan dan Pemberdayaan BUMDesa dalam Program BNI Masuk Desa di kabupaten Barru
8. Perjanjian kerjasama Bank Sulselbar dengan Pemerintah Kabupaten Barru tentang penempatan ATM
9. Nota Kesepahaman Antara Sekretaris Jendral Kementrian Pertanian RI dengan Bupati Kabupaten Barru tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Dari tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
10. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pare-Pare dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
11. Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Hibah Daerah Non Kas dalam rangka Penyelesaian Hutang daerah

B. *Tahun 2017 sebanyak 28 Kerjasama, antara lain :*

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Harian Pare Pos tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Koran Sindo Makassar tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Rakyat Sul-Sel tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Ujung Pandang Ekspres tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.

5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Fajar tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Berita Kota Makassar tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Perum Bulog Kota Pare-Pare tentang Subsidi Program Beras untuk keluarga penerima manfaat beras sejahtera Kab.Barru tahun 2017.
8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan LPP TVRI Sulsel tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.
9. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan tentang penyusunan dan legalisasi peraturan Bupati tentang IMB, SLF, TABG dan Penataan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2017.
10. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen.
11. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Batar Kantor Cabang Barru tentang Pengelolaan Uang Daerah.
12. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru tentang Pengelolaan Uang Daerah.
13. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT Bank Negara Indonesian (Persero) TBK Kantor Cabang Pare-pare / Kantor Cabang Pembantu Barru tentang Pengelolaan Uang Daerah.
14. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Perum Bulog Sub Divre Kota Pare-pare tentang Subsidi Program Beras untuk Keluarga Penerima manfaat Beras Sejahtera Kabupaten Barru Tahun 2017.

15. Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkab Barru dengan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Pemkab Barru.
16. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pare-Pare dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tentang Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja melalui Kantor Kecamatan.
17. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Usaid Indonesia Urban Water Sanitation & Hygiene, penyehatan Lingkungan Untuk semua (Iuwash Plus)
18. Amandemen Perjanjian kerjasama antara Pemerintah kabupaten Barru dengan Rakyat Sulsel tentang Peliputan & Publikasi Kegiatan Pemerintah kabupaten Barru Tahun 2017.
19. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Ujung Pandang Ekspres
20. addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten Barru dengan Harian Pare Pos tentang Peliputan & Publikasi Kegiatan Pemerintah Kab.Barru Tahun 2017.
21. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengembangan manajemen Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017.
22. Nota Kesepahaman antara PT. Bank Negara Indonesia (persero) TBK dengan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa & Layanan Perbankan serta dukungan pasar online (market place) untuk peningkatan sektor usaha mikrokecil & menengah (UMKM) di Daerah Kab.Barru
23. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Resort Barru dengan Pemerintah Daerah Kab. Barru tentang Penyelenggaraan program pembinaan dan pelatihan calon Anggota Polri bagi Putra Daerah berprestasi di Kab. Barru
24. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Pare-Pare tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah.

25. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten barru dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pare-Pare tentang Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Barru
26. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT. Bank Sulselbar tentang penggunaan Lahan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
27. Perjanjian Kerjasama antara Bupati Barru dengan lembaga Pengembangan Kesatuan nasional Independen (LPKNI)
28. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pare-Pare tentang Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi Penduduk Kabupaten Barru Dalam Rangka Universal Health Coverage.

C. *Tahun 2018 sebanyak 28 Kerjasama, antara lain :*

1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan Kota Pare-Pare tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrologian
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Ujung Pandang Ekspres tentang Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Rakyat Sulses tentang Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Harian Pare Pos tentang Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT. Media Fajar Koran tentang Pelaksanaan Kerjasama Publikasi di Pro Otonomi Harian Fajar
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Berita Kota Makassar tentang Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Harian Tribun Timur tentang Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018

8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Media Pijar Barru tentang Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018
9. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Macca News tentang Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018
10. Perjanjian Kerjasama antara Bank Sulselbar dengan Dinas Pendidikan tentang Penempatan ATM
11. Perjanjian Kerjasama antara Bank Sulselbar dengan Dinas Pendidikan tentang Penempatan ATM
12. Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Staf dan Pekerja antara Hutama Karya Bumi Karsa, KSO dengan RSUD Barru
13. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Surat Perintah Pencairan Dana Online
14. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Barru tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan Laporan atau pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
15. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten Barru dengan Bank Sulselbar tentang Implementasi Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota/Kab.Barru
16. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Cabang Pare-Pare tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kabupaten Barru melalui mekanisme PTSP dan Paten.
17. Perjanjian Kerjasama antara KP3M dengan Badan Penyelengaraan jaminan Sosial kesehatan Cabang Pare-pare dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tentang kepesertaan dan penegakan hukum program jaminan kesehatan Nasional.

18. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT.TASPEN (Persero) tentang Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan gaji PNS Daerah & Pelayanan Proaktif.
19. Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Harian Pare Pos tentang Peliputan dan Publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018
20. Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Media Pijar Barru tentang Peliputan dan Publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018
21. Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Harian Fajar tentang Peliputan dan Publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018
22. Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Ujung Pandang Ekspress tentang Peliputan dan Publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018
23. Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Panrita News tentang Peliputan dan Publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2018
24. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barru dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar tentang Kepesertaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai Non ASN Kab.Barru
25. Kesepakatan bersama antara Pemkab Barru dengan Direktorat Jendral Pajak Parepare
26. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Binjai dengan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Percepatan Pembangunan Daerah Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik,
27. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Barru dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cab.Pare-Pare tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kab.Barru dalam rangka Universal Health Coverage
28. Perjanjian Kerjasama antara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri Regional Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kab.Barru

D. *Tahun 2019 sebanyak 66 kerjasama, antara lain :*

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Fajar tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Ujung Pandang Ekspres tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Harian Rakyat Sul-Sel tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Koran Sindo Makassar tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Harian Pare Pos tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Berita Kota Makassar tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Harian Tribun Timur tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.
8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Media Pijar Barru tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.
9. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Macca News tentang peliputan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2019.
10. Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Sul-Sel dengan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Pembangunan Rest area
11. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Pemkab Barru tentang Pengkajian, Penerapan & Pemasyarakatan teknologi untuk mendukung Pembangunan Daerah Kab. Barru Prov Sul-Sel.
12. Nota Kesepahaman Antara Ombudsman RI dengan Pemda Barru tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan percepatan penyelesaian laporan masyarakat.
13. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Barru dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang

Makassar tentang Kepesertaan Pegawai Non ASN Pemkab Barru dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

14. Kesepakatan Bersama antara Pemkab Barru dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tentang Pembayaran dan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem.
15. Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tentang Pembayaran dan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem.
16. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kab.Barru dengan Kantor Pertanahan Kab.Barru tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan dan Pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penyelesaian asset Pemerintah Kabupaten Barru, Pembuatan dan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah serta dukungan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistemastis lengkap.
17. MOU antara PT.Wijaya Karya Beton dengan Pemkab Barru tentang Kerjasama usaha terkait pengelolaan dan Produksi Batu Alam di Kab.Barru Sul-sel.
18. Nota Kesepahaman Antara Bupati Barru dengan PT. Global Lindo Prunetwork tentang Program pendampingan tekhnik penyelenggaraan MPP Kab.Barru
19. Perjanjian Kerjasama antara BPKAD dengan PT.Bank Sulselbar tentang Penempatan dana Deposito
20. Nota Kesepahaman antara Pemkab Barru dengan Universitas Bosowa tentang Kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
21. PKS antara Pemkab Barru dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Unit Bisnis Regional VI Sidrap tentang jual beli benih padi Produksi Instalasi Pembenihan/Pembibitan Bottolampe (IPP)
22. Nota Kesepahaman antara Pemkab Barru dan Badan Pusat Statistik Kab. Barru tentang Penyediaan, Pemanfaatan serta pengembangan data dan Informasi statistik dalam rangka Perencanaan dan Pembangunan Daerah

23. Perjanjian Kerjasama antara Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sul-Sel dengan Pemkab Barru tentang Peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Percepatan Penyelesaian serta tindak lanjut Laporan Masyarakat
24. PKS antara Akademi tehnik dan Keselamatan Penerbangan Makassar dengan Pemkab Barru tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.
25. Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan kabupaten Barru dengan Harian Fajar tentang peliputan dan publikasi kegiatan Pemerintahan kabupaten Barru tahun 2019
26. Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan kabupaten Barru dengan Tribun Timur tentang peliputan dan publikasi kegiatan Pemerintahan kabupaten Barru tahun 2019
27. Perjanjian Hibah Daerah Pemkab Barru dengan KPU Kab.Barru tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
28. Perjanjian Hibah Daerah Pemkab Barru dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Barru tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.
29. Adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan kabupaten Barru dengan I News TV dengan Tribun Timur tentang peliputan dan publikasi kegiatan Pemerintahan kabupaten Barru tahun 2020
30. Adendum PKS antara Pemkab Barru dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Unit Bisnis Regional VI Sidrap tentang jual beli benih padi Produksi Instalasi Pembenihan/Pembibitan Bottolampe (IPP)
31. Nota Kesepahaman antara Pemkab Barru dengan Pengumpulan Pengusaha dan Pemotongan Sapi-Kerbau (PPPSK) Kab.Barru tentang Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH)
32. Nota Kesepahaman antara Pemkab Barru dengan UNHAS tentang Kerjasasma jasa pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan Pengambdian kepada Masyarakat
33. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulselbar tentang kerjasama dalam

penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.

34. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan PDAM Kab.Barru tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
35. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan UPT Pendapatan Wilayah Barru tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
36. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan PT.Bank Sulselbar Cab.Barru tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
37. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan PT. POS Indonesia (Persero) tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
38. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan BPJS Ketenagakerjaan tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
39. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan Polres Barru tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
40. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan PT.PLN Unit Layanan Pelanggan Barru tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
41. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan Kementrian Agama kab.Barru tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
42. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan BPJS Ketenagakerjaan tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
43. Nota Kesepahaman Antara Pemkab Barru dan BPN tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kab.Barru.
44. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan Kantor Wilayan Direktorat Jendral Pajak Sulselbar tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

45. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan PDAM Kab.Barru tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
46. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan UPT Pendapatan Wilayah Barru tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
47. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan PT Bank Sulselbar Cab.Barru tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
48. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan PT. POS Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
49. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
50. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan Kantor Kepolisian Resort Barru tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
51. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Barru tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
52. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan Kementrian Agama Kab. Barru tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
53. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan BPJS Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru

54. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
55. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan Badan Pendapatan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
56. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan Dinas Kesehatan Kab.Barru tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
57. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
58. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
59. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dengan Dinas Sosial Kab.Barru tentang Penyelenggaraan Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kab. Barru
60. Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Distribusi Area dengan Pemkab Barru tentang Pemungutan & Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemda
61. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Barru dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Barru.
62. Perjanjian Kerjasama Baznas Barru dengan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Makassar dengan Pemkab Barru tentang

Kepesertaan Program badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Renta Kab.Barru

63. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI dan Pemkab Barru tentang Implementasi Rencana Aksi Peserta Program Interiship Pemda Ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2019.
64. Nota Kesepahaman Tentang Implementasi Rencana Aksi Peserta Program Interiship Pemda Ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2019 antara Rukijo Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Abustan Pj. Sekda Kab.Barru
65. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pare-Pare tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Barru dalam rangka Universal Health Coverage
66. Perjanjian kerjasama antara Pemkab Barru dengan Bank Hasa Mitra tentang Pemberian Fasilitas Kredit Serba Guna (KSG)

E. Tahun 2020 sebanyak 32 Kerjasama, antara lain :

1. Perjanjian Kerjasama Antara badan Pengembangan Sumber Daya manusia Prov Sul-sel dengan BKPSDM Kab.Barru tentang Pelaksanaan Pengembangan SDM Pemkab Barru.
2. Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM dengan Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN RI Makassar tentang penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi aparatur Pemerintah Kabupaten Barru
3. Perjanjian Kerjasama penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara elektronik antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Barru.
4. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru dengan Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru
5. Nota Kesepahaman antara pemkab Barru dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pare-Pare tentang kerjasama dalam

pemyelenggaraan pelayanan pada Mall Pelayanan Publik Kab.Barru

6. Naskah Kesepahaman antara Universitas Fajar Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Barru
7. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT.Pertani (Persero) Kantor jalan poros Makassar Pare Kab.Pangkep tentang Jual beli benih padi produksio instalasi perbenihan/perbibitan bottolampe (IPP)
8. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah kabupaten Barru dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Fasilitasi asuransi pertanian.
9. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
10. Nota Kesepahaman antara Bupati Barru dengan Kepala Kejaksaan Negeri Barru tentang Pendampingan dan Pengawalan Akuntabilitas dana penanggulangan dan pencegahan corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Barru
11. Nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kab.Barru dengan Gugus Tugas Percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) lingkup Pemerintah Kabupaten Barru
12. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT.Pertani (Persero) Kantor jalan poros Makassar Pare Kab.Pangkep tentang Jual beli benih padi produksio instalasi perbenihan/perbibitan bottolampe (IPP)
13. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan BPJS Kesehatan cabang Pare-Pare tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Barru dalam rangka Universal Health Coverage
14. Perjanjian kerjasama BAZNAS dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Barru tentang kepesertaan program BPJS bagi pengurus, TA, relawan BAZNAS, Penyuluh Kemenag & TK non ASN Kejaksaan Negeri Kabupaten Barru
15. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan fasilitasi penilaian potensi seleksi

terbuka anggota direksi perusahaan perseroan daerah (PERSERODA) Samudra Nusantara Barru

16. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Universitas Muhammadiyah Pare-pare tentang Kerjasama bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian
17. Nota Kesepahaman antara PT Kawasan Industri Makassar (PERSERO) dan Pemerintah Kabupaten Barru tentang Kerjasama pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Barru
18. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten barru dengan BPJS Kesehatan cabang Pare-Pare tentang optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Kabupaten barru melalui mekanisme PTSP dan PATEN
19. Nota kesepahaman antara Bupati Kabupaten Barru dengan Rektor UNHAS tentang Kerjasamadibidang pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan bangsa
20. Nota kesepahaman pengadaan melalui swakelola antara kabag perekonomian dan SDA Kabupaten Barru dengan pusat pengembangan kebijakan pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin Makassar
21. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Barru tentang percepatan dan kemudahan investasi
22. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Barru tentang percepatan dan kemudahan investasi
23. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Barru tentang pembentukan gerai pelayan perizinan & non perisinan
24. MOU antara Pemerintah Kabupaten Barru dan Perum LKBN Antara tentang media layanan Informasi Publik
25. Perjanjian Kerjasasma antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barru dengan Antara Digital Negara
26. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten Barru dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Cabang

27. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barru tentang konfirmasi status wajib pajak Daerah di Sulawesi Selatan
28. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu pintu dan tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan BPD Kabupaten Barru tentang penerapan konfirmasi status wajib pajak Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan dalam pemberian layanan perizinan 7 non perizinan di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
29. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Penanaman Modal PTSP dan TK Kabupaten Barru tentang penerapan konfirmasi status wajib pajak Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan dalam pemberian layanan perizinan & non perizinan di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan
30. Kesepakatan bersama antara Pemkab Barru dan Pemprov Sulsel tentang akselerasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif sesuai standar dan pembangunan di propinsi Sulsel
31. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Barru dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Cab. Pare-pare tentang Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk Kab.Barru dalam rangka Universal Health Coverage
32. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Barru dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cab.Makassar tentang kepesertaan pegawai non ASN Pemkab Barru dalam program Badan Penyelenggaraan.



BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiscal, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan kesesimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan Negara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian keuangan daerah merupakan satu rangkaian proses yang harus saling mendukung satu dan yang lainnya.

Penyusunan Gambaran keuangan daerah adalah untuk menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung selama satu periode kepemimpinan daerah terakhir. Analisis tersebut mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, dan kerangka pendanaan. Bagian ini ditujukan untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir sebagai kondisi eksisting, untuk selanjutnya menjadi landasan dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah untuk satu periode kepemimpinan daerah, selama lima tahun yang akan datang. Dengan melakukan analisis keuangan

daerah yang tepat mengenai kemampuan daerah akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memeliharan dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta tata cara pertanggungjawaban keuangan Daerah. Untuk Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menentukan Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumtah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari

pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penJrusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi akrual.

Peraturan pemerintah ini juga menjelaskan bahwa Pertanggungiawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggunggjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD Kabupaten Barru yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok- pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun ke depan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Kinerja keuangan masa lalu dalam hal ini kinerja untuk Tahun 2016 - 2020 terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. Sampai dengan Tahun 2019, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Barru masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020 meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.Untuk itulah sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan kinerja, dimana penekanan penganggaran pada kinerja yang terukur dari aktivitas dan program kegiatan.

Pendekatan penganggaran berbasis Kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan, Hasil dan manfaat yang diharapkan serta efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. Penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indicator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja

sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimum. Yang disajikan dalam bentuk informasi keuangan daerah yang paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akan digunakan untuk membantu Kepala Daerah dalam membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah, menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah, mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah serta melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi keuangan daerah ini dituangkan dalam system pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang memuat penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana kerja SKPD, penyusunan anggaran, pengelolaan Pendapatan Daerah, pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah, akuntansi dan pelaporan dan pengadaan barang dan jasa.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Barru Tahun anggaran 2016 – 2020 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru terdiri atas (1) Pendapatan, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; (2) Belanja, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang didalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan. Lebih lanjut dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu

dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Jenis Pendapatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas (i) Pendapatan asli daerah; (ii) Pendapatan transfer, (iii) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Kapasitas fiskal selama periode 2016 – 2020 menggambarkan kondisi yang semakin membaik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,63%.

Grafik 3.1

Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020

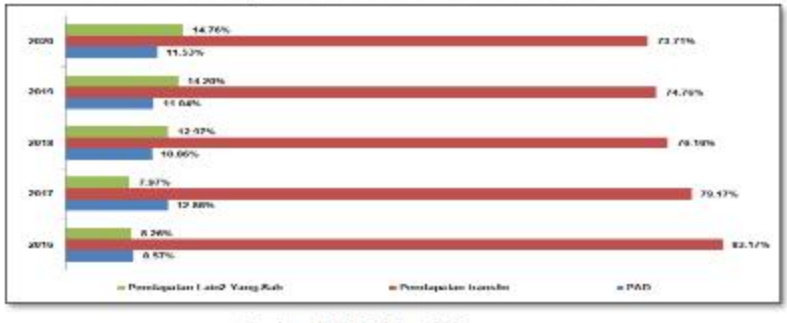


Sumber : BPKAD Tahun 2021

Komposisi kapasitas fiskal di Kabupaten Barru masih didominasi Pendapatan Transfer yaitu sebesar 73,71 % pada tahun 2020 dari keseluruhan pendapatan. Namun jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) bertumbuh cukup besar yaitu sebesar 2,96 % dibanding dengan Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. dapun kinerja pertumbuhan dan postur Pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.2

Postur Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiscal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiscal (*fiscal gap*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31, Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari ; (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun kinerja pendapatan asli daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik 3.3
Kinerja Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016 – 2020



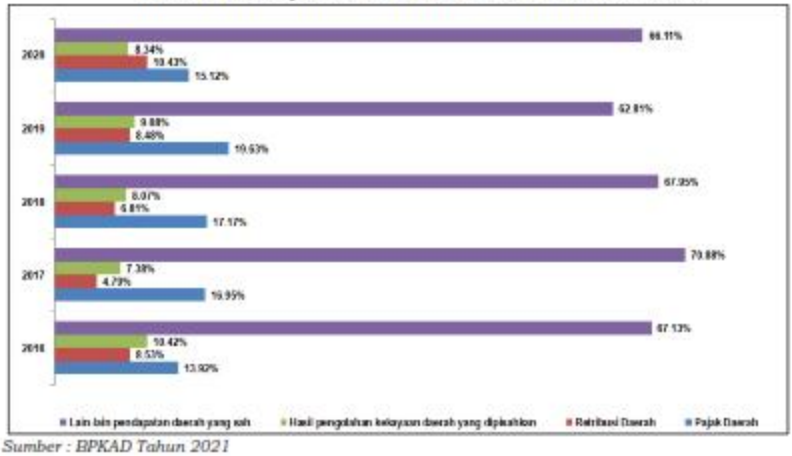
Sumber : BPKAD Tahun 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun kinerja pendapatan asli daerah Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Setelah meningkat pada tahun 2017 sebesar 130.579.970.000 kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 113,328,226,000.

Adapun rata-rata pertumbuhan PAD selama periode 2016 – 2020 sebesar 2,96%. Rata- rata Kontribusi untuk masing-masing komponen adalah untuk pajak daerah sebesar 16,56%, retribusi daerah sebesar 7,8%, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8,65% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 66,8%. Untuk postur pendapatan asli daerah pertahunnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik 3.4

Postur Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

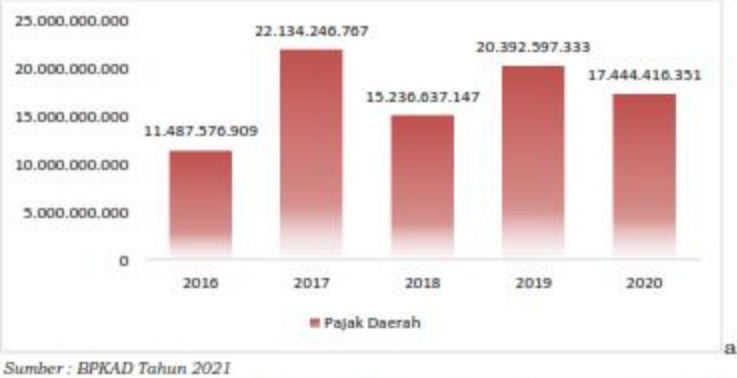
Pertumbuhan rata-rata PAD yang besar mencapai 2,96% tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja pendapatan asli daerah yang sesungguhnya karena pada tahun 2017 terdapat kebijakan Pusat yang mengamanatkan dana transfer BOS SD dan SMP ke satuan pendidikan dicatatkan/dimasukkan sebagai komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari : (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan **Pajak daerah** meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Grafik 3.5
Perkembangan Pajak Daerah
Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adapun postur pajak daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6
Postur Pajak Daerah Tahun 2016 – 2020



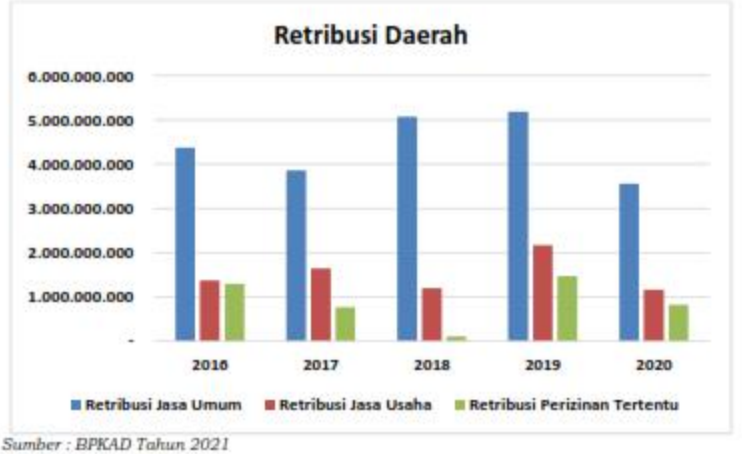
Sumber : BPKAD Tahun 2021

Dari segi postur pajak daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020 masih didominasi oleh pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp.6.929.679.185,- pada tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen. Pajak Penerangan Jalan ini merupakan salah satu jenis pajak yang bertahan dikondisi Pendemi Covid 19.

Selain pajak penerangan jalan, beberapa pajak lain yang tetap bertumbuh dalam kondisi Covid 19 antara lain : Pajak Reklame sebesar 110 persen dan Pajak Restoran sebesar 5 %. Sedangkan Pajak Daerah yang menurun sangat drastis pada kondisi covid 19 antara lain: pajak hiburan menurun sebesar 62 %, pajak parker menurun sebesar 96 %, pajak pengambilan bahan galian C menurun sebesar 61 %.

Retribusi **Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, milik pemerintah/ BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam menggerakan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan asli daerah yang berasal dari Retribusi Daerah berkontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Daerah tetapi tetap dilakukan upaya meningkatkan penerimaannya dengan perbaikan regulasi pengelolaan retribusi. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha telah diperbarui sesuai dengan kondisi saat ini dan dilakukan penyesuaian terhadap potensi obyek dan tarif retribusi yang menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi. Langkah ekstensifikasi juga dilakukan dengan penambahan jenis retribusi baru yang dipungut berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. Realisasi retribusi daerah dapat dilihat pada table berikut :

Grafik 3.7
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016-2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

Dampak Pandemi Covid 19 menyebabkan realisasi retribusi daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup besar dengan rata-rata penurunan sebesar 40 %. Rincian penurunan retribusi daerah tersebut berdasarkan jenis retribusi antara lain retribusi jasa umum menurun sebesar 31, 34 persen, retribusi jasa usaha menurun sebesar 46,44 persen dan retribusi perizinan tertentu menurun sebesar 44,04 persen. Untuk postur retribusi berdasarkan tiap jenis retribusi dapat dilihat pada grafik berikut:

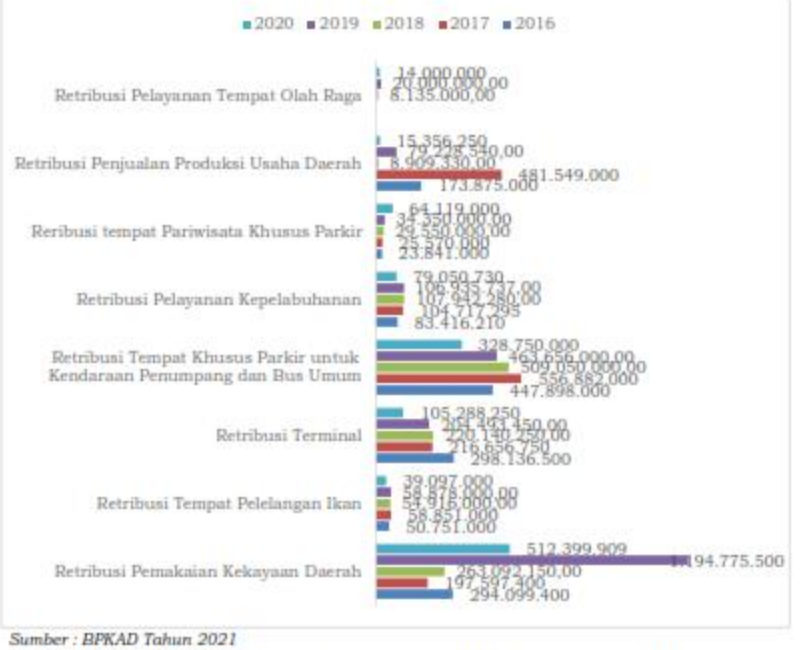
Grafik 3.8
Postur Retribusi Jasa Umum Tahun 2016-2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

Pada tahun 2016 – 2020, postur retribusi jasa umum didominasi oleh pertama, Retribusi Pelayanan Kesehatan dan kedua, Retribusi Pelayanan Kesehatan. Walaupun besaran penerimaan cukup tinggi pada kedua jenis retribusi ini, pada tahun 2020 dampak pandemic covid 19 menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan di kedua jenis retribusi ini masing – masing sebesar Rp. 2.489.207.984 untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan, menurun sekitar 24,63 persen dibanding tahun sebelumnya dan sebesar Rp. 918.594.950,- untuk retribusi Pelayanan Pasar, menurun sekitar 45,82 persen.

Grafik 3.9
Postur Retribusi Jasa Usaha Tahun 2016-2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

Pada tahun 2016 – 2020, postur retribusi jasa usaha didominasi oleh pertama, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan kedua, Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah memingkat cukup besar pada tahun 2019 dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 354,13 % . Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 57, 11 persen atau senilai Rp. 512.399.909,-.

Sedangkan untuk Retribusi Perizinan Tertentu dikontribusi oleh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebesar Rp. 1.469.625.750,- pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 822.827.550,-. Adapun postur retribusi perizinan tertentu tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

Grafik 3.10

Postur Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2016-2020

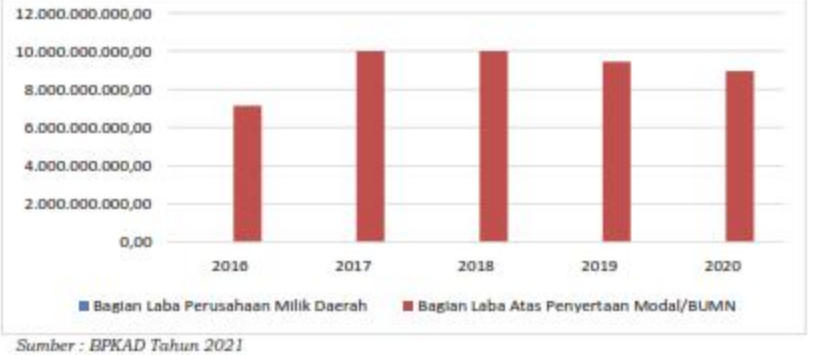


Sumber : BPKAD Tahun 2021

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk jenis penerimaan jenis ini masih mengandalkan penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar.

Grafik 3.11

Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2016-2020



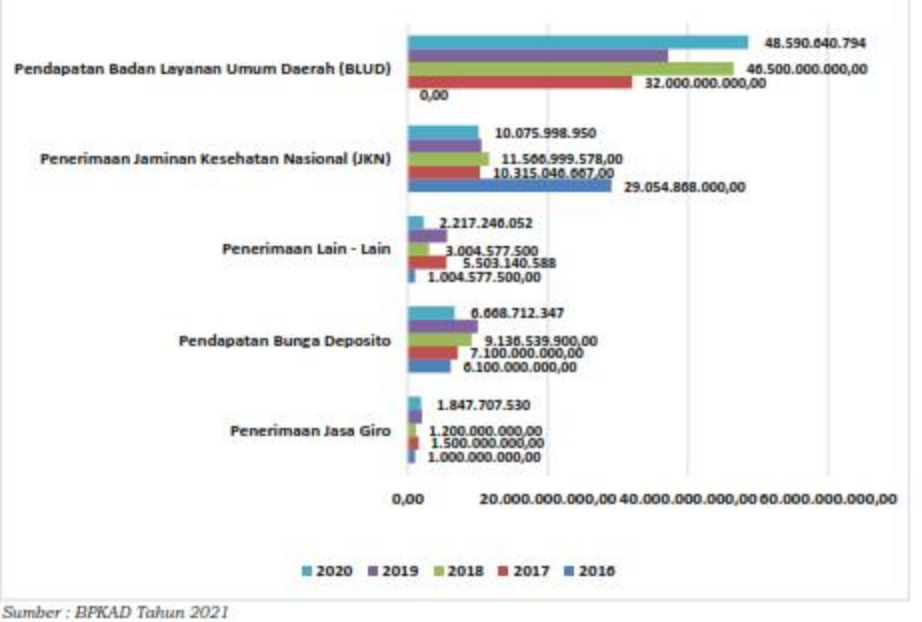
Sumber : BPKAD Tahun 2021

Khusus Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari : hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah;

jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada komponen penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah, kontributor terbesar pada sektor ini adalah penerimaan denda Pajak Daerah.

Grafik 3.12

Postur Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana bagi hasil / bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah. Dana bagi hasil / bagi hasil bukan pajak merupakan dana yang

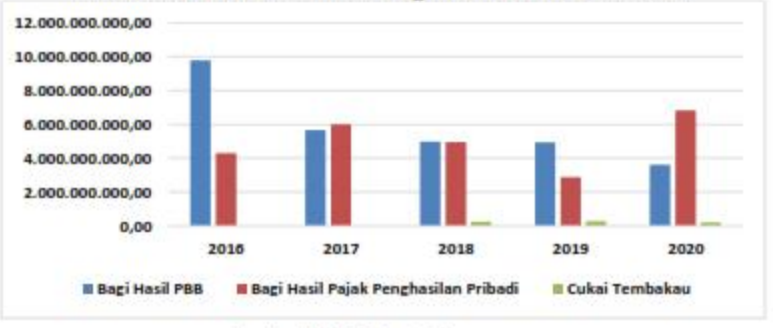
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentrilisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

1. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya sesuai PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 36, DBH bersumber dari: pajak dan sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP 55 tahun 2005 Pasal 1 angka 23 dan PP 12 tahun 2019 pasal 37).
3. Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (PP 12 tahun 2019 pasal 38).
4. Dana Insentif daerah berdasarkan PP 12 tahun 2019 pasal 39 adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu Grafik 3. berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.
5. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun rincian realisasi penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.13

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2016-2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

Realisasi penerimaan dana bagi hasil terdiri dari Bagi hasil PBB, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi dan Bagi Hasil Cukai Tembakau kurun waktu Tahun 2016 – 2020. Postur penerimaan bagi hasil pajak pada tahun 2020, dikontribusi oleh bagi hasil PBB sebesar Rp. 3.594.062.796, bagi hasil Pajak Penghasilan Pribadi sebesar Rp. 6.805.655.881,- dan Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp. 200.079.433,-.

Grafik 3.14

Realisasi Penerimaan bagi hasil bukan pajak Tahun 2016-2020

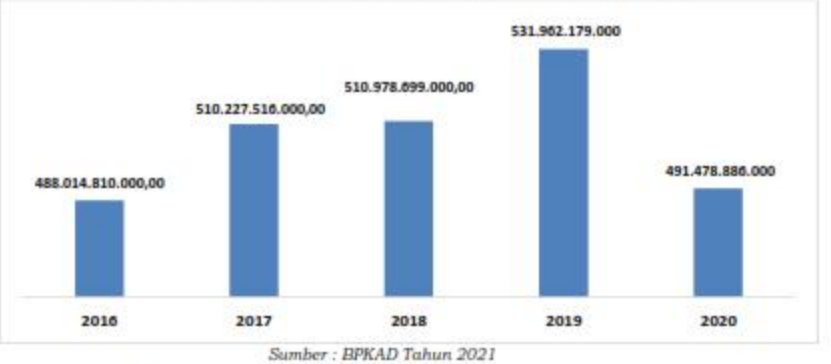


Sumber : BPKAD Tahun 2021

Realisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak terdiri dari Bagi hasil dari iuran Eksplorasi dan iuran eksploitasi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 6.089.901.162,-, namun pada tahun berikutnya jenis bagi hasil ini tidak ada lagi. Untuk dana bagi hasil bukan pajak lainnya yang cukup besar yaitu: Bagi hasil dari mineral batubara sebesar Rp. 3.018.031.765,- pada tahun 2020, bagi hasil dari pungutan hasil perikanan sebesar Rp. 590.155.800,- dan bagi hasil dari pertambangan gas bumi yaitu sebesar Rp. 289.198.800,-

Grafik 3.15

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2016-2020



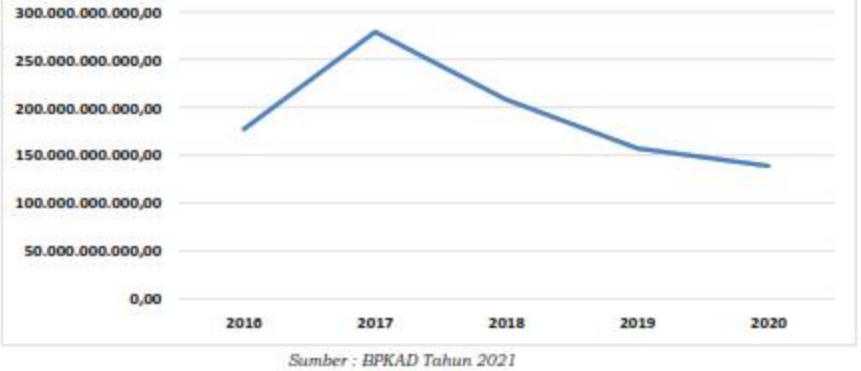
Sumber : BPKAD Tahun 2021

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP 55 tahun 2005 Pasal 1 angka 23 dan PP 12 tahun 2019 pasal 37).

Dana Alokasi Umum setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 2,93 persen dalam kurun waktu 2016-2019. Pada tahun berikutnya, penyaluran DAU cenderung stagnan, bahkan DAU tahun 2017 jumlahnya sama dengan tahun 2018 dan meningkat cukup besar pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,10. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,6 Persen. Untuk Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 3.16

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016-2020



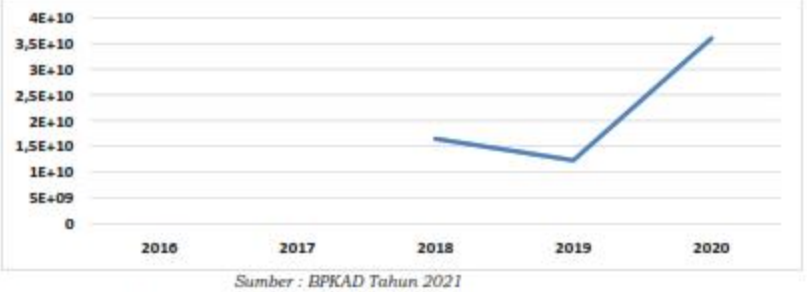
Sumber : BPKAD Tahun 2021

Penerimaan Dana Alokasi khusus sejak 2017 terus mengalami penurunan dari Rp. 278.721.408.044,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 139.002.218.124 atau turun sekitar 50, 13%.

Selanjutnya Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu (PP 12 tahun 2019 pasal 39). Dana otonomi khusus dialokasikan kepadaDaerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undangundangan (PP 12 tahun 2019 pasal 40). Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan (PP 12 tahun 2019 pasal 41). Realisasi Dana Insentif Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan dan rata-rata pertumbuhan 83,78 persen dalam kurun waktu 2018-2020, hal tersebut tergambar pada grafik berikut.

Grafik 3.17

Realisasi Penerimaan Dana Insentif Daerah Khusus
Tahun 2016-2020

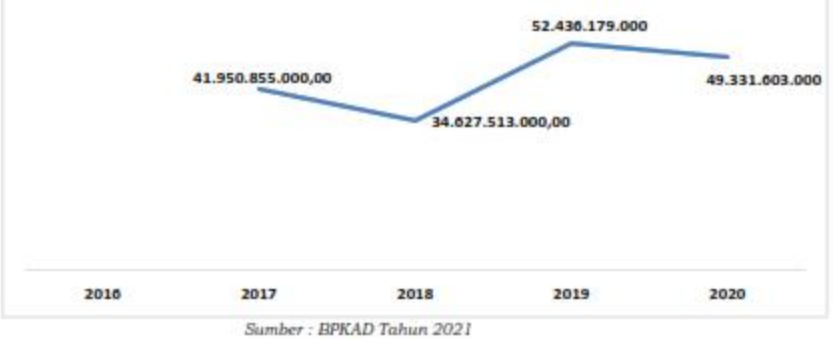


Sumber : BPKAD Tahun 2021

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa (PP 12 tahun 2019 pasal 42). Adapun perkembangan penerimaan APBD untuk Dana Desa dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.18

Realisasi Penerimaan Dana Desa Tahun 2016-2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

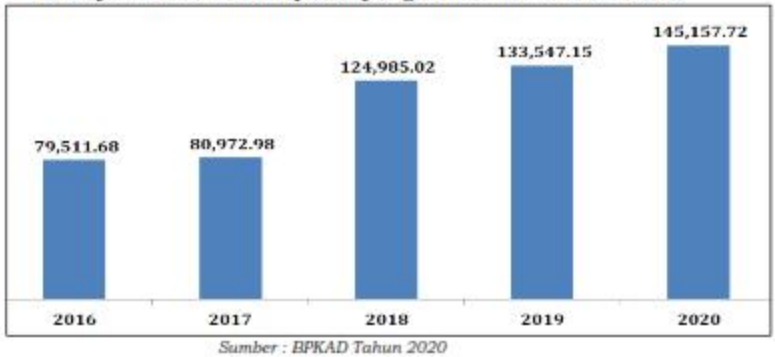
Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 pasal 46 yang dimaksud Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 pasal 47, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 pasal 48, Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lain-lain pendapatan.

Adapun kinerja Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.19

Kinerja Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun 2016 – 2020



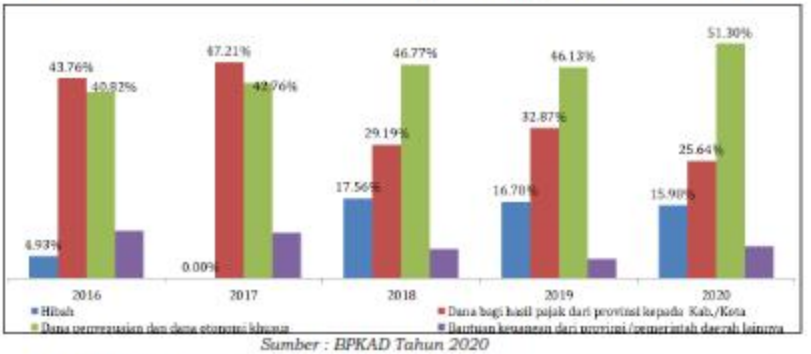
Sumber : BPKAD Tahun 2020

Lain-lain Pendapatan yang Sah selama 5 (lima) tahun mengalami perkembangan yang positif. Pertumbuhan rata-rata Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 17,93%. Rata-rata kenaikan tersebut terdiri dari Pendapatan Hibah naik rata-rata sebesar 1,40%, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kab/kota naik dengan pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 2,60%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

naik dengan pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 25,44%, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya kenaikan rata-rata sebesar 12,34%.

Grafik 3.20

Distribusi Postur Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPKAD Tahun 2020

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah:

1) Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
2) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
3) Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah;
4) Belum Optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi daerah;
5) Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD dalam bentuk deviden;
6) Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;
7) Pada tahun 2020 terjadinya Pandemi Covid 19 yang kemudian berdampak besar dan sangat mempengaruhi semua sektor pendapatan daerah di Kabupaten Barru.

2. Belanja Daerah

PP 12 Tahun 2019 pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 pasal 55 menyebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

PP 12 Tahun 2019 pasal 56 menyebutkan Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Kinerja maka penyajian dari dokumen ini berdasarkan kedua peraturan tersebut. Dan dapat dilihat pada sebagai berikut :

Grafik 3.21

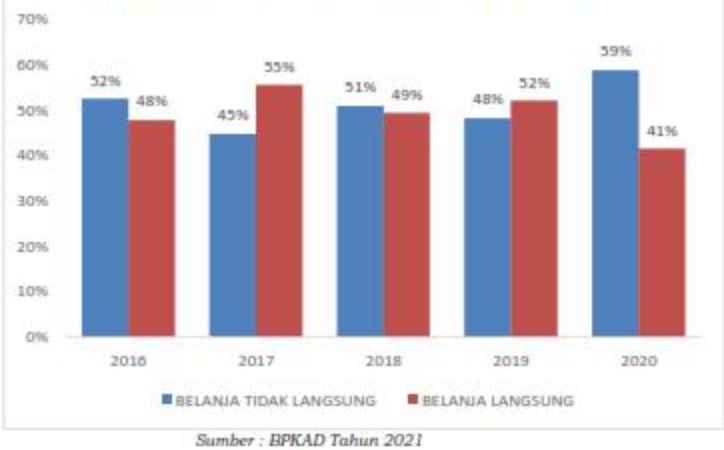
Kinerja Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

Grafik 3.22

Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPKAD Tahun 2021

Dari gambar diatas terlihat bahwa Belanja Operasi mendominasi alokasi Belanja Daerah Kabupaten Barru selama 5 (lima) tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi selama 5 (lima) tahun sebesar 6,49%. Belanja operasi yang terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dari keenam struktur pembangunan belanja operasi masih didominasi oleh belanja pegawai.

Sementara itu belanja modal menempati posisi kedua yang mendapatkan alokasi belanja terbesar, setelahnya belanja transfer dan belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan Daerah

Sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah

merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dan pada pasal 28 ayat 3 berbunyi Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya pada pasal 70 berbunyi Pembiayaan daerah terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari: SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan.

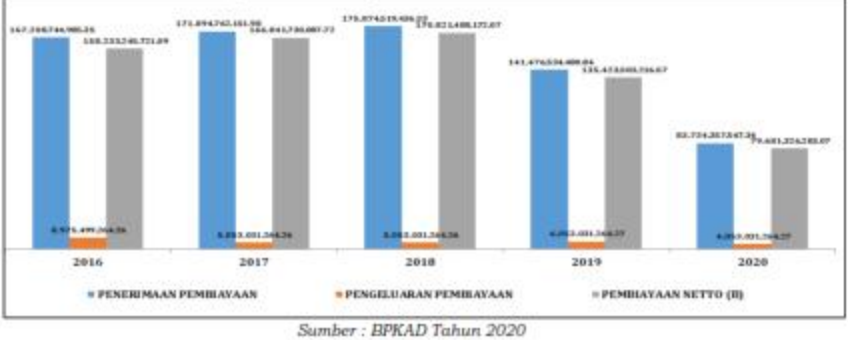
   Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan : pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan disebut Pembiayaan netto. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Adapun Realisasi Pembiayaan Netto selama Tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami penurunan. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaraan Pembiayaan, dan pembiayaan netto selama Tahun 2016 – 2020 ditunjukan pada Gambar berikut ini.

Grafik 3.23

Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPKAD Tahun 2020

Perkembangan penerimaan pembiayaan Kabupaten Barru yang bersumber dari sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Lalu selama tahun 2016 – 2020 bersifat cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah.

Secara umum, gambaran perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru selama tahun 2016 – 2020 ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**962.696.223.948**	**1.015.664.818.852**	**963.311.132.484**	**940.724.982.885**	**983.189.885.495**	**(1,26)**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**82.525913.591**	**130.579.972.435**	**104.627.706.924**	**103.887.386.166**	**113.328.226.000**	**11,68**
1.1.1	Pajak Daerah	11.487.576.909	22.134.246.767	17.964.683.698	20.392.597.333	17.137.000.000	17,85
1.1.2	Retribusi daerah	7.036.836.052	6.258.478.661	7.124.358.585	8.811.848.327	11.818.814.325	15,15
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	8.600.198.743	9.637.356.567	8.447.705.156	9.434.009.603	9.447.705.156	2,88
1.1.4.	Lain - Lain PAD Yang sah	55.401.301.887	92.549.890.440	71.090.959.486	65.248.930.903	74.924.706.519	12,62
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**800.658.633.788**	**804.111.869.363**	**733.698.402.787**	**703.290.448.389**	**760.679.004.000**	**(2.36)**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**						
1.2.1.1	Dana Perimbangan						
	a. Transfer Umum						
	a.1. Dana bagi hasil/ bagi hasil bukan pajak	21.481.846.453	15.162.945.319	14.270.898.567	14.017.026.525	13.519.350.000	**(10,16)**
	a.2. Dana alokasi umum	519.152.475.000	510.227.516.000	510.978.699.000	531.962.179.000	547.116.673.000	**1,35**
	b. Transfer khusus (DAK)	**260.024.312.335**	**278.721.408.044**	**208.448.805.220**	**157.311.242.864**	**164.067.917.000**	**(9,56)**
1.2.1.2.	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000	-	16.500.000.000	24.538.100.000	35.975.064.000	
1.2.2	**Transfer Antar Daerah**						
1.3.	**Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah**	**79,511,676,570**	**80,972,977,054**	**124,985,022,772.00**	**133,547,148,330.07**	**145,157,719,495.00**	2,96
1.3.1	Hibah	3,922,468,000	-	21,945,242,092.00	22,407,918,371.00	23,191,559,650.00	1,40
1.3.2.	Dana darurat	-	-	-	-	-	0
1.3.3	**Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**	**75.589.208.570**	**80.972.977.054**	**103.039.780.680**	**111.139.229.959**	**121.966.159.845**	
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kab./Kota	34.790.937.224	38.224.415.840	36.478.208.490	43.901.994.559	37.213.818.245	2,60
	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	32.457.668.000	34.627.513.000	58.450.855.000	61.600.653.000	74.459.452.000	25,44
	Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	8.340.603.346	8.121.048.214	8.110.717.190	5.636.582.400	10.292.889.600	12,34

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
2	**BELANJA**	**949.079.564.250**	**1.006.659.430.303**	**992.656.086.175**	**992.414.128.555**	**1.015.385.318.265**	**1,74**
02.01	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**497.251.067.030**	**461.611.272.290**	**504.402.651.785**	**537.986.529.745**	**586.543.998.273**	**4,45**
02.01.01	Belanja Pegawai	393.926.257.007	350.912.266.768	382.944.066.587	409.278.623.405	404.844.798.065	1,00
02.01.02	Belanja Bunga	3.333.986.466	3.265.149.092	3.031.557.430	5.191.298.036	3.191.298.036	5,87
02.01.03	Belanja subsidi	-	2.918.016.000	-			
02.01.04	Belanja Hibah	16.698.379.300	14.090.438.766	22.176.752.149	11.765.000.000	44.825.321.200	68,96
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial					-	
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	83.275.874.757	90.275.979.009	96.250.275.619	106.050.924.737	104.012.611.555	5,82
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	16.569.500	149.422.655	-	5.700.683.567	29.669.969.417	
2	**BELANJA LANGSUNG**	**451.828.497.218**	**572.925.904.013**	**488.253.434.390**	**581.177.683.066**	**413.706.331.823**	**-23,41**
02.02.01	Belanja Pegawai	11.497.462.700	28.159.400.000	31.436.144.192	44.844.889.464	38.323.871.604	46,17
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	155.054.368.523	199.499.540.045	196.090.462.106	242.698.351.796	231.310.038.200	-17,45
02.02.03	Belanja Modal	285.276.665.995	345.267.023.968	260.726.828.093	293.634.441.806	144.072.422.019	-10,44
3	**PEMBIAYAAN**	**158.233.245.721**	**166.841.730.888**	**170.821.488.172**	**135.423.503.217**	**79.681.326.283**	**(13.51)**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	167.208.744.985	171.894.762.152	175.874.519.436	141.476.534.481	83.734.357.547	(13.81)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.975.499.264	5.053.031.264	5.053.031.264	6.053.031.264	4.053.031.264	(14.24)

Sumber : BPKAD Tahun 2020

3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan kesesimbangan umum daerah, yakni kesesimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Barru selama periode pencatatan 2016 – 2020, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**						
1.1	**Aset Lancar**						
1.1.1	Kas	171,866,929,287	175,847,248,072	141,476,592,981.84	84,505,156,967.35	68,308,623,959.40	(19.17)
1.1.2	Piutang	12,339,308,768	22,933,937,287	33,825,627,373.14	40,026,995,307.75	60,265,407,347.30	50.56
1.1.3	Persediaan	11,192,438,369	9,526,671,766	9,387,175,027.98	9,622,754,874.63	9,178,900,578.59	(4.61)
	INVESTASI	**54,223,472,453**	**55,755,812,028**	**57,415,745,332.84**	**65,774,938,110.00**	**70,639,799,751.29**	**(6.94)**
	Investasi Non Permanen	1,256,873,695	789,213,270	449,146,574.84	160,105,590.00	82,907,514.03	(48.22)
	Investasi Jangka Panjang Permanen	52,966,598,758	54,966,598,758	56,966,598,758.00	65,614,832,520.00	70,556,892,237.26	(7.53)
	Jumlah Aset Lancar	**195,398,676,424**	**208,307,857,126**	**184,689,395,382.96**	**134,154,907,149.73**	**137,752,931,885.29**	**(7.35)**
1.2	**Aset Tetap**						
1.2.1	Tanah	194,147,523,827	196,500,682,636	278,464,825,718.00	349,533,326,252.81	429,279,902,124.24	22.82
1.2.2	Peralatan dan Mesin	256,796,690,314	281,549,103,269	318,137,646,824.71	355,335,124,170.69	395,993,294,896.74	11.44
1.2.3	Gedung dan Bangunan	617,394,879,651	635,857,577,308	702,655,446,269.13	698,040,418,572.92	727,913,718,109.03	4.28
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,371,440,994,754	1,582,557,543,834	1,760,684,934,075.19	1,897,611,650,892.73	2,115,371,077,084.97	11.48
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	65,882,932,533	71,096,586,318	75,631,514,919.39	78,973,676,281.76	83,899,281,438.28	6.24
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	123,988,941,050	65,999,667,095	38,229,005,894.00	22,450,936,905.01	12,713,277,603.25	(43.37)
1.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(860,580,245,751)	(930,357,372,016)	(1,375,895,737,424.00)	(1,500,243,374,232.72)	(1,825,469,506,059.39)	21.68
	Jumlah Aset Tetap	**1,769,071,716,379**	**1,903,203,788,444**	**1,797,907,636,276.42**	**1,901,701,758,843.20**	**1,939,701,045,197.11**	**2.46**
1.3	**Aset Lainnya**						
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	892,033,231	817,737,831	810,487,831.00	804,711,768.00	778,081,099.08	(3.31)
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi						
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
1.3.4	Aset Tak Berwujud	300,000,000	427,479,032	823,301,331.00	828,301,331.00	1,202,955,482.24	45.23
1.3.5	Aset Lain-lain	60,978,365,404	80,745,333,232	90,490,847,612.45	132,310,436,618.86	172,312,279,853.80	30.23
1.3.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya						
	Jumlah Aset Lainnya	**62,170,398,635**	**81,990,550,095**	**2,132,137,413,766.67**	**2,235,575,053,820.79**	**2,322,387,093,268.81**	**29,94**
	JUMLAH ASET	**2,080,864,263,891**	**2,249,258,007,693**	**2,132,137,413,766.67**	**2,235,575,053,820.79**	**2,322,387,093,268.81**	**2.90**
2	**KEWAJIBAN**						
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	16,643,977	128,636	58,501.00	-	-	
2.1.2	Utang Bunga	3,105,570,540	3,017,549,105	2,706,619,071.87	2,454,813,533.84	2,271,179,647.33	(7.48)
2.1.3	Utang PPh Pasal 21	-	-	-	-	-	
2.1.4	Utang PPh Pasal 22	-	-	-	-	-	
2.1.5	Utang PPh Pasal 23	-	-	-	-	-	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.6	Utang PPN	-	-	-	-	-	
2.1.7	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3,053,031,264	3,053,031,264	3,053,031,264.26	3,053,031,264.26	3,053,031,264.26	0.00
2.1.8	Pendapatan Diterima Dimuka	49,913,649	48,324,085	55,202,579.23	861,721,266.38	946,854,256.61	9.88
2.1.9	Utang Beban	461,744,818	8,611,091,515	9,981,090,305.07	15,659,827,162.53	19,755,813,666.14	26.16
2.1.10	Utang Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota						
2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	115,996,677,207	20,970,897,037	22,953,724,519.00	17,682,947,232.74	12,058,083,837.62	(31.81)
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**122,683,581,456**	**35,701,021,641**	**38,749,726,240.43**	**39,712,340,459.75**	**38,084,962,671.96**	**44,43**
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**						
	Utang Pemerintah Pusat						
	Utang Jangka Panjang Lainnya	33,583,343,907	30,530,312,643	27,477,281,378.44	24,424,250,114.18	21,965,377,796.30	(10.07)
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**33,583,343,907**	**30,530,312,643**	**27,477,281,378.44**	**24,424,250,114.18**	**21,965,377,796.30**	**(10.07)**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**156,266,925,363**	**66,231,334,284**	**66,227,007,618.87**	**64,136,590,573.93**	**60,050,340,468.26**	**20,62**
3	**EKUITAS DANA**	**1,924,597,338,529**	**2,183,026,673,409**	**2,065,910,406,147.80**	**2,171,438,463,246.86**	**2,262,336,752,800.55**	**3.23**
	JUMLAH EKUITAS DANA	**1,924,597,338,529**	**2,183,026,673,409**	**2,065,910,406,147.80**	**2,171,438,463,246.86**	**2,262,336,752,800.55**	**3,23**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2,080,864,263,891**	**2,249,258,007,693**	**2,132,137,413,767**	**2,235,575,053,821**	**2,322,387,093,269**	2,90

Sumber : BPKAD Tahun 2020

1. Aset

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Analisis aset meliputi tiga aspek utama, yakni aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Selama kurun waktu 2016 – 2020, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Barru mencapai 2,90% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Barru meningkat sebesar 2,90% setiap tahun. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari aset

lainnya yang mencapai 29,94 persen. sementara aset tetap hanya mengalami rata-rata pertumbuhan 2,46 persen. Pada periode yang sama, aset lancar mengalami penurunan capaian dengan rata- rata pertumbuhan negatif sebesar 7,35 persen. Rendahnya pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada rata-rata pertumbuhan aset lancar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aset lancar daerah lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban jangka pendek daerah.

2. Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kabupaten Barru selama periode 2016 – 2020 terus mengalami peningkatan dengan capaian kewajiban rata – rata sebesar 20,62 persen setiap tahunnya. Peningkatan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh komponen kewajiban jangka pendek yang bertumbuh rata-rata yang sangat tinggi sebesar 44,43 persen, hal ini dikontribusi oleh utang beban yang bertumbuh sebesar 26,16 persen dan pendapatan diterima dimuka/pendapatan yang ditangguhkan yang bertumbuh rata-rata sebesar 9,88%. Komponen-komponen kewajiban lainnya menunjukkan penurunan yang cukup berarti, terutama yang terkait dengan utang kepada pihak ketiga yang bertumbuh negatif sebesar 31,81%, begitupun utang jangka panjang lainnya juga bertumbuh negatif rata-rata sebesar 10,07 persen.

3. Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Kabupaten Barru selama periode 2016 – 2020, mengalami trend positif, meskipun rata-rata pertumbuhan yang relatif kecil yakni hanya 3,23 persen setiap tahunnya.

4. Rasio Keuangan (likuiditas, solvabilitas)

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen

laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Rasio Likuiditas terdiri rasio lancar *(current ratio)*, rasio kas *(cash ratio)* dan rasio cepat *(quick ratio)*. Sedangkan rasio lancar *(current ratio)* adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Begitupun kondisi rasio keuangan Kabupaten Barru diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Utang. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Barru dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Sementara Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Kabupaten Barru dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam Komponen Rasio Likuiditas ini ada 2 (dua) komponen rasio yang dihitung yaitu Rasio Lancar dengan formula aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek dan Rasio Quick dengan formula adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Kondisi Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio lancar mengalami fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Untuk mengetahui rincian rasio lancar Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3

Rasio Lancar Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2020

No	Rasio Lancar	Aset Lancar	Utang Jgk Pndk	Persentase (%)
1	2018	195.398.676.424	122.683.581.456	**62,79%**
2	2019	208.307.857.126	35.701.021.641	**17,14%**
3	2020	184.689.395.383	38.749.726.240	**20,98%**

Sumber : BPKAD Tahun 2020

Meski terlihat mengalami trend penurunan terutama di periode 2019, namun rasio lancar di Tahun 2020 menunjukkan Pemerintah Kabupaten

Barru masih sangat sehat karena aset lancar masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

Demikian pula yang diukur menggunakan Rasio Quick, rasio ini akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Rasio cepat (Quick Ratio) Kabupaten Barru menunjukkan nilai yang semakin menurun dari tahun 2018 ke tahun 2020, seperti yang diperlihatkan table berikut ini.

Tabel 3.4

Rasio Quick Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2020

No	Rasio Quick	Aset Lancar	Persediaan	Utang Jgk Pndk	Persentase (%)
1	2018	195.398.676.424	-	122.683.581.456	62,79%
2	2019	208.307.857.126	-	35.701.021.641	17,14%
3	2020	184.689.395.383	-	38.749.726.240	20,98%

Sumber : BPKAD Tahun 2020

Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio cash menunjukkan fluktuatif selama tahun 2018-2020. Namun demikian, kemampuan membayar utang jangka pendek menunjukan kondisi yang sangat baik. Rincian rasio Cash daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Rasio Cash Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2020

No	Rasio Lancar	Kas	Utang Jgk Pndk	Rasio
1	2018	141.476.592.982	38.749.726.240	3,65
2	2019	84.505.156.967	39.712.340.460	2,13
3	2020	68.308.623.959	38.084.962.672	1,79

Sumber : BPKAD Tahun 2020

Meski mengalami penurunan terutama di 3 (tiga) tahun terakhir namun rasio cash di Tahun 2020 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Barru masih sangat sehat karena kemampuan kas daerah masih lebih besar jika dibandingkan dengan utang Jangka Pendek.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Adapun rasio yang digunakan untuk menghitung Rasio Solvabilitas ini adalah Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang secara langsung membandingkan Total Kewajiban dengan Total Aset. Formula ini menunjukkan bahwa seberapa besar pendanaan yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan total asset yang dimiliki. Sedangkan untuk

Rasio Total Hutang terhadap Modal secara langsung membandingkan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas yang berarti bahwa seberapa besar pendanaan yang dibiayai dari total hutang dibandingkan dengan total modal yang dimiliki. Berdasarkan formula tersebut maka Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Barru selama tiga tahun terakhir akan dipaparkan berikut ini.

Tabel 3.6
Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Total Kewajiban	Ekuitas Dana	Rasio Hutang Terhadap Aset
1	2018	66.227.007.619	2.065.910.406.148	0,03
2	2019	64.136.590.574	2.171.438.463.247	0,03
3	2020	60.050.340.468	2.262.336.752.801	0,03

Sumber : BPKAD Tahun 2020

Rasio total hutang terhadap total ekuitas pada tahun 2018 hingga 2020 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kisaran nilai 0,03. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada tahun 2018 hingga 2020 relatif sama, dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui Rasio total hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Rasio Total Kewajiban dengan Aset Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Total Kewajiban	Total Aset	Rasio Hutang Terhadap Aset
1	2018	66.227.007.619	2.065.910.406.148	0,03
2	2019	64.136.590.574	2.171.438.463.247	0,03
3	2020	60.050.340.468	2.322.387.093.269	0,03

Sumber : BPKAD Tahun 2020

Kondisi tingkat rasio total hutang terhadap total asset yang cukup rendah yaitu 0,03 menunjukkan kondisi yang baik. Semakin rendah debit rasio akan semakin baik, karena ini berarti bahwa tingkat keamanan dana semakin baik pula.

3.2 Kebijakan Pengelolan dan Keuangan Masa Lalu

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memberikan pedoman dasar dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinamisnya legalitas pengelolaan keuangan daerah tersebut ditujukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan publik di daerah yang akuntabel, transparan dan berkinerja untuk mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Keuangan daerah diharapkan mampu secara efisien mengalokasikan sumberdaya pembangunan daerah, semata-mata

untuk kepentingan masyarakat. Keuangan daerah harus mampu teralokasi kembali secara tepat untuk kepentingan masyarakat, karena uang yang dikelola oleh pemerintah daerah memang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barru sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2016 – 2020, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat melalui proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, dan analisis proyeksi belanja daerah. Dalam era otonomi daerah saat ini, antara kepentingan masyarakat dengan alokasi belanja daerah seringkali tidak sejalan. Kepentingan masyarakat jika tidak diidentifikasi secara baik, tidak direncanakan secara cermat oleh pemerintah daerah, seringkali justru menimbulkan pemborosan dan tidak efisiennya belanja daerah. Akibatnya, kebutuhan belanja (*fiscal needs*) senantiasa akan tidak terkendali besarnya. Sebaliknya, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Barru memiliki keterbatasan untuk menarik uang dari masyarakat, karena di samping akan berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan timbulnya biaya tinggi bagi investasi dan industri lokal, juga kondisi sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi kemiskinan yang berkepanjangan.

Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang rendah dan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang tinggi, menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*)

yang semakin lebar. Untuk memperkecil kesenjangan fiskal tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan daerah secara tepat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi keuangan daerah yang diarahkan untuk mengelola belanja daerah secara cermat, efisiensi belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan, belanja pelayanan publik yang tepat sasaran, belanja modal pada sektor strategis dan akseleratif untuk menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan daerah secara berkesinambungan.

Untuk analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
1	2018	383.099.036.587	992.656.086.175	38,59
2	2019	396.800.964.785	992.414.128.555	39,98
3	2020	451.660.961.249	1.015.385.318.265	44,48

Sumber : BPKAD Tahun 2020

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2018 – 2020 selalu mengalami peningkatan. Tahun Peningkatan total realisasi belanja aparatur ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Defisit Riil dan Komposisi penutupan defisit Anggaran, serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020 secara berturut-turut ditunjukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2018 s/d 2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	**963.311.132.484**	**940.724.982.885**	**983.189.885.495**
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	992.656.086.175	992.414.128.555	1.015.385.318.265
3	Pengeluaran Pembiayaan	5.053.031.264	6.053.031.264	4.053.031.264
	(Defisit Riil)	**(34.397.984.955)**	**(57.742.176.933)**	**(36.248.464.034)**

Sumber : BPKAD Tahun 2020

Tabel 3.10

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2018 s/d 2020

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)		
		2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	141.476.534.481	83.734.357.547	47.485.893.513
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang DIpisahkan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6	Penerimaan Piutang Daerah			

Sumber : BPKAD Tahun 2020

Tabel 3.11

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 s/d 2020

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	**141.476.534.481**	100	**83.734.357.547**	100	47.485.893.513	100
2	Pelampauan Penerimaan PAD	10.322.763.803	(7,30)	6.422.780.872	(7,67)	-	0
0	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	13.432.895.213	(9,49)	21.830.907.823	(26,07)	-	0
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	545.616.008	(0,39)	1.681.164.329	(2,01)	-	0
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	166.751.740.352	117,87	126.750.084.248	(151,37)	-	0
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun belum terselesaikan	22.953.724.519	16,22	17.682.947.233	21,12	12.058.083.838	25,39
7	Kegiatan Lanjutan	23.525.499.846	16,63	25.761.672.706	30,77	20.334.815.813	42,82

Sumber : BPKAD Tahun 2020

Selama Tahun 2018 – 2020 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Barru terus menerus terjadi meskipun berfluktuatif. Defisit rill anggaran Kabupaten Barru secara keseluruhan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan.

3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2021 – 2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu empat tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Barru diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Barru empat tahun ke depan, tetapi karena adanya bencana terkait dengan merebaknya Pandemi Covid 19 pada akhir Tahun 2019 di Wuhan, China yang kemudian merebak pada awal Bulan Maret Tahun 2020 di Indonesia, hal ini berimbas terhadap terjadinya resesi dimana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berada pada angka -3,49% pada kuartal ketiga Tahun 2020. Efek resesi ekonomi ini akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Nasional dan khususnya Kabupaten Barru. Resesi akan berpengaruh pada pasokan atau supply barang yang turun secara drastis, namun permintaan tetap. Akibatnya harga-harga jadi naik, yang memicu inflasi. Inflasi yang tidak terkendali, akan membuat daya beli masyarakat khususnya yang berpenghasilan tetap akan menurun, dimana menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan semakin terpuruk, sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian, dan meskipun Pertumbuhan ekonomi melambat namun tidak mengalami pertumbuhan yang negatif. Selain itu dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Barru selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Barru, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Barru. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Barru, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun. Adapun asumsi indikator makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Barru Periode 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,98	4,47	5,91	6,64	7,23	7,51
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,17	5,88	5,31	5,14	4,98	4,45
3	Inflasi (%)	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0	3,0-1,0	3,0 - 1,0	3,0-1,0
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,08	7,45	6,67	6,41	6,28	6,05
5	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	41,98	43,90	47,08	50,92	53,47	57,38
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,43	71,79	72,26	72,57	72,88	73

Sumber : Olahan BAPPEDA & Dok.KLHS RPJMD Tahun 2020

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 - 2026 diperkirakan akan tumbuh melambat, dengan asumsi bahwasanya kebijakan fiskal masih dipengaruhi efek Covid 19 dan resesi yang terjadi karena pandemi ini.

Tabel. 3.13

Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Tahun (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Asli Daerah	106.995.777.751	108.862.667.688	111.344.324.647	114.977.271.603	116.983.424.703	119.024.581.681
2	Dana Transfer	773.633.384.794	789.131.939.705	804.900.917.399	819.945.036.285	838.052.848.914	852.675.411.256
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	76.655.141.000	77.992.639.678	80.353.475.379	82.755.503.550	84.199.442.928	85.668.576.534

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 - 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 - 2026

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**PENDAPATAN**	**2,01%**	**957.284.303.545**	**978.562.148.054**	**1.012.315.418.570**	**1.033.459.003.788**	**1.057.134.513.859**	**1.073.368.569.471**
1,1	**Pendapatan Asli daerah**	**2,15%**	**106.995.777.751**	**111.437.568.032**	**124.061.025.792**	**127.758.463.953**	**129.882.222.017**	**129.024.581.681**
1.1.1	Pajak Daerah	3,05%	18.670.000.000	19.570.659.321	30.626.096.071	31.737.971.536	32.221.235.790	31.694.477.884
1.1.2	Retribusi Daerah	2,64%	8.451.218.360	9.598.677.399	9.748.709.341	10.301.359.079	10.463.651.592	9.628.775.827
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	2,17%	8.942.135.943	9.098.160.638	9.256.907.692	9.618.424.606	9.786.249.360	9.957.002.364
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	1,85%	70.932.423.448	73.170.070.674	74.429.312.688	76.100.708.732	77.411.085.275	77.744.325.606
1,2	**Dana Transfer**	1,96%	**773.633.384.794**	**789.131.939.705**	**807.900.917.399**	**822.945.036.285**	**843.052.848.914**	**857.675.411.256**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,98%	725.938.731.000	740.605.097.285	755.527.366.112	769.710.002.536	786.941.301.335	800.672.056.207
1.2.1.1	Dana Perimbangan							
	a. Transfer Umum							
	a.1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	2,38%	13.710.482.000	13.949.706.028	14.193.104.098	14.440.749.040	15.153.812.904	15.418.220.542
	a.2. Dana Alokasi Umum	1,87%	498.613.623.000	507.313.562.146	516.165.300.075	525.171.485.411	537.674.915.119	547.056.405.768
	b. Transfer khusus (DAK)							
	b.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3,05%	59.015.166.000	62.044.877.843	67.127.452.880	69.246.365.224	72.402.248.897	73.578.300.727
	b.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1,74%	102.279.002.000	104.063.592.417	105.879.320.828	107.726.730.537	109.606.374.327	111.518.814.627
1.2.1.2.	Dana Insentif Daerah	2,12%	52.320.458.000	53.233.358.851	55.162.188.231	56.124.672.324	57.103.950.088	58.100.314.543

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.2	Transfer Antar Daerah	1,74%	47.694.653.794	48.526.842.420	49.373.551.287	50.235.033.749	51.111.547.579	52.003.355.049
								-
1,3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah**	**2,25%**	**76.655.141.000**	**77.992.639.678**	**80.353.475.379**	**82.755.503.550**	**84.199.442.928**	**85.668.576.534**
1.3.1	Hibah	1,74%	23.377.800.000	23.785.701.886	24.200.720.950	24.622.981.373	25.052.609.505	25.489.733.900
1.3.2	Dana darurat		-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2,47%	53.277.341.000	54.206.937.792	56.152.754.429	58.132.522.177	59.146.833.423	60.178.842.634
2	**BELANJA**	**1,99%**	**961.414.272.281**	**982.628.389.311**	**1.016.317.666.424**	**1.037.397.078.115**	**1.061.008.317.318**	**1.076.178.081.573**
2,1	**Belanja Operasi**	**1,83%**	**734.427.860.619**	**748.279.824.505**	**762.409.291.112**	**776.822.008.313**	**791.523.846.905**	**804.306.655.788**
2.1.1	Belanja Pegawai	2,21%	427.046.274.110	436.697.519.926	446.566.883.898	456.659.295.496	466.979.795.597	476.319.391.509
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,33%	289.386.067.823	293.437.472.774	297.545.597.394	301.711.235.758	305.935.193.060	309.218.285.764
2.1.3	Belanja Bunga	(1,09%)	3.191.298.036	3.156.590.521	3.122.260.474	3.088.303.789	3.054.716.406	3.021.494.308
2.1.4	Belanja Subsidi						-	-
2.1.5	Belanja Hibah	1,24%	14.804.220.650	14.988.241.284	15.174.549.346	15.363.173.270	15.554.141.842	15.747.484.207
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial						-	-
2,2	**Belanja Modal**	**2,77%**	**107.629.505.459**	**112.648.549.978**	**129.312.707.568**	**133.012.270.979**	**138.881.270.459**	**138.402.122.608**
2,3	**Belanja Tidak Terduga**	**1,00%**	**12.083.800.456**	**12.204.638.460**	**12.326.684.844**	**12.449.951.692**	**12.574.451.209**	**12.700.195.721**
2,4	**Belanja Transfer**	**2,40%**	**107.273.105.747**	**109.495.376.368**	**112.268.982.900**	**115.112.847.131**	**118.028.748.745**	**120.769.107.456**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil							
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2,40%	107.273.105.747	109.495.376.368	112.268.982.900	115.112.847.131	118.028.748.745	120.769.107.456
3	**PEMBIAYAAN**	**(1,60%)**	**4.129.968.736**	**4.066.241.896**	**4.002.247.854**	**3.938.074.327**	**3.873.803.459**	**3.809.512.102**
3,1	Penerimaan Pembiayaan	(2,88%)	10.183.000.000	9.889.257.972	9.603.989.319	9.326.949.616	9.057.901.487	8.796.614.405
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	(3,80%)	6.053.031.264	5.823.016.076	5.601.741.465	5.388.875.289	5.184.098.028	4.987.102.303

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing- masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Barru masih sangat rendah karena proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2021 – 2026 diproyeksikan masih rata-rata 10,71% atau lebih rendah dari dana transfer yang mencapai 74,52%.

b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer

pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional, untuk itu peningkatannya diproyeksikan rendah dikarenakan masih terkena imbas dari resesi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena Covid 19.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 157 yaitu :

1. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun belanja wajib dan mengikat yang dimaksud adalah belanja gaji dan tunjangan, Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga dan Belanja Bagi hasil.
2. Prioritas kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 - 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan perhitungan untuk Kapasitas Ril Kemamouan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Barru diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026

No	Uraian	Proyeksi Rp.					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	957.284.303.545	978.562.148.054	1.012.315.418.570	1.033.459.003.788	1.057.134.513.859	1.073.368.569.471
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	4.129.968.736	4.066.241.896	4.002.247.854	3.938.074.327	3.873.803.459	3.809.512.102
4	Pinjaman Daerah						
	Total Penerimaan	961.414.272.281	982.628.389.311	1.016.317.666.424	1.037.397.078.115	1.061.008.317.318	1.076.178.081.572
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	961.414.272.281	982.628.389.311	1.016.317.666.424	1.037.397.078.115	1.061.008.317.318	1.076.178.081.572

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Tabel 3.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2021 – 2026

No	Uraian	Proyeksi Rp					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	961.414.272.281	982.628.389.311	1.016.317.666.424	1.037.397.078.115	1.061.008.317.318	1.076.178.081.572
2	Prioritas I	624.919.276.983	637.034.768.244	650.390.627.435	664.050.325.749	678.021.188.006	689.765.753.022
3	Prioritas II	288.424.281.684	294.016.046.882	303.180.289.585	309.484.765.730	317.932.856.003	323.353.424.472
4	Prioritas III	48.070.713.614	49.002.674.480	50.030.048.264	51.080.794.288	52.155.476.000	53.058.904.079

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

3.4 Dampak Pandemi terhadap pendapatan daerah tahun 2020

Dampak pandemi terhadap pendapatan daerah tahun 2020 sangat besar. Pendapatan transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yang sangat drastis. Dampak covid-19 dari sisi ekonomi berimplikasi kepada tidak bergeraknya sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber pajak dan retribusi. Berhentinya produksi sector yang menjadi sumber – sumber penerimaan menjadi salah satu penyebab dari menurunnya penerimaan pajak yang menjadi kewenangan kabupaten. Pemberlakukan kebijakan subsidi retribusi dan pajak juga menjadi salah satu penyebab berkurang pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru. Selain itu, Perubahan kebijakan yang menjadi dasar dari penyesuaian target pendapatan merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial.

Berkurangnya penerimaan negara dimasa pandemic covid 19 dan focus belanja nasional terhadap penanganan pandemic berimplikasi terhadap berkurangnya dana transfer kepada pemerintah daerah (pemda). Refocusing dilakukan oleh pemerintah daerah dan focus belanja diarahkan kepada kebijakan penanganan pandemic covid 19 melalui sosial savety net, penanganan Kesehatan dan kebijakan lainnya yang akan mendukung pengurangan kasus covid 19, menjamin ketahanan ekonomi selama pandemic serta menjaga agar penduduk miskin di Kabupaten Barru tidak meningkat.

3.5 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan public yang lebih baik. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan

pelayanan publik yang lebih baik. Sumber – sumber pembiayaan lain dalam penyediaan infrastruktur dilaksanakan melalui :

1. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Implementasi skema ini telah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Untuk mendukung penerapan KPBU di Indonesia, Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, yaitu fasilitas penyiapan proyek, dukungan kelayakan, dan penjaminan infrastruktur. Kementerian Keuangan juga memperkenalkan skema pengembalian investasi proyek KPBU yakni skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment atau AP. Beberapa kelebihan skema AP ini antara lain, tidak adanya risiko permintaan atau demand risk bagi Badan Usaha dan kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha. Demi mendukung terlaksananya penerapan KPBU dan lahirnya proyek-proyek baru yang berfokus kepada layanan publik, Kementerian Keuangan juga mendirikan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Direktorat PDPPI menjalankan peran untuk mengelola pemberian fasilitas dan dukungan pemerintah, serta memfasilitasi PJPK dalam menyiapkan dan melakukan transaksi proyek KPBU. Dukungan ini merupakan bentuk kerja nyata upaya Pemerintah Indonesia untuk mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik

lainnya, perlu disiapkan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan dalam mengakselerasi pengimplementasiannya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPBU, Simpul KPBU, Tim KPBU maupun Panitia Pengadaan.

2. Pembiayaan melalui pinjaman daerah

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur

(Persero) ("PT SMI"), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
2. Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
3. Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.
4. Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah

Manfaat Pinjaman Daerah :

1. Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
3. Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
4. Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah
5. Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas(salah satunya obligasi).

Jenis Pinjaman Daerah :

1. Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang

berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

2. Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian.Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
   b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
   c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan secara lengkap dapat dilihatpada gambar skema berikut :

Gambar 3.1

Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan



3.6 Proyeksi Kebutuhan Investasi di Wilayah Kabupaten Barru

Proyeksi kebutuhan investasi di wilyah Kabupaten Barru sangat terkait

dengan pendirian Perseroda. Dalam perencanaannya Perseroda Barru akan mengoperasikan 5 unit divisi bisnis, yang masing-masing terdiri dari divisi pertambangan, divisi pengelolaan kawasan industri, divisi pengelolaan kawasan wisata, divisi perdagangan besah bahan pangan dan hasil-hasil pertanian serta divisi usaha perdagangan bahan bakar Gas (LNG dan Gas Alam). Kecuali biaya dalam pengmbangan unit bisnis divisi pengelolaan kawasan Industri, seluruh biaya pengembangan unit bisnis yang ada bersumber dari dana APBD Kabupaten Barru sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah daerah dalam Perseroda. Sedangkan pembiayaan pengembangan unit bisnis pngelolaan kawasan industri berasal dari 3 sumber, yakni APBD Kabupaten Barru, PT.KIMA dan Masyarakat. Khusus untuk pengelolaan kawasan industri, total dana yang diperlukan untuk biaya pra operasi dan biaya investasi sebesar Rp. 227,5 Milliar, dimana 51% (Rp. 116,03 Milliar) diantaranya bersumber dari APBD Kabupaten Barru, sisanya dikontribusi dari PT KIMA yang umumnya dalam bentuk biaya pengembangan fasilitas dan utilitas kawasan, sedangkan masyarakat berkontribusi dalam penyediaan lahan kawasan.

Total investasi Perseroda Barru dalam dalam pengembangan unit usaha sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah adalah sebesar Rp. 155,07 Milliar, yang terdiri dari biaya pra-operasi (biaya perizinan, DED, dll) sebesar Rp. 3,99 Milliar dan biaya investasi Rp. 151,08 Milliar. Biaya incestasi tersebut sudah mencakup nilai investasi yang dialokasikan lebih awal oleh pemerintah daerah di kawasan industri dan kawasan wisata yang direncanakan. Adapun Biaya pra-operasi dan biaya investasi pengembangan setiap unit bisnis terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.17

Rencana Kebutuhan Investasi Pada Perseroda Kabupaten Barru

No	Jenis investasi	Volume	Unit	Harga per Unit (Rp) *)	Nilai Investasi (Rp)
I	**Investasi Sarana dan Prasaran Dewan Direksi Perseroda**				**2.829.800.000**
II	**Investasi Unit Divisi Bisnis**				
A	**Divisi Pertambangan**				
	Sub Total A				**13.700.670.300**
B	**Divisi Kawasan Wisata**				
1	**Kawasan Bukit Harapan**				
2	**Kawasan Taman Laut Mallusetasi**				
4	**Kawasan Bukit Maddo**				
	Sub Total B				**7.555.529.000**

No	Jenis investasi	Volume	Unit	Harga per Unit (Rp) *)	Nilai Investasi (Rp)
C	Divisi Pengelolaan Kawasan Industri				
	Sub Total C				227.500.000.000
	Nilai Penyertaan Modal Pemerintah (51%)				251.585.999.300
D	Divisi Perdagangan Besar Bahan Pangan				
	Sub Total D				3.287.000.000
E	Divisi Perdagangan Besar Gas Alam				
	Sub Total E				14.506.000.000
	Total Investasi PERSERODA (Penyertaan Modal Pemerintah)				155.074.199.300
	a. Biaya pra operasi				3.995.020.000
	b. Biaya investasi tetap				151.079.179.300

Rencana pengembangan kawasan industri Barru, serta rencana menjadikan Barru sebagai simpul perdagangan barang dan Gas Alam terdapat lima bidang usaha memiliki potensi pasar yang sangat besar serta memiliki nilai strategis untuk dikelola oleh Perseroda Barru, masing-masing Unit usaha pertambangan, pengelolaan kawasan wisata, kawasan industri, perdagangan besar bahan pangan, dan perdagangan Gas Alam. Dari lima bidan usaha tersebut, unit bisnis kawasan wisata sudah memiliki asset terbangun, sedangkan yang lainnya dalam tahap persiapan pembangunan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru perlu menerbitkan Peraturan Daerah untuk Perseroan Daerah berdasarkan sektor (Pertambangan, Perdagangan hasil pertanian, perdagangan besar gas alam, kawasan wisata dan kawasan industri). Dalam menerbitkan Perda dan mendirikan BUMD perlu dilakukan sinkronisasi peraturan–peraturan yang terkait mengingat terdapat banyak peraturan yang sangat terkait antara yang satu dengan yang lainnya termasuk di dalamnya peraturan yang terkait dengan aspek manusia dan lingkungan.

Untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif diciptakan melalui kepastian bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Barru, terutama yang akan melakukan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah yang akan didirikan. Pemerintah Kabupaten Barru perlu sosialisasi secara tepat kepada masyarakat, serta membuat panduan mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyertaan modal dalam unit bisnis (khususnya pengelolaan kawasan industri), serta pelibatannya dalam pengelolaan unit bisnis (khususnya pengelolaan wisata).



BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk membangun kemandirian daerah agar dapat mendukung pembangunan secara nasional. Kemandirian lokal merupakan paradigma pembangunan yang sedang digalakkan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan visi kemandirian lokal, maka paradigma pembangunan yang sedang dijalankan daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan baik terhadap pusat, daerah lain bahkan negara-negara lain. Dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah mengandung pengertian sebuah kemampuan yang dimiliki untuk merancang, merumuskan dan mengatasi permasalahan pembangunan yang dihadapi melalui pengembangan suatu tatanan yang mandiri dan tetap terbingkai pada semangat persatuan dan kesatuan dalam NKRI.

Permasalahan pembangunan merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang saat ini dicapai dengan apa yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan daerah yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan acaman yang tidak diantisipasi. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Berdasarkan pasal 172 Permendagri 86 Tahun 2017 menekankan bahwa strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani Prioritas Nasional. Dalam menyusun permasalahan dan isu strategis daerah maka perlu untuk mengacu pada gambaran umum Kabupaten Barru sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu. Dalam menganalisis isu-isu startegis untuk perencanaan pembangunan jangka menengah daerah diidentifikasi melalui serangkaian proses yang dimulai dari identifikasi permasalahan, diikuti analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh inventarisasi isu strategis.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan

pembangunan daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kondisi riil yang terkait dengan adanya ketimpangan antara pencapaian pembangunan daerah dengan target yang diperoleh. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Selain itu permasalahan pembangunan diindentifikasi menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan informasi penting untuk menyusun perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Permasalahan bisa di identifikasi dengan melihat gap antara target dan capaian.

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah, telah teridentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang ingin diselesaikan dalam Lima tahun ke depan, Pada Bab ini menjelaskan beberapa permasalahan pembangunan daerah, sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan urusan wajib,. Urutan permasalahan berikut ini disesuaikan dengan urutan visi, misi. Tujuan, sasaran RPJMD 2021 – 2026.

4.1.1 ***Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan pemenuhan pelayanan dasar yang belum optimal***

Pada misi pembangunan 1 berbunyi : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Terwujudnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya diukur melalui Indeks Pembangunan manusia (IPM).

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah : pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Terdapat tiga nilai hakiki dalam pembangunan yaitu perbaikan tingkat hidup, peningkatan harga diri dan peningkatan kebebasan. Dengan demikian pembangunan tidak saja untuk meningkatkan pendapatan namun juga meningkatkan kualitas manusia serta memberikan pilihan-pilihan bagi penduduk. Modal fisik akan menjadi lebih produktif apabila suatu daerah mempunyai modal manusia yang memadai dan berkualitas. Dalam paradigma pembangunan manusia terdapat empat pilar yanng menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. Ke empat pilar tersebut adalah produktivitas, pemerataan, keseimbangan dan pemberdayaan. Pada hakikatnya pembangunan manusia tidak berhenti sampai disitu. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial sampai kepada kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif serta menikmati kehidupan sesuai dengan harkat pribadi merupakan bagian dari paradigma tersebut.

Konsep pembangunan manusia memiliki dua sisi yang harus seimbang, sisi pertama adalah peningkatan kapabilitas fisik penduduk seperti perbaikan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan keterampilan, sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Di era otonomi ini sebetulnya telah terjadi perubahan drastis tata hubungan pemerintah dan perilaku masyarakat. Dewasa ini masyarakat sudah semakin cerdas (*knowledge based society*) dan oleh karenanya akan semakin banyak tuntutan dari masyarakat (*demanding community*).

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi dibidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar

kehidupan masyarakat. Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Barru dibuktikan melalui *Masih rendahnya IPM Kabupaten Barru.*

Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index – HDI*) mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Produk Domestik Bruto (PDB). IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia yaitu: (1) Indeks kesehatan : panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); (2) Indeks pendidikan : Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah; (3) Indeks daya beli : memiliki standar hidup yang layak (diukur pada paritas daya beli/PPP, penghasilan). IPM merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan. IPM mencakup tiga hal yang paling mendasar yaitu peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*).

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara atau daerah adalah negara maju, berkembang atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Konsep Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) adalah pengukuran perbandingan dari Indeks Kesehatan, Indeks pendidikan dan standar hidup (ekonomi) untuk semua negara seluruh dunia. Ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemajuan pembangunan manusia di suatu negara, provinsi atau wilayah kabupaten/kota.

Perkembangan IPM Kabupaten Barru selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan trend naik namun ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yakni untuk tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Barru sebesar 71 sementara capaian nasional sebesar 71,94 dan capaian provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,93. Dan untuk capaian Kabupaten Barru dengan wilayah yang bertetangga langsung dengan Kabupaten Barru berada pada posisi ketiga setelah Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, dan diatas Kabupaten Bone, Soppeng dan Kabupaten Pangkep. Belum optimalnya IPM Kab.Barru berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain :

a. belum optimalnya akses layanan dan mutu pendidikan;

   Sektor pendidikan di IPM ditunjukan oleh indeks pendidikan yang terdiri angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Barru tahun 2020 yakni hanya 8,23 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP, yang artinya masih

dibawah target wajib belajar pendidikan dasar. Sementara angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,38 tahun dan Rata-rata lama sekolah nasional sebesar 8,35 tahun.

Kemudian angka Harapan lama sekolah, Harapan lama sekolah Kabupaten Barru Tahun 2020 sebesar 13,58 yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,58 tahun atau setara dengan diploma dua. Dan jika disandingkan dengan tingkat capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Angka HLS Kabupaten Barru lebih baik jika disandingkan dengan angka HLS Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yakni untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 13,45 dan capaian Nasional sebesar 12,95.

Selain itu ukuran keberhasilan indeks pendidikan di Kabupaten Barru juga dapat dilihat dari capaian SPM Bidang Pendidikan selama periode 2016 – 2020 belum menyentuh angka 100% sesuai target SPM. Untuk tahun 2020 capaian SPM untuk Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 85,05 %, Pendidikan Dasar SD sebesar 93,99%, SMP sebesar 90,50%.

b. belum optimalnya akses layanan dan mutu Kesehatan;

Belum optimalnya akses layanan dan mutu kesehatan, terlihat dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2020 sebesar 69,02 tahun yang jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan capaian nasional, capaian Kabupaten Barru berada dibawah capaian Provinsi dan Capaian Nasional yakni capaian provinsi sebesar 70,57 tahun dan capaian nasional sebesar 71,34 tahun. Selain itu belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terlihat dari capaian standart pelayanan maksimal (SPM) yang tidak mencapai angka 100 persen diantaranya pelayanan kesehatan bagi balita, pelayanan kesehatan bagi usia pendidikan dasar, usia produktif dan lansia.

c. Paritas daya beli yang rendah

Sementara itu hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli dalam rupiah). Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. *Purchasing power parity* (PPP) atau kemampuan daya beli masyarakat yang diukur berdasarkan konsumsi perkapita riil. PPP adalah suatu alat ukur yang menggambarkan tingkat keberdayaan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan konsumsi riilnya, tanpa memperhatikan asal atau sumber penerimanya apakah itu berupa

pemberian atau hasil pendapatannya. Oleh karena PPP merupakan alat ukur yang dianggap lebih mewakili tingkat kesejahteraan penduduk sesuai dengan pola, kebiasaan dan kemampuan untuk dapat mengakses terhadap setiap tingkatan kebutuhan berdasarkan kemampuannya.

Untuk paritas daya beli capaian Kabupaten Barru masih berada di bawah capaian Provinsi dan Capaian Nasional. Untuk tahun 2020 capaian Provinsi sebesar 11,08 Juta, capaian nasional sebesar 11,31 juta sementara capaian Kabupaten Barru hanya sebesar 10,92 juta.

4.1.2 ***Penciptaan ketahanan bencana dan pengembangan pemajuan kebudayaan belum Optimal***

Pada misi pembangunan 2 berbunyi : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal. Terwujudnya lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya local Mencakup upaya umum dalam mewujudkan lingkungan kondusif yang tangguh terhadap bencana serta memperkuat dan mengembangkan budaya-budaya lokal yang diukur melalui Korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan Desa Pemajuan Kebudayaan.

Ketangguhan terhadap bencana diukur dari korban yang meninggal dan hilang karena bencana. Sesuai target RPJMD periode sebelumnya ditargetkan korban yang meninggal dan hilang karena bencana sebesar 0, namun pada realisasi tahun 2020 korban yang meninggal dan hilang karena bencana sebesar 0,002. Selain itu capaian Standart pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman dan Ketertiban tidak menujukkan capaian yang sesuai target, untuk sektor penanganan bencana. Untuk pelayanan informasi rawan bencana hanya menunjukkan angka 80 dari target tercapai hingga 100 persen, sementara untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana hanya sebesar 40 dari target 100 persen yang diharapkan.

Untuk pengembangan dan penguatan seni budaya lokal, dimana kesenian tradisional pada zaman ini mulai tergerus, dikarenakan berkembangnya zaman serta adanya arus globalisasi yang mengakibatkan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pola kehidupan masyarakat, yang juga berpengaruh pada kebudayaan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan daerah peninggalan leluhur sudah mulai terpengaruh dengan kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari luar dan lambat laun kebudayaan daerah tersebut mulai ditinggalkan. Padahal sesungguhnya kesenian tradisional harus dilestarikan, selain merupakan peninggalan budaya juga karena Seni memiliki daya *magis* dan harus dimanfaatkan untuk

menciptakan pribadi manusia yang baik. Diharapakan masyarakat yang berkesenian harus mampu membuat kemajuan social dan menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebudayaan di Kabupaten Barru khususnya kesenian-kesenian tradisional juga sudah mulai terpinggirkan dan digantikan oleh kesenian yang lebih modern. Untuk itu sejalan dengan Misi Bupati terpilih, pelestarian Kebudayaan Barru harus segera menjadi perhatian. Kurangnya perhatian terhadap kebudayaan ini ditunjukkan dari Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 sebesar 53,57, dan angka ini capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 53,57 yang berarti stagnan dan tidak ada peningkatan.

4.1.3 *Ketersediaan Infrastruktur yang belum Maksimal dan merata*

Pada Misi pembangunan 3 berbunyi : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan infrastruktur diukur Indeks Williamson.

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Barru yang belum maksimal dan merata terlihat dari angka capaian indeks Williamson yang menunjukkan trend meningkat dari tahun 2016 – 2020 yakni sebesar 0,25 pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,29 pada tahun 2020. Meskipun capaian angka 0,29 ini tidak menunjukkan terjadinya disparitas wilayah yang tinggi, namun kecendrungan terjadinya peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa jika tidak diantisipasi di masa mendatang akan rentan terjadi disparitas wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan infrastruktur yang belum maksimal dan merata di Kabupaten Barru diantaranya proprosi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan angka capaian yang belum mencapai target untuk tahun 2020. Capaian proprosi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar 0,72 namun realisasi hanya sebesar 0,65, selain itu untuk akses penduduk terhadap air minum yang layak juga menunjukkan capaian yang belum mencapai target pembangunan daerah. Pada tahun 2020 capaian akses penduduk terhadap layanan air minum sebesar 95,61 dari yang ditargetkan sebesar 100%.

Pada dasarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda-beda. Terjadinya ketimpangan antarwilayah ini berimplikasi terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat

kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

Selain itu sehubungan dengan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Barru sangat diperlukan mengingat salah satu permasalahan terkait prioritas RPJMN 2020-2024 yang bersifat mandatory terhadap Kabupaten Barru, antara lain: 1) Pengembangan KPPN Barru; dan 2) Pembangunan KA Makassar- Parepare yang melintasi Kabupaten Barru.

4.1.4 *Belum optimalnya daya saing perekonomian produk unggulan*

Pada Misi pembangunan 4 berbunyi : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Terwujudnya peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diukur melalui Pertumbuhan Ekonomi(PE).

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Barru salah satunya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2016 PE sebesar 6,01 dan pada tahun 2019 sebesar 7,41, dan drastis menurun di Tahun 2020 sebesar 0,87 dikarenakan pandemic Covid 19. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru bahkan lebih tinggi jika dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar -0,70 dan capaian Nasional yang sebesar -2,07. Namun Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat ini, tidak diimbangi dengan meningkatnya share lapangan usaha yang menjadi struktur perekonomian Kabupaten Barru. Terbukti dari distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha masih di dominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 33,82 persen, sementara sektor lain cenderung mengalami peningkatan yang lambat bahkan sebagian fluktuatif.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global, Untuk itu potensi lokal di setiap wilayah harus digali untuk menumbuhkan kembangkan potensi daya saing perekonomian Kabupaten Barru.

Sementara itu, pengelolaan ekonomi juga terkadang melupakan pengintegrasian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekologi dalam menyelaraskan upaya –upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk terpeliharanya kualitas lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) diukur berdasarkan 3 indikator komposit yang harus diperhatikan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Pada tahun 2020 capaian IKLH hanya sebesar 69,85, terdiri dari nilai Indeks kualitas Air (IKA) Kabupaten barru sebesar 50 dari yang ditargetkan sebesar 100, Indeks Kualitas Udara sebesar 90,59 dari yang ditargetkan sebesar 95, dan indeks tutupan lahan sebesar 69,77 dari yang ditargetkan sebesar 51,5. Dari ketiga komposit ini dilihat dari pencapaian, dua indeks pembangunan IKLH yakni indeks kualitas air dan indeks kualitas udara tidak mencapai target.

4.1.5 *Pemerataan Pendapatan belum Optimal*

Pada Misi pembangunan 5 berbunyi : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan. Terwujudnya Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan diukur melalui Indeks Gini.

Berbagai indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi makro dan sektoral, peningkatan PDRB, dan pendapatan per kapita serta maraknya berbagai investasi menandakan adanya kondisi ekonomi dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang terus membaik. Meskipun indikator makro ekonomi menunjukkan kemajuan yang berarti, namun belum menjamin adanya distribusi pendapatan dan pengembangan wilayah yang proporsional. Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisen gini mendekati satu. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Mengetahui distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Barru menjadi hal yang penting untuk melihat sejauh mana kebijakan pembangunan daerah yang sudah dilakukan selama ini berdampak bagi pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Barru. Adanya kesenjangan yang tinggi antar golongan masyarakat penghasilan rendah, sedang dan tinggi menunjukkan bahwa telah terjadi pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang bias pada daerah, kelompok dan golongan tertentu. Gini ratio di Kabupaten Barru berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,360. Jika dibandingkan

dengan capaian nasional dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru masih berada di bawah capaian Nasional dan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi jika disandingkan dengan wilayah sekitar, Kabupaten Barru termasuk daerah yang angka indeks gininya tertinggi kedua setelah Kabupaten Soppeng. Adapun penyebab pemerataan pembangunan Kabupaten Barru belum optimal dibuktikan dari :

1. *Angka kemiskinan yang fluktuatif*

   Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan publikasi dari BPS Tahun 2019, angka kemiskinan Kabupaten Barru menurun menjadi 8,57 di tahun 2019 sementara di tahun 2016 sebesar 9,45. Dan jika ditarik dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, dimana dalam kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2016 – 2020 indeks kedalaman kemiskinan menujukkan trend menurun dari angka 1,71 pada tahun 2016 menjadi 1,07 pada tahun 2019. ini berindikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Barru cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

2. *Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barru*

   Pembangunan ekonomi yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang hendak dicapai oleh pemerintah. Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah merupakan salah satu tujuan dari adanya pembangunan tersebut. Kesejahteraan diartikan sebagi keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani. Salah satu faktor yang dapat melihat kesejahteraan penduduk Kabupaten Barru adalah angka Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT). Angka TPT Kabupaten Barru selama periode tahun 2016 – 2020 juga menunjukkan capaian yang tidak optimal dan fluktuatif yang kecendrungannya meningkat. Angka TPT Kabupaten Barru lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 6,39, sementara nasional sebesar 5,28 dan Prov.Sulsel sebesar 4,97.

4.1.6 ***Tata Kelola Pemerintahan Daerah Belum Efektif dan Efisien***

Pada Misi pembangunan 6 berbunyi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi. Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi.

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barru terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Perubahan yang disasar mengarah pada 8 (delapan) perubahan yaitu : (1) Mental Aparatur; (2) Pengawasan; (3) Akuntabilitas; (4) Kelembagaan; (5) Tata Laksana; (6) SDM Aparatur; (7) Peraturan Perundangan, dan (8) Pelayanan Publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Barru masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Belum Efektif dan Efisien Kabupaten Barru belum optimal dibuktikan dari :

- *Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja pemerintahan Daerah (SAKIP)*
  Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabiltas kinerja pembangunan. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai AKIP Kabupaten Barru Tahun 2020 predikat CC. Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat menjadi kategori B (baik), bahkan A (sangat baik)..
- *Belum optimalnya Indeks pelayanan Publik (IPP)*
  Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2020 telah mencapai nilai B atau sebesar 3,27 berada pada peringkat 170 pada level Kabupaten Kota se Indonesia untuk nilai evaluasi Pelayanan Publik unit penyelenggaran Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2020. Sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Barru yang bersih dan melayani dalam bidang pelayanan publik pada tahu 2026, maka pemerintah Kabupaten Barru melakukan langkah-langkah strategis berdasarkan permasalahan pokok yang terjadi. Pelayanan publik masih belum

memiliki kualitas yang diharapkan, yang menjadi latar belakang antara lain:

- Hasil identifikasi dalam pemberian pelayanan publik terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khususnya instrument yang jelas untuk dipedomani dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik. Keberadaan kelembagaan pemerintah dalam menjalakan tugas-tugas pelayanan baik dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan aparatur sipil negara, belum memperlihatkan kinerja yang belum optimal;
- Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan. Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;
- Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan;
- Rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu.

4.1.7 ***Masih banyaknya kejadian kriminalitas***

Pada Misi pembangunan 7 berbunyi : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama diukur melalui angka kriminalitas.

Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Barru ditnjukkan oleh angka kriminalitas yang meningkat, pada tahun 2020 angka kriminalitas 7,25 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 6. Berbagai kategori tindak kriminal adalah seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Adapun permasalahan yang menyebabkan tingkat ketentraman dan ketertiban rendah adalah :

- Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi dengan stakeholder lain;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan

daerah.

- Selain itu Kabupaten Barru yang terkenal sebagai kabupaten yang masyarakatnya taat beragama, telah terjadi penurunan kualitas kehidupan beragama dengan makin banyaknya konflik antara umat beragama.

4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatankan potensi dan seluruh sumber daya yang ada di daerah khususnya Kabupaten Barru. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barru melalui kebijakan baik yang besifat jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Hal tersebut diwujudkan melalui program dan kegiatan yang strategis. Sinergisitas antara stakeholders juga dilakukan mengingat seluruh komponen kota harus saling bahu membahu agar tujuan kesejahteraan masyarakat segera dapat diwujudkan.

Dalam kurun lima tahun terakhir ini, program program pembangunan dimaksud telah menampakkan hasilnya. Berbagai kemajuan di segala bidang telah dapat dinikmati oleh masyarakat. Meski demikian masih terdapat permasalahan yang menjadi tugas bersama seluruh komponen Kabupaten Barru untuk dapat ditangani secara sinergis dan tepat sasaran. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minimal bidang pendidikan belum optimal, terlihat dari belum tercapainya target penyelenggaraan PAUD berdasarkan RPJMD 2016-2021,
- Menurunnya APM SD, angka partisipasi sekolah SD dan SMP, dan meningkatnya angka putus sekolah SD dan SMP ;
- Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah hanya sampai tingkat SMP;
- Belum optimalnya pelayanan pendidikan disebabkan belum terpenuhinya sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan;
- Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terbatas terutama pada

daerah-daerah pegunungan dan terpencil dengan akses jalan dan transportasi publik yang belum memadai;

- Penerapan manajemen berbasis sekolah belum sesuai dengan target sebagai akibat dari rendahnya kemampuan manajerial kepala sekolah dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- Peran komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan belum optimal.
- Kurangnya sumber daya, kompetensi dan kualifikasi pustakawan dan laboran;
- Masih kurangnya pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan.

2. Kesehatan

- Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan belum optimal;
- Angka harapan hidup (AHH) belum mencapai Target;
- Tingginya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup;
- Menurunnya cakupan pelayanan anak balita,
- Meningkatnya % balita gizi buruk;
- Masih ditemukannya kasus gizi buruk dan stunting di Kabupaten Barru;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, dan pegungungan yang belum memadai dan tidak merata;
- Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia;
- Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal;
- Belum optimalnya upaya promotif dan preventif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- Standar dan cara pelayanan tenaga kesehatan masih sering dikeluhkan pasien di RSUD;
- Menurunnya rasio dokter dan rasio tenaga medis per satuan penduduk;
- Masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang

tidak menular, serta meningkatnya penyakit degenerative (Kanker, Jantung, etc);

- Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang;
- Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan di rumah sakit, terutama yang berkaitan di dalam penangan pasien covid-19;
- Menurunnya cakupan desa UCI yang berkontribusi terhadap pencapaian UHH;
- Masih sangat kurangnya Pembinaan Desa Siaga Aktif
- Forum Desa Siaga hampir sebagian besar sudah tidak aktif lagi.

3. Pekerjaan Umum
   - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi buruk masih tinggi;
   - Masih terbatasnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal1,5 m hanya terdapat dibeberapa kecamatan;
   - Masih banyak Drainase dalam kondisi tidak berfungsi secara maksimal dalam artian tersumbat;
   - Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai serta tanggul pantai belum memadai;
   - Masih seringnya terjadi pelanggaran pada beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan
   - Kerusakan kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air;
   - Tingginya sedimentasi yang memberikan potensi pendangkalan sungai;
   - Masih tingginya Abrasi pantai di daerah pesisir Kabupaten Barru;
   - Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan untuk mendukung fungsi kawasan;
   - Masih rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum,;
   - Masih rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, drainase);
   - Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur persampahan;
   - Masih minimnya kuantitas dan kualitas data keciptakaryaan;
   - Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum optimalnya PHBS oleh masyarakat.
   - Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
   - Kesesuaian/ketaatan terhadap regulasi penataan ruang yang disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan informasi

penataan ruang (RTRW dan RDTR);

- Belum Optimalnya Pengendalian dan pengawasan Tata Ruang;
- Belum jelasnya penegakan aturan atas pelanggaran Tata Ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
   - Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minimal bidang Perumahan Rakyat belum optimal;
   - Masih minimnya dokumen perencanaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   - Belum optimalnya penanganan kumuh di wilayah permukiman;
   - Masih minimnya kuantitas dan kualitas data perumahan dan kawasan permukiman;
   - Data Rumah Tidak Layak Huni belum sepenuhnya terintegrasi;
   - Keterbatasan sumberdaya untuk melakukan updating data untuk permukiman layak huni.
   - Biaya pemeliharaan penerangan jalan umum diperhadapkan pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerangan jalan umum.
5. Ketentraman dan Ketertiban
   - Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minimal bidang Ketentraman dan Ketertiban belum optimal;
   - Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi dengan stakeholder lain;
   - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
   - Masih terjadinya konflik sosial di masyarakat;
   - Masih tingginya kejadian bencana alam;
   - Perlunya rencana terait dengan pengurangan resiko bencana;
   - Masih rendahnya pelayanan penangan bencana dikarenakan jangkauan terlalu luas, belum adanya pos pembantu serta kurangnya armada;
6. Sosial
   - Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minimal bidang Sosial belum optimal;
   - Menurunnya Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan yang tertangani;
   - Aksesibilitas penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mendapatkan pelayanan dasar masih belum terlayani secara optimal;

- Intervensi pemerintah untuk perlindungan sosial masih seringkali belum tepat sasaran karena kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih rendah;
- Kemandirian dan keberdayaan penyandang masalah kesejateraan sosial meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyadang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah, dan korban NAPZA masih rendah;
- Terbatasnya SDM pengelola dan pendampingan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum optimal;
- Belum optimalnya penanganan dan pemberian bantuan sosial pada korban bencana alam.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
   - Masih terbatasnya lapangan kerja produktif;
   - Kualitas, kompetensi dan produktifitas tenaga kerja belum memadai;
   - Peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja;
   - Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan belum memadai;
   - Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai;
   - Sarana dan prasarana pembinaan keterampilan ketenagakerjaan belum memenuhi standard nasional, baik dari segi manajerial maupun dengan sarana pendukung.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak belum optimal;
   - Perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidupnya belum memadai;
   - Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender belum menguat;
   - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah;
   - Tingginya tingkat perkawinan anak;

3. Pangan
   - Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder lain yang terkait belum sinergi;
   - Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai;
   - Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal;
   - Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal.
4. Pertanahan
   - Penataan penguasaaan, pemilikan dan penggunan dan pemanfaatan tanah belum tertata termasuk masih adanya lahan pemerintah yang belum bersertifikat;
   - Penyelesaian konflik pertanahan belum optimal termasuk beberapa lahan pemerintah yang disengketakan.
5. Lingkungan Hidup
   - Ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penyusunan belum tersedia;
   - Belum tersedianya dokumen RPPLH;
   - Terjadinya Pencemaran di badan sungai yang disebabkan oleh penggunaan pupuk petisida, sedimen dan limbah domestik;
   - Sampah organik yang mengalir ke sungai menyebabkan air sungai kekurangan oksigen yang akan berdampak parah terhadap ekosistem;
   - Pembuangan air limbah PLTU yang mengalir ke sungai berupa logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan;
   - Pencemaran udara disebabkan oleh kendaraan, pembangkit listrik dan berbagai jenis pembakaran lainnya;
   - Penanganan pengurangan pencemaran udara belum dilaksanakan secara intensif oleh pemerintah Kabupaten Barru;
   - Masih kurangnya pengawasan terhadap penanganan pencemaran udara di PLTU;
   - Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku;
   - Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur professional;
   - Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan;
   - Lahan TPA terbatas.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen administrasi kependudukan;
   - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa
   - Masih perlunya pembinaan terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik;
   - Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah, peran pendamping masih belum maksimal;
   - Memberikan kesadaran serta sosialisasi tentang Peran dan fungsi aparatur pemerintahan desa.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   - Penerapan keluraga berencana belum massif dan menyeluruh;
   - Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara massif dan menyeluruh;
   - Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri belum memadai;
   - Upaya promosi kesehatan ibu dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat masih minim;
   - Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR belum optimal;
   - Kurangnya kesiapan pengembangan kapasitas dan kualitas penduduk di era bonus demografi, yang disebabkan oleh masih tingginya angka perkawinan anak, dan belum memiliki mindset dua anak cukup;
   - Masih perlunnya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
   - Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terhadap kebijakan pengendalian penduduk.
9. Perhubungan
   - Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pemeliharaan sarpras transportasi;
   - Peralatan pengujian tidak memenuhi syarat;
   - Minimnya kendaraan umum yang beroperasi sebagai akibat keberadaan kendaraan plat gantung;
   - Minimnya sumberdaya dalam pengelolaan;

- Batasan kewenangan dalam pengoperasian dan pengelolaan;
- Rendahya kesadaran pemilik mobil untuk KIR;
- Tidak adanya sanksi bagi pemilik kendaraan untuk KIR;
- Belum maksimalnya integrasi transport antar moda;
- Masih minimnya sumberdaya dalam pengelolaan pelayanan pelabuhan dan terminal.

10. Komunikasi dan Informatika
    - Masih ada daerah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi karena daerah tersebut termasuk area blank spot.
11. Koperasi dan UKM
    - Perlu adanya penguatan kelembagaan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, yang disebabkan oleh kurangnyamodal, pemasaran, inovasi dan kualitas produk;
    - Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendororng kegiatan usaha koperasi.
12. Penanaman Modal
    - Belum optimalnya investasi di Kabupaten Barru, hal ini disebabkan oleh Belum ada analisis penentuan kebutuhan investor potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
    - Promosi Peluang investasi konvensional dan belum mampu menarik minat investasi langsung PMA
    - Belum adanya ketersediaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi investasi;
    - Masih minimnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri yang disebabkan oleh minimnya investasi pada sektor ini
13. Kepemudaan dan Olahraga
    - Ada organisasi yang aktif tapi tidak memiliki SK pengurus sehingga tidak bisa terhitung menjadi organisasi pemuda yang aktif;
    - Belum terpolanya pemberdayaan pemuda;
    - Belum optimalnya pembinaan klub-klub olahraga;
    - Banyak kegiatan pembinaan Cabor yang tidak memasukkan laporan kepada dikpora;
    - Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan.
14. Statistik
    - Masih adanya komponen data untuk wilayah kecamatan yang harus dipenuhi;
15. Persandian
    - Keterbatasan Sumberdaya;

- Pengadaan Repeater perangkat pendukung HT Hytera untuk mendukung pencapaian indikator tersebut belum terakomodir dalam APBD

16. Kebudayaan
    - Masih banyak warisan budaya yang belum terdaftar;
    - Belum terpadunya pengelolaan cagar budaya
    - Kurangnya pembinaan terhadap pelestarian/pengrajin alat musik tradisional.
17. Perpustakaan
    - Masih rendahnya minat baca masyarakat;
    - Perkembangan Teknologi (HP) sehingga minat mengunjungi perpustakaan berkurang;
    - Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang;
    - Kurangnya tenaga pustakawan & tenaga teknis.
18. Kearsipan
    - Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip masih kurang;
    - Kurangnya perhatian pimpinan OPD terhadap pengelolaan arsip dinamis;
    - Belum memiliki SDM yang profesional dalam bidang arsip.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan
    - Semakin berkurangnya sumberdaya ikan dilaut;
    - Pembudidaya ikan mengalami kegagalan panen disebabkan oleh penyakit udang dan ikan;
    - Sarana dan prasarana penangkapan ikan belum modern;
    - Kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk pendistribusian ikan seperti pendingin yang menyebabkan kualitas ikan sampai konsumen tidak efektif.
2. Pariwisata
    - Pengembangan daya tarik wisata belum didukung secara optimal oleh sector industry pariwisata seperti perhotelan, restoran dan rumah makan, serta usaha perjalanan. pengelolaan potensi daya tarik wisata masih terbatas, sejauh ini yang sudah dikelola baru dikelola secara profesional tercatat hanya 8 obyek wisata diantaranya Lappa Laona, Celebes Canyon, Pesantren Alam Tompo Lemo-Lemo, Pantai Ujung Batu, Taman Wisata Bola Pitue, Pulau Dutungan, Diana Water Park dan Kupa Beach;

- Rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Barru adalah 1 hari selama 4 tahun terakhir nilai tersebut terbilang stagnan dari tahun ke tahun, meskipun demikian nilai tersebut telah memenuhi target lama kunjungan wisata, di sisi lain masih terbatasnya jumlah akomodasi di kabupaten barru baik itu Hotel, motel maupun penginapan yang representatif terhadap kebutuhan orang yang berkunjung ke Kabupaten Barru;
- Adanya pandemi global (Covid-19) yang membatasi mobilitas manusia sehingga menurunya permintaan berwisata masyarakat. PAD sektor pariwisata di dapatkan dari retribusi jasa parkir, retribusi tempat wisata/rekreasi. Rendahnya PAD sektor pariwisata di sebabkan oleh banyaknya potensi wisata yang belum dikelola sehingga terdapat kebocoran pendapatan daerah serta rendahnya nilai retribusi jasa parkir dan retribusi tempat wisata/rekreasi.

3. Pertanian
   - Pengurangan luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan;
   - Menurunnya produktivitas pertanian per hektar akibat rusaknya struktur tanah (Degradasi Lahan) karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan;
   - Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientas pada on-farm;
   - Potensi kerusakan saluran irigasi tersier sebagai dampak alih fungsi lahan;
   - Masih terbatasnya akses dalam melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok.
4. Perdagangan
   - Tidak ada kewenangan ekspor di tingkat kabupaten/kota;
   - Belum tersedianya data kelompok pedagang yang bergerak pada sektor informal.
5. Industri
   - Belum optimalnya sentra industri kecil dan menengah;
   - Rendahnya kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar;
   - Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang;
   - Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah, khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga

penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi.

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah
   - Belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyenggaraan Pemerintah Daerah;
   - Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
   - Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
   - Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
   - Belum Optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
   - Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
   - Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Sekretariat DPRD
   - Belum optimalnya kinerja Sekretariat Daerah dalam menjalankan Tupoksiya;
   - .Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi terbatas;
   - Pemanfaatan Tenaga Ahli dalam mendukung Kinerja DPRD belum maksimal.

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
   - Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaraan SKPD belum optimal;
   - Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi belum sinergis, *masive* dan sistematis;
   - Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
   - Koordinasi dalam upaya Penataan Peraturan terkadang masih kurang sinergis dengan OPD utama.
2. Keuangan
   - Belum Optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah;
   - Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
   - Upaya meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah belum massif di semua Perangkat Daerah dan aparatur;
   - Upaya menggali dan memetakan potensi PAD dari sektor sektor potensial lain belum optimal.

3. Kepegawaian
   - Jumlah dan rasio pejabat fungsional dengan kompetensi teknis masih sangat kurang terhadap kebutuhan pada sejumlah perangkat daerah;
   - Masih perlunya penataan struktur dan budaya organisasi/ kelembagaan instansi pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang responsif;
   - Masih kurangnya reward and punishment dalam rangka peningkatan motivasi aparatur;
   - Belum sesuainya kompetensi pegawai dengan kebutuhan riil.
4. Pendidikan dan Pelatihan
   - Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;
5. Penelitian dan Pengembangan
   - Fungsi kelitbangan belum optimal;
   - Kurangnya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam Perencanaan dan Pengembangan Daerah;
   - Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian yang lebih terarah dan terukur;
   - Belum optimalnya upaya fasiitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) masih rendah, SAKIP OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD;
- Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indikator dalam penatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.
- Penyelesaian Rekomendasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal maupun internal hasil audit masih belum cukup memadai. Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemeriksaan;
- Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan OPD belum memadai sehingga belum

dapat sepenuhnya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan berdasarkan analisis resiko

- Masih rendahnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) harus segera diperbaiki, untuk memperoleh informasi pelaksanaan dan pencapaian refromasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah.

G. Unsur Kewilayahan

- Belum adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat.
- Belum optimalnya pelayanan tingkat kecamatan dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.
- Terkendala di pendataan(Kecamatan);
- Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan wilayah sebagaimana arahan RTRW terkait dengan pusat pengembangan wilayah di kecamatan yang di tetapkan sebagai kawasan prioritas seperti pengembangan agropolitan, minapolitan, peternakan sapi, dan wisata alam untuk peningkatan perekonomian dan peningkatan daya saing daerah.
- Belum optimalnya pengelolaan dan realisasi dana Desa/Kelurahan dalam mendukung prioritas pembangunan.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik
   - Pengembangan wawasan kebangsaan melalui peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat masih lemah;
   - Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan belum memadai;
   - Upaya pendidikan politik masyarakat masih kurang;
   - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun kualitas politik dan berdemokrasi.

4.3 Isu Strategis

Kondisi lingkungan global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah Kabupaten Barru lima tahun ke depan antara lain:

4.3.1 Isu Strategis Global

A. Pandemi Covid-19

Covid 19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Data global per 2 Juni 2020 menunjukkan ada 6.140.934 orang dari 216 negara

didunia terkonfirmasi wabah Covid-19 dan 373.548 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan untuk data Indonesia menunjukkan ada 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia.

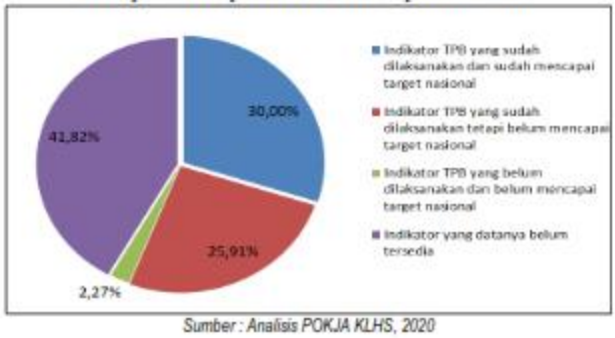
Merebaknya Covid 19 juga membawa pengaruh yang besar bagi Kabupaten Barru secara keseluruhan, Covid 19 menjadi salah satu penyeban menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Untuk itu perencanaan pembangunan pasca COVID 19 merupakan tantangan berat bagi pemerintah daerah Kabupaten Barru untuk melaksanakan akselerasi bagi pencapaian target-target pembangunan daerah yang menurun dikarenakan Covid 19.

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)*

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga ikut berkomitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Barru diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 indikator dengan 17 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Gambar 4.1
Komposisi Capaian TPB Kabupaten Barru



Sumber : Analisis POKJA KLHS, 2020

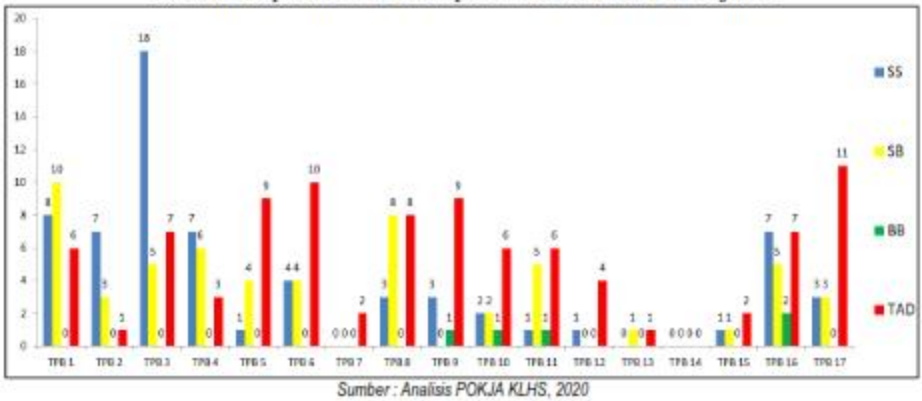
Sebanyak 220 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Barru, dengan uraian capaian sebagai berikut : (i) untuk kategori yang telah melaksanakan indikator TPB dan telah mencapai

target sebanyak 66 indikator atau 30,00%; (i) untuk kategori yang telah melaksanakan indikator TPB tapi belum mencapai target sebesar 57 indikator atau sebesar 25,91%; (iii) untuk kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 5 indikator atau 2,27%; (iv) untuk indikator yang tidak ada data sebesar 92 atau 41,82%.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Barru pada periode RPJMD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator SB, BB dan TAD yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut. Berikut grafik capaian TPB Kabupaten Barru.

Gambar 4.2

Rincian Capaian TPB Kabupaten Barru Menurut Tujuan



Sumber : Analisis POKJA KLHS, 2020

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Barru terhadap target nasional, maka terdapat 3 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu :

- Tujuan 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 18 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target;
- Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dengan indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dan sebanyak 8 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional;

- Tujuan 16 yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dengan total indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dengan capaian yang telah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 7 indikator.

Sedangkan tujuan yang belum memiliki indikator dalam kelompok sudah dilaksanakan dan sudah tercapai yaitu tujuan 7 akses energi yang terjangkau, dan tujuan 13 penanganan perubahan iklim.

C. Perubahan Iklim

Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan pengendalian pertumbuhan populasi manusia telah menimbulkan fenomena global yang merugikan. Fenomena global tersebut adalah "perubahan iklim (*climate change*). Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di darat, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan **Perubahan Iklim**. Perubahan iklim sendiri merupakan sebuah fenomena global karena penyebabnya bersifat global, disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain itu, dampaknya juga bersifat global, dirasakan oleh seluruh mahluk hidup di berbagai belahan dunia.

Gas penyebab efek rumah kaca atau sering kita sebut Gas Rumah Kaca (GRK) diantaranya adalah *karbondioksida* (CO_2), *metana* (CH_4), *dinitroksida* (N_2O), dan *chlorofluorocarbon* (CFC).Kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menyebebkan GRK diantaranya adalah :

- Pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan pemakaian BBM untuk kendaraan bermotor (transportasi) yang mengeluarkan polusi *karbondioksida* (CO_2),.
- Kegiatan pertanian dan peternakan yang dapat menghasilkan gas metan (CH_4).
- Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) yang dapat menghasilkan CO_2 dan CH_4.
- Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat menghasilkan *dinitroksida* (N_2O).
- Penggunaan CFC untuk mesin pendingin (AC, Referigator dll).

Efek rumah kaca itu terjadi sehingga menyebabkan pemanasan global. Matahari mengeluarkan sinar radiasi yang masuk ke bumi melalui atmosfer

diterima oleh permukaan bumi kemudian diubah menjadi panas yang menyebabkan emisi gelombang panjang (infra merah), sebagian radiasi infra merah tersebut diserap oleh bumi dan sebagian lagi di emisikan ke luar atmosfir, karena di lapisan atmosfir terdapat gas rumah kaca, maka radiasi infra merah yang seharusnya keluar semua, sebagian tertahan dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi, sehingga permukaan bumi menerima lebih banyak panas dan radiasi infra merah.

Guna mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim maka Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mengembangkan Sistim Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi dan lingkungan. Tujuan dari penyusunan data ini adalah untuk menyediakan data dan informasi mengenai tingkat kerentanan perubahan iklim berupa indeks yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan yang adaftif terhadap adaptasi perubahan iklim.

Distribusi spasial dengan tingkat kerentanan 5 klaster yaitu tidak rentan (1), rentan (2), agak rentan (3), cukup rentan (4) dansangat rentan (5) dapat dilihat pada peta indeks kerentanan desa khusus untuk Kabupaten Barru terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.1

Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Desa Di Kabupaten Barru

Uraian	Tingkat Kerentanan					Total Desa
	1	2	3	4	5	
Jumlah Desa	1	46	8	-	-	55

Sumber : Data Sidik Kementerian Lingkungan Hidup RI, Tahun 2015

Secara umum dari Peta Indeks Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) di atas, dapat diamati bahwa Desa di Kabupaten Barru didominasi oleh status tatus agak rentan (2) sebanyak 46 Desa dari total 55 desa.

Grafik. 4.3

Presentase Distribusi Luas Kinerja Fungsi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Barru



Sumber : Data Sidik Kementerian Lingkungan Hidup RI, Tahun 2020

Dampak perubahan iklim harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Ini untuk mengantisipasi bencana seperti cuaca ekstrim, banjir, kekeringan lahan, naiknya muka air laut (banjir rob) dan kebakaran hutan yang akan terjadi karena dampak dari perubahan iklim.

D. Revolusi 4.0/ Era Digital/Transformasi Digital

Ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 di Indonesia tidak dapat dihindari. Implikasi dari ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 tidak saja telah merombak struktur ekonomi nasional, tetapi juga telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Indonesia telah menyikapi perubahan ini melalui berbagai kebijakan dan strategi ekonomi agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi sedemikian rupa baik melalui Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 maupun melalui kolaborasi *quintiple helix (Government, Privat Sektor (Swasta), Media, NGO/LSM, Akademisi)* antara pemerintah dengan pelaku industri dan akademisi. Strategi dan kebijakan menyikapi era digital perlu dilakukan. Apalagi Indonesia telah terlibat dalam perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain.

Perkembangan teknologi informasi yang disertai dengan semakin meningkatnya internet dan penggunaannya telah membawa ekonomi Indonesia memasuki era baru yakni ekonomi digital. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi perekonomian 10 tahun lalu. Salah satu pembeda struktur dan konstruksi perekonomian Indonesia dibandingkan 10 tahun lalu yakni pesatnya perkembangan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0.

Pengertian ekonomi digital dapat diartikan secara sederhana sebagai proses jual beli atau transaksi dan pasar yang terjadi di dunia maya atau internet. Ekonomi digital juga merupakan suatu sistem ekonomi yang kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan aspek-aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan administrasi.

Akibat perkembangan baru di bidang digitalisasi tersebut, sikap dan gaya hidup masyarakat berubah menjadi lebih peka dan kritis terhadap setiap perubahan, yang kemudian menciptakan bentuk interkonektivitas baru antarpelaku ekonomi yang menjadi semakin kreatif, aktif dan produktif. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka muncul kesadaran terutama di negara-negara maju untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan industri semata, melainkan perlu membangun dan mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Salah satu bentuk kesadaran ini yakni berkembangnya ekonomi baru atau yang populer disebut sebagai ekonomi atau industri kreatif. Industri ini dapat diartikan sebagai industri yang mengutamakan bakat,

kreativitas, informasi, dan pengetahuan dalam aktivitas operasionalnya. Selain perkembangan industri atau ekonomi kreatif, perkembangan teknologi digitalisasi juga telah mengubah sistem pembayaran dari sistem pembayaran tunai ke nontunai menggunakan *electronic money* atau uang elektronik. Menurut *Bank for International Settlements*, *e-money* didefinisikan sebagai *stored-value* atau *prepaid* produk di mana catatan dana atau *value* yang tersedia untuk konsumen disimpan pada perangkat elektronik yang dimiliki.

Selain perkembangan dalam alat pembayaran nontunai melalui *e-money*, berbagai perusahaan dan/atau industri juga melakukan transformasi dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi keuangan atau yang lebih dikenal *fintech* (*financial technology*). Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Walaupun pada awalnya konsep finansial P2P ini diperuntukkan bagi para *start-up* (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya, namun dalam perkembangannya memiliki partisipan yang lebih luas tidak hanya para pemodal untuk menginvestasikan uangnya kepada *start-up* baru. Perusahaan *fintech* dapat menyasar segmen perusahaan (*business to business*/B2B) maupun ritel (*Business to Customer*/B2C). Di Indonesia, *Fintech* memiliki banyak jenis, antara lain *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, dan riset keuangan, untuk menyebut beberapa jenis saja.

Mempertimbangkan perkembangan digitalisasi keuangan di atas, literasi keuangan (*financial literacy*) menjadi hal yang mutlak diperlukan. Apalagi literasi keuangan telah memainkan peran yang semakin menonjol dalam reformasi keuangan baik di negara maju maupun negara berkembang, dan digambarkan dalam lingkaran kebijakan global sebagai obat mujarab untuk berbagai krisis keuangan terkini. Peningkatan literasi keuangan telah menjadi isu global dan bahkan mampu memberdayakan konsumen sehingga diyakini akan mendukung upaya stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih inklusif. *The Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP), menyebutkan bahwa inklusi keuangan merupakan usaha yang dilakukan untuk menjamin seluruh rumah tangga dan kalangan bisnis untuk memiliki akses secara efektif ke jasa keuangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

4.3.2 Isu Strategis Nasional

A. Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM

secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan MutuPelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataanruang;
4. perumahan rakyat dan kawasanpermukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 TentangPenerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahawa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahundari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II. Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten Barru yaitu terdiri atas:

1. Pendidikan Anak usia dini;
2. Pendidikan Dasar (SD & SMP);
3. Pendidikan Kesetaraan;
4. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil;
5. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin;
6. Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir
7. Pelayanan Kesehatan Bagi Balita
8. Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar
9. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif
10. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut

11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
12. Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus
13. Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
14. Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis
15. Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV
16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic
18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
21. pelayanan informasi rawan bencana
22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran
24. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
25. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
26. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
27. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
28. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Adapun berbagai hambatan yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya : (i) Belum optimalnya pendekatan integratif untuk pencapaian SPM sehingga program–program terkait SPM yang diupayakan belum dapat mendorong akselerasi dan efektitas pencapaian target SPM menuju 100%, (ii) Pada jenjang Pendidikan dan Kesehatan diperlukan upaya pemenuhan sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan. Tantangan yang berat dikarenakan tidak hanya terkait penyediaan fasilitas dan tenaga pendidikan dan juga kesehatan oleh pemerintah namun juga kesadaran masyarakat itu sendiri, (iii) Belum optimalnya dukungan terhadap penanggulangan bencana termasuk belum adanya Dokumen Penanggulangan Bencana, selain itu luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayan penanggulangan bencana dalam hal ini bencana kebakaran serta belum terpenuhinya fasilitas bencana; (iv) Belum adanya inisiasi kebijakan rehabilitasi sosial luar panti dalam bentuk *home/day care services* bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak potensial. Untuk itu perlu adanya inisiasi tersebut diatas sebagai upaya pemberian pelayanan

dasar kepada warga miskin tidak potensial; dan (v) Perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan dengan mengusung visi "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Kemudian diterjemahkan dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 –7,0 persen; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360 –0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 –4,3 persen; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (ParisAgreement).

C. Bonus Demografi

Bonus demografi terjadi ketika struktur penduduk dengan jumlah usia produktif (15-64 tahun) sangatlah besar sedangkan proporsi penduduk usia muda sudah semakin kecil dan proporsi penduduk usia lanjut belum begitu besar. Hal ini membawa angin segar dimana Indonesia akan mendapatkan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas dalam

jangka panjang. Namun bonus demografi ini tidak akan bermanfaat apabila tidak dipersiapkan sedemikian rupa, misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan mutu sumber daya manusia tersebut.

Periode bonus demografi di Indonesia dimulai tahun 2015-2035 dengan angka ketergantungan (*dependency ratio)* berkisar antara 0,4-0,5 yang artinya bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif. Proporsi usia anak-anak kurang dari 15 tahun akan terus berkurang dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Asumsi dasar untuk memahami bonus demografi adalah kondisi komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun) dalam rentangan waktu tertentu. Idealnya, masyarakat dapat mengetahui apa bonus demografi tersebut, yaitu dengan memahami posisi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dengan pemangku kebijakan dengan menyadari pentingnya mengeluarkan kebijakan-kebijkan yang dapat men-*support* agar potensi-potensi yang dimiliki oleh penduduk-penduduk usia produktif tersebut optimal dan maksimal. Harapannya adalah munculnya kesadaran akan peran strategis penduduk usia produktif, terutama kaum muda sebagai 'motor penggerak' bangsa. Pada dasarnya ada syarat untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi yaitu , terwujudnya penduduk berkualitas dengan tersedianya pendidikan yang baik, kemudian tersedianya layanan kesehatan yang baik, memiliki etos kerja, dan kebijakan yang menopang usia produktif agar berdaya guna.

Bonus demografi ibarat pedang bermata dua, di satu sisi menjadi potensi apabila mampu mengambil peluang-peluangnya dan di sisi lain akan menjadi boomerang yaitu beban apabila pemerintah tidak siap dengan sumberdaya manusianya. Pemerintah Kabupaten Barru harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

4.3.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka Panjang, telah diidentifikasi berbagai isu strategis daerah Kabupaten Barru sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 adalah **"Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter".** Adapun penjabaran misi meliputi:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel;*
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitasdan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Arahan pelaksanaan kebijakan pembangunan wilayah Kawasan Pembangunan Parepare dan Sekitarnya berdasarkan kawasan pembangunan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan target sebagai berikut.

Tabel. 4.2

Target Pembangunan Kawasan Pembangunan Parepare dan Sekitarnya Tahun 2018-2023

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Realisasi 2019	Target Pembangunan 2020	2021	2022	2023
Parepare	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,65	(0,08)	3,58 - 4,77	4,65 - 6,20	4,77 - 6,36
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,26	5,44	5,40	4,74	4,08
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42	7,14	7,10	6,96	6,82
	Gini Ratio	0,350	0,373	0,366	0,358	0,351
	IPM	77,62	77,86	78,10	78,37	78,70
Sidenreng Rappang	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,65	(0,59)	3,38 - 4,51	4,39 - 5,86	4,51 - 6,01
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,79	5,05	5,01	4,83	4,78
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,75	5,91	5,88	5,76	5,65
	Gini Ratio	0,284	0,349	0,342	0,335	0,328
	IPM	71,05	71,21	71,37	71,73	72,18

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Realisasi 2019	Target Pembangunan 2020	2021	2022	2023
Barru	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,41	0,87	3,99 – 5,32	4,43 - 5,91	4,85 – 6,64
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	8,26	8,19	7,45	6,67
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,39	6,39	6,36	6,23	6,11
	Gini Ratio	0,360	0,357	0,350	0,343	0,336
	IPM	70,60	71,00	71,41	71,79	72,27
Pinrang	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,53	0,44	3,52- 4,69	4,57 - 6,09	4,68 - 6,19
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,46	8,86	8,79	7,99	7,16
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,91	4,19	4,17	4,09	4,00
	Gini Ratio	0,336	0,375	0,368	0,360	0,353
	IPM	71,12	71,26	71,40	71,72	72,11
Enrekang	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,43	1,25	3,67- 4,90	4,55- 6,06	4,64- 6,19
	Tingkat Kemiskinan	12,33	12,17	11,80	11,38	10,93
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,15	2,44	2,43	2,38	2,33
	Gini Ratio	0,359	0,358	0,355	0,347	0,340
	IPM	72,66	72,76	72,86	73,27	73,79

Adapun Isu stragetis RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 203 yakni :

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan
3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian
4. Pemerataan pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan
5. Keberadaan Sumberdaya Manusa (SDM) yang berkualitas
6. Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Alam
7. Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)
8. Sulawesi selatan sebagai poros maritim

b. Sinkronisasi RPJMD Daerah Lainnya dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barru

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru juga memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang lain yang secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Barru yaitu: RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023, RPJMD Kabupaten Sidrap Tahun 2018 – 2023, RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2016 – 2023, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pangkep Tahun 2021 – 2026, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Soppeng

Tahun 2021 – 2026, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026.

Sinergitas antara dokumen RPJMD Kabupaten Barru dengan RPJMD lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah antar daerah khususnya keterpaduan pembangunan wilayah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun penelaahaan RPJMD Daerah Lain dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun isu strategis dari Penelaahan RPJMD Daerah lain dengan Kebijakan Pembangunan Kab.Barru diantaranya :

1. Penegasan Tapal Batas untuk mencegah konflik tapal batas;
2. Penguatan Koordinasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang bersinggungan dengan wilayah Kab.Barru;
3. Bonus demografi menyebabkan tingkat pengangguran tinggi yang harus disiasati penciptaan lapangan kerjanya;
4. Peningkatan aksesibilitas wilayah (interkoneksi) disisi infrastruktur yang menghubungkan dengan Kabupaten Barru.

c. Kemandirian Perekonomian berbasis Teknologi dan Industri;

Masalah yang tengah dihadapi oleh Kabupaten Barru saat ini adalah bagaimana dapat menjadi kabupaten yang mandiri secara perekonomian. Kabupaten Barru masih menjadi ajang pemasaran produk-produk impor barang jadi. Sumber daya Alam selama ini tidak mampu dikelola sendiri hingga menjadi barang siap dipasarkan untuk konsumsi sendiri maupun untuk pasar luar daerah bahkan luar negeri. Ekspor Kabupaten Barru masih didominasi oleh ekspor bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih kurangnya industry pengolahan dan juga kemampuan iptek dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas.

Kabupaten Barru harus mampu melaksanakan transformasi perekonomian. Secara social, kekuatan ekonomi rakyat harus dibangkitkan, tiap wilayah kecamatan harus mampu memiliki kekhasan tersendiri, sehingga dapat menciptakan *brand* bagi Kecamatannya. Kunci kemandirian perekonomian adalah industrialisasi, baik yang berorientasi pada pasar ekspor maupun domestic. Untuk itu, budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus terus difasilitasi. Tuntutan ini harus mampu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru yang melambat pada

tahun 2020 sebesar 0,87 dikarenakan Pandemi Covid 19, bisa kembali bertumbuh secara cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi.

d. Tuntutan penerapan pemerintahan yang bersih dan profesional

Kenyataan yang terjadi di era otonomi daerah dewasa ini adalah banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur pemerintah. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas. Salah satu ukuran untuk mengukur penerapan pemerintah yang bersih dan professional di Kabupaten Barru adalah terlihat dari hasil evaluasi Reformasi Brokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi yang bertujuan menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public secara prima. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2020 adalah 46,34 dengan kategori C.

e. Bencana alam dan non alam

Letak geografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat menyebabkan Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara keseluruhan yang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan. Dari total kecendrungan kejadian bencana di Kabupaten Barru tiap tahunnya berfluktuatif namun menunjukkan angka tingginya kejadian bencana. Pada tahun 2016 kejadian bencana di Kabupaten Barru sebanyak 19 kali bencana, dan diakhir periode pada tahun 2020 kembali terjadi 19 kejadian bencana.

Tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi akibat terjadinya berbagai bencana merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Barru hingga masyarakat dapat dilindungi dari akibat terjadinya bencana alam tersebut.

Selain itu ancaman terjadinya bencana non alam juga wajib mendapat perhatian, bercermin dari kejadian pandemic covid 19 yang mampu

melumpuhkan perekonomian dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Barru.

f. Kemampuan keuangan daerah

Pembangunan di berbagai bidang yang dilakukan secara menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah maka Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat) dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan investasi. Proporsi PAD dalam Struktur APBD Tahun 2020 hanya menyumbang sebesar 11,53%. Sementara itu capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada pada kisaran 7,41% per desember 2019, tingginya PE ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas di 17 sektor penyumbang PDRB, meskipun begitu sektor yang masih menyumbang proporsi yang tinggi adalah sektor pertanian, sementara untuk mengundang investasi masuk, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru sudah harus memikirkan untuk menggenjot sektor-sektor lainnya terlebih sektor industri dan jasa. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan dan mendorong peningkatan ekspor.

Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, hal ini tentunya harus dibenahi di masa mendatang. Untuk itu belanja harus dialokasikan secara seimbang dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang dialokasikan dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya guna mendorong terwujudnya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barru.

g. Hambatan perdagangan antar daerah

Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah yang merasakan masih kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor karena ketidakmampuan memenuhi standard maupun keterbatasan permodalan dan informasi.

h. Stabilitas keamanan dan ketentraman

Di era otonomi daerah dan demokratisasi, setiap anggota dan kelompok masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, jika kondisi ini tidak mampu dilakukan secara benar akan mudah menimbulkan konflik

antar individu dan kelompok masyarakat yang pada akhirnya berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, dengan semakin berkembangnya kemajuan iptek dan informasi, penyalahgunaannya akan berakibat pada makin canggihnya bentuk dan jenis kejahatan yang terjadi. Keadaan yang menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban belum kondusif terlihat dari kriminalitas terlihat dari angka kriminalitas Kabupaten Barru yang masih berada di angka 7,25.

i. Keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan anak

Indikator pembangunan gender secara resmi adalah *Gender-related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measurement (GEM).* Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu. Hal ini masih menjadi masalah nasional karena masih terbatasnya kemampuan dan kesempatan yang diberikan pada kaum perempuan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Jaminan terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak masih menjadi isu strategis di Indonesia, termasuk di Kabupaten Barru. Hal ini tampak dari masih adanya masalah eksploitasi anak, pekerja anak, dan kekerasan pada anak. Sehingga kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan menyimpang, penelantaran dan eksploitasi sangat dibutuhkan. Termasuk juga tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Barru seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.3

Data Perkawinan Anak Kabupaten Barru Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Tanete Riaja	0	0	0	4	7
2	Kecamatan Tanete Rilau	0	0	0	8	27
3	Kecamatan Barru	5	7	6	10	15
4	Kecamatan Soppeng Riaja	1	2	1	4	7
5	Kecamatan Mallusetasi	0	2	1	4	1
6	Kecamatan Pujananting	18	17	31	27	5
7	Kecamatan Balusu	0	1	0	0	5
Jumlah Perkawinan Anak		24	29	39	53	67

Sumber : KUA Kab.Barru Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Barru. Maraknya Perkawinan Anak terjadi karena didukung oleh keadaan lingkungan yang salah dan bimbingan atau pengetahuan dari orang orang tua juga salah. Penyebab paling utama dari tingginya angka pernikahan anak terutama

di daerah Pujananting disebabkan karena anak perempuan yang dominan tidak melanjutkan sekolah dan juga faktor kebudayaan, selain itu faktor kedua yang menyebabkan tingginya perkawinan anak adalah karena salah pergaulan yang mengakibatkan perkawinan anak banyak disebabkan oleh anak perempuan yang hamil duluan. Dampak dari Perkawinan Anak ini kemudian menjadi negatif dibanding dampak positif, Anak perempuan adalah yang paling dirugikan dalam pernikahan dini, karena mereka cenderung di nikahkan dengan laki-laki yang sudah dewasa. Banyak hal yang harus ditanggung oleh anak perempuan, itu mengakibatkan kondisi psikologisnya bahkan akan terganggu.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan daerah dan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka Panjang, maka akan diidentifikasi berbagai isu strategis daerah Kabupaten Barru dengan menggunakan metode pemetaan yang tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017. Berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian permasalahan daerah dan isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot maka ditetapkan didapatkan isu strategis secara berurutan adalah :

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yakni pelayanan terhadap pendidikan dan kesehatan dimaksimalkan;
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terbuka;
3. Tuntutan penerapan pemerintahan yang bersih dan professional;
4. Kemandirian Perekonomian berbasis Teknologi dan Industri;
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's);
6. Pandemi Covid-19;
7. Stabilitas keamanan dan ketentraman;
8. Bonus Demografi;
9. Perubahan Iklim;



BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu Bupati Barru **Ir.H.SUARDI SALEH, M.Si** dan Wakil Bupati Barru **ASKA MAPPE** yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah dan menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru untuk periode RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

"Kabupaten Barru Yang
Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan"

Rumusan visi ini mengandung empat kata kunci visi yakni sejahtera, mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2026.

Tabel 5.1.

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomi mapun sosial
	Mandiri	Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru
	Berkeadilan	Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang
	Bernafaskan Keagamaan	Kondisi Ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

5.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Sejalan gambaran misi yang demikian, maka tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun pernyataan misi yang merupakan penjabaran visi Kepala Daerah Kabupaten Barru bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Barru
Tahun 2021 – 2026

VISI	POKOK VISI	MISI
Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Sejahtera	Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
		Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
	Mandiri	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
		Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
	Berkeadilan	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
	Bernafaskan keagamaan	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Penjelasan masing-masing misi sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel 5.3, sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kab.Barru Tahun 2021 – 2026

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	***Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan***	Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya	Mencakup upaya umum dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas manusia yang terdiri dari pelayanan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya yang dimaksud pada misi ini adalah pelayanan dasar terhadap konsumen yakni pengendalian harga dan ketersediaan pangan
2		Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan lingkungan kondusif yang tangguh terhadap bencana serta menerapkan kearifan lokal, memperkuat dan mengembangkan budaya-budaya lokal
3		Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal	Mencakup upaya umum dalam membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur yang menjamin pemerataan infrastruktur wilayah sehingga mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal dalam menunjang perekonomian daerah
4		Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan meliputi peningkatan sektor-sektor strategis perekonomian daerah serta memastikan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu
5		Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan	Mencakup upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat pedesaan dan perkotaan meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
6		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi	Mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan pelayanan publik yang memuaskan dengan didukung teknologi informasi
7		Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama

Misi pembangunan Kabupaten Barru mengacu pada Nawa Cita Kedua sebagaimana arahan RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.4

Keterkaitan RPJMD Tahun 2021-2026 Kab.Barru dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

No	Misi RPJMD Kab.Barru Tahun 2021-2026	Misi RPJMN 2020-2024
1.	Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia (1)
2.	Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya local	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga (7)
		Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa (5)
3.	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan (3)
4.	Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing (2)
		Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (4)
5.	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan (3)
6.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya (6)
		Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya (8)
		Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan (9)
7.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa (5)

Sementara misi Provinsi Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera; Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter meliputi:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel;*
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kab.Barru Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

RPJMD KAB.BARRU TAHUN 2021-2026	RPJMD PROV. SULSEL TAHUN 2018-2023
VISI	
Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	***Sulawesi Selatan Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif Dan Berkarakter***
MISI	
Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter (4)
Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal	
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel (2)
	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan (5)
Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif (3)
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif (1)
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter (4)

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Barru 2021 – 2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan didasarkan dari visi dan misi dan isu strategis,rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1 :

Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas daya beli masyarakat

Misi 2 :

Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal

Tujuan :

1. Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana
2. Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana
2. Terwujudnya Pengembangan Pemajuan Kebudayaan

Misi 3 :

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah.

Misi 4 :

Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Tujuan :

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Sektor-sektor Strategis Perekonomian Daerah;
2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu

Misi 5 :

Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan

Tujuan :

Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Penurunan angka Kemiskinan

Misi 6 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi

Tujuan :

Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik.

Misi 7 :

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Tujuan :

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

Meningkatnya penerapan Nilai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat.

Tabel 5.6

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Barru

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
	Visi : *Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan*										
1	**Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya**										
	1	**Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Poin**	**70,6**	**71,79**	**72,26**	**72,57**	**72,88**	**73**	**73**
	1	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	68,91	69,94	70,28	70,83	71,02	71,78	71,78
	2	Sasaran : Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	75,25	76,69	76,93	77,26	77,51	77,93	77,93
	3	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	10.91	11,12	11,35	11,63	11,86	12,02	12,02
2	**Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya local**										
	2	**Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana**	**Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**	**Poin**	**-**	**0,69**	**0,72**	**0,75**	**0,78**	**0,80**	**0,80**
	4	Sasaran : Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,004	0,011	0,009	0,006	0,004	0,001	0,001
	3	**Tujuan : Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan**	**Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%**	**%**	**0**	**5,45**	**7,25**	**9,09**	**10,91**	**12,73**	**12,73**
	5	Sasaran : Terwujudnya Penguatan Seni Budaya	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	6,35	9,52	11,11	12,7	14,29	15,87	15,87
3	**Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal**										
	4	**Tujuan : Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah**	**Indeks Williamson**	**Poin**	**0,29**	**0,29**	**0,28**	**0,27**	**0,26**	**0,25**	**0,25**
	6	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,583	3,82	3,874	3,881	3,884	3,901	3,901

No		Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
4		**Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan**									
	5	**Tujuan : Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**7,41**	**4,47**	**5,91**	**6,64**	**7,23**	**7,51**	**7,51**
	7	Sasaran : Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	50,27	51,94	52,52	52,97	53,29	53,86	53,86
	8	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,19	73,73	74,00	74,26	74,6	75	75
5		**Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan**									
	6	**Tujuan : Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan**	**Indeks Gini**	**Poin**	**0,36**	**0,35**	**0,34**	**0,33**	**0,32**	**0,31**	**0,31**
	9	Sasaran : Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan Penurunan Angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,79	5,88	5,31	5,14	4,98	4,45	4,45
			Angka Kemiskinan	%	8,26	7,45	6,67	6,41	6,28	6,05	6,05
6		**Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi**									
	7	**Tujuan : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih**	**Nilai Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**46,34**	**65**	**70**	**73**	**75**	**80**	**80**
	10	Sasaran : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Nilai SAKIP	Poin	55,52	60	65	70	75	80	80
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,27	3,51	3,70	4,00	4,25	4,25	4,25
7		**Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama**									
	8	**Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama**	**Angka Kriminalitas**	**Per 10.000 pddk**	**7,6**	**6,5**	**6,1**	**5,9**	**5,7**	**5**	**5**
	11	Sasaran : Meningkatnya penerapan Niai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0	0

Berdasarkan tabel 5.6 diatas, menunjukkan tujuan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Barru terdiri atas 7 tujuan, dan 11 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 8 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Barru sebanyak 21 Indikator.

Adapun metodologi untuk indikator kinerja utama, baik indikator tujuan maupun indikator sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 akan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7

Metodologi Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Pengertian Indikator/ Metodologi (Rumus/Formula)	Sumber Data/Regulasi
Indikator Tujuan			
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yakni : pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia : ∛IndeksKesehatan X Indeks Pendidikan X Indeks Pengeluaran	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS
2	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	Jumlah korban yang meninggal, yang hilang karena bencana indikator yang menujukkan capaian penanggulangan bencana di Kab.Barru, juga merupakan salah satu indikator SGDs dan termuat dalam dokumen KLHS	(Jumlah korban yang meninggal akibat bencana : jumlah penduduk pada periode yang sama) X 100%
3	Indeks Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Bencana adalah ukuran untuk mengukur ketahanan bencana yang indikator pengukurannya terdiri dari : 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan logistic 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigas Bencana 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Sumber data oleh BNPB/BPBD
4	Indeks Williamson	Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika Yi = Y maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten.	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi adalah laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang diukur dari Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. PE = Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS
6	Indeks Gini	Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS

No	Indikator Kinerja Utama	Pengertian Indikator/ Metodologi (Rumus/Formula)	Sumber Data/Regulasi
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks RB adalah Indeks untuk mengukur upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.	Data resmi dirilis oleh Kementrian PAN RB RI
8	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas adalah Angka yang menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka Kriminalitas = (Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun/jumlah penduduk) x 10.000	Sumber data oleh Polres Barru/ Formulasi perhitungan Permendagri 86 Tahun 2017
Indikator Sasaran			
1	Indeks Pendidikan	**Ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah** • ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH : mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. • RATA-RATA LAMA SEKOLAH : angka yang menggambarkan tingkat capain penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interprestasinya bahwa semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai. Indeks Pendidikan = (IHLS + IRLS)/2	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS
2	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan diwakili oleh Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indeks Kesehatan = (AHH - AHH Min)/AHH Maks - AHH Min)	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS
3	Paritas Daya Beli (Rata-rata Pengeluaran)	Rata-rata Pengeluaran disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Paritas Daya Beli = (In Pengeluaran - In Pengeluaran Min)/In Pengeluaran Maks - In Pengeluaran Min)	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS
4	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan	Desa Pemajuan Kebudayaan adalah Desa yang telah memenuhi kriteria diantaranya : 1. Desa yang berada di Kabupaten yang telah menysun PPKD 2. Desa sekitar kawasan cagar budaya nasional dan atau WBTb (Warisan Budaya Tak Benda) 3. Desa Sekitar titik jalur rempah 4. Desa Berkembang Kementrian Desa 5. Merupakan Kampung Bahari Nusantara 6. Termasuk dalam Desa destinasi wisata super prioritas 7. Balai besar taman nasional	Dikeluarkan Oleh Kementriaan Pendidikan Dan Kebudayaan RI
5	Persentase Warisan Budaya yang terpelihara	Persentase warisan budaya yang terpelihara dihitung dengan Jumlah warisan budaya (WBB dan WBTb) yang telah terdaftar dan diakui secara resmi oleh Nasional dibagi dengan jumlah keseluruhan warisan budaya yang dimiliki Kabupaten Barru	Data resmi di keluarkan leh Dinas Pendidikan berdasarkan persetujuan Kementriaan Pendidikan Dan Kebudayaan RI
6	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Indeks daya saing daerah adalah metodologi pengukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.	Data resmi dikeluarkan oleh Kementrian Riset dan Teknologi RI

No	Indikator Kinerja Utama	Pengertian Indikator/ Metodologi (Rumus/Formula)	Sumber Data/Regulasi
7	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	Indikator untuk menghitung besaran konstribusi sektor-sektor strategis yang terdapat di Kabupaten Barru yang dapat meningkakan PDRB, diantaranya : Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Industri Pengolahan	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks kualitas lingkungan hidup adalah indeks yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdiri dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan IKLH = Indeks Kualitas Air (30%) + Indeks Kualitas Udara (30%) + Indeks Kualitas Tutupan Lahan (40%)	Sumber data oleh DLH
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS
10	Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk	Data resmi dikeluarkan Oleh BPS
11	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP dimaksud untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran yang diperlukan	Data resmi dirilis oleh Kementrian PAN RB RI
12	Indeks Pelayanan Publik	Permenpan RB Nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja Unit penyelenggaran pelayanan Publik	Data resmi dirilis oleh Kementrian PAN RB RI
13	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Indikator ini merupakan indikator SDGs yang tertuang dalam Tujuan ke 16 yakni menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan nklusif di semua tingkatan. PPKK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100%	Sumber data oleh Polres Barru/ Formulasi perhitungan Permendagri 07 Tahun 2018

Tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 diarahkan pula untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD Tahun 2005 – 2025. Hubungan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005 – 2025 terhadap RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.8

Hubungan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD 2021 – 2026

Sasaran Pokok RPJPD	Indikator	Target RPJPD 2020-2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026	Indikator	Target RPJMD 2021-2026	Keterangan
Meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan serta relasi gender yang baik dalam masyarakat (S1)	IPM	70.94	Meningkatkan kualitas SDM (T1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Target akhir (tahun 2026) sebesar 73	Target RPJMD lebih tinggi dikarenakan target yang tertera di RPJPD untuk periode 2020 - 2025 telah dicapai
	Angka rata-rata lama sekolah	7.81 tahun	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan (S1)	Rata-rata lama sekolah (Komposit perhitungan Indeks Pendidikan)	Target akhir (tahun 2026) sebesar 9	Target RPJMD lebih tinggi dikarenakan target yang tertera di RPJPD untuk periode 2020 - 2025 telah dicapai
	Angka melek huruf	99,51%	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan (S1)	angka harapan lama sekolah	Target akhir (tahun 2026) sebesar 13,65	
	Angka harapan hidup	68.23 tahun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S2)	Angka harapan hidup (Komposit Perhitungan Indeks Kesehatan)	Target akhir (tahun 2026) sebesar 69,11	Target RPJMD lebih tinggi dikarenakan target yang tertera di RPJPD untuk periode 2020 - 2025 telah dicapai
	Indeks pembangunan gender	95,4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S2)	Indeks pembangunan gender (IKU Renstra OPD)	Target akhir (tahun 2026) sebesar 97	Target RPJMD lebih tinggi dikarenakan target yang tertera di RPJPD untuk periode 2020 - 2025 telah dicapai
	Indeks pemberdayaan gender	65,31	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S2)	Indeks pemberdayaan gender (IKU Renstra OPD)	Target akhir (tahun 2026) sebesar 65,50	Target RPJMD lebih tinggi dikarenakan target yang tertera di RPJPD untuk periode 2020 - 2025 telah dicapai
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata (S2)	Pertumbuhan ekonomi	7,23%	Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan (T4)	Pertumbuhan Ekonomi	Target akhir (tahun 2026) sebesar 7,51%	Sesuai/Target 7,23 adalah target yang terdapat pada tahun 2025 di RPJMD 2021 - 2026
	PDRB/kapita	Rp. 88.527114,00	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan (T5)	PDRB Perkapita (IK Makro)	Target akhir periode 2026 sebesar Rp 57.380.00	Tidak menyesuaikan dengan target RPJPD dikarenakan peletakan target pada RPJPD terlalu tinggi melihat capaian di tahun 2020 hanya sebesar 42,43 Juta dan hasil analisis forecasting berdasarkan kondisi 5 tahun sebelumnya sehingga pada RPJMD akhir Periode untuk PDRB perkapita ditarget sebesar 57,38 Juta

Sasaran Pokok RPJPD	Indikator	Target RPJPD 2020-2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026	Indikator	Target RPJMD 2021-2026	Keterangan
	Angka kemiskinan	7,45%	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan (S7)	Angka kemiskinan	Target akhir (tahun 2026) sebesar 6,05	Target menyesuaikan dengan target RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan
	Tingkat pengangguran terbuka	5,53%	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan (S7)	Tingkat pengangguran terbuka	Target akhir (tahun 2026) sebesar 4,45	Target 5,53 yang terdapat di RPJPD di proyeksikan bisa dicapai di Tahun 2023 di RPJMD dan peletakan target di RPJMD menyesuaikan dengan Peletakan target pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	Rp. 2.174.859	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat (S3)	Paritas Daya Beli	Rp 12.020.000	
	Kontribusi sektor-sektor Jasa dalam PDRB	27,50%	Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan (T4)	-	Target akhir (tahun 2026) sebesar	
	% PAD dalam APBD	8,47%	Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan (T4)	-	Target akhir (tahun 2026) sebesar	
Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan permukiman serta infrastruktur lainnya (S3)	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	70%	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah (S5)	Nilai Capaian Panjang Jalan dalam kondisi baik(IK Outcoe)	Target akhir (tahun 2026) sebesar 73,08	Melampaui Target Kinerja RPJPD dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada
	Jumlah pengguna terminal dan pelabuhan	Terminal =1.966.301 orang, Pelabuhan =42.264 Orang	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah (S5)	-	-	Tidak menjadi Target Outcome
	% Rumah layak huni	100%	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah (S5)	Persentase penurunan Jumlah rumah tidak layak huni	Target akhir (tahun 2026) sebesar 2,67	Melampaui Target Kinerja RPJPD dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada
	% Pemukiman kumuh	0	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah (S5)	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Target akhir (tahun 2026) sebesar 20	Tidak sesuai denga Target Kinerja RPJPD dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada
Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pe layanan public (S4)	Opini laporan keuangan	WTP	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik (S8)	Opini laporan keuangan (IKK)	Target akhir (tahun 2026) sebesar WTP	Sesuai

Sasaran Pokok RPJPD	Indikator	Target RPJPD 2020-2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026	Indikator	Target RPJMD 2021-2026	Keterangan
	Predikat AKIP	B	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik (S8)	Nilai SAKIP	Target akhir (tahun 2026) adalah Nilai A	Target RPJMD diarahkan lebih tinggi
	Indeks kepuasan masyarakat	78	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik (S8)	Indeks Pelayanan Publik	Target akhir (tahun 2026) adalah sangat Baik	Target RPJMD diarahkan lebih tinggi
Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam (S5)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	51	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu (S10)	Indeks kualitas lingkungan hidup	Target akhir (tahun 2026) sebesar 75	Target RPJMD lebih tinggi dikarenakan target yang tertera di RPJPD untuk periode 2020 - 2025 telah dicapai
Meningkatnya kebersamaan masyarakat dalam mendukung kondisi aman, tertib, tenteram dan damai (S6)	Angka kriminalitas	0,03%	Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat (T2)	Angka kriminalitas	Target akhir (tahun 2026) sebesar 5	
	Persentase Gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) yang tertangani	100%	Terjaganya Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Daerah (S4)	-	Target akhir (tahun 2026) sebesar 100%	sesuai
Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat (S7)	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	1,6	Meningkatnya Kualitas Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan (S9)	-	-	Tidak menjadi Target Outcome
	Jumlah kelompok pengajian dan majelis taklim	304	Meningkatnya Kualitas Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan (S9)	-	-	Tidak menjadi Target Outcome

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat 7 sasaran Pokok RPJPD yang memiliki terdapat 23 Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Tahun 2005 – 2025. Dari 23 indikator ini, yang berkesesuaian langsung dengan Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021 – 2025 sebanyak 12 indikator yang terdiri dari : IPM, Angka rata-rata lama sekolah, Angka harapan hidup, Pertumbuhan ekonomi, PDRB/kapita, Pengeluaran perkapita, Angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka, Persentase panjang jalan dalam kondisi baik, Predikat AKIP, Indeks kepuasan masyarakat, dan Angka kriminalitas.

Sementara 11 indikator lainnya di arahkan untuk dijadikan indikator Kinerja Utama OPD yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah, 9 indikator tersebut yakni : Angka melek huruf, Kontribusi sektor-sektor Jasa dalam PDRB, % PAD dalan APBD, Jumlah pengguna terminal dan pelabuhan, % Rumah layak

huni, % Pemukiman kumuh, Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD), Opini laporan keuangan, Persentase Gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) yang tertangani, Rasio tempat ibadah persatuan penduduk, Jumlah kelompok pengajian dan majelis taklim.



BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dal am mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Adapun strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah akan diuraikan sebagai berikut :

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan pembangunan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Barru

Visi : Kabupaten Barru yang Sejahterah, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya		
Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan masyarakat	Memaksimalkan penyediaan dan Kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan
	Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat	
	Meningkatnya Kualitas daya beli masyarakat	Menjaga Daya Beli dan Mendorong Komsumsi Masyarakat
Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal		
Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana
Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya dan kearifan Lokal	Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal		
Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	mengoptimalkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah
Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan		
Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Meningkatkan daya dukung dan Kualitas Sumberdaya Ekonomi di sektor-sektor strategis
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Mewujudkan Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan		
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Mengoptimalkan pemerataan pendapatan melalui penanggulangan kemiskinan, Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat
Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi		
Meningkatkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur, inovasi dalam pelayanan publik dan penguatan Kelembagaan
Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama		
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	Meningkatnya penerapan Niai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Agama, kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada Perangkat Daerah di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan strategi dan arah kebjakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Adapun tema dan focus pembangunan tiap tahunnya seperti terlihat berikut ini :

TEMA/FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2022 :

Peningkatan Kualitas Sumber daya untuk pertumbuhan Barru yang mandiri dan Inklusif

TEMA/FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2023 :

Mewujudkan *Clean and Good Governance,* dan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Agama.

TEMA/FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2024 :

Pemerataan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Dengan Pemanfaatan Sektor-sektor Strategis Daerah

TEMA/FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 :

Akselerasi Sumber Daya dan Potensi Daerah Untuk Barru yang Mandiri

TEMA/FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 :

Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter Untuk Barru yang Sejahtera

Tabel 6.2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kabupaten Barru

Visi : Kabupaten Barru yang Sejahterah, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan							
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya							
Meningkatnya kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan masyarakat	Memaksimalkan penyediaan dan Kualitas layanan dasar pendidikan dan layanan kesehatan	Perwujudan optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	Peningkatan kualitas tenaga kependidikan	Peningkatan budaya literasi masyarakat	peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Perwujudan optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
	Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat		Penyediaan layanan dan Optimalisasi kualitas layanan dasar kesehatan	Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan kualitas pelayanan KB dan pendewasaan usia perkawinan pertama	pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
	Meningkatnya Kualitas daya beli masyarakat	Menjaga Daya Beli dan Mendorong Komsumsi Masyarakat	Peningkatan Pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan	Peningkatan pengawasan terhadap harga bahan pangan	Peningkatan Pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan	Peningkatan pengawasan terhadap harga bahan pangan	Peningkatan Pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan
Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal							
Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Peningkatan desa dan kelurahan tangguh bencana	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana
Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya penguatan Seni Budaya dan kearifan Lokal	Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Pelaksanaan Identifikasi Budaya Lokal	Pelaksanaan Pencatatan dan registrasi Budaya Lokal	Pelaksanaan pelestarian Budaya Lokal	Pelaksanaan Identifikasi Budaya Lokal	pencatatan dan pelestarian Budaya Lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya local							
Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	mengoptimalkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah	Mewujudkan Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Sanitasi Layak	Meningkatkan akses rumah layak huni	Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi	Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan Drainase	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah
			Mewujudkan Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Air Minum Layak	Meningkatkan Kualitas ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan jalan dan jembatan	Meningkatkan ketersediaan moda transportasi	Mewujudkan Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat
Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan							
Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Meningkatkan daya dukung dan Kualitas Sumberdaya Ekonomi di sektor-sektor strategis	Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan sarana prasarana sumberdaya pertanian dan perikanan bersinergi dengan pengembangan kawasan industry	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas	Pengembangan industrialisasi yang berbasis investasi	Perluasan kerjasama dan kapasitas pemasaran dan perdagangan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Mewujudkan Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon	Pencegahan, pencemaran/kerusakan sumberdaya alam dan LH	penanggulangan pencemaran/kerusakan SDA dan LH	penguatan kelembagaan dan penegakan hukum serta pencegahan pencemaran/kerusakan SDA dan LH	pemulihan pencemaran/kerusakan SDA dan LH	pemulihan pencemaran/kerusakan SDA dan LH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan							
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Mengoptimalkan pemerataan pendapatan melalui penanggulangan kemiskinan, Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi
			Penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Perlindungan, dan Jaminan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS	Penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Perlindungan, dan Jaminan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Perlindungan, dan Jaminan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi							
Meningkatkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas	Perwujudan Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan kualitas SDM Aparatur	Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas
Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama							
Meningkatkan Kualitas kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Agama	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketaatan akan peraturan dan hukum, serta menjaga kualitas ketentraman dan ketertiban	Peningkatan peran lembaga dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama	Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dan pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara	Peningkatan peran lembaga dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketaatan akan peraturan dan hukum, serta menjaga kualitas ketentraman dan ketertiban

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Prioritas pembangunan daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi serta janji kampanye Bupati Barru **Ir.H.SUARDI SALEH, M.Si** dan Wakil Bupati Barru **ASKA MAPPE**. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur terdapat 10 Program Prioritas yang merupakan janji politik (Janji Politik) Bupati dan wakil Bupati Terpilih yang akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas, yaitu :

1) Penuntasan Reformasi Birokrasi/Pemerintahan Melayani;
2) Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas;
3) Modernisasi Pertanian;
4) Infrastruktur Fisik dan Ekonomi berbasis wilayah;
5) Pembangunan Kawasan Industri Halal serta BLK;
6) Bantuan Modal Kerja bagi UMKM;
7) Pembangunan Sektor Pariwisata berbasis masyarakat;
8) Optimalisasi peran pemuda dan Olahraga;
9) Aktualisasi nilai seni Budaya;
10) Pembangunan dan Optimalisasi Rumah Tahdfiz di Setiap Kecamatan.

Tabel 6.3

10 Program Unggulan RPJMD Kab.Barru Tahun 2021 – 2026

No	Program Unggulan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				Tahun Pelaksanaan
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA/ BUMN	
I	**Penuntasan Reformasi Birokrasi/Pemerintahan Melayani**					
	Pelayanan Publik yang berkualitas	√	√			2021 - 2026
	Penyederhanaan Birokrasi		√			2021
	Meningkatnya OPD yang Menerapkan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	√	√			2021 - 2026
II	**Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas**					
	Rumah Tunggu di Sekitar RS.Wahidin Sudirohusodo		√			2021/2022
	Rumah Tunggu di Sekitar RSUD Kab.Barru		√			2021/2022
	Penduduk harus mendapatkan layanan kesehatan (UHC 100%)	√	√			2021 - 2026
	Bantuan Pendidikan bagi Diploma, S1, S2, S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri		√			2021 - 2026

No	Program Unggulan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				Tahun Pelaksanaan
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA/ BUMN	
	Dilanjutkan MoU Prodi UNHAS (Kelas Jauh Fakultas Peternakan dan Perikanan)		√			2021/2022
III	**Modernisasi Pertanian**					
	Penerapan alat mesin pertanian dengan TTG mulai dr pengolahan lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen, penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat guna dan mencukupi	√	√			2021-2024
	penggunaan SDM pertanian yang lebih berkualitas serta efisiensi penggunaan sumber daya alam terutama irigasi	√	√			2021-2024
IV	**Infrastruktur Fisik dan Ekonomi berbasis wilayah**					
	Kebutuhan untuk menanggulangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi.	√	√			2021-2024
	Penguatan infrastruktur internet di wilayah pegunungan dan Daerah-daerah blankspot (Tower)	√	√		√	2021-2024
	Kawasan EMAS Kab.Barru (Terdiri dari dua : Kawasan Industri dan Kawasan Pelabuhan)	√	√	√	√	2021-2022
V	**Pembangunan Kawasan Industri Halal serta BLK**					
	Kawasan Industri Halal (satu kawasan skala kabupaten)	√	√	√	√	2021-2022
	BLK 7 Kecamatan	√	√	√	√	2021-2024
VI	**Bantuan Modal Kerja bagi UMKM**					
	Pemberian Bantuan Modal dan pendampingan Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah	√	√		√	2021-2024
VII	**Pembangunan Sektor Pariwisata berbasis masyarakat**					
	Pengembangan Destinasi pariwisata	√	√		√	2021-2024
	Penguatan pokdarwis dan bumdes dalam pengelolaan pariwisata	√	√		√	2021-2024
	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	√	√		√	2021-2024
VIII	**Optimalisasi peran pemuda dan Olahraga**					
	Pembangunan Stadion	√		√	√	2021 - 2024
	Pengembangan atlet berprestasi		√			2021 - 2024
IX	**Aktualisasi nilai seni Budaya**					
	Festival Budaya yang local wisdom		√		√	2021 - 2024
	Identifikasi Seni tradisional dan Cagar budaya untuk di daftarkan		√			2021 - 2024
X	**Pembangunan dan Optimalisasi Rumah Tahdfiz di Setiap Kecamatan**					
	Pemberian Bantuan sarana dan prasarana diantaranya peralatan, renovasi gedung, dan fungsi pembinaan		√			2021 - 2024

Selain 10 Program Unggulan tersebut, program prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan arahan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang factor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program prioritas RPJMD diantaranya :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
2. Pencapaian SPM;
3. Pencapaian SDGs.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026, maka dirumuskan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan implemetasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program prioritas merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Rumusan program pembangunan daerah berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan pagu indikatif, dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6.4

Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Tahun 2022-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Visi: Kabupaten Barru yang Sejahterah, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan																
1	**Misi-1: Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya**															
	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM	**Indeks Pembangunan Manusia**	**70,6**	**71,79**		**72,16**		**72,57**		**72,88**		**73**		**73**		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan masyarakat	**Indeks Pendidikan**	**68,91**	**69,94**		**70,28**		**70,83**		**71,02**		**71,78**		**71,78**		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)	85,05	100	11.505.362.400	100	12.223.862.400	100	11.505.362.400	100	11.505.362.400	100	11.205.362.400	100	57.945.312.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM)	92,25	100	43.968.453.949	100	44.108.950.779	100	44.033.838.879	100	44.055.076.379	100	43.832.234.479	100	219.998.554.465	
		Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM)	60,71	100	5.433.526.700	100	5.833.526.700	100	5.233.526.700	100	5.633.526.700	100	5.133.526.700	100	27.267.633.500	
	Sasaran 2 : Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat	**Indeks Kesehatan**	**75,25**	**76,69**		**76,93**		**77,26**		**77,51**		**77,93**		**77,93**		

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100	100%	970.862.500	100	980.571.125	100	990.376.836	100	1.000.280.605	100	1.000.280.607	100	4.942.371.673	DINAS KESEHATAN
		Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100	100%	191.481.000	100	193.395.810	100	195.329.767	100	197.283.065	100	199.255.896	100	976.745.538	
		Angka Status Gizi Masyarakat	89,00%	91,03%	1.816.992.100	91,57%	1.835.162.021	92,03%	1.853.513.642	92,55%	1.872.048.778	92,97%	1.877.755.475	92,97%	9.255.472.016	
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	80%	83%	654.019.436	84%	660.559.630	85%	667.165.227	86%	673.836.879	87%	680.575.248	87%	3.336.156.420	
		Indeks Keluarga Sehat	0,02	0,03	81.215.723.631	0,05	85.892.764.154	0,06	86.751.691.795	0,07	87.619.208.713	0,08	88.518.417.395	0,08	429.997.805.688	
		Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	100	100%	8.000.000	100%	8.080.000	100%	8.160.800	100%	8.242.408	100%	8.324.832	100%	40.808.040	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	47%	71%	42.076.500	83%	49.402.000	92%	49.896.000	100%	50.394.980	100%	50.394.980	100%	242.164.460	DINAS KESEHATAN
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.	Persentase Penduduk yang menerapkan PHBS	75	77	119.000.000	80	187.136.000	82	128.007.360	85	169.287.434	88	169.287.434	88	772.718.227	DINAS KESEHATAN
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,42	0,84%	291.500.000	0,73%	302.000.000	0,63%	305.000.000	0,52%	323.000.000	0,2	321.000.000	0,2	1.542.500.000	DINAS PMDPPKBPPPA
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian evaluasi Kabupaten Layak anak	601	650	111.000.000	700	113.000.000	750	115.000.000	900	117.000.000	970	119.000.000	970	575.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	**Paritas Daya Beli**	**10.91**	**11,12**		**11,35**		**11,63**		**11,86**		**12,02**		**12,02**		
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	42,3	65	35.000.000	68	140.000.000	72	140.000.000	74	140.000.000	78	140.000.000	78	595.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	koefisien variasi harga antar waktu	13	10	53.287.860	10	54.353.617	10	55.440.690	10	56.549.503	10	57.680.493	10	277.312.163	DINAS KOP, UKM & DAG
2	**Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal**															
	Tujuan 2 : Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	**Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**	-	**0,69**		**0,72**		**0,75**		**0,78**		**0,8**		**0,8**		
	Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	**Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana**	**0,004**	**0,011**		**0,009**		**0,006**		**0,004**		**0,001**		**0,001**		
9	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100	100	150.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	330.000.000	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100	100	377.005.315	100	424.145.421	100	436.528.330	100	449.158.896	100	462.042.074	100	2.148.880.037	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	100	80.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	680.000.000	

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100	100	1.639.526.937	100	1.672.317.476	100	1.705.763.825	100	1.739.879.102	100	1.774.676.684	100	8.532.164.024	SATPOL PP DAN DAMKAR
		Waktu tanggap (rensponse time)	15	15	54.589.839	15	55.681.636	15	56.795.268	15	57.931.174	15	59.089.797	15	284.087.714	
11	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100	100	327.746.750	100	335.634.088	100	343.915.792	100	352.611.581	100	361.742.161	100	1.721.650.371	DINAS SOSIAL
	Tujuan 3 : Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	**Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%**	**0**	**5,45**		**7,25**		**9,09**		**10,91**		**12,73**		**12,73**		
	Sasaran 5 : Terwujudnya Penguatan Seni Budaya dan kearifan Lokal	**Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara**	**6,35**	**9,52**		**11,11**		**12,7**		**14,29**		**15,87**		**15,87**		
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB	0	0,11	657.000.000	0,22	657.000.000	0,44	657.000.000	0,55	657.000.000	0,66	657.000.000	0,66	3.285.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan dan ditetapkan sebagai WBTB	0	0,25	160.036.000	0,75	181.450.000	1	24.500.000	1,5	253.550.000	1,5	323.650.000	1,5	943.186.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	**Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal**															

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan antar wilayah	**Indeks Williamson**	**0,29**	**0,29**		**0,28**		**0,27**		**0,26**		**0,25**		**0,25**		
	Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	**Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur**	**3,583**	**3,82**		**3,874**		**3,881**		**3,884**		**3,901**		**3,901**		
14	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	50	52,66	7.500.000.000	54,49	8.000.000.000	55,32	9.000.000.000	57,15	10.000.000.000	60	10.000.000.000	60	44.500.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
		persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	4,05	5,71	13.481.281.821	6,54	13.425.590.971	7,37	13.369.558.644	8,2	13.135.966.396	9,03	14.086.550.896	9,03	67.498.948.728	
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	96,63 Layak dan 62,30 aman	97,75 Layak dan 64,20 aman	1.422.593.490	98,31 layak dan 66,31 aman	1.651.045.360	98,87 Layak dan 68,21 aman	1.880.066.267	99,43 Layak dan 70,32	2.309.667.592	100 layak dan 72,22 aman	2.539.860.944	100 dan 72,22 aman	9.803.233.653	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	88,74	100	4.100.000.000	100	3.764.022.649	100	3.799.303.102	100	3.835.289.164	100	4.071.994.948	100	19.570.609.864	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,12	70,98	23.476.943.746	74,64	38.863.998.923	78,80	39.835.208.717	81,96	50.584.478.707	85	47.381.676.719	85	200.142.306.812	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	100	717.875.000	100	1.607.775.000	100	1.507.775.000	100	1.507.775.000	100	1.507.775.000	100	6.848.975.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
		persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	100	100.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.600.000.000	
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	45,00	52,00	590.515.400	55,00	348.025.450	57,00	348.025.450	61,00	348.025.450	65,00	348.025.450	65,00	1.982.617.200	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
20	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Jumlah orang/barang yang terangkut melalui melalui dermaga/kapal Laut	2%	2%	2.063.883.300	2%	2.105.160.966	2%	2.147.264.185	2%	2.190.209.469	2%	2.234.013.658	2%	10.740.531.579	DINAS PERHUBUNGAN
4	**Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan**															
	Tujuan 5 : Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan	**Pertumbuhan Ekonomi**	**7,41**	**4,47**		**5,91**		**6,64**		**7,23**		**7,51**		**7,51**		
	Sasaran 7 : Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	**Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB**	**50,27**	**51,94**		**52,52**		**52,97**		**53,29**		**53,86**		**53,86**		

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	942 M	235 M	329.024.460	350 M	335.604.949	465 M	342.317.048	580 M	349.163.389	695 M	356.146.657	695 M	1.712.256.503	DINAS PMPTSP
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	6203,9 Ton	6359 Ton	1.520.000.000	6491 Ton	1.550.400.000	6625 Ton	1.580.802.000	6798 Ton	1.612.418.040	6986,59 Ton	1.644.666.401	6986,59 Ton	7.908.286.441	DINAS PERIKANAN
23	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Total Produksi Produk Olahah perikanan	1325,85 Ton	1378 Ton	246.000.000	1393 Ton	250.920.000	1407 Ton	255.938.400	1442 Ton	261.057.168	1471 Ton	266.278.311	1494 Ton	1.280.193.879	DINAS PERIKANAN
24	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	2%	2%	3.844.896.700	2%	5.478.986.370	2%	5.602.835.007	2%	6.090.518.508	2%	6.699.570.358		27.716.806.943	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
25	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	-	8,05	415.804.479	7,45	417.883.501	6,94	419.972.919	6,49	422.072.783	6,09	424.183.147	6,09	2.099.916.830	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,48%	6,98%	2.570.800.000	7,48%	2.047.450.000	7,98%	2.172.899.500	8,48%	2.236.112.485	8,98%	2.306.021.860	8,98%	11.333.283.845	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	1,45%	2,45%	350.000.000	2,95%	350.000.000	3,45%	350.000.000	3,95%	350.000.000	4,45%	350.000.000	4,45%	1.750.000.000	
27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,43%	1,45%	9.087.000.000	1,47%	9.507.500.000	1,50%	9.420.000.000	1,52%	10.090.000.000	1,55%	10.169.350.000	1,55%	48.273.850.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sasaran 8 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**72,19**	**73,73**		**74,00**		**74,26**		**74,60**		**75**		**75,00**		
28	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan Tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	35	31	159.026.668	28	260.458.733	26	289.882.582	23	314.558.664	21	334.839.919	21	1.358.766.566	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase sampah yang tertangani	80,52	81,26	1.544.500.000	81,63	1.598.950.000	82	1.658.845.000	82,37	1.724.729.500	82,74	1.797.202.450	82,74	8.324.226.950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	**Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan**															
	Tujuan 6 : Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	**Indeks Gini**	**0,36**	**0,35**		**0,34**		**0,33**		**0,32**		**0,31**		**0,31**		
	Sasaran 9 : Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**5,79**	**5,88**		**5,31**		**5,14**		**4,98**		**4,45**		**4,45**		
		Angka Kemiskinan	**8,26**	**7,45**		**6,67**		**6,41**		**6,28**		**6,05**		**6,05**		
30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	25	57,03	536.830.590	60	547.567.202	63,08	558.518.546	65	569.688.917	70	581.082.695	70	2.793.687.949	DINAS TENAGA KERJA

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	0	9,8	191.870.854	12,1	195.708.271	14,4	199.622.437	16,7	203.614.885	19,00	207.687.183	19,00	998.503.630	DINAS TENAGA KERJA
32	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100	100	74.121.000	100	75.931.630	100	78.046.579	100	79.371.976	100	79.614.136	100	387.085.321	DINAS SOSIAL
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100	100	40.000.000	100	42.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	47.000.000	100	217.000.000	
		Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100	100	40.000.000	100	42.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	47.000.000	100	217.000.000	
		Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial di luar panti (SPM)	100	100	77.100.000	100	78.100.000	100	81.000.000	100	82.900.000	100	86.100.000	100	405.200.000	
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	304.500.000	

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100	100	514.222.845	100	538.683.987	100	564.368.187	100	591.336.596	100	619.653.426	100	2.828.265.041	DINAS SOSIAL
34	PPROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,08%	10,18%	2.806.600.000	10,55%	2.806.600.000	10,97%	2.806.600.000	11,33%	70.000.000	11,54%	70.000.000	11,54%	8.559.800.000	DINAS KOP, UKM & DAG
35	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	0,46%	0,68%	315.528.330	0,90%	321.838.897	1,12%	328.275.675	1,34%	334.841.188	1,56%	341.538.012	1,56%	1.642.022.101	DINAS KOP, UKM & DAG
6	**Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi**															
	Tujuan 7 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**46,34**	**65**		**70**		**73**		**75**		**80**		**80**		
	Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	**Nilai SAKIP**	**55,52**	**60**		**65**		**70**		**75**		**80**		**80**		
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Tingkat Kematangan Organisasi	1	Level 1	419.829.000	Level 1	461.811.900	Level 2	507.993.090	Level 2	558.792.399	Level 2	614.671.639	Level 2	2.563.098.028	SEKRETARIAT DAERAH
37	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kematang UKPBJ	Level 1	Level 1	350.000.000	level 2	350.000.000	level 3	350.000.000	level 3	375.000.000	level 3	400.000.000	level 3	1.825.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersedian Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai Peraturan Per UU dan Ditetapkan tepat waktu	100%	100%	404.000.000	100%	404.000.000	100%	1.174.000.000	100%	869.000.000	100%	354.000.000	100%	3.205.000.000	BAPPEDA
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100%	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	170.000.000	100%	710.000.000	
39	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Per Undang-undangan	100%	100%	91.857.057.998	100%	104.218.767.249	100%	117.936.478.367	100%	122.223.161.363	100%	122.753.139.481	100%	558.988.604.458	BPKAD
		Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%	100%	667.839.300	100%	670.000.000	100%	680.000.000	100%	690.000.000	100%	700.000.000	100%	3.407.839.300	BPKAD
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%	100%	707.017.850	100%	710.000.000	100%	720.000.000	100%	730.000.000	100%	750.000.000	100%	3.617.017.850	BPKAD
40	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan	100%	100%	899.408.300	100%	1.097.333.830	100%	1.202.067.213	100%	1.317.273.934	100%	1.444.001.328	100%	5.960.084.605	BPKAD
41	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	-	C (41-60)	2.907.520.800	B (61-80)	2.588.427.258	B (61-80)	3.001.401.676	B (61-80)	2.616.313.597	A (81-100)	2.562.539.051	A (81-100)	13.676.202.382	BKPSDM

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun	5%	50%	1.313.671.250	80%	1.145.006.500	80%	976.854.500	80%	976.854.500	100%	976.854.500	100%	5.389.241.250	BKPSDM
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	-	87,2	2.303.079.000	90	2.507.762.000	90	2.552.839.000	90	2.552.839.000	95	2.552.839.000	95	12.469.358.000	INSPEKTORAT DAERAH
	Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	**Indeks Pelayanan Publik**	**3,27**	**3,51**		**3,7**		**4**		**4,25**		**4,25**		**4,25**		
44	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL	99%	99%	237.429.500	99%	246.649.500	99%	256.463.500	99%	246.649.500	99%	246.649.500	99%	1.233.841.500	DINAS DUKCAPIL
45	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	89%	96%	175.855.500	98%	179.773.000	99%	181.525.750	99%	181.050.500	99%	181.050.500	99%	899.255.250	DINAS DUKCAPIL
46	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	94,98	97,48	522.443.796	97,99	532.892.672	98,98	543.550.525	99,46	554.421.536	100	565.509.967	100	2.718.818.496	DINAS PMPTSPNAKER
7	**Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama**															
	Tujuan 8 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	**Angka Kriminalitas**	**7,6**	**6,5**		**6,1**		**5,9**		**5,7**		**5**		**5**		

No	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sasaran 9 : Meningkatnya penerapan Niai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	**Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir**	**0,002**	**0,001**		**0,001**		**0,001**		**0,001**		**0**		**0**		
47	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	100	100	1.085.723.292	100	1.097.437.758	100	1.109.586.513	100	1.122.178.243	100	1.135.221.808	100	5.550.147.614	SATPOL PP DAN DAMKAR
48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100	100	118.760.844	100	121.136.061	100	123.558.782	100	126.029.958	100	128.550.557	100	618.036.202	BADAN KESBANGPOL
49	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	100%	23.281.452.480	100%	23.812.710.579	100%	24.181.219.002	100%	24.788.467.762	100%	25.236.006.473	100%	121.299.856.297	SEKRETARIAT DAERAH
50	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat	-	50%	328.869.726	50%	335.447.121	50%	342.156.063	50%	348.999.184	50%	355.979.168	50%	1.711.451.262	BADAN KESBANGPOL



BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan periode RPJMD Kabupaten Barru. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Kapasitas riil keuangan daerah yang telah diurai pada bab 3, mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2021 ke 2026. Proyeksi kapasitas rill kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2021 s.d. 2026 mengalami peningkatan pada tahun 2020 namun menurun pada tahun 2021. Kapasitas riil Keuangan Daerah Kabupaten Barru untuk periode Tahun 2021- 2026 yang akan datang diharapkan dapat meningkat secara konsisten tetapi akibat dengan adanya bencana Covid 19 membuat kapasitas riil tersebut mengalami peningkatan yang melambat. Pemerintah Kabupaten Barru optimis di tahun 2023 sudah dapat dapat meningkat. Peningkatan Kapasitas riil keuangan daerah ini diharapkan dapat didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, disamping itu juga diharapkan dari pelampauan target pendapatan berupa optimalisasi PAD, peningkatan dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai dampak efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/ non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini sebagai implikasi atas adanya peningkatan untuk belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama, sehingga berpengaruh pada proyeksi kapasitas rill kemampuan daerah. Kemampuan pendanaan pembangunan daerah dapat diketahui melalui kapasitas rill kemampuan keuangan daerah.

Adapun rencana kerangka pendanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 s.d. 2026 Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021 s.d. 2026

No.	Uraian	Target (rp) 2021	Proyeksi (Rp)				
			2022	2023	2024	2025	2026
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**961.414.272.281**	**982.628.389.311**	**1.016.317.666.424**	**1.037.397.078.115**	**1.061.008.317.318**	**1.076.178.081.573**
5	**BELANJA DAERAH**	**961.414.272.281**	**982.628.389.311**	**1.016.317.666.424**	**1.037.397.078.115**	**1.061.008.317.318**	**1.076.178.081.573**
5.1	**Belanja Operasi**	**734.427.860.619**	**748.279.824.505**	**762.409.291.112**	**776.822.008.313**	**791.523.846.905**	**804.306.655.788**
5.1.1	Belanja Pegawai	427.046.274.110	436.697.519.926	446.566.883.998	456.659.295.496	466.979.795.597	476.319.391.509
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	289.386.067.823	293.437.472.774	297.545.597.394	301.711.235.758	305.935.193.060	309.218.285.764
5.1.3	Belanja Bunga	3.191.298.036	3.156.390.521	3.122.260.474	3.088.303.789	3.054.716.406	3.021.494.308
5.1.4	Belanja Subsidi					-	-
5.1.5	Belanja Hibah	14.804.220.650	14.988.241.284	15.174.549.346	15.363.173.270	15.554.141.842	15.747.484.207
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial					-	-
5,2	**Belanja Modal**	**107.629.505.459**	**112.648.549.978**	**129.312.707.568**	**133.012.270.979**	**138.881.270.459**	**138.402.122.605**
5,3	**Belanja Tidak Terduga**	**12.083.800.456**	**12.204.638.460**	**12.326.684.844**	**12.449.951.692**	**12.574.451.209**	**12.700.195.721**
5,4	**Belanja Transfer**	**107.273.105.747**	**109.495.376.368**	**112.268.982.900**	**115.112.847.131**	**118.028.748.745**	**120.769.107.456**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil						
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	107.273.105.747	109.495.376.368	112.268.982.900	115.112.847.131	118.028.748.745	120.769.107.456

Sumber : Data Olahan Bappeda Kabupaten Barru, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan pelayanan dasar yakni SPM. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan.

7.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BARRU

Indikasi rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Barru berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Indikasi rencana program prioritas dan pagu indikatifnya dijabarkan pada tabel 7.2 berikut ini

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	01		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**															
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	3,00	3,00	240.793.072.288	3,00	240.773.072.288	4,00	240.763.072.288	4,00	240.753.072.288	4,00	240.743.072.288	100	1.203.825.361.440	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	130.000.000	20 JPL	150.000.000	20 JPL	160.000.000	20 JPL	170.000.000	20 JPL	180.000.000	100 JPL	790.000.000	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)	85,05	100	11.505.362.400	100	12.223.862.400	100	11.505.362.400	100	11.505.362.400	100	11.205.362.400	100	57.945.312.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM)	92,25	100	43.968.453.949	100	44.108.950.779	100	44.033.838.879	100	44.055.076.379	100	43.832.234.479	100	219.998.554.465	
				Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	60,71	100	5.433.526.700	100	5.833.526.700	100	5.233.526.700	100	5.633.526.700	100	5.133.526.700	100	27.267.633.500	
1	02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															
1	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3,00	3,00	47.179.796.000	3,00	49.297.046.000	3,00	49.435.946.000	4,00	50.190.290.000	4,00	50.190.290.000	4,00	246.293.370.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100	100%	970.862.500	100	980.571.125	100	990.376.836	100	1.000.280.605	100	1.000.280.607	100	4.942.371.673	DINAS KESEHATAN
				Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100	100%	191.481.000	100	193.395.810	100	195.329.767	100	197.283.065	100	199.255.896	100	976.745.538	
				Angka Status Gizi Masyarakat	89,00%	91,03%	1.816.992.100	91,57%	1.835.162.021	92,03%	1.853.513.642	92,55%	1.872.048.778	92,97%	1.877.755.475	92,97%	9.255.472.016	
				Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	80%	83%	654.019.436	84%	660.559.630	85%	667.165.227	86%	673.836.879	87%	680.573.248	87%	3.336.156.420	
				Indeks Keluarga Sehat	0,02	0,03	81.215.723.631	0,05	85.892.764.154	0,06	86.751.691.795	0,07	87.619.208.713	0,08	88.516.417.395	0,08	429.997.805.688	
				Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	100	100%	8.000.000	100%	8.080.000	100%	8.160.800	100%	8.242.408	100%	8.324.832	100%	40.808.040	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	47%	71%	42.076.500	83%	49.402.000	92%	49.896.000	100%	50.394.960	100%	50.394.960	100%	242.164.460	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKAN MINUM	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang bertata dan bersertifikasi.	100%	100	320.000.000	100	169.140.000	100	170.831.400	100	172.539.714	100	172.539.714	100	1.005.050.828	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.	Persentase Penduduk yang menerapkan PHBS	75	77	119.000.000	80	167.136.000	82	128.007.360	85	169.287.434	88	169.287.434	88	772.718.227	DINAS KESEHATAN
1	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Tingkat Kesehatan BLUD	59,35	60	72.376.336.168	62,15	73.415.736.412	65,5	74.475.924.661	68,25	75.557.316.676	70	76.660.336.531	70	372.485.650.448	RSUD
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Pasien yang tertangani sesuai standari pelayanan	76,21	77	18.841.599.601	77,50	19.218.431.593	77,55	19.602.800.225	77,60	19.994.856.230	77,70	20.394.753.354	77,70	98.052.441.005	RSUD
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**															
1	3	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas PUPR	3,00	3,00	6.336.534.260	3,00	6.430.906.545	3,00	6.440.812.493	4,00	6.460.731.991	4,00	6.591.567.542	4,00	32.260.552.831	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	70.000.000	20 JPL	80.000.000	20 JPL	90.000.000	20 JPL	100.000.000	20 JPL	110.000.000	100 JPL	450.000.000	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	50	52,66	7.500.000.000	54,49	8.000.000.000	55,32	9.000.000.000	57,15	10.000.000.000	60	10.000.000.000	60	44.500.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
				persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	4,05	5,71	13.481.281.821	6,54	13.425.590.971	7,37	13.369.558.644	8,2	13.135.966.396	9,03	14.086.550.896	9,03	67.498.948.728	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	96,63 Layak dan 62,30 aman	97,75 Layak dan 64,20 aman	1.422.593.490	98,31 layak dan 66,31 aman	1.651.045.380	98,87 Layak dan 68,21 aman	1.880.066.267	99,43 Layak dan 70,32	2.309.667.592	100 layak dan 72,22 aman	2.539.860.944	100 dan 72,22 aman	9.803.233.653	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kapasitas penampungan Tempat Pembuangan Sampah Dengan Jumlah Penduduk	0	0	-	0	-	100	1.350.000.000	0	-	100	1.350.000.000	100	2.700.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	88,74	100	4.100.000.000	100	3.764.022.649	100	3.799.303.102	100	3.835.269.164	100	4.071.994.948	100	19.570.609.864	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	30%	33%	1.036.478.282	35%	1.049.207.848	37%	1.062.192.006	39%	1.075.435.846	40%	1.088.944.562	40%	5.312.258.544	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase kepatuhan IMB	100%	100%	18.600.000.000	100%	5.120.000.000	100%	4.820.000.000	100%	5.320.000.000	100%	6.520.000.000	100%	40.380.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	65,12	70,98	23.476.943.746	74,64	38.863.998.923	78,80	39.835.208.717	81,96	50.584.478.707	85	47.381.676.719	85	200.142.306.812	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	80%	100%	536.219.110	100%	1.160.000.000	100%	660.000.000	100%	760.000.000	100%	760.000.000	100%	3.876.219.110	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**															
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	100	717.875.000	100	1.607.775.000	100	1.507.775.000	100	1.507.775.000	100	1.507.775.000	100	6.848.975.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
				persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	100	100.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.600.000.000	
1	04	03	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penurunan Jumlah rumah tidak layak huni	4,16	3,63	1.950.000.000	3,29	3.875.000.000	3,01	3.875.000.000	2,88	3.875.000.000	2,67	3.875.000.000	2,67	17.450.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
1	04	04	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dihawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	72,43	73,90	2.388.000.000	75,37	1.958.275.000	76,84	1.956.275.000	78,31	1.550.275.000	80,00	1.467.850.000	80,00	9.322.675.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	45,00	52,00	590.515.400	55,00	348.025.450	57,00	348.025.450	61,00	348.025.450	65,00	348.025.450	65,00	1.982.617.200	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	5	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR	3,00	3,00	4.953.142.233	3,00	4.957.394.263	3,00	4.971.931.333	4,00	4.986.759.144	4,00	5.001.883.512	4,00	24.871.110.485	SATPOL PP DAN DAMKAR
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	140.000.000	20 JPL	150.000.000	20 JPL	150.000.000	20 JPL	150.000.000	20 JPL	150.000.000	100 JPL	740.000.000	
1	5	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BPBD	3,00	3,00	2.326.494.538	3,00	2.331.972.661	3,00	2.337.760.345	4,00	2.343.863.783	4,00	2.350.289.290	4,00	11.690.380.618	BPBD
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	150.000.000	20 JPL	160.000.000	20 JPL	170.000.000	20 JPL	180.000.000	20 JPL	190.000.000	100 JPL	850.000.000	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	100	100	1.085.723.292	100	1.097.437.758	100	1.109.586.513	100	1.122.178.243	100	1.135.221.808	100	5.550.147.614	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100	100	150.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	330.000.000	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100	100	377.005.315	100	424.145.421	100	436.528.330	100	449.158.896	100	462.042.074	100	2.148.880.037	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	100	80.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	680.000.000	
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100	100	1.639.526.937	100	1.672.317.476	100	1.705.763.825	100	1.739.879.102	100	1.774.676.684	100	8.532.164.024	SATPOL PP DAN DAMKAR
				Waktu tanggap (response time)	15	15	54.589.839	15	55.681.636	15	56.795.268	15	57.931.174	15	59.089.797	15	284.087.714	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	6	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Sosial	3,00	3,00	2.824.571.248	3,00	2.897.286.548	3,00	3.007.573.548	4,00	3.144.622.948	4,00	3.233.313.448	4,00	15.107.367.740	DINAS SOSIAL
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	80.000.000	20 JPL	90.000.000	20 JPL	90.000.000	20 JPL	100.000.000	20 JPL	100.000.000	100 JPL	460.000.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUan	100	100	166.597.963	100	170.762.912	100	175.031.984	100	179.407.784	100	183.892.979	100	875.693.621	DINAS SOSIAL
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100	100	12.235.000	100	12.235.000	100	12.235.000	100	12.235.000	100	12.235.000	100	61.175.000	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100	100	74.121.000	100	75.931.650	100	78.046.579	100	79.371.976	100	79.614.136	100	387.085.321	DINAS SOSIAL
				Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	40.000.000	100	42.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	47.000.000	100	217.000.000	
				Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100	100	40.000.000	100	42.000.000	100	43.000.000	100	45.000.000	100	47.000.000	100	217.000.000	
				Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar (tuna sosial di luar panti (SPM)	100	100	77.100.000	100	78.100.000	100	81.000.000	100	82.900.000	100	86.100.000	100	405.200.000	
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	60.900.000	100	304.500.000	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100	100	514.222.845	100	538.683.987	100	564.368.187	100	591.336.596	100	619.653.426	100	2.828.265.041	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100	100	327.746.750	100	335.634.088	100	343.915.792	100	352.611.581	100	361.742.161	100	1.721.650.371	DINAS SOSIAL
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola dan dipelihara sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	100	100	61.182.000	100	63.017.460	100	64.907.984	100	66.855.223	100	68.860.880	100	324.823.547	DINAS SOSIAL

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3,00	3,00	2.200.184.478	3,00	2.252.221.373	3,00	2.314.865.648	4,00	2.389.598.777	4,00	2.479.518.533	4,00	11.636.188.809	DINAS TENAGA KERJA
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	60.000.000	20 JPL	60.000.000	20 JPL	60.000.000	20 JPL	60.000.000	20 JPL	60.000.000	100 JPL	300.000.000	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	100	107.792.615	100	109.948.467	100	112.147.436	100	114.390.385	100	116.678.193	100	560.957.096	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	25	57,03	536.830.590	60	547.567.202	63,08	558.518.546	65	569.688.917	70	581.082.695	70	2.793.687.949	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	0	9,8	191.870.854	12,1	195.708.271	14,4	199.622.437	16,7	203.614.885	19,00	207.687.183	19,00	998.503.630	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	24,32	42,88	30.600.000	52,16	31.212.000	61,44	31.836.240	70,72	32.472.965	80	33.122.424	80	159.243.629	DINAS TENAGA KERJA
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	18,55	18,75	157.000.000	18,85%	159.000.000	0,189	162.000.000	19,25%	164.000.000	19,45%	168.000.000	19,45%	810.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA
2	08	03	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Efektifitas pemanfaatan data gender dan anak	-	80,00%	57.000.000	85,00%	57.000.000	88,00%	57.000.000	90,00%	59.000.000	95,00%	59.000.000	95,00%	289.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA
2	08	04	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,42	0,84%	291.500.000	0,73%	302.000.000	0,65%	305.000.000	0,52%	323.000.000	0,2	321.000.000	0,2	1.542.500.000	DINAS PMDPPKBPPPA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya	100	100	111.000.000	100	113.000.000	100	115.000.000	100	117.000.000	100	119.000.000	100	575.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0,026%	0,20%	80.000.000	0,15%	63.000.000	0,013%	63.000.000	0,010%	64.000.000	0,0067%	65.000.000	0,0067%	315.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	44,37	45	-	46,78	200.000.000	46,92	220.000.000	47,82	242.000.000	48,71	266.200.000	48,71	928.200.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan kasus Kerawanan Pangan	0,80%	0,70%	51.968.000	0,60%	273.000.000	0,50%	290.000.000	0,40%	323.000.000	0,30%	329.500.000	0,30%	1.267.468.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	92	94	123.892.000	95	449.766.155	96	457.272.855	97	468.946.208	98	484.946.208	98	1.984.825.426	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	42,3	65	35.000.000	68	140.000.000	72	140.000.000	74	140.000.000	78	140.000.000	78	595.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	100	1.750.000	100	3.750.000	100	3.750.000	100	3.750.000	100	3.750.000	100	16.750.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	0	100	12.750.300	100	12.750.300	100	12.750.300	100	12.750.300	100	12.750.300	100	63.751.500	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0	100	567.750.300	100	1.070.500.600	100	1.070.500.600	100	1.070.500.600	100	1.070.500.600	100	4.849.752.700	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	0	100	2.750.300	100	2.750.300	100	2.750.300	100	2.750.300	100	2.750.300	5	13.751.500	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Lingkungan Hidup	3,00	3,00	2.447.096.543	3,00	2.458.912.102	3,00	2.470.357.235	4,00	2.484.454.376	4,00	2.500.228.231	4,00	12.361.048.487	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	85.000.000	20 JPL	90.000.000	20 JPL	95.000.000	20 JPL	98.000.000	20 JPL	100.000.000	100 JPL	468.000.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100	100	550.768.300	100	215.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	100	345.000.000	100	1.540.768.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan Tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	35	31	159.026.668	28	260.458.733	26	289.882.582	23	314.558.664	21	334.839.919	21	1.358.766.566	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	100	100	296.050.000	100	310.852.500	100	326.395.125	100	342.714.881	100	359.850.625	100	1.635.863.132	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	83,38	84,19	98.332.000	85,43	101.416.200	86,85	111.557.820	88,56	122.713.602	90,73	134.984.962	90,73	569.004.584	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	40.376.980	100	23.520.000	100	24.403.000	100	25.321.360	100	40.059.150	100	153.680.490	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0	100	10.977.000	100	11.306.310	100	11.419.373	100	11.761.954	100	12.114.813	100	57.579.450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	75	80	78.835.500	82	69.894.255	84	71.991.083	86	74.150.815	88	76.375.340	88	371.246.992	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanguti dan diselesaikan sesuai peraturan per Uuan	100	100	10.976.000	100	11.524.800	100	12.101.040	100	12.706.092	100	13.341.397	100	60.649.329	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase sampah yang tertangani	80,52	81,26	1.544.500.000	81,63	1.598.950.000	82	1.658.845.000	82,37	1.724.729.500	82,74	1.797.202.450	82,74	8.324.226.950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	3,00	3,00	3.810.854.086	3,00	4.659.289.586	3,00	4.184.648.086	4,00	3.901.309.586	4,00	3.973.809.586	4,00	20.509.910.930	DINAS DUKCAPIL
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	140.000.000	20 JPL	140.000.000	20 JPL	140.000.000	20 JPL	140.000.000	20 JPL	140.000.000	100 JPL	700.000.000	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL	99%	99%	237.429.500	99%	246.649.500	99%	256.463.500	99%	246.649.500	99%	246.649.500	99%	1.233.841.500	DINAS DUKCAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	89%	96%	175.855.500	98%	179.773.000	99%	181.525.750	99%	181.050.500	99%	181.050.500	99%	899.255.250	DINAS DUKCAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan dari 5,71% menjadi 14,28%	5,71%	14	193.909.000	22	187.909.000	31	184.961.500	37	185.659.000	42	185.659.000	42	938.097.500	DINAS DUKCAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase pemanfaatan profil kependudukan	100%	100%	78.273.500	100%	75.550.500	100%	72.500.250	100%	72.500.250	100%	72.500.250	100%	371.324.750	DINAS DUKCAPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas PMDPPKBPPPA	3,00	3,00	3.579.755.653	3,00	3.612.255.653	3,00	3.623.255.653	4,00	3.633.255.653	4,00	3.642.755.653	4,00	18.091.278.265	DINAS PMDPPKBPPPA
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	111.500.000	20 JPL	77.500.000	20 JPL	79.500.000	20 JPL	81.500.000	20 JPL	82.500.000	100 JPL	432.500.000	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa dari 17,50% menjadi 75%	17,50%	17,50%	40.000.000	37,50%	47.000.000	50,00%	54.000.000	62,50%	61.000.000	75,00%	68.000.000	75,00%	270.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib administrasi sesuai peraturan Per UU an	100%	100%	1.931.000.000	100%	1.931.000.000	100%	1.419.000.000	100%	1.430.000.000	100%	1.437.000.000	100%	8.148.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase LPM Berprestasi	25,45	32,36	530.000.000	36,49	540.000.000	41,14	571.000.000	46,39	582.000.000	52,31%	595.000.000	52,31%	2.818.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13,90	14,32	3.277.120.000	14,65	3.331.120.000	14,75	3.345.120.000	15,25	3.359.120.000	15,90	3.374.120.000	15,90	16.686.600.000	DINAS PMDPPKBPPPA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	66,67%	66,67%	21.000.000	66,67%	25.000.000	83,33%	25.000.000	83,33%	26.000.000	100	28.000.000	100	125.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	3,00	3,00	4.257.864.330	3,00	4.252.277.666	3,00	4.246.979.309	4,00	4.241.974.965	4,00	4.237.270.534	4,00	21.236.366.824	DINAS PERHUBUNGAN
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	80.000.000	20 JPL	100.000.000	20 JPL	120.000.000	20 JPL	140.000.000	20 JPL	160.000.000	100 JPL	600.000.000	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pemasangan perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundlian	100	100	3.644.040.232	100	3.660.465.036	100	3.677.218.337	100	3.694.306.704	100	3.711.736.838	100	18.387.767.146	DINAS PERHUBUNGAN
				Presentase layanan Angkutan darat	76	99	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	4.250.000.000	
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Jumlah orang/barang yang terangkut melalui melalui dermaga/kapal Laut	2%	2%	2.063.883.300	2%	2.105.160.966	2%	2.147.264.185	2%	2.190.209.469	2%	2.234.013.658	2%	10.740.531.579	DINAS PERHUBUNGAN
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kominfo	3,00	3,00	3.232.472.938	3,00	3.713.890.184	3,00	3.740.174.168	4,00	3.922.885.251	4,00	4.102.322.813	4,00	18.711.745.354	DINAS KOMINFOSTAT
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	95.000.000	20 JPL	120.000.000	20 JPL	150.000.000	20 JPL	150.000.000	20 JPL	150.000.000	100 JPL	665.000.000	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat efektifitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	2.055.011.500	100%	2.190.173.500	100%	2.269.673.500	100%	2.345.673.500	100%	2.433.673.500	100%	11.294.205.500	DINAS KOMINFOSTAT
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentase sistem informasi yang terintegrasi dan berfungsi optimal	100%	100%	2.014.976.000	100%	3.969.326.000	100%	4.410.326.000	100%	3.513.426.000	100%	2.790.426.000	100%	16.718.480.000	DINAS KOMINFOSTAT

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperindag, UKM	3,00	3,00	3.265.963.267	3,00	3.273.745.618	3,00	3.283.723.616	3,00	3.293.901.174	4,00	3.304.282.283	4,00	16.419.615.958	DINAS KOP, UKM & DAG
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	110.000.000	20 JPL	110.000.000	20 JPL	110.000.000	20 JPL	110.000.000	20 JPL	110.000.000	100 JPL	550.000.000	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang	75	75	57.672.828	100	58.826.285	100	60.002.810	100	61.202.866	100	62.426.924	100	300.131.713	DINAS KOP, UKM & DAG
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yangaktif	69,6	76,31	66.179.570	79,89	67.503.162	83,65	68.853.225	87,5600204	70.230.289	91,70	71.634.895	91,70	344.401.141	DINAS KOP, UKM & DAG
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam	95	100	59.378.178	65	60.565.742	70	61.777.056	70	63.012.598	75	64.272.849	75	309.006.423	DINAS KOP, UKM & DAG
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	36,53	61	70.000.000	69	70.000.000	77	70.000.000	85	70.000.000	93	70.000.000	93	350.000.000	DINAS KOP, UKM & DAG
2	17	7	PPROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,88%	10,18%	2.806.600.000	10,55%	2.806.600.000	10,67%	2.806.600.000	11,33%	70.000.000	11,54%	70.000.000	11,54%	8.559.800.000	DINAS KOP, UKM & DAG
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	0,46%	0,68%	315.528.530	0,90%	321.838.897	1,12%	328.275.675	1,34%	334.841.188	1,56%	341.538.012	1,56%	1.642.022.101	DINAS KOP, UKM & DAG
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas PMPTSPNaker	3,00	100	3.143.366.055	100	3.157.455.951	100	3.171.827.646	100	3.186.486.774	100	3.201.439.085	100	15.860.575.512	DINAS PMPTSP
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	130.000.000	20 JPL	130.000.000	20 JPL	130.000.000	20 JPL	130.000.000	20 JPL	130.000.000	100 JPL	650.000.000	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart peraturan per UU an	100	100	57.409.170	100	58.557.353	100	59.728.500	100	60.923.070	100	62.141.532	100	298.759.626	DINAS PMPTSP
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi	74,52	80,18	111.917.460	80,17	114.155.809	80,16	116.438.925	80,16	118.767.704	80,86	121.143.058	80,86	582.422.956	DINAS PMPTSP

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	94,98	97,48	522.443.796	97,99	532.892.672	98,98	543.550.525	99,46	554.421.536	100	565.509.967	100	2.718.818.496	DINAS PMPTSP
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	942 M	235 M	329.024.460	350 M	335.604.949	465 M	342.317.048	580 M	349.163.389	695 M	356.146.657	695 M	1.712.256.503	DINAS PMPTSP
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat efektifitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100	100	51.000.000	100	52.020.000	100	53.060.400	100	54.121.608	100	55.204.040	100	265.406.048	DINAS PMPTSP
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9,30%	13,30%	1.365.027.224	15,30%	1.390.287.768	17,30%	1.416.093.524	19,30%	1.446.455.394	21,30%	1.475.384.502	21,30%	7.093.248.413	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,26	0,7	953.722.080	0,91	972.796.522	1,12	992.252.452	1,33	1.012.097.501	1,54	1.032.339.451	1,54	4.963.208.005	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kenaikan raihan Prestasi pada event olahraga nasional dan provinsi	0	100%	467.716.266	100%	473.070.591	100%	478.532.003	100%	484.102.643	100%	489.784.696	100%	2.393.206.197	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Lembaga Kepramukaan yang aktif	-	100	123.959.409	100	126.438.597	100	128.967.369	100	131.546.716	100	134.177.650	100	645.089.741	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
3	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	35,00%	80,00%	158.497.800	100%	681.379.000	100%	444.118.500	100%	457.494.500	100%	471.540.500	100%	2.213.030.300	DINAS KOMINFOSTAT
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	100%	87.000.000	100%	295.000.000	100%	115.000.000	100%	92.000.000	100%	92.000.000	100%	681.000.000	DINAS KOMINFOSTAT
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB	0	0,11	657.000.000	0,22	657.000.000	0,44	657.000.000	0,55	657.000.000	0,66	657.000.000	0,66	3.285.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan dan ditetapkan menjadi WISTB	0	0,5	349.022.000	1,5	349.022.000	2	349.022.000	3	349.022.000	3	349.022.000	3	1.745.110.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan dan ditetapkan sebagai WISTB	0	0,25	160.036.000	0,75	161.450.000	1	24.500.000	1,5	253.550.000	1,5	323.650.000	1,5	943.186.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**															
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perpustakaan	3,00	3,00	3.408.213.759	3,00	3.440.369.042	3,00	3.515.369.042	4,00	3.538.869.042	4,00	3.538.869.042	4,00	17.441.689.927	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	85.000.000	20 JPL	85.000.000	20 JPL	85.000.000	20 JPL	85.000.000	20 JPL	85.000.000	100 JPL	425.000.000	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah dan Taman Bara	65%	72%	1.007.558.800	77%	1.012.762.800	81%	1.102.185.880	83%	1.108.355.480	85%	1.108.355.480	85%	5.339.198.440	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**															
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang telah mengelola Arsip sesuai Peraturan Perundang-undangan	0,5	1	29.500.000	1	30.300.000	1,5	33.200.000	2,0	34.000.000	2,0	34.000.000	2,0	161.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	48,5	54,5	13.315.000	57,5	15.500.000	60,5	17.900.000	63,5	18.300.000	66,5	18.300.000	66,5	83.315.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**															
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan	3,00	3,00	2.936.594.203	3,00	2.946.013.260	3,00	2.955.620.699	4,00	2.965.420.286	4,00	2.975.415.865	4,00	14.779.064.313	DINAS PERIKANAN
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	45.000.000	20 JPL	45.000.000	20 JPL	45.000.000	20 JPL	45.000.000	20 JPL	45.000.000	100 JPL	225.000.000	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	19570 Ton	19866 Ton	1.102.000.000	20154 Ton	1.124.040.000	20427 Ton	1.146.520.800	20919 Ton	1.169.451.216	21399 Ton	1.192.840.240	21399 Ton	5.734.852.256	DINAS PERIKANAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	6203,9 Ton	6359 Ton	1.520.000.000	6491 Ton	1.550.400.000	6625 Ton	1.580.802.000	6798 Ton	1.612.418.040	6986,59 Ton	1.644.666.401	6986,59 Ton	7.908.286.441	DINAS PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Total Produksi Produk Olahah perikanan	1325,85 Ton	1378 Ton	246.000.000	1393 Ton	250.920.000	1407 Ton	255.938.400	1442 Ton	261.057.168	1471 Ton	266.278.311	1494 Ton	1.280.193.879	DINAS PERIKANAN
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**															
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pariwisata	3,00	3,00	4.601.754.417	3,00	4.910.032.888	3,00	5.250.139.205	4,00	5.814.881.443	4,00	5.905.287.587	4,00	26.482.095.540	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	70.000.000	20 JPL	80.000.000	20 JPL	90.000.000	20 JPL	90.000.000	20 JPL	90.000.000	100 JPL	420.000.000	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	2%	2%	3.844.896.700	2%	5.478.986.370	2%	5.602.835.007	2%	6.090.518.508	2%	6.899.570.358		27.716.806.943	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	-	8,05	415.804.479	7,45	417.883.501	6,94	419.972.919	6,49	422.072.783	6,09	424.183.147	6,09	2.099.916.830	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Peningkatan pelaku Ekfraf yang memiliki HAKI	0	0	-	100	81.400.000	100	89.540.000	100	98.494.000	100	218.343.400	100	487.777.400	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Pariwisata	100	100	726.680.000	100	799.348.000	100	879.282.800	100	967.211.080	100	1.063.932.188	100	4.436.454.068	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**															
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian	3,00	3,00	12.651.646.281	3,00	13.284.625.869	3,00	13.626.993.009	3,00	13.969.573.404	3,00	14.312.373.452	3,00	67.845.212.015	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Rata-rata Lama Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20 JPL	20 JPL	40.000.000	20 JPL	50.000.000	20 JPL	60.000.000	20 JPL	70.000.000	20 JPL	80.000.000	100 JPL	300.000.000	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,48%	6,98%	2.570.800.000	7,48%	2.047.450.000	7,98%	2.172.898.500	8,48%	2.236.112.485	8,98%	2.306.021.860	8,98%	11.333.283.845	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	1,45%	2,45%	350.000.000	2,95%	350.000.000	3,45%	350.000.000	3,95%	350.000.000	4,45%	350.000.000	4,45%	1.750.000.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,42%	1,45%	9.087.000.000	1,47%	9.507.500.000	1,50%	9.420.000.000	1,52%	10.090.000.000	1,55%	10.169.350.000	1,55%	48.273.850.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,39%	0,36%	520.559.106	0,33%	575.600.000	0,30%	575.600.000	0,27%	579.500.000	0,24%	583.517.000	0,21%	2.834.776.106	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan kerugian akibat bencana pertanian	3,00%	6,00%	220.000.000	9,00%	330.000.000	12,00%	330.000.000	15,00%	330.000.000	19,00%	330.000.000	22,00%	1.540.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang Memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	100	100	90.000.000	100	115.000.000	100	118.000.000	100	121.090.000	100	124.272.700	200	568.362.700	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	20	20	1.365.000.000	20	859.650.000	20	859.650.000	20	864.650.000	20	865.650.000	100	4.834.600.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**															
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (SUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	12,66	25,32	96.900.000	31,65	98.838.000	37,97	100.814.760	44,3	102.831.055	50,63	104.887.676	50,63	504.271.492	DINAS KOP, UKM & DAG
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	90	95	1.256.267.599	95	1.281.392.951	95	1.307.020.810	95	1.333.161.226	95	1.359.824.451	95	6.537.667.037	DINAS KOP, UKM & DAG
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	koefisien variasi harga antar waktu	15	10	53.287.860	10	54.353.617	10	55.440.690	10	56.549.503	10	57.680.493	10	277.312.163	DINAS KOP, UKM & DAG
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	88,19	89,79	197.071.038	90,59	201.012.459	91,39	205.032.708	92,19	209.133.362	92,99	213.316.029	92,99	1.025.565.596	DINAS KOP, UKM & DAG

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi dan kerjasama perdagangan yang terlaksana	0	100	10.370.340	100	10.577.747	100	10.789.302	100	11.005.088	100	11.225.190	100	53.967.666	DINAS KOP, UKM & DAG
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK	100	100	465.977.820	100	473.297.376	100	484.803.324	100	494.499.390	100	504.389.378	100	2.424.967.289	DINAS KOP, UKM & DAG
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	425.836.230	100	434.352.955	100	443.040.014	100	451.900.814	100	460.938.830	100	2.216.068.843	DINAS KOP, UKM & DAG
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat efektifitas pemanfaatan sistem informasi industri nasional	100	100	50.610.870	100	51.623.087	100	52.655.549	100	53.708.660	100	54.782.833	100	263.381.000	DINAS KOP, UKM & DAG
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3,00	3,00	37.184.323.776	3,00	31.339.997.261	3,00	31.419.502.542	4,00	36.134.753.842	4,00	41.563.107.586	4,00	177.641.685.006	SEKRETARIAT DAERAH
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	532.689.000	20 JPL	590.907.150	20 JPL	617.877.965	20 JPL	655.045.862	20 JPL	696.150.548	100 JPL	3.092.670.524	
				Tingkat Kematangan Organisasi	1	Level 1	419.829.000	Level 1	461.811.900	Level 2	507.993.090	Level 2	558.792.399	Level 2	614.671.639	Level 2	2.563.098.028	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,2112	3,3044	629.992.000	3,3697	699.992.000	3,4005	716.420.300	3,4769	755.134.340	3,5000	806.647.774	3,5000	3.610.186.414	SEKRETARIAT DAERAH
				Nilai hasil evaluasi RB pada Perangkat PerUUan	-	3	550.000.000	3	605.000.000	4	665.500.000	4	732.050.000	5	805.255.000	5	3.357.805.000	
				Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	100%	23.281.452.480	100%	23.812.710.579	100%	24.181.219.002	100%	24.788.467.762	100%	25.236.006.473	100%	121.299.856.297	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	100%	100%	86.665.200	100%	205.284.500	100%	205.284.500	100%	205.284.500	100%	205.284.500	100%	907.823.200	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Peningkatan Rata-rata capaian kinerja Program Sekretariat Daerah	100%	100%	300.302.000	100%	330.332.200	100%	363.365.420	100%	399.701.962	100%	439.672.158	100%	1.833.373.740	
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	60	60	350.000.000	60-80	350.000.000	60-80	350.000.000	80-99	375.000.000	80-99	400.000.000	80-99	1.825.000.000	
4	2		SEKRETARIAT DPRD															
4	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat DPRD	3,00	3,00	14.640.618.683	3,00	14.666.537.952	3,00	14.692.716.414	4,00	14.719.156.661	4,00	14.745.861.310	4,00	73.464.891.021	SEKRETARIAT DPRD
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	95.000.000	20 JPL	95.000.000	20 JPL	95.000.000	20 JPL	95.000.000	20 JPL	95.000.000	100 JPL	475.000.000	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai peraturan perUUan	100	100	6.205.955.703	100	6.268.015.260	100	6.330.695.412	100	6.394.002.367	10 Ranperda	6.457.942.390	0 Ranperd	31.656.611.132	SEKRETARIAT DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP bappeda	3,00	3,00	3.096.186.017	3,00	3.082.416.947	3,00	3.098.729.032	4,00	3.095.122.677	4,00	3.111.598.291	4,00	15.484.052.964	BAPPEDA
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	150.000.000	20 JPL	180.000.000	20 JPL	180.000.000	20 JPL	200.000.000	20 JPL	200.000.000	100 JPL	910.000.000	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersedian Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai Peraturan Per UU dan Ditetapkan tepat waktu	100%	100%	404.000.000	100%	404.000.000	100%	1.174.000.000	100%	869.000.000	100%	354.000.000	100%	3.205.000.000	BAPPEDA
				Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100%	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	170.000.000	100%	710.000.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi dan Kajian Sektoral yang mendukung Perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan PerUUan	100%	100%	765.000.000	100%	765.000.000	100%	765.000.000	100%	765.000.000	100%	765.000.000	100%	3.825.000.000	BAPPEDA
5	02		KEUANGAN															
5	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BPKAD	3,00	3,00	11.848.587.215	3,00	9.718.579.559	3,00	10.070.886.505	4,00	9.784.918.076	4,00	9.818.110.227	4,00	51.041.081.580	BPKAD
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	500.000.000	20 JPL	500.000.000	20 JPL	500.000.000	20 JPL	500.000.000	20 JPL	500.000.000	100 JPL	2.500.000.000	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Per Undang-undangan	100%	100%	91.857.057.998	100%	104.218.767.249	100%	117.936.478.367	100%	122.223.161.363	100%	122.753.139.481	100%	558.988.604.458	BPKAD
				Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%	100%	667.839.300	100%	670.000.000	100%	680.000.000	100%	690.000.000	100%	700.000.000	100%	3.407.839.300	BPKAD
				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%	100%	707.017.850	100%	710.000.000	100%	720.000.000	100%	730.000.000	100%	750.000.000	100%	3.617.017.850	BPKAD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan	100%	100%	899.408.300	100%	1.097.333.820	100%	1.202.067.213	100%	1.317.273.934	100%	1.444.001.328	100%	5.960.084.805	BPKAD
5	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BAPENDA	3,00	3,00	4.564.666.329	3,00	4.815.952.879	3,00	4.899.794.829	4,00	4.763.794.829	4,00	4.788.794.829	4,00	23.833.003.695	BAPENDA
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	50.000.000	20 JPL	70.000.000	20 JPL	70.000.000	20 JPL	70.000.000	20 JPL	70.000.000	100 JPL	330.000.000	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5,64	4,44	1.009.182.000	3,84	4.266.716.000	3,24	3.820.994.000	2,64	3.820.994.000	2,04	3.820.994.000	2,04	16.738.880.000	BAPENDA
5	03		KEPEGAWAIAN															
5	3	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP BKPSDM	3	3	3.434.132.836	3	3.537.617.223	3	3.672.029.829	4	3.837.969.566	4	4.010.073.789	4	18.491.823.242	BKPSDM
				Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JP	20 JP	197.250.500	20 JP	202.717.200	20 JP	214.301.040	20 JP	225.884.880	20 JP	237.468.720	100 JPL	1.077.622.340	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	-	C (41-60)	2.907.520.800	B (61-80)	2.568.427.258	B (61-80)	3.001.401.676	B (61-80)	2.616.313.597	A (81-100)	2.562.539.051	A (81-100)	13.676.202.382	BKPSDM
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun	5%	50%	1.313.671.250	80%	1.145.006.500	80%	976.854.500	80%	976.854.500	100%	976.854.500	100%	5.389.241.250	BKPSDM
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	527	> 685	50.000.000	>764	735.000.000	>842	805.000.000	>921	610.000.000	1000	615.000.000	100%	2.815.000.000	BAPPEDA
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Daerah	3,00	3,00	3.633.193.248	3,00	3.663.733.248	3,00	3.697.894.248	4,00	3.735.969.248	4,00	3.778.428.248	4,00	18.509.238.240	INSPEKTORAT DAERAH
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	2.100.000.000	20 JPL	2.100.000.000	20 JPL	2.100.000.000	20 JPL	2.100.000.000	20 JPL	2.100.000.000	100 JPL	10.500.000.000	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	-	87,2	2.303.079.000	90	2.507.762.000	90	2.552.839.000	90	2.552.839.000	95	2.552.839.000	95	12.469.358.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	PROGRAM PEKUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyimpangan/penyalah gunaan yang terjadi	-	8%	678.294.000	7%	743.785.000	6%	818.013.000	5%	900.133.000	4%	975.398.000	4%	4.113.623.000	INSPEKTORAT DAERAH
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1		KECAMATAN															
7	1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP kecamatan	-	3,00	24.737.922.536	3,00	24.785.054.301	3,00	24.907.399.301	3,00	24.980.399.301	3,00	27.452.899.301	3,00	126.843.674.740	KECAMATAN
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	460.000.000	20 JPL	460.000.000	20 JPL	490.000.000	20 JPL	500.000.000	20 JPL	520.000.000	100 JPL	2.450.000.000	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	100%	367.479.900	100%	319.315.600	100%	325.453.700	100%	328.770.900	100%	332.374.025	100%	1.673.394.125	KECAMATAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	100%	100%	5.397.342.244	100%	5.926.239.045	100%	6.019.888.250	100%	6.139.617.769	100%	7.552.010.164	100%	31.035.097.472	KECAMATAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	267.104.200	100%	252.451.500	100%	255.852.900	100%	259.391.145	100%	269.900.300	100%	1.304.680.045	KECAMATAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	135.000.000	KECAMATAN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	288.560.000	100%	279.000.000	100%	279.000.000	100%	297.000.000	100%	306.000.000	100%	1.429.560.000	KECAMATAN
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**															
8	**1**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**															
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP kesbangpol	3,00	3,00	2.072.409.406	3,00	2.071.585.934	3,00	2.080.905.592	4,00	2.080.432.044	4,00	2.090.149.024	4,00	10.395.481.999	BADAN KESBANGPOL
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	75.000.000	20 JPL	85.000.000	20 JPL	85.000.000	20 JPL	95.000.000	20 JPL	95.000.000	100 JPL	435.000.000	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat bela negara	100	100	49.217.856	100	50.202.213	100	51.206.257	100	52.230.383	100	53.274.990	100	256.131.899	BADAN KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada.	80%	80%	612.000.000	80%	624.240.000	80%	636.724.800	80%	649.459.296	80%	662.448.482	80%	3.184.872.578	BADAN KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	100	100	128.051.412	100	130.612.440	100	133.224.689	100	135.889.183	100	138.606.966	100	666.384.691	BADAN KESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100	100	118.760.844	100	121.136.061	100	123.558.782	100	126.029.958	100	128.550.557	100	618.036.202	BADAN KESBANGPOL

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021 (t0))	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022 (n1)		TAHUN 2023 (n2)		TAHUN 2024 (n3)		TAHUN 2025 (n4)		TAHUN 2026 (n5)				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat	-	50%	328.869.726	50%	333.447.121	50%	342.156.063	50%	348.999.184	50%	355.979.168	50%	1.711.451.262	BADAN KESBANGPOL
JUMLAH							982.628.389.311		1.016.317.866.424		1.037.397.078.115		1.061.006.317.318		1.076.178.081.573		5.173.529.532.741	



BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1.1. Indikator Kinerja Makro

Penetapan indikator makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada table berikut.

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi awal (Tahun 2020)	Target Tahun Ke-						Kondisi Akhir Periode RPJMD
				2021 (t0)	2022 (n)	2023 (n+1)	2024 (n+2)	2025 (n+3)	2026 (n+4)	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71	71,43	71,79	72,16	72,57	72,88	73	73
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,26	9,08	7,45	6,67	6,41	6,28	6,05	6,05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,39	6,17	5,88	5,31	5,14	4,98	4,45	4,45
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,87	3,98	4,47	5,91	6,64	7,23	7,51	7,51
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	40,3	41,98	43,90	47,08	50,92	53,47	57,38	57,38
6	Rasio Gini	Angka	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31

8.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,6	71,79	72,27	72,57	72,88	73	73
2	Indeks Pendidikan	Poin	68,91	69,94	70,28	70,83	71,02	71,78	71,78
3	Indeks Kesehatan	Poin	75,25	76,69	76,93	77,26	77,51	77,93	77,93
4	Paritas Daya Beli	Juta Rupiah	10.91	11,12	11,35	11,63	11,86	12,02	12,02
5	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,004	0,011	0,009	0,006	0,004	0,001	0,001
6	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	0	5,45	7,25	9,09	10,91	12,73	12,73
7	Indeks Ketahanan Bencana	Poin	-	0,69	0,72	0,75	0,78	0,80	0,80
8	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	6,35	9,52	11,11	12,7	14,29	15,87	15,87
9	Indeks Williamson	Poin	0,29	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
10	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,583	3,82	3,874	3,881	3,884	3,901	3,901
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,41	4,47	5,91	6,64	7,23	7,51	7,51
12	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	50,27	51,94	52,52	52,97	53,29	53,86	53,86
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,19	73,73	74,00	74,26	74,6	75	75
14	Indeks Gini	Poin	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,79	5,88	5,31	5,14	4,98	4,45	4,45
16	Angka Kemiskinan	%	8,26	7,45	6,67	6,41	6,28	6,05	6,05
17	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	46,34	65	70	73	75	80	80
18	Nilai SAKIP	Poin	55,52	60	65	70	75	80	80
19	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,27	3,51	3,70	4,00	4,25	4,25	4,25
20	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	7,6	6,5	6,1	5,9	5,7	5	5
21	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0	0

8.1.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penetapan indikator kinerja kunci ini menggunakan perpaduan IKK pada Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 18 Tahun 2020 yang selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kab. Barru Tahun 2021 - 2026

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
1					ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	1				KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	1	1			Tingkat kemiskinan	%	8,26	8,89	8,57	8,32	8,06	7,84	7,84
1	1	2			Pertumbuhan Ekonomi	%	0,87	4,57	5,93	7,04	7,23	7,51	7,51
1	1	3			PDRB per kapita	Juta Rp	42,43	43,9	47,08	51	53	57,38	57,38
1	1	4			Indeks Gini	Poin	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31
1	1	5			Laju inflasi	%	1,61	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0
1	1	6			Indeks Williamson	Poin	0,29	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
1	2				KESEJAHTERAAN SOSIAL								
1	2	1			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	7	71,79	72,27	72,57	72,88	73	73
1	2	2			Tingkat pengangguran terbuka	%	6,39	5,88	5,31	5,14	4,98	4,45	4,45
1	2	3			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,58	13,61	13,62	13,63	13,64	13,65	13,65
1	2	4			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,23	8,53	8,77	8,84	8,95	9	9
1	2	5			Angka usia harapan hidup	Tahun	69,02	69,05	69,06	69,07	69,1	69,11	69,11
1	2	6			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,52	95,58	95,62	95,65	95,7	95,75	95,75
1	2	7			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	63,96	64,1	64,15	64,25	65,24	66,9	66,9
2					ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	2				Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
2	2	1			Pendidikan								
2	2	1	1		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	85,05	91,55	93,05	95,12	97,05	100	100
2	2	1	2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	93,99	94,49	95,37	97,03	99,32	100	100
2	2	1	3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	90,5	91,57	94,5	96	98,5	100	100

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	2	1	4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	60,71	80,71	87,14	90,93	97,19	100	100
2	2	1	5	1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	100,67	105,8	106,6	107,41	108,23	109,05	109,05
2	2	1	5	2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	112,09	107,81	108,63	109,46	110,29	111,13	111,13
2	2	1	6	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	93,99	94,49	95,37	97,03	99,32	100	100
2	2	1	6	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90,5	91,57	94,5	96	98,5	100	100
2	2	1	7	1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	97,69	100	100	100	100	100	100
2	2	1	7	2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	93,41	100	100	100	100	100	100
2	2	1	8	1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,44	0	0	0	0	0	0
2	2	1	8	2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,19	0	0	0	0	0	0
2	2	1	9	1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
2	2	1	9	2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
2	2	1	10	1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	122,23	100	100	100	100	100	100
2	2	1	10	2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	2	1	11	1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	89	95,67	96,39	97,13	97,87	98,61	98,61
2	2	1	11	2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	55	55,84	56,26	56,69	57,12	57,56	57,56
2	2	1	12	1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	%	102,63	104,2	104,99	105,79	106,59	107,4	107,4
2	2	1	12	2	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	%	40,59	56,75	57,18	57,62	58,06	58,5	58,5
2	2	1	13	1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)		1.100,34	1048,87	1040,99	1032,99	1025,14	1017,35	1017,35
2	2	1	13	2	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)		1,216,47	718,95	713,48	708,06	702,68	697,34	697,34
2	2	1	14		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,03	99,25	99,31	99,39	99,47	99,59	99,59
2	2	1	15		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94,89	89,34	90,02	90,71	91,4	92,09	92,09
2	**2**	**2**			**Kesehatan**								
2	2	2	1		Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	3	1,84	1,75	1,67	1,59	1,51	1,51
2	2	2	2		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	angka per 100.000	99,7	100	100	100	100	100	100
2	2	2	3		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	1	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16
2	2	2	4		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	2	1,45	1,24	1,06	0,9	0,77	0,77
2	2	2	5		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka per 100.000	98	56	47	40	34	29	29
2	2	2	6		Rasio dokter per satuan penduduk	angka per 1000	0.13	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29
2	2	2	7		Rasio tenaga medis persatuan penduduk	angka per 1000	0.30	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	2	2	8		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	2	2	9		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	2	10		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	2	11		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	2	12		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	2	13		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	61	62,4	63,1	63,8	64,5	65,2	65,2
2	2	2	14		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	64	65,4	66,1	66,8	67,5	68,2	68,2
2	2	2	15		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	57	58,4	59,1	59,8	60,5	61,2	61,2
2	2	2	16		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	79	80,4	81,1	81,8	82,5	83,2	83,2
2	2	2	17		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	2	18		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	2	19		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	2	20		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	2	21		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	72	73,8	74,7	75,6	76,5	77,4	77,4
2	2	2	22		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	64	100	100	100	100	100	100
2	**2**	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
2	2	3	1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	4,05	5,71	6,54	7,37	8,2	9,03	9,03
2	2	3	2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	28,55	30,21	31,04	31,87	32,7	33,53	33,53

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	2	3	3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Nilai	50	52,66	54,49	55,32	57,15	60	60
2	2	3	4		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,41	54	56	58	60	62	62
2	2	3	5		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	95,61	97,75	98,31	98,87	99,43	100	100
2	2	3	6		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	88,74	93,24	95,49	98,24	100	100	100
2	2	3	7		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	3	8		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	81,52	83,18	84,01	84,84	85,67	86,5	86,5
2	2	3	9		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	N/A	71,36	72,19	73,02	73,85	74,68	74,68
2	2	3	10		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	3	11		Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	3,88	100	100	100	100	100	100
2	2	3	12		Persentase areal kawasan kumuh	%	0,02	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
2	**2**	**4**			**Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman**								
2	2	4	1		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	100	100	100	100	100	100
2	2	4	2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	100	100	100	100	100	100
2	2	4	3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	72,43	73,9	75,37	76,84	78,31	80	80
2	2	4	4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	4,16	3,63	3,29	3,01	2,88	2,67	2,67
2	2	4	5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	33,91	36,85	38,32	39,79	41,26	42,73	42,73
2	**2**	**5**			**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
2	2	5	1		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	5	2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	100	100	100	100	100	100	100
2	2	5	3		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Per 10.000 pddk	0,47	0,44	0,56	0,59	0,6	0,6	0,6

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	2	5	4		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
2	2	5	5		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	N/A	24443	25319	26195	27071	27947	27947
2	2	5	6		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	N/A	26843	27819	28795	29771	30747	30747
2	2	5	7		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100
2	2	5	8		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	5	9		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
2	2	5	10		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	15	15	15	15
2	**2**	**6**			**Sosial**								
2	2	6	1		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	6	1		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	2	6	1		Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	45,15	70	80	90	100	100	100
2	2	6	2		Presentase PMKS yang tertangani	%	45,15	70	80	90	100	100	100
2	**3**				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**								
2	**3**	**1**			**Tenaga Kerja**								
2	3	1	1		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	N/A	58	66	74	82	90	90
2	3	1	2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	53,66	56,86	58,46	60,06	61,66	63,26	63,26
2	3	1	3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	N/A	53	61	69	77	85	85
2	3	1	4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	24,32	42,88	52,16	61,44	70,72	80	80

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	1	5		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	N/A	9,8	12,1	14,4	16,7	19	19
2	3	1	6		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		79,27	70,53	71,07	71,61	72,15	72,7	72,7
2	3	1	7		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	0
2	**3**	**2**			**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2	3	2	1		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	13,25	13,65	13,85	14,05	14,25	14,45	14,45
2	3	2	2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,012	0,19	0,28	0,37	0,46	0,55	0,55
2	3	2	3		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	18,55	18,75	19,01	19,56	19,73	20	20
2	3	2	4		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	21,12	21,7	22,3	22,92	23,55	23,55
2	3	2	5		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,42	0,38	0,33	0,27	0,23	0,2	0,2
2	3	2	6		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	3	2	7		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100
2	3	2	8		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100
2	**3**	**3**			**Pangan**								
2	3	3	1		Ketersediaan pangan utama	%	43,79	46,78	46,92	47,82	48,29	48,71	48,71
2	3	3	2		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	42,3	65	68	72	74	78	78
2	**3**	**4**			**Pangan**								
2	3	4	1		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
2	3	4	2		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	50	64	71	78	85	92	92

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	3		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
2	3	4	4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0,5	1,1	1,4	1,7	2	2,3	2,3
2	**3**	**5**			**Lingkungan Hidup**								
2	3	5	1		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai	58	73	74,26	74,52	74,6	75	75
2	3	5	2		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	80,52	81,26	81,63	82	82,37	82,74	82,74
2	3	5	3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	3	5	4		Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	3	5	5		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	3	5	6		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/Tidak ada	Tidak Ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	3	5	7		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Poin	50	59	62	64	68	70	70
2	3	5	8		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Poin	90,59	91	91,84	92,31	92,67	93	93
2	3	5	9		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas tutupan Lahan	poin	69,77	70	71	73	77	79	79
2	3	5	10		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	5	6,24%	7,17%	8,22%	9,44%	10,83 %	10,83%
2	3	5	11		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	**3**	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
2	3	6	1		Perekaman KTP elektronik	Persen	99,99	100	100	100	100	100	100
2	3	6	2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan akta kelahiran	Persen	30	45	45	45	45	50	50
2	3	6	3		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	0	14	22	31	37	42	42
2	3	6	4		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		99	100	100	100	100	100	100
2	3	6	5		Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	3	6	6		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	6	7		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2	3	6	8		Cakupan Penerbitan KTP	%	99,99	100	100	100	100	100	100
2	3	6	9		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	97	98	98,5	99	99,5	99,5	97
2	**3**	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
2	3	7	1		Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	21,22	37,22	45,22	53,22	61,22	69,22	69,22
2	3	7	2		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	1	1	1	1	1	1
2	3	7	3		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1	1 Kelompok Binaaan LPM	1 Kelompok Binaaan LPM	1 Kelompok Binaaan LPM	1 Kelompok Binaaan LPM	1 Kelompok Binaaan LPM	1 Kelompok Binaaan LPM
2	3	7	4		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		39,44	41,65	42,8	43,98	45,19	46,44	46,44
2	3	7	5		Presentase LPM Berprestasi	%	25,45	32,36	36,49	41,14	46,39	52,31	52,31
2	3	7	6		Presentase PKK aktif	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	7	7		Presentase Posyandu aktif	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	7	8		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30	30%	30%	30%	30%	30%	30%
2	3	7	9		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	**3**	**8**			**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
2	3	8	1		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	66.63	70,36	72,3	74,3	76,35	78,45	78,45
2	3	8	2		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,51	1,15	1	0,87	0,76	0,67	0,67
2	3	8	3		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,71	17,65	18,13	18,63	19,15	19,68	19,68
2	3	8	4		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	13,9	14,68	15,08	15,5	15,93	16,37	16,37
2	3	8	5		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	50.09	52,89	54,35	55,85	57,39	58,98	58,98
2	3	8	6		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	45,13	47,66	48,97	50,32	51,71	53,14	53,14
2	3	8	7		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	30,1	31,78	32,66	33,56	34,49	35,44	35,44
2	3	8	8		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	33,16	35,02	35,98	36,98	38	39,04	39,04
2	3	8	9		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	8	10		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		900	950,37	976,6	1003,55	1031,25	1059,71	1059,71
2	3	8	11		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	8	13		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	51,15	55,9	58,34	60,9	63,57	66,35	66,35
2	3	8	14		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	8	15		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	8	16		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	8	17		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	8	18		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**3**	**9**			**Perhubungan**								
2	3	9	1		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Nilai	71,87	72,55	72,89	73,23	73,57	73,91	73,91
2	3	9	2		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Nilai	N/A						0
2	3	9	3		Jumlah arus penumpang angkutan umum	jiwa	1,682,943	1.909.104	2.096.196	2.301.623	2.527.182	2774846	2774845,8
2	3	9	4		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		9	11	11	11	11	11	11
2	3	9	5		Presentase layanan Angkutan darat	%	76	99	100	100	100	100	100
2	3	9	6		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		917909	927.605 Orang, 12.709 Ton	931.890 Orang, 13.093 Ton	939.723 Orang, 13.879 Ton	943.891 Orang, 13.976 Ton	950.759 Orang, 13.999 Ton	950.759 Orang, 13.999 Ton
2	3	9	7		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun		9,694,239	1.881.879 Orang, 9.785.137 Ton	1.893.899 Orang, 9.792.798 Ton	1.903.555 Orang, 9.812.094 Ton	1.909.511 Orang, 9.853.012 Ton	1.993.072 Orang, 9.987.798 Ton	1.993.072 Orang, 9.987.798 Ton
2	**3**	**10**			**Komunikasi dan Informatika**								
2	3	10	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	3	10	2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	3	10	3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah danpemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	95	97	98	99	100	100	100

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	**3**	**11**			**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
2	3	11	1		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	34,61	36,81	37,91	39,01	40,11	41,21	41,21
2	3	11	2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	40,58	44,78	46,88	48,98	51,08	53,18	53,18
2	3	11	3		Persentase koperasi aktif	%	62,5	76,31	79,89	83,65	87,58	91,7	91,7
2	3	11	4		Persentase UKM non BPR/LKM UKM	%	96,46	95,2	95,87	96,54	97,21	97,89	97,89
2	3	11	5		Presentase BPR/LKM Aktif	%	71,43	73,88	75,14	76,41	77,71	79,03	79,03
2	3	11	6		Presentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,27	99,84	99,87	99,89	99,91	99,94	99,94
2	**3**	**12**			**Penanaman Modal**								
2	3	12	1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		118	122,0461	124,1209	126,2309	128,3769	130,5593	130,55927
2	3	12	2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	rp	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	3	12	3		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		17,06	17,29968	17,42077	17,54272	17,66552	17,78918	17,789177
2	**3**	**13**			**Kepemudaan dan Olahraga**								
2	3	13	1		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,28	0,7	0,91	1,12	1,33	1,54	1,54
2	3	13	2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,30%	13,30 %	15,30 %	17,30 %	19,30 %	21,30 %	21,30%
2	3	13	3		Peningkatan prestasi olahraga	Persen	N/A	24,8	26,1	27,4	28,7	30	30
2	3	13	4		Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
2	3	13	5		Presentase wirausaha muda	%	13.33	13,79	14,02	14,26	14,5	14,75	14,75
2	3	13	6		Cakupan pembinaan olahraga	%	93,1	100	100	100	100	100	100
2	3	13	7		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	76	6,80	7,59	8,48	9,47	10,58	10,58
2	3	13	8		Jumlah atlet berprestasi		0	1	2	2	3	3	3
2	3	13	9		Cakupan pembinaan atlet muda	%	70,9	73,33	74,58	75,85	77,13	78,45	78,45
2	3	13	10		Jumlah Prestasi olahraga		0	1	2	2	3	3	3
2	**3**	**14**			**Statistik**								
2	3	14	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	N/A	82	84	86	88	90	90
2	3	14	2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	N/A	82	84	86	88	90	90
2	3	14	3		Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	3	14	4		Buku "PDRB kabupaten"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	**3**	**15**			**Persandian**								
2	3	15	1		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
2	3	15	2		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	**3**	**16**			**Kebudayaan**								
2	3	16	1		Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	3	16	2		Penyelenggaraan festival seni dan budaya		5	9	10	10	10	11	11
2	3	16	3		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		100	82,74	84,15	85,58	87,04	88,51	88,51
2	3	16	4		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		3	6	10	13	15	19	19
2	3	16	5		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		15	30	32	32	32	34	34
2	**3**	**17**			**Perpustakaan**								
2	3	17	1		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa	121.286	125445	127577	129746	131952	134195	134195
2	3	17	2		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	58.685	60697	61729	62778	63846	64931	64931
2	3	17	3		Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	3	18	4		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3	2	2	3	3	4	4
2	**3**	**18**			**Kearsipan**								
2	3	18	1		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Nilai	48,5	54,5	57,5	60,5	63,5	66,5	66,5
2	3	18	2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	50	56	59	62	65	68	68
2	3	18	3		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80,5	100	100	100	100	100	100
2	3	18	4		Peningkatan SDM pengelola kearsipan		0	2	3	4	5	5	5
2	**4**				**Pelayanan Urusan Pilihan**								
2	**4**	**1**			**Kelautan dan Perikanan**								
2	4	1	1		Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	25773	26814,23	27350,51	27897,52	28455,47	29024,58	29024,58
2	4	1	2		Produksi perikanan		25733,9	26222,53	26563,42	26908,75	27258,56	27612,92	27612,92
2	4	1	3		Konsumsi ikan		99	46,37	46,52	46,79	47,03	47,19	47,19
2	4	1	4		Cakupan bina kelompok nelayan	%	388	79	85	87	90	92	92
2	4	1	5		Produksi perikanan kelompok nelayan		12555	12943	13058	13341	13703	14050	14050
2	**4**	**2**			**Pariwisata**								
2	4	2	1		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	N/A	3	3	3	3	3	3

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	4	2	2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	N/A	5	5	5	5	5	5
2	4	2	3		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,01	1,03	1,04	1,05	1,06	0,07	0,07
2	4	2	4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,89	0,97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,13
2	**4**	**3**			**Pertanian**								
2	4	3	1		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	5,98	6,98	7,48	7,98	8,48	8,98	8,98
2	4	3	2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,39	0,33	0,3	0,27	0,24	0,21	0,21
2	4	3	3		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	59,8	54,24	54,65	55,06	55,48	55,9	55,9
2	4	3	4		Cakupan bina kelompok petani	%	11,94	12,11	12,2	12,3	12,39	12,48	12,48
2	**4**	**4**			**Perdagangan**								
2	4	4	1		Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	12,66	25,32	31,65	37,97	44,3	50,63	50,63
2	4	4	2		Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	57,41	59,01	59,81	60,61	61,41	62,21	62,21
2	4	4	3		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	88,19	89,79	90,59	91,39	92,19	92,99	92,99
2	4	4	4		Ekspor Bersih Perdagangan	RP	101.314.971.941	103.166.478	107.293.137	115.876.588	129.781.778	131.339.159	131.339.159
2	4	4	5		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	30,77	28,82	31,87	33,98	36,02	38	38
2	**4**	**5**			**Perindustrian**								
2	4	5	1		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kota	Persen	4,41	6,41	7,41	8,41	9,41	10,41	10,41
2	4	5	1		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	50	54	56	58	60	62	62
2	4	5	1	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	4	5	1		Cakupan bina kelompok pengrajin	%	14	15	15,34	15,97	16,03	16,74	16,74
2	**5**				**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**								
2	**5**	**1**			**Sekretariat Daerah**								
2	5	1	1		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	24,59	27,19	28,49	29,79	31,09	32,39	32,39
2	5	1	2		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Poin	N/A	21,6	21,8	22	22,2	22,4	22,4

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	**5**	**2**			**Sekretariat Dewan**								
2	5	2	1		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	5	2	2		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	5	2	3		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	**6**				**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**								
2	**6**	**1**			**Perencanaan Pembangunan**								
2	6	1	1		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	6	1	2		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	6	1	3		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	6	1	4		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	6	1	5		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
2	6	1	6		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2	**6**	**2**			**Keuangan**								
2	6	2	1		Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	6	2	2		Persentase SILPA	%	8,43	5	5	5	5	5	5
2	6	2	3		Persentase belanja pendidikan (20%)	%	22,92	20	20	20	20	20	20
2	6	2	4		Persentase belanja kesehatan (10%)	%	18,66	10	10	10	10	10	10
2	6	2	5		Penetapan APBD		29 Desember 2019	30-Nov-21	30-Nov-22	30-Nov-23	30-Nov-24	30-Nov-25	30-Nov-25
2	6	2	6		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	7,63	6,43	5,83	5,23	4,63	4,03	4,03
2	6	2	7		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	5,64	4,44	3,84	3,24	2,64	2,04	2,04
2	6	2	8		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		8,43	7,23	6,63	6,03	5,43	4,83	4,83

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Periode Awal RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja Pada Periode akhir RPJMD (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
2	**6**	**3**			**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
2	6	3	1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	2,41	4,81	6,01	7,21	8,41	9,61	9,61
2	6	3	2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,07	23,07	26,07	29,07	32,07	35,07	35,07
2	6	3	3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	38	40	41	42	43	44	44
2	6	3	4		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JPL	16,56	20	20	20	20	20	20
2	6	3	5		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,25	15	20	25	30	35	35
2	6	3	6		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	57,34	68	72	76	80	85	85
2	6	3	7		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	30	34	29	29	29	29	29
2	6	3	8		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	544	200	200	200	150	150	150
2	6	3	9		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
2	**6**	**4**			**Penelitian dan Pengembangan**								
2	6	4	1		Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100
2	6	4	2		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	87,5	100	100	100	100	100	100
2	6	4	3		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	%	90,9	100	100	100	100	100	100
2	6	4	4		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	64,93	100	100	100	100	100	100
2	**6**	**5**			**Pengawasan**								
2	6	5	1		Persentase tindak lanjut temuan	%	76,74	100	100	100	100	100	100
2	6	5	2		Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	0	0	0	0
2	6	5	3		Jumlah temuan BPK		10	10	9	8	7	5	5
2	6	5	4		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2	3	3	3	4	4	4
2	6	5	6		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Poin	1	3	3	3	4	4	4

8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan

prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.4

Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
SPM PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak usia dini	100%	88,05	91,55	93,05	95,12	97,05
2	Pendidikan Dasar (SD)	100%	93,99	94,49	95,37	97,03	99,32
	Pendidikan Dasar (SMP)	100%	90,50	91,57	94,50	96,00	98,50
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	71,21	80,71	87,14	90,93	97,19
SPM KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	100%	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	100%	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	100%	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	100%	62,4	63,1	63,8	64,5	65,2
5	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar	100%	65,4	66,1	66,8	67,5	68,2
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	100%	58,4	59,1	59,8	60,5	61,2
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	100%	80,4	81,1	81,8	82,5	83,2
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100	100	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus	100%	100	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	100	100	100	100	100

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Target 2022	2023	2024	2025	2026
11	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis	100%	100	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV	100%	73,8	74,7	75,6	76,5	77,4
SPM PEKERJAAN UMUM							
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	95,61	97,75	98,31	98,87	99,43	100
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	88,74	93,24	95,49	98,24	100,00	100
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SPM SOSIAL							
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	rehabilitasi sosial das ar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Barru berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Srategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021 - 2026 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 8.5

Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG) Kab. Barru Tahun 2021 - 2026

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	BASELINE DATA (2019)	TARGET PEMERINTAH DAERAH					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,57	9,08	8,89	8,57	8,32	8,06	7,45
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37131,000	37168	37205	37242	37279	37335	37391
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	88,02	90,13	97,56	100	100	100	100
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	95,10	100	100	100	100	100	100
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	94,71	95	98,99	99,01	99,38	99,45	99,71
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	2,00	4	5	7	10	16	25
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	252,00	265	279	293	308	332	358
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0,00	0	0	0	0	0	0
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2392600000,00	672.981.095,00	453.981.700,00	210.983.290,00	198.726.320,00	107.989.531,00	58.682.407,00
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum Ada	Belum Ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	13,20	9,50	8,72	8,29	7,16	6,83	6,19

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	BASELINE DATA (2019)	TARGET PEMERINTAH DAERAH					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	42,01	41,27	39,64	37,28	32,81	29	26
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	91,20	91,37	92,72	93,41	94,03	95,00	96,00
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1,59	0,89	0,71	0,67	0,52	0,49	0,41
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	6,37	5,62	4,91	4,08	3,58	3,13	2,95
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,13	0,11	0,10	0,07	0,05	0,03	0,02
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	13,62	14,44	16,38	18,33	20,27	24,00	28,00
		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0,00	0,38%	0,38%	0,41%	0,47%	0,52%	0,57%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	81,24	86,19	91,07	97,83	98,65	99,04	99,37
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	74,36	79,34	84,89	89,79	93,56	95,67	97,19
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	101,70	103,54	107,93	110,02	114,00	114,00	114,00
		4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	64,88	69,87	73,87	79,69	87,96	89,52	93,47
		4.c.1*	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	88,54	91,01	93,47	95,22	97,19	99,34	100
		4.c.1*	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	87,48	90,07	92,37	97,09	99,39	100	100
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	6,060606061	6,06	6,06	9,09	12,12	15,15	21
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	15,32%	15,02	14,93	13,96	11,87	11	10
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	69,29	70,09	75,82	81,34	85,00	94	95
		5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	5,00	6	6	7	7	8	10

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	BASELINE DATA (2019)	TARGET PEMERINTAH DAERAH					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	88,02	90,13	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	88,02	90,13	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	1810,00	1935	2110	2450	2730	3243	3852
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	61,67	69,37	76,19	80,56	88,34	93,47	95,06
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	41710000,00	43.705.000	46.903.000	50.079.000	54.092.000	59.467.000	64,380 000
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	0,35	39,67%	44,58 %	51,09%	59,76%	61,72	68,87
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	0,33	36,87%	42,19 %	48,32%	51,00%	53,19	59,77
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	0,34	35,19%	41,14 %	47,98%	52,19%	57,09	60,11
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	5,79	5,77	5,48	5,31	5,14	4,98	4,45
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	693,00	59	289	544	732	1063	1759
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	0,21	25,50%	27,50 %	29,50%	31,50%	49,87	57,02
		8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6,13	5,13	5,87	6,19	6,72	6,99	7,03
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	ADA	ADA
		10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37131,00	37168	37205	37242	37279	37335	37391
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	ADA	ADA
		11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2392600000,00	672.981.095,00	453.981.700,00	210.983.290,00	198.726.320,00	107.989.531,00	100.682.407,00

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	BASELINE DATA (2019)	TARGET PEMERINTAH DAERAH					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	0,82	85,00	91,02	97,83	99,98	99,99	100
		11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	ADA	ADA
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0,00	0	1	1	2	2	3
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	CC	cc	B	B	B	BB	BB
		16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	78,01	91.2.8	93,19	95,27	97,16	98,31	98,99
		16.10. 2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	1,00	1	2	2	3	5	5
		16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Belum ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	ADA	ADA
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	940707735 216,33	1.033.7 21.292. 466,00	1.049. 366.63 4.082. 00	1.065.34 3.412.06 7,00	1.081.66 2.957.43 0,00	1.106. 461.23 9.533	1.131. 828.04 8.820



BAB IX
PENUTUP

BAB IX
PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan sasaran dan program pemerintah Kabupaten Barru. RPJMD Kabupaten Barru periode ini akan selesai pada tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2021, perlu disusun RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 akan didasarkan pada RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005-2025, RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, serta menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 . Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Barru yang

dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda);

4. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Barru.
5. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
6. Perubahan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dapat dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
7. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2021 – 2026

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2021

Tabel 1.A

Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020 - 2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023					Indikator Pembangunan	RPJMD Kab.Barru Tahun 2021 - 2026				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20	Pertumbuhan Ekonomi	-0,70	4,10 - 5,55	4,62 - 5,98	5,04 - 6,52		Pertumbuhan Ekonomi	0,87%	3,98	4,47	5,91	6,64
2	Tingkat Kemiskinan	9,81	9,43	9,00	8,55	8,15	Tingkat Kemiskinan	8,99	8,7	8,1	7,45		Tingkat Kemiskinan	8,26%	9,08	7,45	6,67	6,41
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,31	6,08	5,9	5,69		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,39%	6,17	5,88	5,31	5,14
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,51	73,26	74,01	74,77	74,60 - 84,23	Indeks Pembangunan Manusia	71,93	72,2	72,57	73,05		Indeks Pembangunan Manusia	71	71,43	71,79	72,16	72,57
5	Rasio Gini	0,39	0,38	0,37		0,360 - 0,474	Rasio Gini	0,382	0,382	0,381	0,381		Rasio Gini	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33
6	Penurunan Emisi GRK	26,00	26,30	26,70	27,00	27,30	Penurunan Emisi GRK	0,96	1,07	1,198	1,347		Penurunan Emisi GRK	0,96	1,07	1,198	1,347	1,347

Tabel 2.A

Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Terhadap Program Prioritas Nasional

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023							RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026						
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	PN	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**																				
1	PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	13.4	14.5	15.7	17.9	19.5														
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68.0	68.0	68.8	69.2	70.3														
2	PP	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US$/m³)	4. 0	4. 4	4. 7	5. 1	5. 4														
3	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90. 4	91. 6	92. 8	94. 0	95. 2	**Pangan/Program penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan keamanan pangan segar**	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			92.9 %(86. 70)	93.05		**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	Skoring Pola Pangan Harapan	92	93	94	95	96
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2. 100. 0	2. 100. 0	2. 100. 0	2. 100. 0	2. 100. 0	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari)			3904.1 Kkal/Kapita /hari	3916. 65 Kkal/Kapita /hari		**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	Persentase Penurunan kasus Kerawanan Pangan	0,80%	0,80%	0,70%	0,60%	0,50%
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57. 0	57. 0	57. 0	57. 0	57. 0		Ketersediaan Protein (gr/Kapita/hari)			143.59 gr/Kapita/hari	159.04 gr/Kapita/hari		**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	44,37	44,37	0	46,78	46,92

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023							RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026						
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undernourishment/ PoU)	6. 2	5. 8	5. 5	5. 2	5. 0	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rawanan Pangan yang Ditangani			54,50%	63,60%								
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5. 2	4. 8	4. 5	4. 2	4. 0														
4	PP	Peningkatan Pengelolaan kemaritiman,perikan an dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (juta ha)	23.4	24.2	25.1	26.0	26.9	Kelautan dan Perikanan/ Progra m Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan		1008321 .52	1008321 .52										
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis	≈64	≈67	≈72	≈76	≥80													
5	PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro,Kecil menegah (UMKM), dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0													
			Kontribusi UMKM terhadapPDB (Persen)	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0								PPROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,08%	10,08%	10,18%	10,55%	10,97%
			Kontribusi Koperasi terhadap PDB (%)	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5													
6	PP	Peningkatan nilai tambah lapangan kerja,dan investasi disektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	Penanaman Modal/Program Pengembangan Penanaman Modal												
			Kontribusi PDB Kemaritiman (%)	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8													

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023							RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026						
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)(%)	5.0	5.5	6.5	7.5	8.1														
			Kontribusi PDB Pariwisata (8.9.1)(%)	4.8	5.0	5.2	5.3	5.5														
			Pertumbuhan Investasi (PMTB)(%)	5.6	6.2	6.9	7.8	8.4														
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0		Kasio Daya Serap Tenaga Kerja		12 org/proyek	13 org/proyek									
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1)(%)	3.0-3.3	3.1-3.5	3.2-3.7	3.2-4.0	3.5-4.5														
			Kontribusi tenaga kerja industri (%)	14.2	14.6	15.0	15.3	15.7														
			Jumlah tenaga kerja industri (juta orang)	19.7	20.3	20.9	21.4	22.0														
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (%)	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0														
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19.0	20.0	20.0	21.0	21.0														
5	PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan Dalam negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor dan barang jasa (%)	3.9	4.2	4.8	5.5	6.2														

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023							RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026						
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Neraca perdangan barang (USD miliar)	0.3	1.0	3.0	7.5	15.0														
			Nilai devisa pariwisata (ß.9.1)/C (USD miliar)	21.0	23.0	25.0	27,5	30.0								PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
6	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan /PDB (persen)	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4														
			Biaya logistik terhadap PDB (%)	23.2	22.2	21.1	20.1	18.0														
			Peringkat Travel and Tourism convetitiveness Indeks (TTCI) /peringkat)	N.A	34-39	N.A	29-34	N.A														
	PN	**Meningkatkan Kualitas SDM dan Berdaya Saing**																				
1	PP	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%0	78.7				98														
			Angka kelahiran total(Total Fertylity rate/TFR)	2.26	2.24	2.21	2.19	2.10														
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial	65.2				80														
2	PP	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78.7				98		Program perlinfungan dan jaminan sosial			7	7. 2		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100	100	100	100	100

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023								RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026							
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial	65.2				80																
3	PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI)(per 100.000 kelahiran hidup)	230.0	217.0	205.0	194.0	183.0	Kesehatan/Program Promosi kesehatan bina gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kematian Ibu		114	113			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100,00%	100,00%	100,00%	100	100
			Angka kematian bayi (AKB)(per 1000 kelahiran hidup)	20.6	19.5	18.6	17.6	16.0		Jumlah Kematian Bayi		1057(960)	1055				Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100,00%	100,00%	100,00%	100	100
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12.9	12.2	11.6	11.0	10.0																
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	61.8	62.2	62.5	62.9	63.4								PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13,90	14,32	14,45	14,65	14,75
			Prevalensi kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4																
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25.0	24.0	21.0	20.0	18.0																
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24.1	21.1	18.4	16.0	14.0		Prevalensi Balita Stunting (Prioritas)		33	31			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Status Gizi Masyarakat	89,00%	91,03%	91,03%	91,57%	92,03%

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023								RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026							
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	
			Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	8.1	7.8	7.5	7.3	7.0		Prevalensi Balita Kurus (Wasting)		8. 25	8											
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	% Orang dengan HIV (ODHA) Mendapatkan Pengobatan		55(53. 19)	60											
			Insidensi tuberkilosis (per 100.000 penduduk)	272.0	252.0	231.0	211.0	190.0		Angka Kejadian Tuberkulosis/100.000 Penduduk (Case Notification Rate)		202 /100000 Penduduk	207/100000 Penduduk											
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325.0	345.0	365.0	385.0	405.0		Angka Penemuan/Kejadian Malaria per 1.000 Penduduk (API)		1/1000 penduduk (*)	1/1000 penduduk (*)											
			Insidensi hepatitis B (%)	1.68	1.54	1.39	1.24	1.09																
			Prevalensi merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9.1	9.0	8.9	8.8	8.7																
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (%)	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8																
			Prevalensi tekanan darah tinggi	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1																
			Prevalensi fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65.0	70.0	80.0	90.0	100.0	Program upaya kesehatan dan standarisasi dan pelayanan kesehatan	% Puskesmas Terakreditasi		60 (99. 54)	70											
			Prevalensi rumah sakit yang terakreditasi	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0		% RS yang Terakreditasi Nasional		70(85. 45)	75	80	97									

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023								RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026							
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	
1	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan pendidikan	Nilai rata-rata hasil PISA a. Membaca	N.A	399.1	N.A	N.A	399.7									**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)	85,05	100	100	100	100
			b. Mate-matika	N.A	388.7	N.A	N.A	392,3										Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM)	92,245	100	100	100	100
			c. Sains	N.A	400.4	N.A	N.A	406,2										Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	60,71	100	100	100	100
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam test PISA (%)																					
			a. Membaca	N.A	34.4	N.A	N.A	35.6																
			b. Mate-matika	N.A	46.6	N.A	N.A	47.4																
			c. Sains	N.A	49	N.A	N.A	51																
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Tahun)	8.75	8.85	8.95	9.06	9.16																
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 tahun ke atas	13.41	13.6	13.79	13.97	14.116																
2	PP	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.34	68.1	69.87	71.66	73.49																
			prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan	Laki-laki :16.7;Perempuan 62(Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun																

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023							RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026						
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.2116475	91.27794284	91.27896233	91.33469578	91.38627023														
			Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	73.24481017	73.50050042	73.74501922	73.98592027	74.17744751														
			Tingkat Partiaipasi Angkatan Kerja TPAK) Perempuan	52.512	53.134	57.756	54.378	55														
			Prevalensi kekerasaan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9.4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun														
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53.33	56.5	56.5	58.17	57.67														
1	PP	Pengentasan Kemiskinan	Presentase rumah tangga	27.9 miskin dan rentan				40														
			Presentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses	25.6				50														
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan	630000	1600000	1850000	1350000	1100000														
			Bidang tanah yang diretribusi	750.000				7.750.000														
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				########														
7	PP	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Presentase angkatan kerja berpendidikan menegah ke atas	44.6	46.6	48.4	50.2	52.1														
			Jumlah PT. yang masuk ke dalam World Class University																			

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023								RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026							
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	
			a. Top 200	0	0	0	0	1																
			b. Top 300	1	1	1	1	2																
			c. Top 500	2	2	2	2	3																
	PN	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**																						
1	PP	Revolusi Mental dan Pembinaan Idiologi Pancasila untuk memperkuluh ketahanan Budaya bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa yang maju, Modern, dan berkarakter																						
2	PP	Meninghatkan kemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia																						
3	PP	Memperkuat modernisasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat beragama																					

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023							RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026						
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
4	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan kreatifitas bagi terwujudnya Masyarakat berpengetahuan dan berkarakter																				
	PN	**Memperkuat Infrastruktur Untuk MendukungPengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar**							**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**													
1	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan menempati kecukupan luas per kapita(%)	92,84	93,44	94	94,63	95	Program penyediaan dan Pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		1. 25	1. 75									
			Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap,lantai,dinding (%)	82,35	83,5	84,8	86	87		Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi		39. 88		13. 69	23. 42							
			Presentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, kualifikasi,klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan KP	persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan teregistrasi				14. 29%	42. 86%							
			Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43 % akses layak (termasuk 11 % akses aman	82,07 % akses layak (termasuk 13 % akses aman	86,03 % akses layak (termasuk 14 % akses aman	90 % akses layak (termasuk 15 % akses aman aman	Program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman				100	100	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	88,74	100	100	100	100

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023								RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026							
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	
			Presentase rumah tangga yang masih mempraktekkan buar air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0																
			Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelolah dengan baik (%)	72,92% penanganan 3,7% pengurangan	73,7% penanganan 5,51% pengurangan	75,28% penanganan 9,13 % pengurangan	72,92% penanganan 3,7% pengurangan	72,92% penanganan 3,70 % pengurangan									**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Presentase sampah yang tertangani	80,52	81,26	81,26	81,63	82
			Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91,8% (JP:23,6 %, BJP:68,2 %)	93,6% (JP:25,4 %, BJP:68,4 %)	95,9% (JP:27,1 %, BJP:68,7 %)	97,9 % (JP:28,9 %, BJP:69,0 %)	100 % (JP:30,4 %, BJP:69,5 %)		Persentase rumah tangga yang beraksses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	100	100	100	100	100	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	96,63 Layak dan 62,30 aman	97,75 Layak dan 64,20 aman	97,75 Layak dan 64,20 aman	98,31 layak dan 66,31 aman	98,87 Layak dan 68,21 aman
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7.3	8.4	10	12.2	1.5																
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52.501896 21	55.181462 89	57.059998 2	58.104982 73	58.498632 05																
			Jumlah daerah irigasi yang dimoderniasasi	1	2	3	2	1																
			Luas lahan pertanian padi dan non padi yang beririgasi meningkat (Ha)	45229.16667	115942.7083	116142.7083	116342.7083	116342.7083																
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum,industri dan kawasan unggulan (m3/detik)	4.27	11.4325	11.4325	11.4325	11.4325																

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023							RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026						
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Rasio fasilitas kecelakaan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010 (%)	53	55	57	60	65													
2	PP	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500km)																		
			Jumlah Pelabuhan utama yang memenuhi standar																		
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)																		
3	PP	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah Layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan																		
4	PP	Energi dan ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100													
			Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408													
			Penurunan Emisi CO2 pembangkit (juta ton)	4.71	4.92	5.36	5.91	6.07													
5	PP	Transformasi Digital	Presentase pertumbuhan TIK (rata-rata)	8. 8	8. 8	8. 8	8. 8	8. 8													
			Presentase Pengguna Internet (%)	72.6	74.2	72	80.7	82.3													
			Presentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) existing Q2 2019 : 97. 95)	97.5	98	98.5	99	100													

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023							RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026						
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	PN	**Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**																				
1	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas udara (IKU)	84.10	84.20	84.30	84.40	84.50														
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55.10	55.20	55.30	55.40	55.50														
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58. 50	59. 00	59. 50	60. 00	60. 50														
			Indeks Kualitas tutupan Lahan dan Ekosistim Gambut (IKTL)	61. 60	62. 50	63. 50	64. 50	65. 50														
2	PP	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Presentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10														
			Presentasi penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0. 34	0. 59	0. 81	1. 00	1. 15														
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5. 0	4.5	4.0	3.5	3.0														
3	PP	Pembangunan Rendah Karbon	Presentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	11. 8	12. 5	12. 8	12. 8	13. 2														

No	RPJMN Tahun 2020 - 2024								RPJMD Perubahan Prov.Sulsel Tahun 2019 - 2023								RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026							
	Kode PP/PN	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	
			Presentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	45. 8	50. 7	53. 1	57. 2	58. 3																
			Presentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	8. 5	9. 0	9. 3	9. 4	9. 4																
			Presentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	2. 0	2. 3	2. 5	2. 6	2. 9																
			Presentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor Pesisir dan Kelautan (%)	6. 5	6. 6	6. 8	7. 0	7. 3																